

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023.
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 253);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Operasional;
 3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 4. Neraca;
 5. Laporan Perubahan Ekuitas;
 6. Laporan Arus Kas;
 7. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kedua
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp999.216.392.889,62
b. Belanja	<u>Rp929.446.825.891,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 69.769.566.998,62
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp 15.765.207.909,21
2) Pengeluaran	<u>Rp 49.269.873.688,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp(33.504.665.778,79)

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp71.778.483.478,38 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.070.994.876.368,00
2. Realisasi	<u>Rp 999.216.392.889,62</u>
Selisih lebih /(kurang)	Rp 71.778.483.478,38
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp108.043.204.698,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp1.037.490.030.589,00
2. Realisasi	<u>Rp 929.446.825.891,00</u>
Selisih lebih /(kurang)	Rp 108.043.204.698,00
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / (Defisit) sejumlah Rp(36.264.721.219,62) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Surplus / (defisit) setelah Perubahan	Rp 33.504.845.779,00
2. Realisasi	<u>Rp 69.769.566.998,62</u>
Selisih lebih /(kurang)	Rp (36.264.721.219,62)

d.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(180.000,21) dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 15.765.027.909,00
	2. Realisasi	<u>Rp 15.765.207.909,21</u>
	Selisih lebih /(kurang)	Rp (180.000,21)
e.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 49.269.873.688,00
	2. Realisasi	<u>Rp 49.269.873.688,00</u>
	Selisih lebih /(kurang)	Rp 0,00
f.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp(180.000,21) dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp (33.504.845.779,00)
	2. Realisasi	<u>Rp (33.504.665.778,79)</u>
	Selisih lebih /(kurang)	Rp (180.000,21)

Bagian Ketiga
Laporan Operasional

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.	Pendapatan LO	Rp 848.547.195.485,56
b.	Beban LO	<u>Rp 697.976.359.033,33</u>
	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 150.570.836.452,23
c.	Kegiatan Non Operasional	<u>Rp 3.229.273.454,15</u>
	Surplus/Defisit dari Sebelum pos Luar Biasa	Rp 153.800.109.906,38
d.	Pos Luar Biasa	<u>Rp (310.440.000,00)</u>
	Surplus/Defisit LO	Rp 153.489.669.906,38

Bagian Keempat
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 15.765.207.909,21
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp <u>0,00</u>
Sub Total	Rp 15.765.207.909,21
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp <u>36.264.901.219,83</u>
d. Saldo Anggaran Lebih	Rp 36.264.901.219,83

Bagian Kelima
Neraca

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp1.793.207.956.151,40
b. Jumlah Kewajiban	Rp <u>22.193.903.871,14</u>
c. Jumlah Ekuitas	Rp1.771.014.052.280,26

Bagian Keenam
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.622.449.043.822,40
b. Surplus/Defisit LO	Rp 153.489.669.906,38
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp <u>(4.924.661.448,52)</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp1.771.014.052.280,26

Bagian Ketujuh
Laporan Arus Kas

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp 15.795.189.873,30
b.	Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp 261.679.685.089,86
c.	Arus Kas dari Aktifitas Investasi	Rp(192.910.118.091,24)
d.	Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan	Rp (48.269.873.688,00)
e.	Arus Kas dari Aktifitas Transitoris	Rp 395.676.814,00
f.	Saldo Kas Akhir Per 31 Desember Tahun 2021	Rp 36.690.559.997,92

Bagian Kedelapan
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1. : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2023;
Lampiran I.2. : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2023;

Lampiran I.3.	:	Rincian Apbd Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA 2023;
Lampiran I.4.	:	Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2023;
b. Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Lampiran III	:	Laporan Operasional (LO);
d. Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e. Lampiran V	:	Neraca;
f. Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas (LAK);
g. Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
h. Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah TA 2023;
i. Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023;
j. Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir TA 2023;
k. Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah TA 2023;
l. Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah TA 2023;
m. Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap TA 2023;
n. Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Per 31 Desember 2023;
o. Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023;
p. Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2023;
q. Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023;
r. Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2023;
s. Lampiran XIX	:	Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir TA 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t. Lampiran XX.1.	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022.
Lampiran XX.2.	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022.

- u. Lampiran Tambahan :
- 1). Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara TA 2023;
 - 2) Rekapitulasi Realisasi Belanja *Mandatory Spending*;
 - 3) Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
 - 4) Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
 - 5) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri;
 - 6) Realisasi Belanja Daerah Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
 - 7) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Penurunan *Stunting*;
 - 8) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - 9) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *E-Purchasing*;
 - 10) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2023.

Pasal 12

Bupati Maluku Tenggara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal, 4 Oktober 2024

PEJABAT BUPATI MALUKU TENGGARA,

Diundangkan di Langgur
pada tanggal, 4 Oktober 2024

PEJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

JASMONO

NICODEMUS UBRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2024
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU : ...

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

DEBBIE P J BUNGA, SH
NIP. 19781220 200804 2 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yang meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama Tahun Anggaran 2023.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara juga merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah Daerah dan wujud pengawasan DPRD yang pada dasarnya memuat gambaran tentang kinerja yang telah dicapai selama satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum APBD Maluku Tenggara Tahun 2023.

Secara teknis penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara disesuaikan pula dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Esensinya adalah Pemerintah Daerah mendeskripsikan kinerja yang telah dicapai sebagai wujud pelaksanaan kehendak rakyat yang telah tertuang dalam APBD Maluku Tenggara Tahun 2023.

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah mengungkapkan secara transparan pelaksanaan program/proyek-proyek maupun kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Maluku Tenggara Tahun 2023.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara melalui DPRD sebagai representasi rakyat Maluku Tenggara dapat menilai secara langsung kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TANGGAL 4 OKTOBER TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023	HALAMAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN I	LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023	1	-	2
LAMPIRAN I.1	RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	3	-	11
LAMPIRAN I.2	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	12	-	13
LAMPIRAN I.3	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN			

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01	. 01	DINAS PENDIDIKAN	14	-	21
1.02	. 01	DINAS KESEHATAN	22	-	29
1.03	. 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	30	-	36
1.04	. 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	37	-	42
1.05	. 01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	43	-	48
1.05	. 02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	49	-	51
1.05	. 03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	52	-	54
1.05	. 04	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	55	-	57
1.06	. 01	DINAS SOSIAL DAERAH	58	-	61

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2.9	. 01	DINAS KETAHANAN PANGAN	62	-	64
2.11	. 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	65	-	69
2.12	. 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	70	-	72
2.13	. 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	73	-	77
2.14	. 01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	78	-	82
2.15	. 01	DINAS PERHUBUNGAN	83	-	86
2.16	. 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	87	-	89
2.17	. 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	90	-	93
2.18	. 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	94	-	97
2.19	. 01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH	98	-	101
2.22	. 01	DINAS KEBUDAYAAN	102	-	104
2.24	. 01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	105	-	107

URUSAN PILIHAN

3.25	.	01	DINAS PERIKANAN		108	-	111
3.26	.	01	DINAS PARIWISATA		112	-	114
3.26	.	01	DINAS PERTANIAN.		115	-	118
3.30	.	01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		119	-	124

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01	.	01	SEKRETARIAT DAERAH		125	-	130
4.02	.	01	SEKRETARIAT DPRD		131	-	133

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.01	.	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		134	-	138
5.02	.	01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		139	-	144
5.02	.	02	BADAN PENDAPATAN DAERAH		145	-	147
5.03	.	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		148	-	151
5.06	.	01	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		152	-	154

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01	.	01	INSPEKTORAT		155	-	157

UNSUR KEWILAYAAN

7.01	.	01	KECAMATAN KEI KECIL		158	-	161
7.01	.	02	KECAMATAN KEI KECIL BARAT		162	-	164
7.01	.	03	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR		165	-	167
7.01	.	04	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR		168	-	170
7.01	.	05	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN		171	-	173
7.01	.	06	KECAMATAN MANYEUW		174	-	176
7.01	.	07	KECAMATAN HOAT SORBAY		177	-	179
7.01	.	08	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN		180	-	182
7.01	.	09	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT		183	-	185
7.01	.	10	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT		186	-	188
7.01	.	11	KECAMATAN KEI BESAR		189	-	191

LAMPIRAN	I.4	REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		192	-	279
LAMPIRAN	II	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH		280	-	280
LAMPIRAN	III	LAPORAN OPERASIONAL		281	-	281
LAMPIRAN	IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		282	-	282
LAMPIRAN	V	NERACA		283	-	284
LAMPIRAN	VI	LAPORAN ARUS KAS		285	-	286

LAMPIRAN VII	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	287	-	422
LAMPIRAN VIII	DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH	423	-	423
LAMPIRAN IX	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	424	-	424
LAMPIRAN X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	425	-	425
LAMPIRAN XI	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	426	-	426
LAMPIRAN XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	427	-	427
LAMPIRAN XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP	428	-	428
LAMPIRAN XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	429	-	429
LAMPIRAN XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA	430	-	430
LAMPIRAN XVI	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH	431	-	431
LAMPIRAN XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	432	-	432
LAMPIRAN XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	433	-	433
LAMPIRAN XIX	DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA. 2023 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	434	-	434
LAMPIRAN XX.1	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022	435	-	435
LAMPIRAN XX.2	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022	436	-	436
LAMPIRAN TAMBAHAN				
1	REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	437	-	439
2	REKAPITULASI REALISASI BELANJA <i>MANDATORY SPENDING</i>	440	-	442
3	REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	443	-	444
4	REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI	445	-	445
5	REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	446	-	448
6	REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN <i>STUNTING</i>	449	-	449
7	REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	450	-	452
8	REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI <i>E-PURCHASING</i>	453	-	453
9	REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)	454	-	454



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN	1.070.994.876.368,00	999.216.392.889,62	93,30	893.109.172.160,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	92.477.624.904,00	73.801.232.072,00	79,80	54.850.177.521,42
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	47.218.977.384,00	11.190.143.473,00	23,70	12.056.543.681,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	6.553.042.000,00	1.992.498.500,00	30,41	2.559.104.600,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.446.735.017,00	6.446.735.017,00	100,00	3.211.782.587,06
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.258.870.503,00	54.171.855.082,00	167,93	37.022.746.653,36
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	978.517.251.464,00	925.415.160.817,62	94,57	827.374.566.189,00
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	804.433.292.951,00	753.216.996.141,62	93,63	667.514.392.947,00
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	9.335.710.951,00	9.895.199.975,00	105,99	14.113.628.231,00
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	472.015.431.000,00	472.005.502.824,00	100,00	452.775.497.601,00
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	323.082.151.000,00	271.316.293.342,62	83,98	200.625.267.115,00
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	149.641.511.000,00	154.777.281.000,00	103,43	143.311.636.000,00
4.2.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	6.207.486.000,00	6.207.486.000,00	100,00	5.805.126.000,00
4.2.02.04	Dana Desa	143.434.025.000,00	148.569.795.000,00	103,58	137.506.510.000,00
4.2.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	24.442.447.513,00	17.420.883.676,00	71,27	16.548.537.242,00
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.442.447.513,00	17.420.883.676,00	71,27	16.121.937.242,00
4.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0	426.600.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0	10.884.428.450,11
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0	10.884.428.450,11
5	BELANJA	1.037.490.030.589,00	929.446.825.891,00	89,59	942.046.175.474,39
5.1	BELANJA OPERASI	643.080.198.997,00	552.714.560.307,76	85,95	543.444.952.876,66
5.1.01	Belanja Pegawai	273.945.397.707,00	245.328.012.957,00	89,55	240.096.047.701,00
5.1.02	Belanja Barang	258.341.898.142,00	244.869.780.409,76	94,79	251.935.384.712,66
5.1.03	Belanja Bunga	999.245.608,00	999.245.608,00	100,00	709.426.734,00
5.1.05	Belanja Hibah	90.251.857.540,00	46.904.766.333,00	51,97	39.534.257.729,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.541.800.000,00	14.612.755.000,00	74,78	11.169.836.000,00
5.2	BELANJA MODAL	214.308.606.790,00	191.910.118.091,24	89,55	210.488.597.602,73
5.2.01	Belanja Tanah	568.124.525,00	0,00	0,00	1.032.948.772,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	28.077.962.789,00	26.629.682.986,00	94,84	37.012.000.249,73
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	94.796.299.777,00	76.615.372.183,00	80,82	17.665.831.432,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.827.499.699,00	87.929.442.922,24	97,89	154.050.191.850,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.038.720.000,00	735.620.000,00	70,82	727.625.299,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	717.530.909,00	310.440.000,00	43,27	668.857.600,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	717.530.909,00	310.440.000,00	43,27	668.857.600,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
6	TRANSFER	179.383.693.893,00	184.511.707.492,00	102,86	187.443.767.395,00
6.1	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	179.383.693.893,00	184.511.707.492,00	102,86	187.443.767.395,00
6.1.01	Bagi Hasil Pajak	3.791.714.693,00	3.784.456.892,00	99,81	3.109.616.752,00
6.1.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	175.591.979.200,00	180.727.250.600,00	102,92	184.334.150.643,00
	SURPLUS / DEFISIT	33.504.845.779,00	69.769.566.998,62	208,24	(48.893.284.313,86)
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.765.027.909,00	15.765.207.909,21	100,00	78.156.340.468,07
7.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	15.765.027.909,00	15.765.207.909,21	100,00	19.188.618.518,07
7.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0	58.967.721.950,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	49.269.873.688,00	49.269.873.688,00	100,00	13.497.848.245,00
7.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	2.800.000.000,00
7.2.03	Pembayaran Pokok Utang	48.269.873.688,00	48.269.873.688,00	100,00	10.697.848.245,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(33.504.845.779,00)	(33.504.665.778,79)	100,00	64.658.492.223,07
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	36.264.901.219,83		15.765.207.909,21

LANGGUR, 4 OKTOBER 2024
Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO



 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Tahun Anggaran 2023					
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.070.994.876.368,00	999.216.392.889,62	(71.778.483.478,38)	93,30
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.403.829.440,00	62.902.532.110,42	45.498.702.670,42	361,43
4.1.01	PENDIDIKAN	0,00	11.542.251.947,62	11.542.251.947,62	0
					0
					95,02
4.1.01.1-01.0-00.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	11.542.251.947,62	11.542.251.947,62	13.116
					.195.3
					95,02
4.1.02	KESEHATAN	17.403.829.352,00	51.360.280.162,80	33.956.450.810,80	295,11
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	17.403.829.352,00	51.360.280.162,80	33.956.450.810,80	295,11
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	389.599.470,00	148.725.708.000,00	148.336.108.530,00	38.174
					,00
4.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	148.569.795.000,00	148.569.795.000,00	0
4.2.13.2-13.2-08.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	148.569.795.000,00	148.569.795.000,00	0
4.2.18	PENANAMAN MODAL	389.599.470,00	155.913.000,00	(233.686.470,00)	40,02
4.2.18.2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	389.599.470,00	155.913.000,00	(233.686.470,00)	40,02
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	51.611.000,00	13.798.000,00	(37.813.000,00)	26,73
4.3.30	PERDAGANGAN	51.611.000,00	13.798.000,00	(37.813.000,00)	26,73
4.3.30.3-30.0-00.0-00.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	51.611.000,00	13.798.000,00	(37.813.000,00)	26,73
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.053.149.836.551,00	787.574.354.779,20	(265.575.481.771,80)	74,78
4.5.02	KEUANGAN	1.053.149.836.551,00	787.574.354.779,20	(265.575.481.771,80)	74,78
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	995.713.612.538,00	774.567.499.527,20	(221.146.113.010,80)	77,79
4.5.02.5-02.0-00.0-00.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	57.436.224.013,00	13.006.855.252,00	(44.429.368.761,00)	22,65
5	BELANJA DAERAH	1.037.490.030.589,00	929.446.825.891,00	(108.043.204.698,00)	89,59
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	604.992.097.520,00	522.223.409.164,28	(82.768.688.355,72)	86,32
5.1.01	PENDIDIKAN	220.453.549.810,00	174.711.206.446,89	(45.742.343.363,11)	79,25
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN	220.453.549.810,00	174.711.206.446,89	(45.742.343.363,11)	79,25
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	186.103.277.860,00	144.631.530.548,89	(41.471.747.311,11)	77,72
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	121.808.714.875,00	107.944.464.457,00	(13.864.250.148,00)	88,62
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.574.335.916,00	19.660.859.260,89	(3.913.476.655,11)	83,40
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	40.720.227.163,00	17.026.206.831,00	(23.694.020.332,00)	41,81



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	34.350.271.950,00	30.079.675.898,00	(4.270.596.052,00)	87,57
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.822.600.193,00	3.658.275.524,00	(164.324.669,00)	95,70
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.593.321.669,00	25.765.150.374,00	(3.828.171.295,00)	87,06
5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	934.350.000,00	656.250.000,00	(278.100.000,00)	70,24
5.1.02	KESEHATAN	213.106.777.115,00	201.898.793.110,48	(11.207.984.004,52)	94,74
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	213.106.777.115,00	201.898.793.110,48	(11.207.984.004,52)	94,74
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	132.654.039.138,00	136.378.015.589,48	3.723.976.451,48	102,81
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	52.476.512.601,00	48.570.609.745,00	(3.905.902.856,00)	92,56
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.177.526.537,00	87.807.405.844,48	7.629.879.307,48	109,52
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	80.452.737.977,00	65.520.777.521,00	(14.931.960.456,00)	81,44
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.235.866.377,00	21.639.009.812,00	(596.856.565,00)	97,32
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.065.999.100,00	40.991.721.709,00	(14.074.277.391,00)	74,44
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.150.872.500,00	2.890.046.000,00	(260.826.500,00)	91,72
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.924.591.025,00	99.426.720.937,91	(1.497.870.087,09)	98,52
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	100.924.591.025,00	99.426.720.937,91	(1.497.870.087,09)	98,52
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	13.665.897.957,00	13.056.758.165,67	(609.139.791,33)	95,54
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.205.443.086,00	3.184.623.263,00	(20.819.823,00)	99,35
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.460.454.871,00	9.872.134.902,67	(588.319.968,33)	94,38
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	87.258.693.068,00	86.369.962.772,24	(888.730.295,76)	98,98
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	445.339.100,00	445.141.250,00	(197.850,00)	99,96
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.688.238.100,00	8.681.100.100,00	(7.138.000,00)	99,92
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.101.995.868,00	77.220.601.422,24	(881.394.445,76)	98,87
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.120.000,00	23.120.000,00	0,00	100,00
5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	35.765.142.251,00	26.664.469.370,00	(9.100.672.881,00)	74,55
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	35.765.142.251,00	26.664.469.370,00	(9.100.672.881,00)	74,55
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	26.261.986.395,00	18.726.992.870,00	(7.534.993.525,00)	71,31
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.748.675.201,00	1.712.573.508,00	(36.101.693,00)	97,94
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.041.511.194,00	2.431.664.362,00	(2.609.846.832,00)	48,23
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.471.800.000,00	14.582.755.000,00	(4.889.045.000,00)	74,89
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2	BELANJA MODAL	9.503.155.856,00	7.937.476.500,00	(1.565.679.356,00)	83,52
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	568.124.525,00	0,00	(568.124.525,00)	0
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.400.000,00	118.681.000,00	(191.719.000,00)	38,23
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.574.631.331,00	7.818.795.500,00	(755.835.831,00)	91,19
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	31.167.066.764,00	16.111.026.341,00	(15.056.040.423,00)	51,69
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	Satuan Polisi Pamong Praja	5.776.541.460,00	5.725.021.534,00	(51.519.926,00)	99,11
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	5.776.541.460,00	5.725.021.534,00	(51.519.926,00)	99,11
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	3.022.343.210,00	3.004.286.197,00	(18.057.013,00)	99,40
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.754.198.250,00	2.720.735.337,00	(33.462.913,00)	98,79
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.764.226.250,00	3.276.295.635,00	(1.487.930.615,00)	68,77



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	4.764.226.250,00	3.276.295.635,00	(1.487.930.615,00)	68,77
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	1.596.027.100,00	1.572.944.835,00	(23.082.265,00)	98,55
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.168.199.150,00	1.703.350.800,00	(1.464.848.350,00)	53,76
5.1.05.1-05.0-00.0-00.04	Dinas Pemadam Kebakaran	869.831.625,00	863.096.318,00	(6.735.307,00)	99,23
5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	545.006.625,00	538.929.318,00	(6.077.307,00)	98,88
5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	100,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.206.625,00	507.129.318,00	(6.077.307,00)	98,82
5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	324.825.000,00	324.167.000,00	(658.000,00)	99,80
5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.825.000,00	128.167.000,00	(658.000,00)	99,49
5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.756.467.429,00	6.246.612.854,00	(13.509.854.575,00)	31,62
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	19.711.592.429,00	6.201.737.854,00	(13.509.854.575,00)	31,46
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.818.822.052,00	1.762.807.305,00	(56.014.747,00)	96,92
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.599.989.000,00	4.019.471.047,00	(580.517.953,00)	87,38
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	13.292.781.377,00	419.459.502,00	(12.873.321.875,00)	3,16
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.2	BELANJA MODAL	44.875.000,00	44.875.000,00	0,00	100,00
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.875.000,00	44.875.000,00	0,00	100,00
5.1.06	SOSIAL	3.574.970.555,00	3.411.192.958,00	(163.777.597,00)	95,42
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	Dinas Sosial Daerah	3.574.970.555,00	3.411.192.958,00	(163.777.597,00)	95,42
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.574.970.555,00	3.411.192.958,00	(163.777.597,00)	95,42
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.169.398.655,00	2.148.720.506,00	(20.678.149,00)	99,05
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.405.571.900,00	1.262.472.452,00	(143.099.448,00)	89,82
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	231.069.565.657,00	230.712.334.055,00	(357.231.602,00)	99,85
5.2.09	PANGAN	1.204.939.000,00	1.200.940.738,00	(3.998.262,00)	99,67
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan	1.204.939.000,00	1.200.940.738,00	(3.998.262,00)	99,67
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	1.172.814.000,00	1.168.815.738,00	(3.998.262,00)	99,66
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.126.614.000,00	1.122.615.738,00	(3.998.262,00)	99,65
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	32.125.000,00	32.125.000,00	0,00	100,00
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.125.000,00	32.125.000,00	0,00	100,00
5.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	7.774.604.711,00	6.876.428.985,00	(898.175.726,00)	88,45
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	7.774.604.711,00	6.876.428.985,00	(898.175.726,00)	88,45
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	7.603.712.861,00	6.876.428.985,00	(727.283.876,00)	90,44
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.502.606.211,00	1.491.231.595,00	(11.374.616,00)	99,24
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.101.106.650,00	5.385.197.390,00	(715.909.260,00)	88,27
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	170.891.850,00	0,00	(170.891.850,00)	0
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.538.750,00	0,00	(116.538.750,00)	0
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.353.100,00	0,00	(29.353.100,00)	0
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	2.963.714.269,00	2.920.592.752,00	(43.121.517,00)	98,55



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.963.714.269,00	2.920.592.752,00	(43.121.517,00)	98,55
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.901.339.269,00	2.863.217.752,00	(38.121.517,00)	98,69
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.768.714.469,00	1.730.595.452,00	(38.119.017,00)	97,84
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.132.624.800,00	1.132.622.300,00	(2.500,00)	100,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	62.375.000,00	57.375.000,00	(5.000.000,00)	91,98
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.375.000,00	57.375.000,00	(5.000.000,00)	91,98
5.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	181.093.461.687,00	185.784.404.086,00	4.690.942.399,00	102,59
5.2.13.2-13.2-08.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	181.093.461.687,00	185.784.404.086,00	4.690.942.399,00	102,59
5.2.13.2-13.2-08.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.493.857.487,00	5.057.153.486,00	(436.704.001,00)	92,05
5.2.13.2-13.2-08.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.942.882.487,00	1.895.455.102,00	(47.427.385,00)	97,56
5.2.13.2-13.2-08.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.975.000,00	2.381.698.384,00	(119.276.616,00)	95,23
5.2.13.2-13.2-08.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.050.000.000,00	780.000.000,00	(270.000.000,00)	74,29
5.2.13.2-13.2-08.0-00.01.2	BELANJA MODAL	7.625.000,00	0,00	(7.625.000,00)	0
5.2.13.2-13.2-08.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.625.000,00	0,00	(7.625.000,00)	0
5.2.13.2-13.2-08.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	175.591.979.200,00	180.727.250.600,00	5.135.271.400,00	102,92
5.2.13.2-13.2-08.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	175.591.979.200,00	180.727.250.600,00	5.135.271.400,00	102,92
5.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.902.074.788,00	6.526.740.575,00	(375.334.213,00)	94,56
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.902.074.788,00	6.526.740.575,00	(375.334.213,00)	94,56
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.902.074.788,00	6.526.740.575,00	(375.334.213,00)	94,56
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.458.424.997,00	1.448.540.507,00	(9.884.490,00)	99,32
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.443.649.791,00	5.078.200.068,00	(365.449.723,00)	93,29
5.2.15	PERHUBUNGAN	9.562.004.169,00	8.930.794.865,00	(631.209.304,00)	93,40
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	9.562.004.169,00	8.930.794.865,00	(631.209.304,00)	93,40
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.381.616.361,00	8.873.794.865,00	(507.821.496,00)	94,59
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.838.400.742,00	1.805.376.810,00	(33.023.932,00)	98,20
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.543.215.619,00	7.068.418.055,00	(474.797.564,00)	93,71
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	180.387.808,00	57.000.000,00	(123.387.808,00)	31,60
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.387.808,00	0,00	(123.387.808,00)	0
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	2.702.151.256,00	2.578.309.109,00	(123.842.147,00)	95,42
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.702.151.256,00	2.578.309.109,00	(123.842.147,00)	95,42
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	2.688.401.256,00	2.565.259.109,00	(123.142.147,00)	95,42
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	1.650.833.256,00	1.634.684.246,00	(16.149.010,00)	99,02
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.037.568.000,00	930.574.863,00	(106.993.137,00)	89,69
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2	BELANJA MODAL	13.750.000,00	13.050.000,00	(700.000,00)	94,91
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.750.000,00	13.050.000,00	(700.000,00)	94,91
5.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.895.044.133,00	2.726.673.840,00	(2.168.370.293,00)	55,70
5.2.17.2-17.0-00.0-00.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.895.044.133,00	2.726.673.840,00	(2.168.370.293,00)	55,70
5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.895.044.133,00	2.726.673.840,00	(2.168.370.293,00)	55,70
5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.422.074.808,00	1.373.642.914,00	(48.431.894,00)	96,59



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.507.360.575,00	1.326.780.926,00	(180.579.649,00)	88,02
5.2.17.2-17.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.965.608.750,00	26.250.000,00	(1.939.358.750,00)	1,34
5.2.18	PENANAMAN MODAL	3.993.567.914,00	3.910.366.868,00	(83.201.046,00)	97,92
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.993.567.914,00	3.910.366.868,00	(83.201.046,00)	97,92
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.941.817.914,00	3.858.616.868,00	(83.201.046,00)	97,89
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.395.069.164,00	2.380.018.085,00	(15.051.079,00)	99,37
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.546.748.750,00	1.478.598.783,00	(68.149.967,00)	95,59
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	100,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	100,00
5.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.514.393.185,00	4.036.096.513,00	(478.296.672,00)	89,41
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah	4.514.393.185,00	4.036.096.513,00	(478.296.672,00)	89,41
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.447.768.185,00	3.969.471.513,00	(478.296.672,00)	89,25
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.414.743.585,00	1.381.726.913,00	(33.016.672,00)	97,67
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.361.374.350,00	1.359.494.600,00	(1.879.750,00)	99,86
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.671.650.250,00	1.228.250.000,00	(443.400.250,00)	73,48
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	66.625.000,00	66.625.000,00	0,00	100,00
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.625.000,00	66.625.000,00	0,00	100,00
5.2.22	KEBUDAYAAN	3.358.389.270,00	3.149.383.596,00	(209.005.674,00)	93,78
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01	Dinas Kebudayaan	3.358.389.270,00	3.149.383.596,00	(209.005.674,00)	93,78
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.358.389.270,00	3.149.383.596,00	(209.005.674,00)	93,78
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.481.710.770,00	1.424.848.136,00	(56.862.634,00)	96,16
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	776.678.500,00	774.935.460,00	(1.743.040,00)	99,78
5.2.22.2-22.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.100.000.000,00	949.600.000,00	(150.400.000,00)	86,33
5.2.24	KEARSIPAN	2.105.221.275,00	2.071.602.128,00	(33.619.147,00)	98,40
5.2.24.2-24.0-00.0-00.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	2.105.221.275,00	2.071.602.128,00	(33.619.147,00)	98,40
5.2.24.2-24.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.105.221.275,00	2.071.602.128,00	(33.619.147,00)	98,40
5.2.24.2-24.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.331.021.275,00	1.313.512.579,00	(17.508.696,00)	98,68
5.2.24.2-24.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	774.200.000,00	758.089.549,00	(16.110.451,00)	97,92
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39.254.861.974,00	37.657.723.013,72	(1.597.138.960,28)	95,93
5.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	18.443.035.288,00	17.427.784.025,72	(1.015.251.262,28)	94,50
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01	Dinas Perikanan	18.443.035.288,00	17.427.784.025,72	(1.015.251.262,28)	94,50
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	18.434.285.288,00	17.427.784.025,72	(1.006.501.262,28)	94,54
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.809.717.288,00	2.761.331.364,00	(48.385.924,00)	98,28
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.624.568.000,00	14.666.452.661,72	(958.115.338,28)	93,87
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	0
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	0
5.3.26	PARIWISATA	3.451.328.898,00	3.259.718.717,00	(191.610.181,00)	94,45
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01	Dinas Pariwisata	3.451.328.898,00	3.259.718.717,00	(191.610.181,00)	94,45
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.451.328.898,00	3.259.718.717,00	(191.610.181,00)	94,45
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.786.128.898,00	1.776.471.717,00	(9.657.181,00)	99,46



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.665.200.000,00	1.483.247.000,00	(181.953.000,00)	89,07
5.3.27	PERTANIAN	13.620.826.524,00	13.342.178.776,00	(278.647.748,00)	97,95
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01	Dinas Pertanian	13.620.826.524,00	13.342.178.776,00	(278.647.748,00)	97,95
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	12.414.576.524,00	12.204.528.776,00	(210.047.748,00)	98,31
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.486.659.699,00	4.457.153.608,00	(29.506.091,00)	99,34
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.927.916.825,00	7.747.375.168,00	(180.541.657,00)	97,72
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.206.250.000,00	1.137.650.000,00	(68.600.000,00)	94,31
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.050.000.000,00	981.400.000,00	(68.600.000,00)	93,47
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	100,00
5.3.30	PERDAGANGAN	3.739.671.264,00	3.628.041.495,00	(111.629.769,00)	97,01
5.3.30.3-30.0-00.0-00.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	3.739.671.264,00	3.628.041.495,00	(111.629.769,00)	97,01
5.3.30.3-30.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.708.596.264,00	3.596.966.495,00	(111.629.769,00)	96,99
5.3.30.3-30.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.980.150.514,00	1.966.520.417,00	(13.630.097,00)	99,31
5.3.30.3-30.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.358.445.750,00	1.300.446.078,00	(57.999.672,00)	95,73
5.3.30.3-30.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
5.3.30.3-30.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	70.000.000,00	30.000.000,00	(40.000.000,00)	42,86
5.3.30.3-30.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	31.075.000,00	31.075.000,00	0,00	100,00
5.3.30.3-30.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.075.000,00	31.075.000,00	0,00	100,00
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	102.752.503.662,00	91.721.427.300,00	(11.031.076.362,00)	89,26
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	62.501.451.607,00	56.350.616.943,00	(6.150.834.664,00)	90,16
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	62.501.451.607,00	56.350.616.943,00	(6.150.834.664,00)	90,16
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	62.125.966.988,00	56.228.366.943,00	(5.897.600.045,00)	90,51
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.672.578.055,00	7.571.052.060,00	(101.525.995,00)	98,68
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.301.798.933,00	22.482.314.883,00	(1.819.484.050,00)	92,51
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	30.151.590.000,00	26.175.000.000,00	(3.976.590.000,00)	86,81
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	375.484.619,00	122.250.000,00	(253.234.619,00)	32,56
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.484.619,00	122.250.000,00	(253.234.619,00)	32,56
5.4.02	SEKRETARIAT DPRD	40.251.052.055,00	35.370.810.357,00	(4.880.241.698,00)	87,88
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat DPRD	40.251.052.055,00	35.370.810.357,00	(4.880.241.698,00)	87,88
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	40.135.880.805,00	35.345.901.957,00	(4.789.978.848,00)	88,07
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	16.641.353.055,00	16.411.804.669,00	(229.548.386,00)	98,62
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.494.527.750,00	18.934.097.288,00	(4.560.430.462,00)	80,59
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	115.171.250,00	24.908.400,00	(90.262.850,00)	21,63
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.171.250,00	24.908.400,00	(90.262.850,00)	21,63
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	42.959.671.088,00	31.242.228.343,00	(11.717.442.745,00)	72,72
5.5.01	PERENCANAAN	6.272.907.138,00	5.854.664.586,00	(418.242.552,00)	93,33
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.272.907.138,00	5.854.664.586,00	(418.242.552,00)	93,33
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.272.907.138,00	5.854.664.586,00	(418.242.552,00)	93,33
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.626.308.638,00	2.584.684.627,00	(41.624.011,00)	98,42



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.01.5-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.646.598.500,00	3.269.979.959,00	(376.618.541,00)	89,67
5.5.02	KEUANGAN	18.687.528.208,00	16.804.577.015,00	(1.882.951.193,00)	89,92
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.601.777.525,00	12.430.555.906,00	(1.171.221.619,00)	91,39
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.092.531.923,00	8.335.659.014,00	(756.872.909,00)	91,68
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.373.448.215,00	2.363.372.124,00	(10.076.091,00)	99,58
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.719.838.100,00	4.973.041.282,00	(746.796.818,00)	86,94
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.03	Belanja Bunga	999.245.608,00	999.245.608,00	0,00	100,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	717.530.909,00	310.440.000,00	(407.090.909,00)	43,27
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	717.530.909,00	310.440.000,00	(407.090.909,00)	43,27
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	3.791.714.693,00	3.784.456.892,00	(7.257.801,00)	99,81
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.791.714.693,00	3.784.456.892,00	(7.257.801,00)	99,81
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.085.750.683,00	4.374.021.109,00	(711.729.574,00)	86,01
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	5.074.288.183,00	4.374.021.109,00	(700.267.074,00)	86,20
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	2.691.059.802,00	2.265.912.880,00	(425.146.922,00)	84,20
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.383.228.381,00	2.108.108.229,00	(275.120.152,00)	88,46
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	11.462.500,00	0,00	(11.462.500,00)	0
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.462.500,00	0,00	(11.462.500,00)	0
5.5.03	KEPEGAWAIAN	15.664.403.842,00	6.290.100.562,00	(9.374.303.280,00)	40,16
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	15.664.403.842,00	6.290.100.562,00	(9.374.303.280,00)	40,16
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	15.664.403.842,00	6.290.100.562,00	(9.374.303.280,00)	40,16
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	13.014.221.592,00	3.807.178.467,00	(9.207.043.125,00)	29,25
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.182.250,00	2.482.922.095,00	(167.260.155,00)	93,69
5.5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	2.334.831.900,00	2.292.886.180,00	(41.945.720,00)	98,20
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.334.831.900,00	2.292.886.180,00	(41.945.720,00)	98,20
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.311.081.900,00	2.269.136.180,00	(41.945.720,00)	98,19
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.363.257.850,00	1.354.096.137,00	(9.161.713,00)	99,33
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	947.824.050,00	915.040.043,00	(32.784.007,00)	96,54
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00
5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	4.313.143.967,00	4.031.911.244,00	(281.232.723,00)	93,48
5.6.01	INSPEKTORAT	4.313.143.967,00	4.031.911.244,00	(281.232.723,00)	93,48
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat	4.313.143.967,00	4.031.911.244,00	(281.232.723,00)	93,48
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.313.143.967,00	4.031.911.244,00	(281.232.723,00)	93,48
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.213.144.967,00	2.177.682.630,00	(35.462.337,00)	98,40
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.099.999.000,00	1.854.228.614,00	(245.770.386,00)	88,30
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	12.148.186.985,00	11.857.792.771,00	(290.394.214,00)	97,61
5.7.01	KECAMATAN	12.148.186.985,00	11.857.792.771,00	(290.394.214,00)	97,61
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Kei Kecil	1.767.411.728,00	1.725.078.406,00	(42.333.322,00)	97,60
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	1.766.461.728,00	1.725.078.406,00	(41.383.322,00)	97,66
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.220.922.853,00	1.218.478.269,00	(2.444.584,00)	99,80



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.538.875,00	506.600.137,00	(38.938.738,00)	92,86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	950.000,00	0,00	(950.000,00)	0
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	950.000,00	0,00	(950.000,00)	0
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Kei Kecil Barat	1.069.602.110,00	1.043.213.248,00	(26.388.862,00)	97,53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	1.069.602.110,00	1.043.213.248,00	(26.388.862,00)	97,53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	706.952.110,00	684.766.248,00	(22.185.862,00)	96,86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.650.000,00	358.447.000,00	(4.203.000,00)	98,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Kei Kecil Timur	1.039.356.376,00	1.007.740.457,00	(31.615.919,00)	96,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	1.039.356.376,00	1.007.740.457,00	(31.615.919,00)	96,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	765.156.376,00	747.499.885,00	(17.656.491,00)	97,69
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.200.000,00	260.240.572,00	(13.959.428,00)	94,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Kei Besar Utara Timur	1.151.324.865,00	1.145.899.870,00	(5.424.995,00)	99,53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	1.151.324.865,00	1.145.899.870,00	(5.424.995,00)	99,53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	756.924.865,00	751.499.870,00	(5.424.995,00)	99,28
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.400.000,00	394.400.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Kei Besar Selatan	1.330.585.068,00	1.303.995.484,00	(26.589.584,00)	98,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	1.330.585.068,00	1.303.995.484,00	(26.589.584,00)	98,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	901.879.568,00	875.437.484,00	(26.442.084,00)	97,07
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.705.500,00	428.558.000,00	(147.500,00)	99,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Manyeuw	931.260.483,00	921.598.886,00	(9.661.597,00)	98,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	931.260.483,00	921.598.886,00	(9.661.597,00)	98,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	657.060.483,00	647.601.326,00	(9.459.157,00)	98,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.200.000,00	273.997.560,00	(202.440,00)	99,93
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Hoat Sorbay	993.640.337,00	954.588.079,00	(39.052.258,00)	96,07
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	993.640.337,00	954.588.079,00	(39.052.258,00)	96,07
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	693.648.087,00	654.827.879,00	(38.820.208,00)	94,40
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.992.250,00	299.760.200,00	(232.050,00)	99,92
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan	812.279.799,00	799.266.164,00	(13.013.635,00)	98,40
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1	BELANJA OPERASI	812.279.799,00	799.266.164,00	(13.013.635,00)	98,40
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01	Belanja Pegawai	529.680.049,00	516.816.164,00	(12.863.885,00)	97,57
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.599.750,00	282.450.000,00	(149.750,00)	99,95
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat	878.174.272,00	851.778.856,00	(26.395.416,00)	96,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	878.174.272,00	851.778.856,00	(26.395.416,00)	96,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	450.174.522,00	439.194.656,00	(10.979.866,00)	97,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.999.750,00	412.584.200,00	(15.415.550,00)	96,40
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10	Kecamatan Kei Besar Utara Barat	1.089.690.829,00	1.070.314.589,00	(19.376.240,00)	98,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1	BELANJA OPERASI	1.074.065.829,00	1.054.689.589,00	(19.376.240,00)	98,20
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.01	Belanja Pegawai	739.690.829,00	721.649.589,00	(18.041.240,00)	97,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.375.000,00	333.040.000,00	(1.335.000,00)	99,60
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2	BELANJA MODAL	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	100,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11	Kecamatan Kei Besar	1.084.861.118,00	1.034.318.732,00	(50.542.386,00)	95,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1	BELANJA OPERASI	1.084.861.118,00	1.034.318.732,00	(50.542.386,00)	95,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.01	Belanja Pegawai	734.861.118,00	714.318.732,00	(20.542.386,00)	97,20
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	320.000.000,00	(30.000.000,00)	91,43
6	PEMBIAYAAN DAERAH	65.034.901.597,00	65.035.081.597,21	180.000,21	100,00
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	65.034.901.597,00	65.035.081.597,21	180.000,21	100,00
6.5.02	KEUANGAN	65.034.901.597,00	65.035.081.597,21	180.000,21	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	65.034.901.597,00	65.035.081.597,21	180.000,21	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.765.027.909,00	15.765.207.909,21	180.000,21	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.765.027.909,00	15.765.207.909,21	180.000,21	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	49.269.873.688,00	49.269.873.688,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	48.269.873.688,00	48.269.873.688,00	0,00	100,00

LANGGUR, 4 OKTOBER 2024

Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO



 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2023					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	1.070.994.876.368,00	999.216.392.889,62	93,30	893.109.571.160,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92.477.624.904,00	73.801.232.072,00	79,80	54.850.576.521,42
4.1.01	Pajak Daerah	47.218.977.384,00	11.190.143.473,00	23,70	12.056.543.681,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.553.042.000,00	1.992.498.500,00	30,41	2.559.104.600,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.446.735.017,00	6.446.735.017,00	100,00	3.211.782.587,06
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	32.258.870.503,00	54.171.855.082,00	167,93	37.023.145.653,36
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	978.517.251.464,00	925.415.160.817,62	94,57	827.374.566.189,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	954.074.803.951,00	907.994.277.141,62	95,17	810.826.028.947,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	804.433.292.951,00	753.216.996.141,62	93,63	667.514.392.947,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	6.207.486.000,00	6.207.486.000,00	100,00	5.805.126.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	143.434.025.000,00	148.569.795.000,00	103,58	137.506.510.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.442.447.513,00	17.420.883.676,00	71,27	16.548.537.242,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	24.442.447.513,00	17.420.883.676,00	71,27	16.121.937.242,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0	426.600.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0	10.884.428.450,11
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0	10.884.428.450,11
5	BELANJA DAERAH	1.037.490.030.589,00	929.446.825.891,00	89,59	942.002.855.474,39
5.1	BELANJA OPERASI	643.080.198.997,00	552.714.560.307,76	85,95	543.414.604.276,66
5.1.01	Belanja Pegawai	273.945.397.707,00	245.328.012.957,00	89,55	240.052.727.701,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.341.898.142,00	244.869.780.409,76	94,79	251.948.356.112,66
5.1.03	Belanja Bunga	999.245.608,00	999.245.608,00	100,00	709.426.734,00
5.1.05	Belanja Hibah	90.251.857.540,00	46.904.766.333,00	51,97	39.534.257.729,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.541.800.000,00	14.612.755.000,00	74,78	11.169.836.000,00
5.2	BELANJA MODAL	214.308.606.790,00	191.910.118.091,24	89,55	210.475.626.202,73
5.2.01	Belanja Modal Tanah	568.124.525,00	0,00	0,00	1.032.948.772,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.077.962.789,00	26.629.682.986,00	94,84	36.999.028.849,73
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.796.299.777,00	76.615.372.183,00	80,82	17.665.831.432,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.827.499.699,00	87.929.442.922,24	97,89	154.050.191.850,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.038.720.000,00	735.620.000,00	70,82	727.625.299,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	717.530.909,00	310.440.000,00	43,27	668.857.600,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	717.530.909,00	310.440.000,00	43,27	668.857.600,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.4	BELANJA TRANSFER	179.383.693.893,00	184.511.707.492,00	102,86	187.443.767.395,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.791.714.693,00	3.784.456.892,00	99,81	3.109.616.752,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	175.591.979.200,00	180.727.250.600,00	102,92	184.334.150.643,00
	SURPLUS / DEFISIT	33.504.845.608,00	69.769.566.998,62	208,24	(48.893.284.313,86)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.765.027.909,00	15.765.207.909,21	100,00	58.718.792.463,34
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.765.027.909,00	15.765.207.909,21	100,00	-248.929.486,66
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0	58.967.721.950,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	49.269.873.688,00	49.269.873.688,00	100,00	13.497.848.245,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	2.800.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	48.269.873.688,00	48.269.873.688,00	100,00	10.697.848.245,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(33.504.845.779,00)	(33.504.665.778,79)	0	45.220.944.218,34
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	36.264.901.219,83	0	(3.672.340.095,52)

LANGGUR, 4 OKTOBER 2024
Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
SKPD : 1-01.0-00.0-00.01 DINAS PENDIDIKAN
Unit Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01.001 DINAS PENDIDIKAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	11.542.251.947,62	11.542.251.947,62	0		
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	11.542.251.947,62	11.542.251.947,62	0		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	11.542.251.947,62	11.542.251.947,62	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	220.453.549.546,00	174.711.206.446,89	(45.742.343.099,11)	79,25		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.048.254.698,00	107.572.712.273,00	(14.475.542.425,00)	88,14		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.816.250,00	274.819.500,00	(33.996.750,00)	88,99		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	171.816.250,00	171.569.500,00	(246.750,00)	99,86		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	171.816.250,00	171.569.500,00	(246.750,00)	99,86		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.816.250,00	171.569.500,00	(246.750,00)	99,86		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.000.000,00	103.250.000,00	(33.750.000,00)	75,36		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	137.000.000,00	103.250.000,00	(33.750.000,00)	75,36		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.000.000,00	103.250.000,00	(33.750.000,00)	75,36		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	119.166.919.198,00	105.068.595.831,00	(14.098.323.367,00)	88,17		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93.869.519.198,00	81.378.725.055,00	(12.490.794.143,00)	86,69		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	93.869.519.198,00	81.378.725.055,00	(12.490.794.143,00)	86,69		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	93.869.519.198,00	81.378.725.055,00	(12.490.794.143,00)	86,69		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86.076.000,00	85.800.000,00	(276.000,00)	99,68		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	86.076.000,00	85.800.000,00	(276.000,00)	99,68		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.000,00	0,00	(276.000,00)	0		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.211.324.000,00	23.604.070.776,00	(1.607.253.224,00)	93,62		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.211.324.000,00	23.604.070.776,00	(1.607.253.224,00)	93,62		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	25.211.324.000,00	23.604.070.776,00	(1.607.253.224,00)	93,62		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	134.800.500,00	131.788.000,00	(3.012.500,00)	97,77		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	134.800.500,00	131.788.000,00	(3.012.500,00)	97,77		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	134.800.500,00	131.788.000,00	(3.012.500,00)	97,77		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.800.500,00	131.788.000,00	(3.012.500,00)	97,77		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.741.000,00	112.129.225,00	(2.611.775,00)	97,72		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	114.741.000,00	112.129.225,00	(2.611.775,00)	97,72		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	114.741.000,00	112.129.225,00	(2.611.775,00)	97,72		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.741.000,00	112.129.225,00	(2.611.775,00)	97,72		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.107.809.000,00	909.398.101,00	(198.410.899,00)	82,09		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.075.000,00	20.070.500,00	(4.500,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.075.000,00	20.070.500,00	(4.500,00)	99,98		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.075.000,00	20.070.500,00	(4.500,00)	99,98		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.250.000,00	186.536.000,00	(714.000,00)	99,62		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	187.250.000,00	186.536.000,00	(714.000,00)	99,62		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.250.000,00	186.536.000,00	(714.000,00)	99,62		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.975.000,00	23.975.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	196.116.000,00	117.378.700,00	(78.737.300,00)	59,85		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	196.116.000,00	117.378.700,00	(78.737.300,00)	59,85		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.116.000,00	117.378.700,00	(78.737.300,00)	59,85		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	178.780.000,00	146.459.000,00	(32.321.000,00)	81,92		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	178.780.000,00	146.459.000,00	(32.321.000,00)	81,92		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.780.000,00	146.459.000,00	(32.321.000,00)	81,92		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	501.613.000,00	414.978.901,00	(86.634.099,00)	82,73		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	501.613.000,00	414.978.901,00	(86.634.099,00)	82,73		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.613.000,00	414.978.901,00	(86.634.099,00)	82,73		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.625.000,00	158.405.000,00	(1.220.000,00)	99,24		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	159.625.000,00	158.405.000,00	(1.220.000,00)	99,24		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	159.625.000,00	158.405.000,00	(1.220.000,00)	99,24		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.625.000,00	158.405.000,00	(1.220.000,00)	99,24		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.662.500,00	570.727.366,00	(79.935.134,00)	87,71		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.000.000,00	261.479.866,00	(77.520.134,00)	77,13		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	339.000.000,00	261.479.866,00	(77.520.134,00)	77,13		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.000.000,00	261.479.866,00	(77.520.134,00)	77,13		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.662.500,00	309.247.500,00	(2.415.000,00)	99,23		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	311.662.500,00	309.247.500,00	(2.415.000,00)	99,23		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.662.500,00	309.247.500,00	(2.415.000,00)	99,23		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.045.000,00	307.724.250,00	(11.320.750,00)	96,45		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.105.000,00	62.336.000,00	(1.769.000,00)	97,24		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	64.105.000,00	62.336.000,00	(1.769.000,00)	97,24		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.105.000,00	62.336.000,00	(1.769.000,00)	97,24		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.400.000,00	22.950.000,00	(450.000,00)	98,08		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	22.950.000,00	(450.000,00)	98,08		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	22.950.000,00	(450.000,00)	98,08		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.540.000,00	222.438.250,00	(9.101.750,00)	96,07		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	231.540.000,00	222.438.250,00	(9.101.750,00)	96,07		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.540.000,00	222.438.250,00	(9.101.750,00)	96,07		
01.2.13	Penataan Organisasi	85.836.250,00	39.125.000,00	(46.711.250,00)	45,58		
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	85.836.250,00	39.125.000,00	(46.711.250,00)	45,58		
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	85.836.250,00	39.125.000,00	(46.711.250,00)	45,58		
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.836.250,00	39.125.000,00	(46.711.250,00)	45,58		
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	97.562.644.348,00	67.138.494.173,89	(30.424.150.174,11)	68,82		
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	49.441.087.992,00	34.608.180.618,56	(14.832.906.373,44)	70,00		
02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.687.065.000,00	1.641.980.500,00	(45.084.500,00)	97,33		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.687.065.000,00	1.641.980.500,00	(45.084.500,00)	97,33		
02.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	1.687.065.000,00	1.641.980.500,00	(45.084.500,00)	97,33		
02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.267.141.700,00	2.027.616.975,00	(239.524.725,00)	89,43		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.267.141.700,00	2.027.616.975,00	(239.524.725,00)	89,43		
02.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	2.267.141.700,00	2.027.616.975,00	(239.524.725,00)	89,43		
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.917.453.543,00	1.751.213.081,00	(166.240.462,00)	91,33		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.503.555.649,00	1.343.989.081,00	(159.566.568,00)	89,39		
02.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	1.503.555.649,00	1.343.989.081,00	(159.566.568,00)	89,39		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	413.897.894,00	407.224.000,00	(6.673.894,00)	98,39		
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	413.897.894,00	407.224.000,00	(6.673.894,00)	98,39		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.430.179.616,00	5.923.872.352,00	(1.506.307.264,00)	79,73		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.459.855.716,00	4.368.759.507,00	(1.091.096.209,00)	80,02		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.003.300.516,00	565.646.727,00	(437.653.789,00)	56,38		
02.2.01.06.5.1.05	Belanja Hibah	4.456.555.200,00	3.803.112.780,00	(653.442.420,00)	85,34		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	1.970.323.900,00	1.555.112.845,00	(415.211.055,00)	78,93		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.970.323.900,00	1.555.112.845,00	(415.211.055,00)	78,93		
02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	3.408.727.162,00	2.755.587.275,00	(653.139.887,00)	80,84		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.689.780.056,00	2.076.271.275,00	(613.508.781,00)	77,19		
02.2.01.07.5.1.05	Belanja Hibah	2.689.780.056,00	2.076.271.275,00	(613.508.781,00)	77,19		
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	718.947.106,00	679.316.000,00	(39.631.106,00)	94,49		
02.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	718.947.106,00	679.316.000,00	(39.631.106,00)	94,49		
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.621.545.746,00	4.224.660.775,00	(396.884.971,00)	91,41		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.562.576.066,00	2.443.177.170,00	(119.398.896,00)	95,34		
02.2.01.08.5.1.05	Belanja Hibah	2.562.576.066,00	2.443.177.170,00	(119.398.896,00)	95,34		
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	2.058.969.680,00	1.781.483.605,00	(277.486.075,00)	86,52		
02.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.058.969.680,00	1.781.483.605,00	(277.486.075,00)	86,52		
02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	452.164.375,00	433.808.325,00	(18.356.050,00)	95,94		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	150.001.175,00	148.336.175,00	(1.665.000,00)	98,89		
02.2.01.11.5.1.05	Belanja Hibah	150.001.175,00	148.336.175,00	(1.665.000,00)	98,89		
02.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	302.163.200,00	285.472.150,00	(16.691.050,00)	94,48		
02.2.01.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	302.163.200,00	285.472.150,00	(16.691.050,00)	94,48		
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.474.173.600,00	1.393.597.000,00	(80.576.600,00)	94,53		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	1.177.740.000,00	1.105.109.400,00	(72.630.600,00)	93,83		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.175.000,00	0,00	(55.175.000,00)	0		
02.2.01.12.5.1.05	Belanja Hibah	1.122.565.000,00	1.105.109.400,00	(17.455.600,00)	98,45		
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	296.433.600,00	288.487.600,00	(7.946.000,00)	97,32		
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	296.433.600,00	288.487.600,00	(7.946.000,00)	97,32		
02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.100.000.000,00	2.086.300.000,00	(13.700.000,00)	99,35		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	2.070.000.000,00	2.056.300.000,00	(13.700.000,00)	99,34		
02.2.01.16.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.650.000.000,00	1.636.300.000,00	(13.700.000,00)	99,17		
02.2.01.16.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	908.850.250,00	695.796.510,00	(213.053.740,00)	76,56		
02.2.01.24.5.1	BELANJA OPERASI	908.850.250,00	695.796.510,00	(213.053.740,00)	76,56		
02.2.01.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.850.250,00	695.796.510,00	(213.053.740,00)	76,56		
02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.292.347.500,00	5.742.082.684,00	(550.264.816,00)	91,26		
02.2.01.27.5.1	BELANJA OPERASI	6.292.347.500,00	5.742.082.684,00	(550.264.816,00)	91,26		
02.2.01.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.992.347.500,00	5.532.082.684,00	(460.264.816,00)	92,32		
02.2.01.27.5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	210.000.000,00	(90.000.000,00)	70,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	16.690.312.000,00	5.838.818.781,56	(10.851.493.218,44)	34,98		
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	16.125.350.017,00	5.327.250.707,56	(10.798.099.199,44)	33,04		
02.2.01.29.5.1.01	Belanja Pegawai	1.513.931.907,00	1.519.402.626,00	5.470.719,00	100,36		
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.727.168.000,00	3.807.848.081,56	80.680.081,56	102,16		
02.2.01.29.5.1.05	Belanja Hibah	10.884.250.000,00	0,00	(10.884.250.000,00)	0		
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	564.970.148,00	511.568.074,00	(53.402.074,00)	90,55		
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564.970.148,00	511.568.074,00	(53.402.074,00)	90,55		
02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	191.118.500,00	92.846.360,00	(98.272.140,00)	48,58		
02.2.01.40.5.1	BELANJA OPERASI	191.118.500,00	92.846.360,00	(98.272.140,00)	48,58		
02.2.01.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.118.500,00	92.846.360,00	(98.272.140,00)	48,58		
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	38.609.178.716,00	29.681.461.416,33	(8.927.717.299,67)	76,88		
02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.930.363.000,00	3.561.554.726,00	(368.808.274,00)	90,62		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	3.930.363.000,00	3.561.554.726,00	(368.808.274,00)	90,62		
02.2.02.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.930.363.000,00	3.561.554.726,00	(368.808.274,00)	90,62		
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3.052.619.000,00	2.815.431.330,00	(237.187.670,00)	92,23		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	3.052.619.000,00	2.815.431.330,00	(237.187.670,00)	92,23		
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.052.619.000,00	2.815.431.330,00	(237.187.670,00)	92,23		
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	7.179.819.756,00	6.216.088.728,00	(963.731.028,00)	86,58		
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	7.179.819.756,00	6.216.088.728,00	(963.731.028,00)	86,58		
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.179.819.756,00	6.216.088.728,00	(963.731.028,00)	86,58		
02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	3.608.375.877,00	3.366.472.650,00	(241.903.227,00)	93,30		
02.2.02.09.5.2	BELANJA MODAL	3.608.375.877,00	3.366.472.650,00	(241.903.227,00)	93,30		
02.2.02.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.608.375.877,00	3.366.472.650,00	(241.903.227,00)	93,30		
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.387.005.219,00	2.444.579.550,00	(942.425.669,00)	72,18		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	2.247.848.000,00	1.602.330.700,00	(645.517.300,00)	71,28		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.369.398.000,00	1.029.459.000,00	(339.939.000,00)	75,18		
02.2.02.12.5.1.05	Belanja Hibah	878.450.000,00	572.871.700,00	(305.578.300,00)	65,21		
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	1.139.157.219,00	842.248.850,00	(296.908.369,00)	73,94		
02.2.02.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	124.000.000,00	(1.000.000,00)	99,20		
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.014.157.219,00	718.248.850,00	(295.908.369,00)	70,82		
02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	886.208.933,00	775.762.000,00	(110.446.933,00)	87,54		
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	886.208.933,00	775.762.000,00	(110.446.933,00)	87,54		
02.2.02.14.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	886.208.933,00	775.762.000,00	(110.446.933,00)	87,54		
02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	181.735.663,00	181.366.000,00	(369.663,00)	99,80		
02.2.02.15.5.2	BELANJA MODAL	181.735.663,00	181.366.000,00	(369.663,00)	99,80		
02.2.02.15.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.735.663,00	181.366.000,00	(369.663,00)	99,80		
02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.180.282.201,00	769.478.380,00	(410.803.821,00)	65,19		
02.2.02.18.5.2	BELANJA MODAL	1.180.282.201,00	769.478.380,00	(410.803.821,00)	65,19		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.18.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.180.282.201,00	769.478.380,00	(410.803.821,00)	65,19		
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.355.650.967,00	1.402.744.365,00	(952.906.602,00)	59,55		
02.2.02.24.5.1	BELANJA OPERASI	1.367.923.167,00	814.270.365,00	(553.652.802,00)	59,53		
02.2.02.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.247.000,00	57.121.165,00	(162.125.835,00)	26,05		
02.2.02.24.5.1.05	Belanja Hibah	1.148.676.167,00	757.149.200,00	(391.526.967,00)	65,91		
02.2.02.24.5.2	BELANJA MODAL	987.727.800,00	588.474.000,00	(399.253.800,00)	59,58		
02.2.02.24.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	987.727.800,00	588.474.000,00	(399.253.800,00)	59,58		
02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	456.250.000,00	400.850.000,00	(55.400.000,00)	87,86		
02.2.02.27.5.2	BELANJA MODAL	456.250.000,00	400.850.000,00	(55.400.000,00)	87,86		
02.2.02.27.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.000.000,00	164.600.000,00	(55.400.000,00)	74,82		
02.2.02.27.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	236.250.000,00	236.250.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.381.244.750,00	1.804.563.029,00	(576.681.721,00)	75,78		
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	2.381.244.750,00	1.804.563.029,00	(576.681.721,00)	75,78		
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.981.244.750,00	1.404.563.029,00	(576.681.721,00)	70,89		
02.2.02.37.5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	97.718.500,00	0,00	(97.718.500,00)	0		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	97.718.500,00	0,00	(97.718.500,00)	0		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.718.500,00	0,00	(97.718.500,00)	0		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.609.550.000,00	5.741.200.655,33	(3.868.349.344,67)	59,74		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	8.872.895.400,00	5.032.538.205,33	(3.840.357.194,67)	56,72		
02.2.02.42.5.1.01	Belanja Pegawai	1.128.139.500,00	1.356.466.000,00	228.326.500,00	120,24		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.760.605.900,00	3.676.072.205,33	(84.533.694,67)	97,75		
02.2.02.42.5.1.05	Belanja Hibah	3.984.150.000,00	0,00	(3.984.150.000,00)	0		
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	736.654.600,00	708.662.450,00	(27.992.150,00)	96,20		
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	736.654.600,00	708.662.450,00	(27.992.150,00)	96,20		
02.2.02.50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	226.572.500,00	201.370.003,00	(25.202.497,00)	88,88		
02.2.02.50.5.1	BELANJA OPERASI	68.736.000,00	44.416.003,00	(24.319.997,00)	64,62		
02.2.02.50.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.736.000,00	44.416.003,00	(24.319.997,00)	64,62		
02.2.02.50.5.2	BELANJA MODAL	157.836.500,00	156.954.000,00	(882.500,00)	99,44		
02.2.02.50.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.836.500,00	156.954.000,00	(882.500,00)	99,44		
02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	75.782.250,00	0,00	(75.782.250,00)	0		
02.2.02.53.5.1	BELANJA OPERASI	75.782.250,00	0,00	(75.782.250,00)	0		
02.2.02.53.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.782.250,00	0,00	(75.782.250,00)	0		
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.080.997.990,00	2.725.117.200,00	(4.355.880.790,00)	38,48		
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	649.464.000,00	648.353.500,00	(1.110.500,00)	99,83		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	649.464.000,00	648.353.500,00	(1.110.500,00)	99,83		
02.2.03.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	649.464.000,00	648.353.500,00	(1.110.500,00)	99,83		
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.557.288.590,00	1.474.381.585,00	(82.907.005,00)	94,68		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	545.601.150,00	496.592.575,00	(49.008.575,00)	91,02		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.450.000,00	0,00	(48.450.000,00)	0		
02.2.03.02.5.1.05	Belanja Hibah	497.151.150,00	496.592.575,00	(558.575,00)	99,89		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	1.011.687.440,00	977.789.010,00	(33.898.430,00)	96,65		
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.011.687.440,00	977.789.010,00	(33.898.430,00)	96,65		
02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	206.674.900,00	165.692.500,00	(40.982.400,00)	80,17		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	56.529.500,00	16.657.500,00	(39.872.000,00)	29,47		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.529.500,00	16.657.500,00	(39.872.000,00)	29,47		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	150.145.400,00	149.035.000,00	(1.110.400,00)	99,26		
02.2.03.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.145.400,00	149.035.000,00	(1.110.400,00)	99,26		
02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	329.467.750,00	198.261.865,00	(131.205.885,00)	60,18		
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	329.467.750,00	198.261.865,00	(131.205.885,00)	60,18		
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.467.750,00	198.261.865,00	(131.205.885,00)	60,18		
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	247.602.750,00	238.427.750,00	(9.175.000,00)	96,29		
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	247.602.750,00	238.427.750,00	(9.175.000,00)	96,29		
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.602.750,00	238.427.750,00	(9.175.000,00)	96,29		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.090.500.000,00	0,00	(4.090.500.000,00)	0		
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	4.082.325.000,00	0,00	(4.082.325.000,00)	0		
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.325.000,00	0,00	(155.325.000,00)	0		
02.2.03.18.5.1.05	Belanja Hibah	3.927.000.000,00	0,00	(3.927.000.000,00)	0		
02.2.03.18.5.2	BELANJA MODAL	8.175.000,00	0,00	(8.175.000,00)	0		
02.2.03.18.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.175.000,00	0,00	(8.175.000,00)	0		
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.431.380.750,00	123.734.939,00	(2.307.645.811,00)	5,09		
02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	151.680.750,00	123.734.939,00	(27.945.811,00)	81,58		
02.2.04.13.5.1	BELANJA OPERASI	151.680.750,00	123.734.939,00	(27.945.811,00)	81,58		
02.2.04.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.680.750,00	123.734.939,00	(27.945.811,00)	81,58		
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	2.279.700.000,00	0,00	(2.279.700.000,00)	0		
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	2.277.861.000,00	0,00	(2.277.861.000,00)	0		
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.551.000,00	0,00	(16.551.000,00)	0		
02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	2.261.310.000,00	0,00	(2.261.310.000,00)	0		
02.2.04.17.5.2	BELANJA MODAL	1.839.000,00	0,00	(1.839.000,00)	0		
02.2.04.17.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.839.000,00	0,00	(1.839.000,00)	0		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	822.400.500,00	0,00	(822.400.500,00)	0		
03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	635.160.000,00	0,00	(635.160.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	153.654.000,00	0,00	(153.654.000,00)	0		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	153.654.000,00	0,00	(153.654.000,00)	0		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.654.000,00	0,00	(153.654.000,00)	0		
03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	257.850.000,00	0,00	(257.850.000,00)	0		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	257.850.000,00	0,00	(257.850.000,00)	0		
03.2.01.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	257.850.000,00	0,00	(257.850.000,00)	0		
03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	223.656.000,00	0,00	(223.656.000,00)	0		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	223.656.000,00	0,00	(223.656.000,00)	0		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.656.000,00	0,00	(223.656.000,00)	0		
03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	187.240.500,00	0,00	(187.240.500,00)	0		
03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	187.240.500,00	0,00	(187.240.500,00)	0		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	187.240.500,00	0,00	(187.240.500,00)	0		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.240.500,00	0,00	(187.240.500,00)	0		
06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	20.250.000,00	0,00	(20.250.000,00)	0		
06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.250.000,00	0,00	(20.250.000,00)	0		
06.2.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.250.000,00	0,00	(20.250.000,00)	0		
06.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	20.250.000,00	0,00	(20.250.000,00)	0		
06.2.01.07.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.250.000,00	0,00	(20.250.000,00)	0		
	SURPLUS / DEFISIT	(220.453.549.546,00)	(163.168.954.499,27)	57.284.595. 046,73	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(220.453.549.546,00)	(163.168.954.499,27)	57.284.595. 046,73	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 DINAS KESEHATAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	17.403.829.352,00	51.360.280.162,80	33.956.450.810,80	295,11		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.403.829.352,00	51.360.280.162,80	33.956.450.810,80	295,11		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.403.829.352,00	51.360.280.162,80	33.956.450.810,80	295,11		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	213.106.777.115,00	201.898.793.110,48	(11.207.984.004,52)	94,74		
00	Non Program	0,00	147.734.982,80	147.734.982,80	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	147.734.982,80	147.734.982,80	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	147.734.982,80	147.734.982,80	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	147.734.982,80	147.734.982,80	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	147.734.982,80	147.734.982,80	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.555.337.451,00	84.943.452.484,00	4.388.115.033,00	105,45		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	224.569.300,00	222.448.511,00	(2.120.789,00)	99,06		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.099.800,00	26.096.000,00	(3.800,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.099.800,00	26.096.000,00	(3.800,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.099.800,00	26.096.000,00	(3.800,00)	99,99		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.469.500,00	196.352.511,00	(2.116.989,00)	98,93		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	198.469.500,00	196.352.511,00	(2.116.989,00)	98,93		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.469.500,00	196.352.511,00	(2.116.989,00)	98,93		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.388.317.601,00	48.516.277.745,00	(3.872.039.856,00)	92,61		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.279.952.601,00	48.408.009.745,00	(3.871.942.856,00)	92,59		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.279.952.601,00	48.408.009.745,00	(3.871.942.856,00)	92,59		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	52.279.952.601,00	48.408.009.745,00	(3.871.942.856,00)	92,59		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.200.000,00	56.103.000,00	(97.000,00)	99,83		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	56.200.000,00	56.103.000,00	(97.000,00)	99,83		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.200.000,00	56.103.000,00	(97.000,00)	99,83		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52.165.000,00	52.165.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	52.165.000,00	52.165.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.165.000,00	52.165.000,00	0,00	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.363.000.000,00	3.362.892.450,00	(107.550,00)	100,00		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.363.000.000,00	3.362.892.450,00	(107.550,00)	100,00		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.363.000.000,00	3.362.892.450,00	(107.550,00)	100,00		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.363.000.000,00	3.362.892.450,00	(107.550,00)	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	708.649.500,00	705.687.374,00	(2.962.126,00)	99,58		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.937.500,00	186.909.125,00	(28.375,00)	99,98		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	186.937.500,00	186.909.125,00	(28.375,00)	99,98		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.937.500,00	186.909.125,00	(28.375,00)	99,98		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.125.000,00	78.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	78.125.000,00	78.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.125.000,00	78.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	90.000.000,00	89.926.000,00	(74.000,00)	99,92		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	89.926.000,00	(74.000,00)	99,92		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.926.000,00	(74.000,00)	99,92		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353.587.000,00	350.727.249,00	(2.859.751,00)	99,19		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	353.587.000,00	350.727.249,00	(2.859.751,00)	99,19		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.587.000,00	350.727.249,00	(2.859.751,00)	99,19		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	625.000.000,00	621.395.000,00	(3.605.000,00)	99,42		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000,00	399.950.000,00	(50.000,00)	99,99		
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	399.950.000,00	(50.000,00)	99,99		
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	399.950.000,00	(50.000,00)	99,99		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.000.000,00	221.445.000,00	(3.555.000,00)	98,42		
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	225.000.000,00	221.445.000,00	(3.555.000,00)	98,42		
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.000.000,00	221.445.000,00	(3.555.000,00)	98,42		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.332.000,00	138.184.764,00	(54.147.236,00)	71,85		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.000.000,00	114.143.041,00	(52.856.959,00)	68,35		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	167.000.000,00	114.143.041,00	(52.856.959,00)	68,35		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.000.000,00	114.143.041,00	(52.856.959,00)	68,35		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.800.000,00	12.509.723,00	(1.290.277,00)	90,65		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	12.509.723,00	(1.290.277,00)	90,65		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	12.509.723,00	(1.290.277,00)	90,65		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.532.000,00	11.532.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.532.000,00	11.532.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.532.000,00	11.532.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.301.550,00	576.139.800,00	(44.161.750,00)	92,88		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.120.000,00	254.908.750,00	(1.211.250,00)	99,53		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	256.120.000,00	254.908.750,00	(1.211.250,00)	99,53		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.120.000,00	254.908.750,00	(1.211.250,00)	99,53		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.750.000,00	52.746.000,00	(4.000,00)	99,99		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	52.750.000,00	52.746.000,00	(4.000,00)	99,99		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.750.000,00	52.746.000,00	(4.000,00)	99,99		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	311.431.550,00	268.485.050,00	(42.946.500,00)	86,21		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	34.331.150,00	12.100.000,00	(22.231.150,00)	35,24		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.331.150,00	12.100.000,00	(22.231.150,00)	35,24		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	277.100.400,00	256.385.050,00	(20.715.350,00)	92,52		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	277.100.400,00	256.385.050,00	(20.715.350,00)	92,52		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	22.433.167.500,00	30.800.426.840,00	8.367.259.340,00	137,30		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.433.167.500,00	30.800.426.840,00	8.367.259.340,00	137,30		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.986.190.000,00	28.555.360.254,00	8.569.170.254,00	142,88		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.986.190.000,00	28.555.360.254,00	8.569.170.254,00	142,88		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	2.446.977.500,00	2.245.066.586,00	(201.910.914,00)	91,75		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.879.977.500,00	1.727.133.586,00	(152.843.914,00)	91,87		
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	567.000.000,00	517.933.000,00	(49.067.000,00)	91,35		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	128.497.914.664,00	112.952.656.834,68	(15.545.257.829,32)	87,90		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	76.951.049.847,00	63.506.244.508,00	(15.444.805.339,00)	80,44		
02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	74.715.148.727,00	59.546.571.093,00	(15.168.577.634,00)	79,70		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.352.275.952,00	1.534.601.500,00	(817.674.452,00)	65,24		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.352.275.952,00	1.534.601.500,00	(817.674.452,00)	65,24		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	72.362.872.775,00	58.011.969.593,00	(14.350.903.182,00)	80,17		
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.157.633.875,00	15.947.659.434,00	(209.974.441,00)	98,70		
02.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.054.366.400,00	39.174.264.159,00	(13.880.102.241,00)	73,84		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.150.872.500,00	2.890.046.000,00	(260.826.500,00)	91,72		
02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	290.000.000,00	281.500.000,00	(8.500.000,00)	97,07		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	266.000.000,00	257.500.000,00	(8.500.000,00)	96,80		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.000.000,00	257.500.000,00	(8.500.000,00)	96,80		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	518.240.000,00	459.366.364,00	(58.873.636,00)	88,64		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	518.240.000,00	459.366.364,00	(58.873.636,00)	88,64		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.240.000,00	459.366.364,00	(58.873.636,00)	88,64		
02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	666.994.500,00	653.639.500,00	(13.355.000,00)	98,00		
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	666.994.500,00	653.639.500,00	(13.355.000,00)	98,00		
02.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	666.994.500,00	653.639.500,00	(13.355.000,00)	98,00		
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	827.661.120,00	719.630.000,00	(108.031.120,00)	86,95		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	0		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	0		
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	805.161.120,00	719.630.000,00	(85.531.120,00)	89,38		
02.2.01.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	805.161.120,00	719.630.000,00	(85.531.120,00)	89,38		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.833.005.500,00	1.750.622.487,00	(82.383.013,00)	95,51		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	1.833.005.500,00	1.750.622.487,00	(82.383.013,00)	95,51		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.833.005.500,00	1.750.622.487,00	(82.383.013,00)	95,51		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	50.000.000,00	44.915.064,00	(5.084.936,00)	89,83		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	44.915.064,00	(5.084.936,00)	89,83		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	44.915.064,00	(5.084.936,00)	89,83		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.938.698.707,00	40.942.634.391,68	3.935.684,68	100,01		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	104.950.000,00	104.344.395,00	(605.605,00)	99,42		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	104.950.000,00	104.344.395,00	(605.605,00)	99,42		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.950.000,00	104.344.395,00	(605.605,00)	99,42		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	104.950.000,00	101.878.593,00	(3.071.407,00)	97,07		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	104.950.000,00	101.878.593,00	(3.071.407,00)	97,07		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.950.000,00	101.878.593,00	(3.071.407,00)	97,07		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	104.950.000,00	104.774.816,00	(175.184,00)	99,83		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	104.950.000,00	104.774.816,00	(175.184,00)	99,83		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.950.000,00	104.774.816,00	(175.184,00)	99,83		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	99.892.250,00	98.490.600,00	(1.401.650,00)	98,60		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	99.892.250,00	98.490.600,00	(1.401.650,00)	98,60		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.892.250,00	98.490.600,00	(1.401.650,00)	98,60		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	104.950.000,00	103.790.100,00	(1.159.900,00)	98,89		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	104.950.000,00	103.790.100,00	(1.159.900,00)	98,89		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.950.000,00	103.790.100,00	(1.159.900,00)	98,89		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	58.325.000,00	58.025.000,00	(300.000,00)	99,49		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	58.325.000,00	58.025.000,00	(300.000,00)	99,49		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.325.000,00	58.025.000,00	(300.000,00)	99,49		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.000.000,00	49.951.580,00	(48.420,00)	99,90		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.951.580,00	(48.420,00)	99,90		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.951.580,00	(48.420,00)	99,90		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	102.086.000,00	100.925.600,00	(1.160.400,00)	98,86		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	102.086.000,00	100.925.600,00	(1.160.400,00)	98,86		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.086.000,00	100.925.600,00	(1.160.400,00)	98,86		
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	104.423.500,00	104.318.900,00	(104.600,00)	99,90		
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	104.423.500,00	104.318.900,00	(104.600,00)	99,90		
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.423.500,00	104.318.900,00	(104.600,00)	99,90		
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50.000.000,00	47.900.000,00	(2.100.000,00)	95,80		
02.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.900.000,00	(2.100.000,00)	95,80		
02.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.900.000,00	(2.100.000,00)	95,80		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.384.500,00	99.894.184,00	(1.490.316,00)	98,53		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	101.384.500,00	99.894.184,00	(1.490.316,00)	98,53		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.384.500,00	99.894.184,00	(1.490.316,00)	98,53		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.424.073.037,00	28.236.846.408,68	19.812.773.371,68	335,19		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	7.857.109.655,00	27.700.597.103,68	19.843.487.448,68	352,55		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.857.109.655,00	27.700.597.103,68	19.843.487.448,68	352,55		
02.2.02.26.5.2	BELANJA MODAL	566.963.382,00	536.249.305,00	(30.714.077,00)	94,58		
02.2.02.26.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	566.963.382,00	536.249.305,00	(30.714.077,00)	94,58		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.500.000.000,00	2.051.180.000,00	(448.820.000,00)	82,05		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000.000,00	2.051.180.000,00	(448.820.000,00)	82,05		
02.2.02.32.5.1.01	Belanja Pegawai	66.000.000,00	61.200.000,00	(4.800.000,00)	92,73		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.434.000.000,00	1.989.980.000,00	(444.020.000,00)	81,76		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	27.184.964.420,00	7.820.000.494,00	(19.364.963.926,00)	28,77		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	27.184.964.420,00	7.820.000.494,00	(19.364.963.926,00)	28,77		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.184.964.420,00	7.820.000.494,00	(19.364.963.926,00)	28,77		
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.473.750.000,00	1.490.664.721,00	16.914.721,00	101,15		
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	1.473.750.000,00	1.490.664.721,00	16.914.721,00	101,15		
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.473.750.000,00	1.490.664.721,00	16.914.721,00	101,15		
02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	100.000.000,00	99.700.000,00	(300.000,00)	99,70		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.700.000,00	(300.000,00)	99,70		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.700.000,00	(300.000,00)	99,70		
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	50.000.000,00	49.954.000,00	(46.000,00)	99,91		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.954.000,00	(46.000,00)	99,91		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.954.000,00	(46.000,00)	99,91		
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	294.600.000,00	223.626.369,00	(70.973.631,00)	75,91		
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	225.850.000,00	186.276.369,00	(39.573.631,00)	82,48		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	225.850.000,00	186.276.369,00	(39.573.631,00)	82,48		
02.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	130.560.000,00	101.400.000,00	(29.160.000,00)	77,67		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.290.000,00	84.876.369,00	(10.413.631,00)	89,07		
02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	68.750.000,00	37.350.000,00	(31.400.000,00)	54,33		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	68.750.000,00	37.350.000,00	(31.400.000,00)	54,33		
02.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.750.000,00	37.350.000,00	(31.400.000,00)	54,33		
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.313.566.110,00	8.280.151.566,00	(33.414.544,00)	99,60		
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	7.676.278.010,00	7.653.020.316,00	(23.257.694,00)	99,70		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.676.278.010,00	7.653.020.316,00	(23.257.694,00)	99,70		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.676.278.010,00	7.653.020.316,00	(23.257.694,00)	99,70		
02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	637.288.100,00	627.131.250,00	(10.156.850,00)	98,41		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	637.288.100,00	627.131.250,00	(10.156.850,00)	98,41		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	637.288.100,00	627.131.250,00	(10.156.850,00)	98,41		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.580.000.000,00	3.422.932.609,00	(157.067.391,00)	95,61		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	22.859.911,00	(2.140.089,00)	91,44		
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	25.000.000,00	22.859.911,00	(2.140.089,00)	91,44		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.859.911,00	(2.140.089,00)	91,44		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.859.911,00	(2.140.089,00)	91,44		
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.555.000.000,00	3.400.072.698,00	(154.927.302,00)	95,64		
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.555.000.000,00	3.400.072.698,00	(154.927.302,00)	95,64		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.779.087.200,00	2.735.602.698,00	(43.484.502,00)	98,44		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.779.087.200,00	2.735.602.698,00	(43.484.502,00)	98,44		
03.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	775.912.800,00	664.470.000,00	(111.442.800,00)	85,64		
03.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.375.000,00	274.970.000,00	(405.000,00)	99,85		
03.2.03.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.537.800,00	389.500.000,00	(111.037.800,00)	77,82		
04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	423.525.000,00	382.016.200,00	(41.508.800,00)	90,20		
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100.000.000,00	96.200.000,00	(3.800.000,00)	96,20		
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000,00	47.700.000,00	(2.300.000,00)	95,40		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.700.000,00	(2.300.000,00)	95,40		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.700.000,00	(2.300.000,00)	95,40		
04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000,00	48.500.000,00	(1.500.000,00)	97,00		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.500.000,00	(1.500.000,00)	97,00		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.500.000,00	(1.500.000,00)	97,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25.000.000,00	24.998.000,00	(2.000,00)	99,99		
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25.000.000,00	24.998.000,00	(2.000,00)	99,99		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.998.000,00	(2.000,00)	99,99		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.998.000,00	(2.000,00)	99,99		
04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	273.525.000,00	235.818.200,00	(37.706.800,00)	86,21		
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	273.525.000,00	235.818.200,00	(37.706.800,00)	86,21		
04.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	273.525.000,00	235.818.200,00	(37.706.800,00)	86,21		
04.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.525.000,00	235.818.200,00	(37.706.800,00)	86,21		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(195.702.947.763,00)	(150.538.512.947,68)	45.164.434.815,32	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(195.702.947.763,00)	(150.538.512.947,68)	45.164.434.815,32	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SKPD
: 1-03.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01.001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	100.924.591.025,00	99.426.720.937,91	(1.497.870.087,09)	98,52		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.554.014.927,00	4.530.517.976,00	(23.496.951,00)	99,48		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.251.500,00	87.953.250,00	(298.250,00)	99,66		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.251.500,00	7.991.500,00	(260.000,00)	96,85		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.251.500,00	7.991.500,00	(260.000,00)	96,85		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.251.500,00	7.991.500,00	(260.000,00)	96,85		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.000.000,00	79.961.750,00	(38.250,00)	99,95		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.961.750,00	(38.250,00)	99,95		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.961.750,00	(38.250,00)	99,95		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.236.475.986,00	3.215.463.913,00	(21.012.073,00)	99,35		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.109.083.086,00	3.088.463.263,00	(20.619.823,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.109.083.086,00	3.088.463.263,00	(20.619.823,00)	99,34		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.109.083.086,00	3.088.463.263,00	(20.619.823,00)	99,34		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.150.900,00	98.950.900,00	(200.000,00)	99,80		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	99.150.900,00	98.950.900,00	(200.000,00)	99,80		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	96.360.000,00	96.160.000,00	(200.000,00)	99,79		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.790.900,00	2.790.900,00	0,00	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.242.000,00	8.242.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.242.000,00	8.242.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.242.000,00	8.242.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000,00	19.807.750,00	(192.250,00)	99,04		
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.807.750,00	(192.250,00)	99,04		
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.807.750,00	(192.250,00)	99,04		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	833.545.350,00	833.060.653,00	(484.697,00)	99,94		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.619.100,00	221.421.250,00	(197.850,00)	99,91		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	221.619.100,00	221.421.250,00	(197.850,00)	99,91		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.619.100,00	221.421.250,00	(197.850,00)	99,91		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.988.750,00	59.988.750,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	59.988.750,00	59.988.750,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.988.750,00	59.988.750,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.085.500,00	57.085.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	57.085.500,00	57.085.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.085.500,00	57.085.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	55.000.000,00	54.964.250,00	(35.750,00)	99,94		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.964.250,00	(35.750,00)	99,94		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.964.250,00	(35.750,00)	99,94		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	431.852.000,00	431.600.903,00	(251.097,00)	99,94		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	431.852.000,00	431.600.903,00	(251.097,00)	99,94		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.852.000,00	431.600.903,00	(251.097,00)	99,94		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.668.525,00	236.202.444,00	(1.466.081,00)	99,38		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.299.975,00	182.833.894,00	(1.466.081,00)	99,20		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	184.299.975,00	182.833.894,00	(1.466.081,00)	99,20		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.299.975,00	182.833.894,00	(1.466.081,00)	99,20		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.368.550,00	53.368.550,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	53.368.550,00	53.368.550,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.368.550,00	53.368.550,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.073.566,00	157.837.716,00	(235.850,00)	99,85		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.998.950,00	58.763.450,00	(235.500,00)	99,60		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	58.998.950,00	58.763.450,00	(235.500,00)	99,60		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.998.950,00	58.763.450,00	(235.500,00)	99,60		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.001.266,00	69.001.266,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	69.001.266,00	69.001.266,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.001.266,00	69.001.266,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.630.000,00	15.630.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.630.000,00	15.630.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.630.000,00	15.630.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.443.350,00	14.443.000,00	(350,00)	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	14.443.350,00	14.443.000,00	(350,00)	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.443.350,00	14.443.000,00	(350,00)	100,00		
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.881.157.128,00	5.599.568.257,29	(281.588.870,71)	95,21		
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	610.010.628,00	510.515.000,00	(99.495.628,00)	83,69		
02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	610.010.628,00	510.515.000,00	(99.495.628,00)	83,69		
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	579.510.628,00	480.015.000,00	(99.495.628,00)	82,83		
02.2.01.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	579.510.628,00	480.015.000,00	(99.495.628,00)	82,83		
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.271.146.500,00	5.089.053.257,29	(182.093.242,71)	96,55		
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	274.823.500,00	272.496.512,00	(2.326.988,00)	99,15		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	274.823.500,00	272.496.512,00	(2.326.988,00)	99,15		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.823.500,00	272.496.512,00	(2.326.988,00)	99,15		
02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.996.323.000,00	4.816.556.745,29	(179.766.254,71)	96,40		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	249.816.150,00	247.703.000,00	(2.113.150,00)	99,15		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.816.150,00	247.703.000,00	(2.113.150,00)	99,15		
02.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	4.746.506.850,00	4.568.853.745,29	(177.653.104,71)	96,26		
02.2.02.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.746.506.850,00	4.568.853.745,29	(177.653.104,71)	96,26		
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	300.925.500,00	257.807.637,95	(43.117.862,05)	85,67		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	300.925.500,00	257.807.637,95	(43.117.862,05)	85,67		
03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	43.472.000,00	42.433.167,00	(1.038.833,00)	97,61		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	43.472.000,00	42.433.167,00	(1.038.833,00)	97,61		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.472.000,00	42.433.167,00	(1.038.833,00)	97,61		
03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	175.000.000,00	133.563.470,95	(41.436.529,05)	76,32		
03.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	175.000.000,00	133.563.470,95	(41.436.529,05)	76,32		
03.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.000.000,00	133.563.470,95	(41.436.529,05)	76,32		
03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	74.953.500,00	74.311.000,00	(642.500,00)	99,14		
03.2.01.19.5.2	BELANJA MODAL	74.953.500,00	74.311.000,00	(642.500,00)	99,14		
03.2.01.19.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.953.500,00	74.311.000,00	(642.500,00)	99,14		
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.355.142.000,00	2.353.736.000,00	(1.406.000,00)	99,94		
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.355.142.000,00	2.353.736.000,00	(1.406.000,00)	99,94		
05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00		
05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.175.142.000,00	2.175.142.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	2.125.142.000,00	2.125.142.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.125.142.000,00	2.125.142.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	80.000.000,00	79.594.000,00	(406.000,00)	99,49		
05.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	80.000.000,00	79.594.000,00	(406.000,00)	99,49		
05.2.01.16.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.000.000,00	79.594.000,00	(406.000,00)	99,49		
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	190.014.270,00	188.573.000,00	(1.441.270,00)	99,24		
06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	190.014.270,00	188.573.000,00	(1.441.270,00)	99,24		
06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	190.014.270,00	188.573.000,00	(1.441.270,00)	99,24		
06.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	190.014.270,00	188.573.000,00	(1.441.270,00)	99,24		
06.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	190.014.270,00	188.573.000,00	(1.441.270,00)	99,24		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	441.336.800,00	353.948.800,00	(87.388.000,00)	80,20		
07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	441.336.800,00	353.948.800,00	(87.388.000,00)	80,20		
07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	416.245.300,00	328.857.300,00	(87.388.000,00)	79,01		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.105.000,00	72.105.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.105.000,00	72.105.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	344.140.300,00	256.752.300,00	(87.388.000,00)	74,61		
07.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	344.140.300,00	256.752.300,00	(87.388.000,00)	74,61		
07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.091.500,00	25.091.500,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	25.091.500,00	25.091.500,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.091.500,00	25.091.500,00	0,00	100,00		
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	170.442.250,00	170.442.250,00	0,00	100,00		
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	170.442.250,00	170.442.250,00	0,00	100,00		
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	29.781.250,00	29.781.250,00	0,00	100,00		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.781.250,00	29.781.250,00	0,00	100,00		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.781.250,00	29.781.250,00	0,00	100,00		
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	117.361.000,00	117.361.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	117.361.000,00	117.361.000,00	0,00	100,00		
08.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.361.000,00	117.361.000,00	0,00	100,00		
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	9.427.363.100,00	9.086.965.100,00	(340.398.000,00)	96,39		
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	9.427.363.100,00	9.086.965.100,00	(340.398.000,00)	96,39		
09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	9.303.988.100,00	8.976.265.100,00	(327.723.000,00)	96,48		
09.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	615.750.000,00	295.165.000,00	(320.585.000,00)	47,94		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
09.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.750.000,00	295.165.000,00	(320.585.000,00)	47,94		
09.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	8.688.238.100,00	8.681.100.100,00	(7.138.000,00)	99,92		
09.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.688.238.100,00	8.681.100.100,00	(7.138.000,00)	99,92		
09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	123.375.000,00	110.700.000,00	(12.675.000,00)	89,73		
09.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	123.375.000,00	110.700.000,00	(12.675.000,00)	89,73		
09.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.375.000,00	110.700.000,00	(12.675.000,00)	89,73		
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	77.129.043.300,00	76.411.793.969,67	(717.249.330,33)	99,07		
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	77.129.043.300,00	76.411.793.969,67	(717.249.330,33)	99,07		
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	546.890.000,00	483.931.625,67	(62.958.374,33)	88,49		
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	546.890.000,00	483.931.625,67	(62.958.374,33)	88,49		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.890.000,00	483.931.625,67	(62.958.374,33)	88,49		
10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.079.841.000,00	1.255.184.000,00	175.343.000,00	116,24		
10.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.079.841.000,00	1.255.184.000,00	175.343.000,00	116,24		
10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.079.841.000,00	1.255.184.000,00	175.343.000,00	116,24		
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	3.461.200.000,00	3.398.915.000,00	(62.285.000,00)	98,20		
10.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	3.211.200.000,00	3.148.915.000,00	(62.285.000,00)	98,06		
10.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.211.200.000,00	3.148.915.000,00	(62.285.000,00)	98,06		
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	58.837.371.300,00	58.157.802.344,00	(679.568.956,00)	98,85		
10.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.497.693.480,00	2.146.474.938,00	(351.218.542,00)	85,94		
10.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.497.693.480,00	2.146.474.938,00	(351.218.542,00)	85,94		
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	56.339.677.820,00	56.011.327.406,00	(328.350.414,00)	99,42		
10.2.01.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.720.000,00	223.720.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.092.837.820,00	55.764.487.406,00	(328.350.414,00)	99,41		
10.2.01.08.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.120.000,00	23.120.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	12.841.741.000,00	12.759.445.000,00	(82.296.000,00)	99,36		
10.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	309.000.000,00	309.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.000.000,00	309.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	12.532.741.000,00	12.450.445.000,00	(82.296.000,00)	99,34		
10.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.532.741.000,00	12.450.445.000,00	(82.296.000,00)	99,34		
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	244.800.000,00	239.445.000,00	(5.355.000,00)	97,81		
10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	244.800.000,00	239.445.000,00	(5.355.000,00)	97,81		
10.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.800.000,00	239.445.000,00	(5.355.000,00)	97,81		
10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	117.200.000,00	117.071.000,00	(129.000,00)	99,89		
10.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	117.200.000,00	117.071.000,00	(129.000,00)	99,89		
10.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.200.000,00	117.071.000,00	(129.000,00)	99,89		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	109.401.750,00	108.791.004,00	(610.746,00)	99,44		
11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	53.008.000,00	52.397.254,00	(610.746,00)	98,85		
11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	53.008.000,00	52.397.254,00	(610.746,00)	98,85		
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	53.008.000,00	52.397.254,00	(610.746,00)	98,85		
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.008.000,00	52.397.254,00	(610.746,00)	98,85		
11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	56.393.750,00	56.393.750,00	0,00	100,00		
11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	56.393.750,00	56.393.750,00	0,00	100,00		
11.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	56.393.750,00	56.393.750,00	0,00	100,00		
11.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.393.750,00	56.393.750,00	0,00	100,00		
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	365.750.000,00	364.576.943,00	(1.173.057,00)	99,68		
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	365.750.000,00	364.576.943,00	(1.173.057,00)	99,68		
12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	365.750.000,00	364.576.943,00	(1.173.057,00)	99,68		
12.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	365.750.000,00	364.576.943,00	(1.173.057,00)	99,68		
12.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.750.000,00	364.576.943,00	(1.173.057,00)	99,68		
	SURPLUS / DEFISIT	(100.924.591.025,00)	(99.426.720.937,91)	1.497.870.087,09	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(100.924.591.025,00)	(99.426.720.937,91)	1.497.870.087,09	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SKPD : 1-04.2-10.0-00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Unit Organisasi : 1-04.2-10.0-00.01.001 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	35.765.142.251,00	26.664.469.370,00	(9.100.672.881,00)	74,55		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.665.462.951,00	2.523.702.870,00	(141.760.081,00)	94,68		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.150.000,00	95.150.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.150.000,00	80.150.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	80.150.000,00	80.150.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.150.000,00	80.150.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.753.275.201,00	1.709.537.508,00	(43.737.693,00)	97,51		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.695.275.201,00	1.659.173.508,00	(36.101.693,00)	97,87		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.695.275.201,00	1.659.173.508,00	(36.101.693,00)	97,87		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.695.275.201,00	1.659.173.508,00	(36.101.693,00)	97,87		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.000.000,00	50.364.000,00	(1.636.000,00)	96,85		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	50.364.000,00	(1.636.000,00)	96,85		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	1.764.000,00	(1.636.000,00)	51,88		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.373.000,00	64.257.724,00	(1.115.276,00)	98,29		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.373.000,00	64.257.724,00	(1.115.276,00)	98,29		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	65.373.000,00	64.257.724,00	(1.115.276,00)	98,29		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.373.000,00	64.257.724,00	(1.115.276,00)	98,29		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.656.000,00	481.162.923,00	(68.493.077,00)	87,54		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.497.500,00	3.497.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.497.500,00	3.497.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.497.500,00	3.497.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.125.000,00	59.518.000,00	(1.607.000,00)	97,37		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	61.125.000,00	59.518.000,00	(1.607.000,00)	97,37		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.125.000,00	59.518.000,00	(1.607.000,00)	97,37		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.438.000,00	101.794.000,00	(36.644.000,00)	73,53		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	138.438.000,00	101.794.000,00	(36.644.000,00)	73,53		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.438.000,00	101.794.000,00	(36.644.000,00)	73,53		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.765.500,00	51.167.500,00	(23.598.000,00)	68,44		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	74.765.500,00	51.167.500,00	(23.598.000,00)	68,44		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.765.500,00	51.167.500,00	(23.598.000,00)	68,44		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.830.000,00	265.185.923,00	(6.644.077,00)	97,56		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	271.830.000,00	265.185.923,00	(6.644.077,00)	97,56		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.830.000,00	265.185.923,00	(6.644.077,00)	97,56		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.950.000,00	625.000,00	(7.325.000,00)	7,86		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.950.000,00	625.000,00	(7.325.000,00)	7,86		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	7.325.000,00	0,00	(7.325.000,00)	0		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.325.000,00	0,00	(7.325.000,00)	0		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.188.750,00	82.584.715,00	(17.604.035,00)	82,43		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	3.550.000,00	(2.450.000,00)	59,17		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	3.550.000,00	(2.450.000,00)	59,17		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.550.000,00	(2.450.000,00)	59,17		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000,00	37.503.465,00	(5.696.535,00)	86,81		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	43.200.000,00	37.503.465,00	(5.696.535,00)	86,81		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	37.503.465,00	(5.696.535,00)	86,81		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	13.800.000,00	(1.200.000,00)	92,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.800.000,00	(1.200.000,00)	92,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.800.000,00	(1.200.000,00)	92,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.988.750,00	27.731.250,00	(8.257.500,00)	77,06		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.863.750,00	27.731.250,00	(5.132.500,00)	84,38		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.863.750,00	27.731.250,00	(5.132.500,00)	84,38		
01.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL	3.125.000,00	0,00	(3.125.000,00)	0		
01.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.125.000,00	0,00	(3.125.000,00)	0		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.070.000,00	84.585.000,00	(3.485.000,00)	96,04		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.140.000,00	56.655.000,00	(3.485.000,00)	94,21		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	60.140.000,00	56.655.000,00	(3.485.000,00)	94,21		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.140.000,00	56.655.000,00	(3.485.000,00)	94,21		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6.791.786.000,00	5.150.491.000,00	(1.641.295.000,00)	75,83		
02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.586.786.000,00	4.945.491.000,00	(1.641.295.000,00)	75,08		
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	847.325.000,00	100.000.000,00	(747.325.000,00)	11,80		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	847.325.000,00	100.000.000,00	(747.325.000,00)	11,80		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.325.000,00	100.000.000,00	(747.325.000,00)	11,80		
02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	5.719.461.000,00	4.825.491.000,00	(893.970.000,00)	84,37		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.719.461.000,00	4.825.491.000,00	(893.970.000,00)	84,37		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.461.000,00	72.536.000,00	(66.925.000,00)	52,01		
02.2.03.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.580.000.000,00	4.752.955.000,00	(827.045.000,00)	85,18		
02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	16.141.081.000,00	10.865.781.500,00	(5.275.299.500,00)	67,32		
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	135.000.000,00	50.000.000,00	(85.000.000,00)	37,04		
03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0		
03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	125.000.000,00	50.000.000,00	(75.000.000,00)	40,00		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	50.000.000,00	(75.000.000,00)	40,00		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	50.000.000,00	(75.000.000,00)	40,00		
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	16.006.081.000,00	10.815.781.500,00	(5.190.299.500,00)	67,57		
03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	15.736.081.000,00	10.545.781.500,00	(5.190.299.500,00)	67,02		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.676.206.000,00	10.486.618.500,00	(5.189.587.500,00)	66,90		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.784.406.000,00	656.818.500,00	(1.127.587.500,00)	36,81		
03.2.03.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.891.800.000,00	9.829.800.000,00	(4.062.000.000,00)	70,76		
03.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	59.875.000,00	59.163.000,00	(712.000,00)	98,81		
03.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.875.000,00	59.163.000,00	(712.000,00)	98,81		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	50.000.000,00	43.400.000,00	(6.600.000,00)	86,80		
04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	43.400.000,00	(6.600.000,00)	86,80		
04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	43.400.000,00	(6.600.000,00)	86,80		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	43.400.000,00	(6.600.000,00)	86,80		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	43.400.000,00	(6.600.000,00)	86,80		
05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.986.851.775,00	7.871.370.500,00	(1.115.481.275,00)	87,59		
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	8.986.851.775,00	7.871.370.500,00	(1.115.481.275,00)	87,59		
05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.934.276.775,00	7.818.795.500,00	(1.115.481.275,00)	87,51		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	130.695.444,00	0,00	(130.695.444,00)	0		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.695.444,00	0,00	(130.695.444,00)	0		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	8.803.581.331,00	7.818.795.500,00	(984.785.831,00)	88,81		
05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.950.000,00	0,00	(178.950.000,00)	0		
05.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
05.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.574.631.331,00	7.818.795.500,00	(755.835.831,00)	91,19		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.079.960.525,00	159.723.500,00	(920.237.025,00)	14,79		
05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.079.960.525,00	159.723.500,00	(920.237.025,00)	14,79		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.079.960.525,00	159.723.500,00	(920.237.025,00)	14,79		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	511.836.000,00	159.723.500,00	(352.112.500,00)	31,21		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.836.000,00	159.723.500,00	(352.112.500,00)	31,21		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	568.124.525,00	0,00	(568.124.525,00)	0		
05.2.01.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	568.124.525,00	0,00	(568.124.525,00)	0		
07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(35.765.142.251,00)	(26.664.469.370,00)	9.100.672.881,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(35.765.142.251,00)	(26.664.469.370,00)	9.100.672.881,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.8-01.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Unit Organisasi : 1-05.8-01.0-00.01.001 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	19.756.467.429,00	6.246.612.854,00	(13.509.854.575,00)	31,62		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.434.072.052,00	2.234.225.562,00	(199.846.490,00)	91,79		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.827.022.052,00	1.770.801.055,00	(56.220.997,00)	96,92		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.802.022.052,00	1.746.007.305,00	(56.014.747,00)	96,89		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.802.022.052,00	1.746.007.305,00	(56.014.747,00)	96,89		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.802.022.052,00	1.746.007.305,00	(56.014.747,00)	96,89		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000,00	24.793.750,00	(206.250,00)	99,18		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.793.750,00	(206.250,00)	99,18		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	7.993.750,00	(206.250,00)	97,48		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.650.000,00	260.687.535,00	(118.962.465,00)	68,67		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.000.000,00	38.915.750,00	(17.084.250,00)	69,49		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000,00	38.915.750,00	(17.084.250,00)	69,49		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	38.915.750,00	(17.084.250,00)	69,49		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.780.000,00	43.229.000,00	(1.551.000,00)	96,54		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	44.780.000,00	43.229.000,00	(1.551.000,00)	96,54		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.780.000,00	43.229.000,00	(1.551.000,00)	96,54		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.500.000,00	19.045.625,00	(1.454.375,00)	92,91		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	20.500.000,00	19.045.625,00	(1.454.375,00)	92,91		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	19.045.625,00	(1.454.375,00)	92,91		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.620.000,00	46.687.000,00	(32.933.000,00)	58,64		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	79.620.000,00	46.687.000,00	(32.933.000,00)	58,64		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.620.000,00	46.687.000,00	(32.933.000,00)	58,64		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000,00	109.060.160,00	(65.939.840,00)	62,32		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	109.060.160,00	(65.939.840,00)	62,32		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	109.060.160,00	(65.939.840,00)	62,32		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.800.000,00	123.033.222,00	(7.766.778,00)	94,06		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	52.233.222,00	(7.766.778,00)	87,06		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	52.233.222,00	(7.766.778,00)	87,06		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	52.233.222,00	(7.766.778,00)	87,06		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.100.000,00	44.203.750,00	(16.896.250,00)	72,35		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000,00	16.285.000,00	(5.715.000,00)	74,02		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	16.285.000,00	(5.715.000,00)	74,02		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	16.285.000,00	(5.715.000,00)	74,02		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	23.818.750,00	(11.181.250,00)	68,05		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	25.625.000,00	14.443.750,00	(11.181.250,00)	56,37		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.625.000,00	14.443.750,00	(11.181.250,00)	56,37		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	254.000.000,00	243.773.160,00	(10.226.840,00)	95,97		
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	254.000.000,00	243.773.160,00	(10.226.840,00)	95,97		
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000,00	48.998.660,00	(1.001.340,00)	98,00		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.998.660,00	(1.001.340,00)	98,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.998.660,00	(1.001.340,00)	98,00		
02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	104.000.000,00	94.775.000,00	(9.225.000,00)	91,13		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	104.000.000,00	94.775.000,00	(9.225.000,00)	91,13		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	94.775.000,00	(9.225.000,00)	91,13		
02.2.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100.000.000,00	99.999.500,00	(500,00)	100,00		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.999.500,00	(500,00)	100,00		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.999.500,00	(500,00)	100,00		
03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	13.508.413.377,00	523.286.902,00	(12.985.126.475,00)	3,87		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	13.508.413.377,00	523.286.902,00	(12.985.126.475,00)	3,87		
03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	165.632.000,00	57.662.700,00	(107.969.300,00)	34,81		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
		165.632.000,00	57.662.700,00	(107.969.300,00)	34,81		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	165.632.000,00	57.662.700,00	(107.969.300,00)	34,81		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.342.781.377,00	465.624.202,00	(12.877.157.175,00)	3,49		
03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.342.781.377,00	465.624.202,00	(12.877.157.175,00)	3,49		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	46.164.700,00	(3.835.300,00)	92,33		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.292.781.377,00	419.459.502,00	(12.873.321.875,00)	3,16		
03.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	113.209.000,00	88.546.980,00	(24.662.020,00)	78,22		
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	113.209.000,00	88.546.980,00	(24.662.020,00)	78,22		
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	83.209.000,00	58.846.980,00	(24.362.020,00)	70,72		
04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	83.209.000,00	58.846.980,00	(24.362.020,00)	70,72		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.209.000,00	58.846.980,00	(24.362.020,00)	70,72		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00		
04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.700.000,00	433.941.000,00	(32.759.000,00)	92,98		
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	466.700.000,00	433.941.000,00	(32.759.000,00)	92,98		
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	400.000.000,00	368.041.000,00	(31.959.000,00)	92,01		
05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400.000.000,00	368.041.000,00	(31.959.000,00)	92,01		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	368.041.000,00	(31.959.000,00)	92,01		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	66.700.000,00	65.900.000,00	(800.000,00)	98,80		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	66.700.000,00	65.900.000,00	(800.000,00)	98,80		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.700.000,00	65.900.000,00	(800.000,00)	98,80		
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.980.073.000,00	2.722.839.250,00	(257.233.750,00)	91,37		
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.980.073.000,00	2.722.839.250,00	(257.233.750,00)	91,37		
06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	386.974.000,00	280.570.000,00	(106.404.000,00)	72,50		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	386.974.000,00	280.570.000,00	(106.404.000,00)	72,50		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.974.000,00	280.570.000,00	(106.404.000,00)	72,50		
06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	168.600.000,00	29.900.000,00	(138.700.000,00)	17,73		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	168.600.000,00	29.900.000,00	(138.700.000,00)	17,73		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.600.000,00	29.900.000,00	(138.700.000,00)	17,73		
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.321.549.000,00	2.319.775.500,00	(1.773.500,00)	99,92		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.321.549.000,00	2.319.775.500,00	(1.773.500,00)	99,92		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.321.549.000,00	2.319.775.500,00	(1.773.500,00)	99,92		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	102.950.000,00	92.593.750,00	(10.356.250,00)	89,94		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	102.950.000,00	92.593.750,00	(10.356.250,00)	89,94		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.950.000,00	92.593.750,00	(10.356.250,00)	89,94		
	SURPLUS / DEFISIT	(19.756.467.429,00)	(6.246.612.854,00)	13.509.854.575,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(19.756.467.429,00)	(6.246.612.854,00)	13.509.854.575,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.0-00.0-00.02 Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.02.001 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.776.541.460,00	5.725.021.534,00	(51.519.926,00)	99,11		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.048.203.710,00	5.019.519.912,00	(28.683.798,00)	99,43		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.045.819.210,00	3.027.762.197,00	(18.057.013,00)	99,41		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.996.543.210,00	2.983.286.197,00	(13.257.013,00)	99,56		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.996.543.210,00	2.983.286.197,00	(13.257.013,00)	99,56		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.996.543.210,00	2.983.286.197,00	(13.257.013,00)	99,56		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.276.000,00	44.476.000,00	(4.800.000,00)	90,26		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	49.276.000,00	44.476.000,00	(4.800.000,00)	90,26		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	25.800.000,00	21.000.000,00	(4.800.000,00)	81,40		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.476.000,00	23.476.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	574.414.500,00	571.219.298,00	(3.195.202,00)	99,44		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.992.000,00	7.990.000,00	(2.000,00)	99,97		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.992.000,00	7.990.000,00	(2.000,00)	99,97		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.992.000,00	7.990.000,00	(2.000,00)	99,97		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	343.003.500,00	342.785.500,00	(218.000,00)	99,94		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	343.003.500,00	342.785.500,00	(218.000,00)	99,94		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.003.500,00	342.785.500,00	(218.000,00)	99,94		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.436.000,00	27.436.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	27.436.000,00	27.436.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.436.000,00	27.436.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.983.000,00	193.007.798,00	(2.975.202,00)	98,48		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	195.983.000,00	193.007.798,00	(2.975.202,00)	98,48		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.983.000,00	193.007.798,00	(2.975.202,00)	98,48		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.232.623.000,00	1.225.721.842,00	(6.901.158,00)	99,44		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000,00	11.698.842,00	(6.901.158,00)	62,90		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.600.000,00	11.698.842,00	(6.901.158,00)	62,90		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	11.698.842,00	(6.901.158,00)	62,90		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.214.023.000,00	1.214.023.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.214.023.000,00	1.214.023.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.214.023.000,00	1.214.023.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.347.000,00	194.816.575,00	(530.425,00)	99,73		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.448.000,00	183.467.575,00	19.575,00	100,01		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	183.448.000,00	183.467.575,00	19.575,00	100,01		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.448.000,00	183.467.575,00	19.575,00	100,01		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.999.000,00	4.449.000,00	(550.000,00)	89,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	4.999.000,00	4.449.000,00	(550.000,00)	89,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.000,00	4.449.000,00	(550.000,00)	89,00		
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	728.337.750,00	705.501.622,00	(22.836.128,00)	96,86		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	653.347.000,00	643.790.000,00	(9.557.000,00)	98,54		
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100.000.000,00	98.475.000,00	(1.525.000,00)	98,48		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.475.000,00	(1.525.000,00)	98,48		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.475.000,00	(1.525.000,00)	98,48		
02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	224.130.000,00	219.248.000,00	(4.882.000,00)	97,82		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	224.130.000,00	219.248.000,00	(4.882.000,00)	97,82		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.130.000,00	219.248.000,00	(4.882.000,00)	97,82		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.400.000,00	(600.000,00)	97,00		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.400.000,00	(600.000,00)	97,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.400.000,00	(600.000,00)	97,00		
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	289.975.000,00	289.975.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	289.975.000,00	289.975.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.975.000,00	289.975.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	19.242.000,00	16.692.000,00	(2.550.000,00)	86,75		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.242.000,00	16.692.000,00	(2.550.000,00)	86,75		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.242.000,00	16.692.000,00	(2.550.000,00)	86,75		
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	49.990.750,00	43.258.022,00	(6.732.728,00)	86,53		
02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	19.991.250,00	17.234.272,00	(2.756.978,00)	86,21		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.991.250,00	17.234.272,00	(2.756.978,00)	86,21		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.991.250,00	17.234.272,00	(2.756.978,00)	86,21		
02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	29.999.500,00	26.023.750,00	(3.975.750,00)	86,75		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	29.999.500,00	26.023.750,00	(3.975.750,00)	86,75		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.500,00	26.023.750,00	(3.975.750,00)	86,75		
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	25.000.000,00	18.453.600,00	(6.546.400,00)	73,81		
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	25.000.000,00	18.453.600,00	(6.546.400,00)	73,81		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	18.453.600,00	(6.546.400,00)	73,81		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	18.453.600,00	(6.546.400,00)	73,81		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.776.541.460,00)	(5.725.021.534,00)	51.519.926,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.776.541.460,00)	(5.725.021.534,00)	51.519.926,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.0-00.0-00.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.03.001 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.764.226.250,00	3.276.295.635,00	(1.487.930.615,00)	68,77		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.221.366.000,00	2.179.649.435,00	(41.716.565,00)	98,12		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.596.027.100,00	1.572.944.835,00	(23.082.265,00)	98,55		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.552.227.100,00	1.529.144.835,00	(23.082.265,00)	98,51		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.552.227.100,00	1.529.144.835,00	(23.082.265,00)	98,51		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.552.227.100,00	1.529.144.835,00	(23.082.265,00)	98,51		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.207.500,00	289.175.805,00	(7.031.695,00)	97,63		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.055.500,00	66.704.505,00	(3.350.995,00)	95,22		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	70.055.500,00	66.704.505,00	(3.350.995,00)	95,22		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.055.500,00	66.704.505,00	(3.350.995,00)	95,22		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.209.000,00	29.450.000,00	(759.000,00)	97,49		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.209.000,00	29.450.000,00	(759.000,00)	97,49		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.209.000,00	29.450.000,00	(759.000,00)	97,49		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.768.000,00	188.846.300,00	(2.921.700,00)	98,48		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	191.768.000,00	188.846.300,00	(2.921.700,00)	98,48		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.768.000,00	188.846.300,00	(2.921.700,00)	98,48		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.150.000,00	55.950.795,00	(11.199.205,00)	83,32		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	24.800.795,00	(11.199.205,00)	68,89		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	24.800.795,00	(11.199.205,00)	68,89		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	24.800.795,00	(11.199.205,00)	68,89		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.981.400,00	261.578.000,00	(403.400,00)	99,85		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.866.400,00	215.520.000,00	(346.400,00)	99,84		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	215.866.400,00	215.520.000,00	(346.400,00)	99,84		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.866.400,00	215.520.000,00	(346.400,00)	99,84		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.005.000,00	38.978.000,00	(27.000,00)	99,93		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	39.005.000,00	38.978.000,00	(27.000,00)	99,93		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.005.000,00	38.978.000,00	(27.000,00)	99,93		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.110.000,00	7.080.000,00	(30.000,00)	99,58		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	7.110.000,00	7.080.000,00	(30.000,00)	99,58		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	7.080.000,00	(30.000,00)	99,58		
03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.542.860.250,00	1.096.646.200,00	(1.446.214.050,00)	43,13		
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000,00	49.775.000,00	(225.000,00)	99,55		
03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	50.000.000,00	49.775.000,00	(225.000,00)	99,55		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.775.000,00	(225.000,00)	99,55		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.775.000,00	(225.000,00)	99,55		
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	156.494.000,00	155.117.900,00	(1.376.100,00)	99,12		
03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	105.994.000,00	105.832.900,00	(161.100,00)	99,85		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	105.994.000,00	105.832.900,00	(161.100,00)	99,85		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.994.000,00	105.832.900,00	(161.100,00)	99,85		
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.500.000,00	49.285.000,00	(1.215.000,00)	97,59		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.500.000,00	49.285.000,00	(1.215.000,00)	97,59		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	49.285.000,00	(1.215.000,00)	97,59		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.336.366.250,00	891.753.300,00	(1.444.612.950,00)	38,17		
03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	2.336.366.250,00	891.753.300,00	(1.444.612.950,00)	38,17		
03.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.336.366.250,00	891.753.300,00	(1.444.612.950,00)	38,17		
03.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.336.366.250,00	891.753.300,00	(1.444.612.950,00)	38,17		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.764.226.250,00)	(3.276.295.635,00)	1.487.930.615,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.764.226.250,00)	(3.276.295.635,00)	1.487.930.615,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.0-00.0-00.04 Dinas Pemadam Kebakaran Unit

Organisasi : 1-05.0-00.0-00.04.000 Dinas Pemadam Kebakaran

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	869.831.625,00	863.096.318,00	(6.735.307,00)	99,23		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	693.949.875,00	689.268.218,00	(4.681.657,00)	99,33		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.829.875,00	200.054.605,00	(775.270,00)	99,61		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.162.500,00	4.162.000,00	(500,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.162.500,00	4.162.000,00	(500,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.162.500,00	4.162.000,00	(500,00)	99,99		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.526.875,00	52.400.125,00	(126.750,00)	99,76		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	52.526.875,00	52.400.125,00	(126.750,00)	99,76		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.526.875,00	52.400.125,00	(126.750,00)	99,76		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.805.500,00	23.805.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.805.500,00	23.805.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.805.500,00	23.805.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.335.000,00	119.686.980,00	(648.020,00)	99,46		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	120.335.000,00	119.686.980,00	(648.020,00)	99,46		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.335.000,00	119.686.980,00	(648.020,00)	99,46		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.875.000,00	113.217.000,00	(658.000,00)	99,42		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.375.000,00	54.717.000,00	(658.000,00)	98,81		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	55.375.000,00	54.717.000,00	(658.000,00)	98,81		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.375.000,00	54.717.000,00	(658.000,00)	98,81		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.792.500,00	56.486.613,00	(1.305.887,00)	97,74		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.820.000,00	19.514.113,00	(1.305.887,00)	93,73		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.820.000,00	19.514.113,00	(1.305.887,00)	93,73		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.820.000,00	19.514.113,00	(1.305.887,00)	93,73		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.022.500,00	31.022.500,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	31.022.500,00	31.022.500,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.022.500,00	31.022.500,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.652.500,00	287.710.000,00	(1.942.500,00)	99,33		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.652.500,00	91.710.000,00	(1.942.500,00)	97,93		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	93.652.500,00	91.710.000,00	(1.942.500,00)	97,93		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.652.500,00	91.710.000,00	(1.942.500,00)	97,93		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	175.881.750,00	173.828.100,00	(2.053.650,00)	98,83		
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	101.248.750,00	100.745.500,00	(503.250,00)	99,50		
04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.504.750,00	36.384.500,00	(120.250,00)	99,67		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.504.750,00	36.384.500,00	(120.250,00)	99,67		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.504.750,00	36.384.500,00	(120.250,00)	99,67		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	64.744.000,00	64.361.000,00	(383.000,00)	99,41		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	64.744.000,00	64.361.000,00	(383.000,00)	99,41		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.744.000,00	64.361.000,00	(383.000,00)	99,41		
04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	74.633.000,00	73.082.600,00	(1.550.400,00)	97,92		
04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	74.633.000,00	73.082.600,00	(1.550.400,00)	97,92		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	59.683.000,00	58.132.600,00	(1.550.400,00)	97,40		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.683.000,00	58.132.600,00	(1.550.400,00)	97,40		
04.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(869.831.625,00)	(863.096.318,00)	6.735.307,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(869.831.625,00)	(863.096.318,00)	6.735.307,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL
SKPD : 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial Daerah
Unit Organisasi : 1-06.0-00.0-00.01.001 Dinas Sosial
Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.574.970.555,00	3.411.192.958,00	(163.777.597,00)	95,42		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.733.188.255,00	2.663.099.835,00	(70.088.420,00)	97,44		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	145.388.412,00	(4.611.588,00)	96,93		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000,00	145.388.412,00	(4.611.588,00)	96,93		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	145.388.412,00	(4.611.588,00)	96,93		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	145.388.412,00	(4.611.588,00)	96,93		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.173.598.655,00	2.152.920.506,00	(20.678.149,00)	99,05		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.120.798.655,00	2.100.120.506,00	(20.678.149,00)	99,02		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.120.798.655,00	2.100.120.506,00	(20.678.149,00)	99,02		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.120.798.655,00	2.100.120.506,00	(20.678.149,00)	99,02		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.183.000,00	207.363.328,00	(13.819.672,00)	93,75		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.896.000,00	24.396.000,00	(4.500.000,00)	84,43		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	28.896.000,00	24.396.000,00	(4.500.000,00)	84,43		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.896.000,00	24.396.000,00	(4.500.000,00)	84,43		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.796.000,00	36.496.000,00	(3.300.000,00)	91,71		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	39.796.000,00	36.496.000,00	(3.300.000,00)	91,71		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.796.000,00	36.496.000,00	(3.300.000,00)	91,71		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.491.000,00	146.471.328,00	(6.019.672,00)	96,05		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	152.491.000,00	146.471.328,00	(6.019.672,00)	96,05		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.491.000,00	146.471.328,00	(6.019.672,00)	96,05		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.689.000,00	76.352.321,00	(24.336.679,00)	75,83		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.415.000,00	22.434.750,00	(3.980.250,00)	84,93		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.415.000,00	22.434.750,00	(3.980.250,00)	84,93		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.415.000,00	22.434.750,00	(3.980.250,00)	84,93		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	33.643.571,00	(20.356.429,00)	62,30		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	33.643.571,00	(20.356.429,00)	62,30		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	33.643.571,00	(20.356.429,00)	62,30		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.274.000,00	20.274.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.274.000,00	20.274.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.274.000,00	20.274.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.242.600,00	51.836.768,00	(6.405.832,00)	89,00		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.552.550,00	15.164.375,00	(388.175,00)	97,50		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.552.550,00	15.164.375,00	(388.175,00)	97,50		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.552.550,00	15.164.375,00	(388.175,00)	97,50		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.710.050,00	29.612.393,00	(3.097.657,00)	90,53		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.710.050,00	29.612.393,00	(3.097.657,00)	90,53		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.710.050,00	29.612.393,00	(3.097.657,00)	90,53		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.980.000,00	7.060.000,00	(2.920.000,00)	70,74		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.980.000,00	7.060.000,00	(2.920.000,00)	70,74		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	7.060.000,00	(2.920.000,00)	70,74		
01.2.13	Penataan Organisasi	29.475.000,00	29.238.500,00	(236.500,00)	99,20		
01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	29.475.000,00	29.238.500,00	(236.500,00)	99,20		
01.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI	29.475.000,00	29.238.500,00	(236.500,00)	99,20		
01.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.475.000,00	29.238.500,00	(236.500,00)	99,20		
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	102.814.500,00	70.314.500,00	(32.500.000,00)	68,39		
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	102.814.500,00	70.314.500,00	(32.500.000,00)	68,39		
02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	82.650.000,00	50.150.000,00	(32.500.000,00)	60,68		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	82.650.000,00	50.150.000,00	(32.500.000,00)	60,68		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.650.000,00	50.150.000,00	(32.500.000,00)	60,68		
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	20.164.500,00	20.164.500,00	0,00	100,00		
	Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat						
	Kewenangan Kabupaten/Kota						
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.164.500,00	20.164.500,00	0,00	100,00		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.164.500,00	20.164.500,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	108.713.750,00	103.866.493,00	(4.847.257,00)	95,54		
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	103.925.750,00	99.078.493,00	(4.847.257,00)	95,34		
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta						
	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	44.076.000,00	43.556.000,00	(520.000,00)	98,82		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.076.000,00	43.556.000,00	(520.000,00)	98,82		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.076.000,00	43.556.000,00	(520.000,00)	98,82		
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	59.849.750,00	55.522.493,00	(4.327.257,00)	92,77		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	59.849.750,00	55.522.493,00	(4.327.257,00)	92,77		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.849.750,00	55.522.493,00	(4.327.257,00)	92,77		
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan	4.788.000,00	4.788.000,00	0,00	100,00		
	Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan						
	NAPZA di Luar Panti Sosial						
04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	4.788.000,00	4.788.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	4.788.000,00	4.788.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.788.000,00	4.788.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	180.204.000,00	136.393.850,00	(43.810.150,00)	75,69		
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	180.204.000,00	136.393.850,00	(43.810.150,00)	75,69		
	Kabupaten/Kota						
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	114.644.000,00	102.881.660,00	(11.762.340,00)	89,74		
	Kabupaten/Kota						
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	114.644.000,00	102.881.660,00	(11.762.340,00)	89,74		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.644.000,00	102.881.660,00	(11.762.340,00)	89,74		
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	65.560.000,00	33.512.190,00	(32.047.810,00)	51,12		
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	65.560.000,00	33.512.190,00	(32.047.810,00)	51,12		
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.560.000,00	33.512.190,00	(32.047.810,00)	51,12		
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	350.054.250,00	337.522.480,00	(12.531.770,00)	96,42		
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	350.054.250,00	337.522.480,00	(12.531.770,00)	96,42		
	Kabupaten/Kota						
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	323.229.250,00	311.137.480,00	(12.091.770,00)	96,26		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	323.229.250,00	311.137.480,00	(12.091.770,00)	96,26		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.229.250,00	311.137.480,00	(12.091.770,00)	96,26		
06.2.01.02	Penyediaan Sandang	26.825.000,00	26.385.000,00	(440.000,00)	98,36		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.825.000,00	26.385.000,00	(440.000,00)	98,36		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.825.000,00	26.385.000,00	(440.000,00)	98,36		
07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	99.995.800,00	99.995.800,00	0,00	100,00		
07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	99.995.800,00	99.995.800,00	0,00	100,00		
07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12.995.550,00	12.995.550,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.995.550,00	12.995.550,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.995.550,00	12.995.550,00	0,00	100,00		
07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	87.000.250,00	87.000.250,00	0,00	100,00		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.000.250,00	87.000.250,00	0,00	100,00		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.000.250,00	87.000.250,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.574.970.555,00)	(3.411.192.958,00)	163.777.597,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.574.970.555,00)	(3.411.192.958,00)	163.777.597,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 PANGAN

SKPD : 2-09.0-00.0-00.01 Dinas Ketahanan Pangan

Unit Organisasi : 2-09.0-00.0-00.01.001 Dinas Ketahanan Pangan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.204.939.000,00	1.200.940.738,00	(3.998.262,00)	99,67		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	484.136.000,00	482.233.014,00	(1.902.986,00)	99,61		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.321.000,00	286.072.064,00	(248.936,00)	99,91		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.831.250,00	1.831.250,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.831.250,00	1.831.250,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.831.250,00	1.831.250,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.788.750,00	48.788.750,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	48.788.750,00	48.788.750,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.788.750,00	48.788.750,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.469.000,00	10.469.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.469.000,00	10.469.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.469.000,00	10.469.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.232.000,00	222.983.064,00	(248.936,00)	99,89		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	223.232.000,00	222.983.064,00	(248.936,00)	99,89		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.232.000,00	222.983.064,00	(248.936,00)	99,89		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.875.000,00	30.875.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.875.000,00	30.875.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	30.875.000,00	30.875.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.875.000,00	30.875.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.800.000,00	63.145.950,00	(1.654.050,00)	97,45		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000,00	18.745.950,00	(1.654.050,00)	91,89		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	18.745.950,00	(1.654.050,00)	91,89		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	18.745.950,00	(1.654.050,00)	91,89		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.940.000,00	55.940.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.140.000,00	39.140.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.140.000,00	39.140.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.140.000,00	39.140.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	508.766.000,00	506.950.130,00	(1.815.870,00)	99,64		
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	96.358.500,00	96.256.830,00	(101.670,00)	99,89		
03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	29.933.750,00	29.891.700,00	(42.050,00)	99,86		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.933.750,00	29.891.700,00	(42.050,00)	99,86		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.933.750,00	29.891.700,00	(42.050,00)	99,86		
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	53.004.750,00	52.945.130,00	(59.620,00)	99,89		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	53.004.750,00	52.945.130,00	(59.620,00)	99,89		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.004.750,00	52.945.130,00	(59.620,00)	99,89		
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	412.407.500,00	410.693.300,00	(1.714.200,00)	99,58		
03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	165.877.000,00	164.166.500,00	(1.710.500,00)	98,97		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	165.877.000,00	164.166.500,00	(1.710.500,00)	98,97		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.877.000,00	164.166.500,00	(1.710.500,00)	98,97		
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	246.530.500,00	246.526.800,00	(3.700,00)	100,00		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	246.530.500,00	246.526.800,00	(3.700,00)	100,00		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.530.500,00	246.526.800,00	(3.700,00)	100,00		
04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	54.860.000,00	54.581.194,00	(278.806,00)	99,49		
04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	54.860.000,00	54.581.194,00	(278.806,00)	99,49		
04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	54.860.000,00	54.581.194,00	(278.806,00)	99,49		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.860.000,00	54.581.194,00	(278.806,00)	99,49		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.860.000,00	54.581.194,00	(278.806,00)	99,49		
05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	157.177.000,00	157.176.400,00	(600,00)	100,00		
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	157.177.000,00	157.176.400,00	(600,00)	100,00		
05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	157.177.000,00	157.176.400,00	(600,00)	100,00		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	155.927.000,00	155.926.400,00	(600,00)	100,00		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.927.000,00	155.926.400,00	(600,00)	100,00		
05.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.204.939.000,00)	(1.200.940.738,00)	3.998.262,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.204.939.000,00)	(1.200.940.738,00)	3.998.262,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.001 Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.774.604.711,00	6.876.428.985,00	(898.175.726,00)	88,45		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.254.953.661,00	2.000.909.139,00	(254.044.522,00)	88,73		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.300.000,00	51.799.650,00	(1.500.350,00)	97,19		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.249.650,00	(750.350,00)	92,50		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.249.650,00	(750.350,00)	92,50		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.249.650,00	(750.350,00)	92,50		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.300.000,00	42.550.000,00	(750.000,00)	98,27		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	43.300.000,00	42.550.000,00	(750.000,00)	98,27		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000,00	42.550.000,00	(750.000,00)	98,27		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.514.831.211,00	1.501.533.095,00	(13.298.116,00)	99,12		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.452.206.211,00	1.440.831.595,00	(11.374.616,00)	99,22		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.452.206.211,00	1.440.831.595,00	(11.374.616,00)	99,22		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.452.206.211,00	1.440.831.595,00	(11.374.616,00)	99,22		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	62.625.000,00	60.701.500,00	(1.923.500,00)	96,93		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	62.625.000,00	60.701.500,00	(1.923.500,00)	96,93		
01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.225.000,00	10.301.500,00	(1.923.500,00)	84,27		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.674.500,00	3.429.000,00	(1.245.500,00)	73,36		
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.674.500,00	3.429.000,00	(1.245.500,00)	73,36		
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.674.500,00	3.429.000,00	(1.245.500,00)	73,36		
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.674.500,00	3.429.000,00	(1.245.500,00)	73,36		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.718.500,00	244.447.019,00	(102.271.481,00)	70,50		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	5.990.000,00	(10.000,00)	99,83		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.990.000,00	(10.000,00)	99,83		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.990.000,00	(10.000,00)	99,83		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.276.250,00	42.883.530,00	(26.392.720,00)	61,90		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.565.000,00	42.883.530,00	(17.681.470,00)	70,81		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.565.000,00	42.883.530,00	(17.681.470,00)	70,81		
01.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	8.711.250,00	0,00	(8.711.250,00)	0		
01.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.711.250,00	0,00	(8.711.250,00)	0		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.105.500,00	22.780.750,00	(13.324.750,00)	63,09		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	36.105.500,00	22.780.750,00	(13.324.750,00)	63,09		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.105.500,00	22.780.750,00	(13.324.750,00)	63,09		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.336.750,00	169.792.739,00	(62.544.011,00)	73,08		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	232.336.750,00	169.792.739,00	(62.544.011,00)	73,08		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.336.750,00	169.792.739,00	(62.544.011,00)	73,08		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.228.100,00	0,00	(109.228.100,00)	0		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.875.000,00	0,00	(79.875.000,00)	0		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	79.875.000,00	0,00	(79.875.000,00)	0		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.875.000,00	0,00	(54.875.000,00)	0		
01.2.07.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0		
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.353.100,00	0,00	(29.353.100,00)	0		
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	29.353.100,00	0,00	(29.353.100,00)	0		
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.353.100,00	0,00	(29.353.100,00)	0		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.188.750,00	90.243.247,00	(14.945.503,00)	85,79		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000,00	57.064.247,00	(14.935.753,00)	79,26		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	57.064.247,00	(14.935.753,00)	79,26		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	57.064.247,00	(14.935.753,00)	79,26		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.188.750,00	33.179.000,00	(9.750,00)	99,97		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.188.750,00	33.179.000,00	(9.750,00)	99,97		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.188.750,00	33.179.000,00	(9.750,00)	99,97		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.012.600,00	109.457.128,00	(11.555.472,00)	90,45		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.522.600,00	66.588.850,00	(5.933.750,00)	91,82		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.522.600,00	66.588.850,00	(5.933.750,00)	91,82		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.522.600,00	66.588.850,00	(5.933.750,00)	91,82		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.450.000,00	29.350.278,00	(1.099.722,00)	96,39		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.450.000,00	29.350.278,00	(1.099.722,00)	96,39		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000,00	29.350.278,00	(1.099.722,00)	96,39		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.040.000,00	13.518.000,00	(4.522.000,00)	74,93		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	18.040.000,00	13.518.000,00	(4.522.000,00)	74,93		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.040.000,00	13.518.000,00	(4.522.000,00)	74,93		
02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	309.121.100,00	241.213.675,00	(67.907.425,00)	78,03		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	222.492.600,00	188.263.675,00	(34.228.925,00)	84,62		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	97.437.500,00	89.332.500,00	(8.105.000,00)	91,68		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	97.437.500,00	89.332.500,00	(8.105.000,00)	91,68		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.437.500,00	89.332.500,00	(8.105.000,00)	91,68		
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	106.583.100,00	82.702.929,00	(23.880.171,00)	77,59		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	103.508.100,00	82.702.929,00	(20.805.171,00)	79,90		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.508.100,00	82.702.929,00	(20.805.171,00)	79,90		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	3.075.000,00	0,00	(3.075.000,00)	0		
03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.075.000,00	0,00	(3.075.000,00)	0		
03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	18.472.000,00	16.228.246,00	(2.243.754,00)	87,85		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.472.000,00	16.228.246,00	(2.243.754,00)	87,85		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.472.000,00	16.228.246,00	(2.243.754,00)	87,85		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	86.628.500,00	52.950.000,00	(33.678.500,00)	61,12		
03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	686.500,00	600.000,00	(86.500,00)	87,40		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	686.500,00	600.000,00	(86.500,00)	87,40		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	686.500,00	600.000,00	(86.500,00)	87,40		
03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	85.942.000,00	52.350.000,00	(33.592.000,00)	60,91		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	85.942.000,00	52.350.000,00	(33.592.000,00)	60,91		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.942.000,00	52.350.000,00	(33.592.000,00)	60,91		
05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	100,00		
07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	30.000.000,00	29.550.000,00	(450.000,00)	98,50		
07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	30.000.000,00	29.550.000,00	(450.000,00)	98,50		
07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	30.000.000,00	29.550.000,00	(450.000,00)	98,50		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.550.000,00	(450.000,00)	98,50		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.550.000,00	(450.000,00)	98,50		
08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	266.315.000,00	136.592.400,00	(129.722.600,00)	51,29		
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	266.315.000,00	136.592.400,00	(129.722.600,00)	51,29		
08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	47.180.000,00	40.585.000,00	(6.595.000,00)	86,02		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.180.000,00	40.585.000,00	(6.595.000,00)	86,02		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.180.000,00	40.585.000,00	(6.595.000,00)	86,02		
08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	55.200.000,00	9.900.000,00	(45.300.000,00)	17,93		
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.200.000,00	9.900.000,00	(45.300.000,00)	17,93		
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	9.900.000,00	(45.300.000,00)	17,93		
08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	119.685.000,00	57.157.400,00	(62.527.600,00)	47,76		
08.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	119.685.000,00	57.157.400,00	(62.527.600,00)	47,76		
08.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.685.000,00	57.157.400,00	(62.527.600,00)	47,76		
08.2.01.04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	44.250.000,00	28.950.000,00	(15.300.000,00)	65,42		
08.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	44.250.000,00	28.950.000,00	(15.300.000,00)	65,42		
08.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	28.950.000,00	(15.300.000,00)	65,42		
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.688.264.950,00	4.442.213.771,00	(246.051.179,00)	94,75		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.688.264.950,00	4.442.213.771,00	(246.051.179,00)	94,75		
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4.688.264.950,00	4.442.213.771,00	(246.051.179,00)	94,75		
11.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.638.387.450,00	4.442.213.771,00	(196.173.679,00)	95,77		
11.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.638.387.450,00	4.442.213.771,00	(196.173.679,00)	95,77		
11.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	49.877.500,00	0,00	(49.877.500,00)	0		
11.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.877.500,00	0,00	(49.877.500,00)	0		
	SURPLUS / DEFISIT	(7.774.604.711,00)	(6.876.428.985,00)	898.175.726,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.774.604.711,00)	(6.876.428.985,00)	898.175.726,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

SKPD : 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.963.714.269,00	2.920.592.752,00	(43.121.517,00)	98,55		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.456.567.519,00	2.418.446.002,00	(38.121.517,00)	98,45		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.768.714.469,00	1.730.595.452,00	(38.119.017,00)	97,84		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.768.714.469,00	1.730.595.452,00	(38.119.017,00)	97,84		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.768.714.469,00	1.730.595.452,00	(38.119.017,00)	97,84		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.768.714.469,00	1.730.595.452,00	(38.119.017,00)	97,84		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.979.300,00	280.977.800,00	(1.500,00)	100,00		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.231.050,00	17.229.800,00	(1.250,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.231.050,00	17.229.800,00	(1.250,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.231.050,00	17.229.800,00	(1.250,00)	99,99		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.202.250,00	108.202.000,00	(250,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	108.202.250,00	108.202.000,00	(250,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.202.250,00	108.202.000,00	(250,00)	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.101.000,00	32.101.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	32.101.000,00	32.101.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.101.000,00	32.101.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.445.000,00	117.445.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	117.445.000,00	117.445.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.445.000,00	117.445.000,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.375.000,00	57.375.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.625.000,00	28.625.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	28.625.000,00	28.625.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.625.000,00	28.625.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.698.750,00	197.697.750,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.427.500,00	130.427.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	130.427.500,00	130.427.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.427.500,00	130.427.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.043.750,00	28.043.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	28.043.750,00	28.043.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.043.750,00	28.043.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.737.500,00	30.737.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	30.737.500,00	30.737.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.737.500,00	30.737.000,00	(500,00)	100,00		
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	436.584.250,00	431.584.250,00	(5.000.000,00)	98,85		
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	436.584.250,00	431.584.250,00	(5.000.000,00)	98,85		
02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	268.834.250,00	263.834.250,00	(5.000.000,00)	98,14		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	263.834.250,00	263.834.250,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.834.250,00	263.834.250,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0		
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0		
02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	70.562.500,00	70.562.500,00	0,00	100,00		
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	70.562.500,00	70.562.500,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	70.562.500,00	70.562.500,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.562.500,00	70.562.500,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.562.500,00	70.562.500,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.963.714.269,00)	(2.920.592.752,00)	43.121.517,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.963.714.269,00)	(2.920.592.752,00)	43.121.517,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD : 2-13.2-08.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Unit Organisasi : 2-13.2-08.0-00.01.001 Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	148.569.795.000,00	148.569.795.000,00	0		
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	148.569.795.000,00	148.569.795.000,00	0		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	148.569.795.000,00	148.569.795.000,00	0		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	181.093.461.687,00	185.784.404.086,00	4.690.942.399,00	102,59		
00	Non Program	0,00	148.569.795.000,00	148.569.795.000,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	148.569.795.000,00	148.569.795.000,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	148.569.795.000,00	148.569.795.000,00	0		
00.0.00.00.5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	148.569.795.000,00	148.569.795.000,00	0		
00.0.00.00.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	148.569.795.000,00	148.569.795.000,00	0		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.285.215.487,00	2.215.345.343,00	(69.870.144,00)	96,94		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.942.882.487,00	1.895.455.102,00	(47.427.385,00)	97,56		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.942.882.487,00	1.854.055.102,00	(47.427.385,00)	97,51		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.942.882.487,00	1.854.055.102,00	(47.427.385,00)	97,51		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.942.882.487,00	1.854.055.102,00	(47.427.385,00)	97,51		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.116.750,00	205.335.280,00	(20.781.470,00)	90,81		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.113.750,00	1.113.750,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.113.750,00	1.113.750,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.750,00	1.113.750,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.625.000,00	0,00	(7.625.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	7.625.000,00	0,00	(7.625.000,00)	0		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.625.000,00	0,00	(7.625.000,00)	0		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.097.000,00	45.096.750,00	(250,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	45.097.000,00	45.096.750,00	(250,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.097.000,00	45.096.750,00	(250,00)	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.281.000,00	124.124.780,00	(13.156.220,00)	90,42		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	137.281.000,00	124.124.780,00	(13.156.220,00)	90,42		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.281.000,00	124.124.780,00	(13.156.220,00)	90,42		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.013.750,00	72.130.461,00	(883.289,00)	98,79		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.050.000,00	15.167.461,00	(882.539,00)	94,50		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.050.000,00	15.167.461,00	(882.539,00)	94,50		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.050.000,00	15.167.461,00	(882.539,00)	94,50		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.963.750,00	56.963.000,00	(750,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	56.963.750,00	56.963.000,00	(750,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.963.750,00	56.963.000,00	(750,00)	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.202.500,00	42.424.500,00	(778.000,00)	98,20		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.880.000,00	40.102.000,00	(778.000,00)	98,10		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.880.000,00	40.102.000,00	(778.000,00)	98,10		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.880.000,00	40.102.000,00	(778.000,00)	98,10		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.022.500,00	1.022.500,00	0,00	100,00		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.022.500,00	1.022.500,00	0,00	100,00		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.022.500,00	1.022.500,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	490.234.000,00	400.234.000,00	(90.000.000,00)	81,64		
02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	15.279.000,00	15.279.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	15.279.000,00	15.279.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.279.000,00	15.279.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.279.000,00	15.279.000,00	0,00	100,00		
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	474.955.000,00	384.955.000,00	(90.000.000,00)	81,05		
02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	474.955.000,00	384.955.000,00	(90.000.000,00)	81,05		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	474.955.000,00	384.955.000,00	(90.000.000,00)	81,05		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.955.000,00	24.955.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	360.000.000,00	(90.000.000,00)	80,00		
02	PROGRAM PENATAAN DESA	720.000.000,00	538.885.102,00	(181.114.898,00)	74,85		
02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	720.000.000,00	538.885.102,00	(181.114.898,00)	74,85		
02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	720.000.000,00	538.885.102,00	(181.114.898,00)	74,85		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	720.000.000,00	538.885.102,00	(181.114.898,00)	74,85		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	118.885.102,00	(1.114.898,00)	99,07		
02.2.01.06.5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	420.000.000,00	(180.000.000,00)	70,00		
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	10.000.000,00	9.699.200,00	(300.800,00)	96,99		
04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.699.200,00	(300.800,00)	96,99		
04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.699.200,00	(300.800,00)	96,99		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.699.200,00	(300.800,00)	96,99		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.699.200,00	(300.800,00)	96,99		
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	177.352.579.200,00	33.821.844.672,00	(143.530.734.528,00)	19,07		
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	177.352.579.200,00	33.821.844.672,00	(143.530.734.528,00)	19,07		
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.540.000.000,00	1.469.566.272,00	(70.433.728,00)	95,43		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.540.000.000,00	1.469.566.272,00	(70.433.728,00)	95,43		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000.000,00	1.469.566.272,00	(70.433.728,00)	95,43		
04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	15.000.000,00	6.526.000,00	(8.474.000,00)	43,51		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	6.526.000,00	(8.474.000,00)	43,51		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	6.526.000,00	(8.474.000,00)	43,51		
04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	84.000.000,00	82.500.000,00	(1.500.000,00)	98,21		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	82.500.000,00	(1.500.000,00)	98,21		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	82.500.000,00	(1.500.000,00)	98,21		
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	175.591.979.200,00	32.157.455.600,00	(143.434.523.600,00)	18,31		
04.2.01.12.5.4	BELANJA TRANSFER	175.591.979.200,00	32.157.455.600,00	(143.434.523.600,00)	18,31		
04.2.01.12.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	175.591.979.200,00	32.157.455.600,00	(143.434.523.600,00)	18,31		
04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30.600.000,00	30.240.800,00	(359.200,00)	98,83		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	30.600.000,00	30.240.800,00	(359.200,00)	98,83		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	30.240.800,00	(359.200,00)	98,83		
04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	20.000.000,00	4.556.000,00	(15.444.000,00)	22,78		
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	4.556.000,00	(15.444.000,00)	22,78		
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	4.556.000,00	(15.444.000,00)	22,78		
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	128.292.000,00	128.263.252,00	(28.748,00)	99,98		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	128.292.000,00	128.263.252,00	(28.748,00)	99,98		
05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	93.292.000,00	93.263.252,00	(28.748,00)	99,97		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	93.292.000,00	93.263.252,00	(28.748,00)	99,97		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.292.000,00	93.263.252,00	(28.748,00)	99,97		
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	47.141.000,00	40.337.517,00	(6.803.483,00)	85,57		
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47.141.000,00	40.337.517,00	(6.803.483,00)	85,57		
06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.141.000,00	40.337.517,00	(6.803.483,00)	85,57		
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.141.000,00	40.337.517,00	(6.803.483,00)	85,57		
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.141.000,00	40.337.517,00	(6.803.483,00)	85,57		
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(181.093.461.687,00)	(37.214.609.086,00)	143.878.852.601,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(181.093.461.687,00)	(37.214.609.086,00)	143.878.852.601,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SKPD : 2-14.0-00.0-00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2-14.0-00.0-00.01.001 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	6.902.074.788,00	6.526.740.575,00	(375.334.213,00)	94,56		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.894.584.747,00	1.851.336.575,00	(43.248.172,00)	97,72		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.414.624.997,00	1.404.740.507,00	(9.884.490,00)	99,30		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.414.624.997,00	1.404.740.507,00	(9.884.490,00)	99,30		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.414.624.997,00	1.404.740.507,00	(9.884.490,00)	99,30		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.414.624.997,00	1.404.740.507,00	(9.884.490,00)	99,30		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.891.000,00	15.195.380,00	(4.695.620,00)	76,39		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.891.000,00	15.195.380,00	(4.695.620,00)	76,39		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	19.891.000,00	15.195.380,00	(4.695.620,00)	76,39		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.891.000,00	15.195.380,00	(4.695.620,00)	76,39		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.295.500,00	200.318.780,00	(1.976.720,00)	99,02		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.585.000,00	3.095.780,00	(489.220,00)	86,35		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.585.000,00	3.095.780,00	(489.220,00)	86,35		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.585.000,00	3.095.780,00	(489.220,00)	86,35		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.022.000,00	14.022.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	14.022.000,00	14.022.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.022.000,00	14.022.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.617.500,00	8.130.000,00	(1.487.500,00)	84,53		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.617.500,00	8.130.000,00	(1.487.500,00)	84,53		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.617.500,00	8.130.000,00	(1.487.500,00)	84,53		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.071.000,00	172.071.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	172.071.000,00	172.071.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.071.000,00	172.071.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.286.250,00	110.991.908,00	(15.294.342,00)	87,89		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.270.000,00	24.269.000,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.270.000,00	24.269.000,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.270.000,00	24.269.000,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.200.000,00	22.106.908,00	(9.093.092,00)	70,86		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	22.106.908,00	(9.093.092,00)	70,86		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	22.106.908,00	(9.093.092,00)	70,86		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.816.250,00	64.616.000,00	(6.200.250,00)	91,24		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	70.816.250,00	64.616.000,00	(6.200.250,00)	91,24		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.016.250,00	20.816.000,00	(6.200.250,00)	77,05		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.487.000,00	120.090.000,00	(11.397.000,00)	91,33		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.052.000,00	79.895.000,00	(8.157.000,00)	90,74		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	88.052.000,00	79.895.000,00	(8.157.000,00)	90,74		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.052.000,00	79.895.000,00	(8.157.000,00)	90,74		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000,00	0,00	(2.920.000,00)	0		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.920.000,00	0,00	(2.920.000,00)	0		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	0,00	(2.920.000,00)	0		
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.090.000,00	3.770.000,00	(320.000,00)	92,18		
01.2.09.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.090.000,00	3.770.000,00	(320.000,00)	92,18		
01.2.09.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	3.770.000,00	(320.000,00)	92,18		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.425.000,00	36.425.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	36.425.000,00	36.425.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.425.000,00	36.425.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	211.811.250,00	211.585.000,00	(226.250,00)	99,89		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	21.131.250,00	21.131.000,00	(250,00)	100,00		
02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	21.131.250,00	21.131.000,00	(250,00)	100,00		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	21.131.250,00	21.131.000,00	(250,00)	100,00		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.131.250,00	21.131.000,00	(250,00)	100,00		
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	190.680.000,00	190.454.000,00	(226.000,00)	99,88		
02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	34.080.000,00	34.079.000,00	(1.000,00)	100,00		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	34.080.000,00	34.079.000,00	(1.000,00)	100,00		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.080.000,00	34.079.000,00	(1.000,00)	100,00		
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	156.600.000,00	156.375.000,00	(225.000,00)	99,86		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	156.600.000,00	156.375.000,00	(225.000,00)	99,86		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.600.000,00	156.375.000,00	(225.000,00)	99,86		
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.139.778.791,00	2.951.194.000,00	(188.584.791,00)	93,99		
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	934.850.000,00	876.148.500,00	(58.701.500,00)	93,72		
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	143.000.000,00	126.800.000,00	(16.200.000,00)	88,67		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	143.000.000,00	126.800.000,00	(16.200.000,00)	88,67		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.000.000,00	126.800.000,00	(16.200.000,00)	88,67		
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	529.650.000,00	514.768.500,00	(14.881.500,00)	97,19		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	529.650.000,00	514.768.500,00	(14.881.500,00)	97,19		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.650.000,00	514.768.500,00	(14.881.500,00)	97,19		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	52.380.000,00	(27.620.000,00)	65,48		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	52.380.000,00	(27.620.000,00)	65,48		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	52.380.000,00	(27.620.000,00)	65,48		
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	822.600.000,00	822.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	822.600.000,00	822.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	822.600.000,00	822.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.600.000,00	822.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.016.828.791,00	940.795.500,00	(76.033.291,00)	92,52		
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	297.804.000,00	230.150.000,00	(67.654.000,00)	77,28		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	297.804.000,00	230.150.000,00	(67.654.000,00)	77,28		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.804.000,00	230.150.000,00	(67.654.000,00)	77,28		
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	641.629.000,00	633.250.000,00	(8.379.000,00)	98,69		
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	641.629.000,00	633.250.000,00	(8.379.000,00)	98,69		
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.629.000,00	633.250.000,00	(8.379.000,00)	98,69		
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	42.595.791,00	42.595.500,00	(291,00)	100,00		
03.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	42.595.791,00	42.595.500,00	(291,00)	100,00		
03.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.595.791,00	42.595.500,00	(291,00)	100,00		
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	365.500.000,00	311.650.000,00	(53.850.000,00)	85,27		
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	365.500.000,00	311.650.000,00	(53.850.000,00)	85,27		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	365.500.000,00	311.650.000,00	(53.850.000,00)	85,27		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.500.000,00	311.650.000,00	(53.850.000,00)	85,27		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.655.900.000,00	1.512.625.000,00	(143.275.000,00)	91,35		
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.655.900.000,00	1.512.625.000,00	(143.275.000,00)	91,35		
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	234.900.000,00	(125.100.000,00)	65,25		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	234.900.000,00	(125.100.000,00)	65,25		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	234.900.000,00	(125.100.000,00)	65,25		
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.295.900.000,00	1.277.725.000,00	(18.175.000,00)	98,60		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.295.900.000,00	1.277.725.000,00	(18.175.000,00)	98,60		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.295.900.000,00	1.277.725.000,00	(18.175.000,00)	98,60		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.902.074.788,00)	(6.526.740.575,00)	375.334.213,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.902.074.788,00)	(6.526.740.575,00)	375.334.213,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN

SKPD : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	9.562.004.169,00	8.930.794.865,00	(631.209.304,00)	93,40		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.369.679.617,00	2.270.188.665,00	(99.490.952,00)	95,80		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.838.400.742,00	1.805.376.810,00	(33.023.932,00)	98,20		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.800.000.742,00	1.766.976.810,00	(33.023.932,00)	98,17		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000.742,00	1.766.976.810,00	(33.023.932,00)	98,17		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.800.000.742,00	1.766.976.810,00	(33.023.932,00)	98,17		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.474.500,00	278.708.692,00	(51.765.808,00)	84,34		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.927.500,00	1.926.000,00	(1.500,00)	99,92		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.927.500,00	1.926.000,00	(1.500,00)	99,92		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.927.500,00	1.926.000,00	(1.500,00)	99,92		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.657.500,00	69.814.899,00	(7.842.601,00)	89,90		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	77.657.500,00	69.814.899,00	(7.842.601,00)	89,90		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.657.500,00	69.814.899,00	(7.842.601,00)	89,90		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.937.500,00	30.139.300,00	(3.798.200,00)	88,81		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	33.937.500,00	30.139.300,00	(3.798.200,00)	88,81		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.937.500,00	30.139.300,00	(3.798.200,00)	88,81		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.923.500,00	1.350.000,00	(3.573.500,00)	27,42		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.923.500,00	1.350.000,00	(3.573.500,00)	27,42		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.923.500,00	1.350.000,00	(3.573.500,00)	27,42		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	36.300.000,00	30.203.900,00	(6.096.100,00)	83,21		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	36.300.000,00	30.203.900,00	(6.096.100,00)	83,21		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	30.203.900,00	(6.096.100,00)	83,21		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.728.500,00	145.274.593,00	(30.453.907,00)	82,67		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	175.728.500,00	145.274.593,00	(30.453.907,00)	82,67		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.728.500,00	145.274.593,00	(30.453.907,00)	82,67		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.392.875,00	61.777.052,00	(3.615.823,00)	94,47		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	22.292.552,00	(2.707.448,00)	89,17		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.292.552,00	(2.707.448,00)	89,17		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.292.552,00	(2.707.448,00)	89,17		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.392.875,00	39.484.500,00	(908.375,00)	97,75		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.392.875,00	39.484.500,00	(908.375,00)	97,75		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.392.875,00	39.484.500,00	(908.375,00)	97,75		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.411.500,00	124.326.111,00	(11.085.389,00)	91,81		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.260.000,00	111.734.111,00	(8.525.889,00)	92,91		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	120.260.000,00	111.734.111,00	(8.525.889,00)	92,91		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.260.000,00	111.734.111,00	(8.525.889,00)	92,91		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.910.000,00	5.395.000,00	(2.515.000,00)	68,20		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.910.000,00	5.395.000,00	(2.515.000,00)	68,20		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	5.395.000,00	(2.515.000,00)	68,20		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.241.500,00	7.197.000,00	(44.500,00)	99,39		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.241.500,00	7.197.000,00	(44.500,00)	99,39		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.241.500,00	7.197.000,00	(44.500,00)	99,39		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.631.998.936,00	6.449.831.200,00	(182.167.736,00)	97,25		
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	74.000.000,00	62.298.000,00	(11.702.000,00)	84,19		
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	17.000.000,00	5.298.000,00	(11.702.000,00)	31,16		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	5.298.000,00	(11.702.000,00)	31,16		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	5.298.000,00	(11.702.000,00)	31,16		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90		
02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90		
02.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90		
02.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90		
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.436.236.936,00	6.273.480.200,00	(162.756.736,00)	97,47		
02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.436.236.936,00	6.273.480.200,00	(162.756.736,00)	97,47		
02.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.436.236.936,00	6.273.480.200,00	(162.756.736,00)	97,47		
02.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.436.236.936,00	6.273.480.200,00	(162.756.736,00)	97,47		
02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.762.000,00	14.153.000,00	(7.609.000,00)	65,04		
02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.762.000,00	14.153.000,00	(7.609.000,00)	65,04		
02.2.16.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.762.000,00	14.153.000,00	(7.609.000,00)	65,04		
02.2.16.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.762.000,00	14.153.000,00	(7.609.000,00)	65,04		
03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	560.325.616,00	210.775.000,00	(349.550.616,00)	37,62		
03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.900.000,00	(1.100.000,00)	98,90		
03.2.06.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.900.000,00	(1.100.000,00)	98,90		
03.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.900.000,00	(1.100.000,00)	98,90		
03.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.900.000,00	(1.100.000,00)	98,90		
03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	460.325.616,00	111.875.000,00	(348.450.616,00)	24,30		
03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	174.062.808,00	0,00	(174.062.808,00)	0		
03.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.675.000,00	0,00	(50.675.000,00)	0		
03.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.675.000,00	0,00	(50.675.000,00)	0		
03.2.12.02.5.2	BELANJA MODAL	123.387.808,00	0,00	(123.387.808,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.12.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.387.808,00	0,00	(123.387.808,00)	0		
03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan	95.000.000,00	94.900.000,00	(100.000,00)	99,89		
	Pengumpan Lokal						
03.2.12.03.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	94.900.000,00	(100.000,00)	99,89		
03.2.12.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	94.900.000,00	(100.000,00)	99,89		
03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	191.262.808,00	16.975.000,00	(174.287.808,00)	8,88		
	Lokal						
03.2.12.04.5.1	BELANJA OPERASI	191.262.808,00	16.975.000,00	(174.287.808,00)	8,88		
03.2.12.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.262.808,00	16.975.000,00	(174.287.808,00)	8,88		
	SURPLUS / DEFISIT	(9.562.004.169,00)	(8.930.794.865,00)	631.209.304,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9.562.004.169,00)	(8.930.794.865,00)	631.209.304,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA
SKPD : 2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2-16.2-20.2-21.01.001 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.702.151.256,00	2.578.309.109,00	(123.842.147,00)	95,42		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.208.126.506,00	2.119.096.809,00	(89.029.697,00)	95,97		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.650.833.256,00	1.634.684.246,00	(16.149.010,00)	99,02		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.607.033.256,00	1.590.884.246,00	(16.149.010,00)	99,00		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.607.033.256,00	1.590.884.246,00	(16.149.010,00)	99,00		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.607.033.256,00	1.590.884.246,00	(16.149.010,00)	99,00		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	422.731.500,00	369.743.701,00	(52.987.799,00)	87,47		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	1.404.000,00	(2.596.000,00)	35,10		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	1.404.000,00	(2.596.000,00)	35,10		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	1.404.000,00	(2.596.000,00)	35,10		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.172.500,00	69.025.510,00	(27.146.990,00)	71,77		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	96.172.500,00	69.025.510,00	(27.146.990,00)	71,77		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.172.500,00	69.025.510,00	(27.146.990,00)	71,77		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.163.000,00	46.349.000,00	(13.814.000,00)	77,04		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	60.163.000,00	46.349.000,00	(13.814.000,00)	77,04		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.163.000,00	46.349.000,00	(13.814.000,00)	77,04		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.696.000,00	237.990.191,00	(4.705.809,00)	98,06		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	242.696.000,00	237.990.191,00	(4.705.809,00)	98,06		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.696.000,00	237.990.191,00	(4.705.809,00)	98,06		
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19.700.000,00	14.975.000,00	(4.725.000,00)	76,02		
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	19.700.000,00	14.975.000,00	(4.725.000,00)	76,02		
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	14.975.000,00	(4.725.000,00)	76,02		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.750.000,00	13.050.000,00	(700.000,00)	94,91		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.750.000,00	13.050.000,00	(700.000,00)	94,91		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	13.750.000,00	13.050.000,00	(700.000,00)	94,91		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.750.000,00	13.050.000,00	(700.000,00)	94,91		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.400.000,00	18.985.712,00	(5.414.288,00)	77,81		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.400.000,00	8.985.712,00	(3.414.288,00)	72,47		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.400.000,00	8.985.712,00	(3.414.288,00)	72,47		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	8.985.712,00	(3.414.288,00)	72,47		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	83,33		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	83,33		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	83,33		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.411.750,00	82.633.150,00	(13.778.600,00)	85,71		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.754.250,00	48.750.000,00	(8.004.250,00)	85,90		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	56.754.250,00	48.750.000,00	(8.004.250,00)	85,90		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.754.250,00	48.750.000,00	(8.004.250,00)	85,90		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.870.000,00	10.935.000,00	(1.935.000,00)	84,97		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.870.000,00	10.935.000,00	(1.935.000,00)	84,97		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	10.935.000,00	(1.935.000,00)	84,97		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.787.500,00	22.948.150,00	(3.839.350,00)	85,67		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	26.787.500,00	22.948.150,00	(3.839.350,00)	85,67		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.787.500,00	22.948.150,00	(3.839.350,00)	85,67		
02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	372.604.750,00	348.702.225,00	(23.902.525,00)	93,59		
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	372.604.750,00	348.702.225,00	(23.902.525,00)	93,59		
02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	78.362.000,00	75.370.000,00	(2.992.000,00)	96,18		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.362.000,00	75.370.000,00	(2.992.000,00)	96,18		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.362.000,00	75.370.000,00	(2.992.000,00)	96,18		
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	163.000.000,00	142.958.225,00	(20.041.775,00)	87,70		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	163.000.000,00	142.958.225,00	(20.041.775,00)	87,70		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.000.000,00	142.958.225,00	(20.041.775,00)	87,70		
02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	25.331.000,00	25.331.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	25.331.000,00	25.331.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.331.000,00	25.331.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	105.911.750,00	105.043.000,00	(868.750,00)	99,18		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	105.911.750,00	105.043.000,00	(868.750,00)	99,18		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.911.750,00	105.043.000,00	(868.750,00)	99,18		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	19.853.750,00	19.000.000,00	(853.750,00)	95,70		
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19.853.750,00	19.000.000,00	(853.750,00)	95,70		
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19.853.750,00	19.000.000,00	(853.750,00)	95,70		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.853.750,00	19.000.000,00	(853.750,00)	95,70		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.853.750,00	19.000.000,00	(853.750,00)	95,70		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	49.444.500,00	42.810.075,00	(6.634.425,00)	86,58		
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.444.500,00	42.810.075,00	(6.634.425,00)	86,58		
02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	49.444.500,00	42.810.075,00	(6.634.425,00)	86,58		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	49.444.500,00	42.810.075,00	(6.634.425,00)	86,58		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.444.500,00	42.810.075,00	(6.634.425,00)	86,58		
03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	52.121.750,00	48.700.000,00	(3.421.750,00)	93,44		
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.121.750,00	48.700.000,00	(3.421.750,00)	93,44		
03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	15.521.750,00	12.100.000,00	(3.421.750,00)	77,96		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.521.750,00	12.100.000,00	(3.421.750,00)	77,96		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.521.750,00	12.100.000,00	(3.421.750,00)	77,96		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.702.151.256,00)	(2.578.309.109,00)	123.842.147,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.702.151.256,00)	(2.578.309.109,00)	123.842.147,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
SKPD : 2-17.0-00.0-00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 2-17.0-00.0-00.01.001 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.895.044.133,00	2.726.673.840,00	(2.168.370.293,00)	55,70		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.072.701.383,00	1.957.545.555,00	(115.155.828,00)	94,44		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.700.000,00	18.000.000,00	(2.700.000,00)	86,96		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.700.000,00	18.000.000,00	(2.700.000,00)	86,96		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	20.700.000,00	18.000.000,00	(2.700.000,00)	86,96		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	18.000.000,00	(2.700.000,00)	86,96		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.431.678.558,00	1.383.246.664,00	(48.431.894,00)	96,62		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.386.674.808,00	1.339.742.914,00	(46.931.894,00)	96,62		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.386.674.808,00	1.339.742.914,00	(46.931.894,00)	96,62		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.386.674.808,00	1.339.742.914,00	(46.931.894,00)	96,62		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.003.750,00	43.503.750,00	(1.500.000,00)	96,67		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	45.003.750,00	43.503.750,00	(1.500.000,00)	96,67		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	35.400.000,00	33.900.000,00	(1.500.000,00)	95,76		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.603.750,00	9.603.750,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.847.375,00	386.566.602,00	(52.280.773,00)	88,09		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.139.375,00	99.539.375,00	(1.600.000,00)	98,42		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	101.139.375,00	99.539.375,00	(1.600.000,00)	98,42		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.139.375,00	99.539.375,00	(1.600.000,00)	98,42		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.770.500,00	39.769.667,00	(833,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	39.770.500,00	39.769.667,00	(833,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.770.500,00	39.769.667,00	(833,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.062.500,00	241.382.560,00	(50.679.940,00)	82,65		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	292.062.500,00	241.382.560,00	(50.679.940,00)	82,65		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.062.500,00	241.382.560,00	(50.679.940,00)	82,65		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.993.750,00	83.258.289,00	(7.735.461,00)	91,50		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	48.664.539,00	(5.335.461,00)	90,12		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	48.664.539,00	(5.335.461,00)	90,12		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	48.664.539,00	(5.335.461,00)	90,12		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.993.750,00	34.593.750,00	(2.400.000,00)	93,51		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	36.993.750,00	34.593.750,00	(2.400.000,00)	93,51		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.993.750,00	34.593.750,00	(2.400.000,00)	93,51		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.481.700,00	86.474.000,00	(4.007.700,00)	95,57		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.999.200,00	41.990.000,00	(3.009.200,00)	93,31		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.999.200,00	41.990.000,00	(3.009.200,00)	93,31		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.999.200,00	41.990.000,00	(3.009.200,00)	93,31		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.602.500,00	39.604.000,00	(998.500,00)	97,54		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	40.602.500,00	39.604.000,00	(998.500,00)	97,54		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.602.500,00	39.604.000,00	(998.500,00)	97,54		
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	25.000.000,00	23.020.000,00	(1.980.000,00)	92,08		
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000,00	23.020.000,00	(1.980.000,00)	92,08		
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	23.020.000,00	(1.980.000,00)	92,08		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.020.000,00	(1.980.000,00)	92,08		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.020.000,00	(1.980.000,00)	92,08		
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	59.941.000,00	54.949.700,00	(4.991.300,00)	91,67		
04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.941.000,00	54.949.700,00	(4.991.300,00)	91,67		
04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.699.700,00	(1.300.300,00)	95,67		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.699.700,00	(1.300.300,00)	95,67		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.699.700,00	(1.300.300,00)	95,67		
04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	29.941.000,00	26.250.000,00	(3.691.000,00)	87,67		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.941.000,00	26.250.000,00	(3.691.000,00)	87,67		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.691.000,00	0,00	(3.691.000,00)	0		
04.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	237.530.250,00	232.859.925,00	(4.670.325,00)	98,03		
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	237.530.250,00	232.859.925,00	(4.670.325,00)	98,03		
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	237.530.250,00	232.859.925,00	(4.670.325,00)	98,03		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	237.530.250,00	232.859.925,00	(4.670.325,00)	98,03		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.530.250,00	232.859.925,00	(4.670.325,00)	98,03		
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	30.000.000,00	27.663.580,00	(2.336.420,00)	92,21		
06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	27.663.580,00	(2.336.420,00)	92,21		
06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	27.663.580,00	(2.336.420,00)	92,21		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.663.580,00	(2.336.420,00)	92,21		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.663.580,00	(2.336.420,00)	92,21		
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	119.221.000,00	117.984.580,00	(1.236.420,00)	98,96		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	119.221.000,00	117.984.580,00	(1.236.420,00)	98,96		
07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	30.000.000,00	28.945.600,00	(1.054.400,00)	96,49		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.945.600,00	(1.054.400,00)	96,49		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.945.600,00	(1.054.400,00)	96,49		
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	19.221.000,00	19.038.980,00	(182.020,00)	99,05		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	19.221.000,00	19.038.980,00	(182.020,00)	99,05		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.221.000,00	19.038.980,00	(182.020,00)	99,05		
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.350.650.500,00	312.650.500,00	(2.038.000.000,00)	13,30		
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.350.650.500,00	312.650.500,00	(2.038.000.000,00)	13,30		
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.350.650.500,00	312.650.500,00	(2.038.000.000,00)	13,30		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.350.650.500,00	312.650.500,00	(2.038.000.000,00)	13,30		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.291.750,00	312.650.500,00	(98.641.250,00)	76,02		
08.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	1.939.358.750,00	0,00	(1.939.358.750,00)	0		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.895.044.133,00)	(2.726.673.840,00)	2.168.370.293,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.895.044.133,00)	(2.726.673.840,00)	2.168.370.293,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL
SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.001 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	389.599.470,00	155.913.000,00	(233.686.470,00)	40,02		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	389.599.470,00	155.913.000,00	(233.686.470,00)	40,02		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	389.599.470,00	155.913.000,00	(233.686.470,00)	40,02		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.993.567.914,00	3.910.366.868,00	(83.201.046,00)	97,92		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.117.267.914,00	3.075.360.342,00	(41.907.572,00)	98,66		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.395.069.164,00	2.380.018.085,00	(15.051.079,00)	99,37		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.357.269.164,00	2.342.218.085,00	(15.051.079,00)	99,36		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.357.269.164,00	2.342.218.085,00	(15.051.079,00)	99,36		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.357.269.164,00	2.342.218.085,00	(15.051.079,00)	99,36		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.950.000,00	72.643.920,00	(9.306.080,00)	88,64		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	81.950.000,00	72.643.920,00	(9.306.080,00)	88,64		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	81.950.000,00	72.643.920,00	(9.306.080,00)	88,64		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.950.000,00	72.643.920,00	(9.306.080,00)	88,64		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.748.500,00	296.025.912,00	(13.722.588,00)	95,57		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.967.500,00	7.967.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.967.500,00	7.967.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.967.500,00	7.967.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	74.998.500,00	(1.500,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.998.500,00	(1.500,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.998.500,00	(1.500,00)	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	34.999.578,00	(422,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.999.578,00	(422,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.999.578,00	(422,00)	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.781.000,00	175.060.334,00	(13.720.666,00)	92,73		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	188.781.000,00	175.060.334,00	(13.720.666,00)	92,73		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.781.000,00	175.060.334,00	(13.720.666,00)	92,73		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.800.000,00	93.047.275,00	(2.752.725,00)	97,13		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.400.000,00	42.647.275,00	(2.752.725,00)	93,94		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.400.000,00	42.647.275,00	(2.752.725,00)	93,94		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	42.647.275,00	(2.752.725,00)	93,94		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.013.750,00	122.938.650,00	(1.075.100,00)	99,13		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.823.750,00	31.759.550,00	(1.064.200,00)	96,76		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.823.750,00	31.759.550,00	(1.064.200,00)	96,76		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.823.750,00	31.759.550,00	(1.064.200,00)	96,76		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.790.000,00	4.780.000,00	(10.000,00)	99,79		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.790.000,00	4.780.000,00	(10.000,00)	99,79		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	4.780.000,00	(10.000,00)	99,79		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	2.999.100,00	(900,00)	99,97		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.999.100,00	(900,00)	99,97		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.999.100,00	(900,00)	99,97		
01.2.13	Penataan Organisasi	58.936.500,00	58.936.500,00	0,00	100,00		
01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	58.936.500,00	58.936.500,00	0,00	100,00		
01.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI	58.936.500,00	58.936.500,00	0,00	100,00		
01.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.936.500,00	58.936.500,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	60.000.000,00	40.778.016,00	(19.221.984,00)	67,96		
02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	40.778.016,00	(19.221.984,00)	67,96		
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	25.590.000,00	7.880.000,00	(17.710.000,00)	30,79		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.590.000,00	7.880.000,00	(17.710.000,00)	30,79		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.590.000,00	7.880.000,00	(17.710.000,00)	30,79		
02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	34.410.000,00	32.898.016,00	(1.511.984,00)	95,61		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.410.000,00	32.898.016,00	(1.511.984,00)	95,61		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.410.000,00	32.898.016,00	(1.511.984,00)	95,61		
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	60.000.000,00	47.237.958,00	(12.762.042,00)	78,73		
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	47.237.958,00	(12.762.042,00)	78,73		
03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	25.000.000,00	13.000.000,00	(12.000.000,00)	52,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	13.000.000,00	(12.000.000,00)	52,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	13.000.000,00	(12.000.000,00)	52,00		
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	34.237.958,00	(762.042,00)	97,82		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.237.958,00	(762.042,00)	97,82		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.237.958,00	(762.042,00)	97,82		
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	185.000.000,00	180.446.888,00	(4.553.112,00)	97,54		
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	185.000.000,00	180.446.888,00	(4.553.112,00)	97,54		
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	120.000.000,00	115.448.892,00	(4.551.108,00)	96,21		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	115.448.892,00	(4.551.108,00)	96,21		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	115.448.892,00	(4.551.108,00)	96,21		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	65.000.000,00	64.997.996,00	(2.004,00)	100,00		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	64.997.996,00	(2.004,00)	100,00		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.997.996,00	(2.004,00)	100,00		
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	571.300.000,00	566.543.664,00	(4.756.336,00)	99,17		
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	571.300.000,00	566.543.664,00	(4.756.336,00)	99,17		
05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	65.535.000,00	65.481.203,00	(53.797,00)	99,92		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	65.535.000,00	65.481.203,00	(53.797,00)	99,92		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.535.000,00	65.481.203,00	(53.797,00)	99,92		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	332.840.000,00	328.137.461,00	(4.702.539,00)	98,59		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	332.840.000,00	328.137.461,00	(4.702.539,00)	98,59		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.840.000,00	328.137.461,00	(4.702.539,00)	98,59		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	172.925.000,00	172.925.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	172.925.000,00	172.925.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.925.000,00	172.925.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.603.968.444,00)	(3.754.453.868,00)	(150.485.424,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.603.968.444,00)	(3.754.453.868,00)	(150.485.424,00)	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SKPD : 2-19.0-00.0-00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah

Unit Organisasi : 2-19.0-00.0-00.01.001 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.514.393.185,00	4.036.096.513,00	(478.296.672,00)	89,41		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.852.072.685,00	1.817.233.263,00	(34.839.422,00)	98,12		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.414.743.585,00	1.381.726.913,00	(33.016.672,00)	97,67		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.378.143.585,00	1.345.126.913,00	(33.016.672,00)	97,60		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.378.143.585,00	1.345.126.913,00	(33.016.672,00)	97,60		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.378.143.585,00	1.345.126.913,00	(33.016.672,00)	97,60		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.702.000,00	45.000.000,00	(702.000,00)	98,46		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.702.000,00	45.000.000,00	(702.000,00)	98,46		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	45.702.000,00	45.000.000,00	(702.000,00)	98,46		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.702.000,00	45.000.000,00	(702.000,00)	98,46		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.622.500,00	259.180.350,00	(442.150,00)	99,83		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.087.500,00	1.087.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.087.500,00	1.087.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.500,00	1.087.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.625.000,00	21.625.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	21.625.000,00	21.625.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.625.000,00	21.625.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	29.998.750,00	(1.250,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.998.750,00	(1.250,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.998.750,00	(1.250,00)	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.910.000,00	155.469.100,00	(440.900,00)	99,72		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	155.910.000,00	155.469.100,00	(440.900,00)	99,72		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.910.000,00	155.469.100,00	(440.900,00)	99,72		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	89.321.400,00	(678.600,00)	99,25		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.200.000,00	30.521.400,00	(678.600,00)	97,83		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	30.521.400,00	(678.600,00)	97,83		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	30.521.400,00	(678.600,00)	97,83		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.004.600,00	42.004.600,00	0,00	100,00		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.924.600,00	24.924.600,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.924.600,00	24.924.600,00	0,00	100,00		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.924.600,00	24.924.600,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.069.685.500,00	1.036.228.250,00	(33.457.250,00)	96,87		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	832.175.500,00	798.718.250,00	(33.457.250,00)	95,98		
02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	25.176.000,00	25.176.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.176.000,00	25.176.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.176.000,00	25.176.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	221.030.250,00	187.629.000,00	(33.401.250,00)	84,89		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	221.030.250,00	187.629.000,00	(33.401.250,00)	84,89		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.380.000,00	109.379.000,00	(1.000,00)	100,00		
02.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	111.650.250,00	78.250.000,00	(33.400.250,00)	70,08		
02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	74.410.000,00	74.410.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	74.410.000,00	74.410.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.410.000,00	74.410.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	511.559.250,00	511.503.250,00	(56.000,00)	99,99		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	511.559.250,00	511.503.250,00	(56.000,00)	99,99		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.559.250,00	511.503.250,00	(56.000,00)	99,99		
02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	237.510.000,00	237.510.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	237.510.000,00	237.510.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	237.510.000,00	237.510.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.510.000,00	37.510.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.332.635.000,00	922.635.000,00	(410.000.000,00)	69,23		
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.635.000,00	28.635.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	28.635.000,00	28.635.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.635.000,00	28.635.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.635.000,00	28.635.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	774.000.000,00	714.000.000,00	(60.000.000,00)	92,25		
03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	600.000.000,00	540.000.000,00	(60.000.000,00)	90,00		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	540.000.000,00	(60.000.000,00)	90,00		
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	540.000.000,00	(60.000.000,00)	90,00		
03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	530.000.000,00	180.000.000,00	(350.000.000,00)	33,96		
03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	530.000.000,00	180.000.000,00	(350.000.000,00)	33,96		
03.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	530.000.000,00	180.000.000,00	(350.000.000,00)	33,96		
03.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.05.03.5.1.05	Belanja Hibah	480.000.000,00	130.000.000,00	(350.000.000,00)	27,08		
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.514.393.185,00)	(4.036.096.513,00)	478.296.672,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.514.393.185,00)	(4.036.096.513,00)	478.296.672,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 KEBUDAYAAN
SKPD : 2-22.0-00.0-00.01 Dinas Kebudayaan
Unit Organisasi : 2-22.0-00.0-00.01.001 Dinas Kebudayaan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.358.389.270,00	3.149.383.596,00	(209.005.674,00)	93,78		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.808.406.520,00	1.749.836.246,00	(58.570.274,00)	96,76		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.481.710.770,00	1.424.848.136,00	(56.862.634,00)	96,16		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.459.510.770,00	1.402.848.136,00	(56.662.634,00)	96,12		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.459.510.770,00	1.402.848.136,00	(56.662.634,00)	96,12		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.459.510.770,00	1.402.848.136,00	(56.662.634,00)	96,12		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.200.000,00	22.000.000,00	(200.000,00)	99,10		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.200.000,00	22.000.000,00	(200.000,00)	99,10		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	22.200.000,00	22.000.000,00	(200.000,00)	99,10		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.187.000,00	232.185.710,00	(1.290,00)	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	39.998.750,00	(1.250,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.998.750,00	(1.250,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.998.750,00	(1.250,00)	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.087.000,00	59.087.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	59.087.000,00	59.087.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.087.000,00	59.087.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.100.000,00	108.099.960,00	(40,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	108.100.000,00	108.099.960,00	(40,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.100.000,00	108.099.960,00	(40,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.490.000,00	63.489.900,00	5.999.900,00	110,44		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00	17.499.900,00	5.999.900,00	152,17		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	17.499.900,00	5.999.900,00	152,17		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	17.499.900,00	5.999.900,00	152,17		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.018.750,00	29.312.500,00	(7.706.250,00)	79,18		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000,00	16.293.750,00	(7.706.250,00)	67,89		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	16.293.750,00	(7.706.250,00)	67,89		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	16.293.750,00	(7.706.250,00)	67,89		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.018.750,00	10.018.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.018.750,00	10.018.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.018.750,00	10.018.750,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.170.000.000,00	1.019.583.000,00	(150.417.000,00)	87,14		
02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.170.000.000,00	1.019.583.000,00	(150.417.000,00)	87,14		
02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	70.000.000,00	69.983.000,00	(17.000,00)	99,98		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.983.000,00	(17.000,00)	99,98		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.983.000,00	(17.000,00)	99,98		
02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1.100.000.000,00	949.600.000,00	(150.400.000,00)	86,33		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000,00	949.600.000,00	(150.400.000,00)	86,33		
02.2.03.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.100.000.000,00	949.600.000,00	(150.400.000,00)	86,33		
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	239.993.750,00	239.993.750,00	0,00	100,00		
04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	239.993.750,00	239.993.750,00	0,00	100,00		
04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	39.993.750,00	39.993.750,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.993.750,00	39.993.750,00	0,00	100,00		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.993.750,00	39.993.750,00	0,00	100,00		
04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	109.989.000,00	109.970.600,00	(18.400,00)	99,98		
05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	79.989.000,00	79.970.600,00	(18.400,00)	99,98		
05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	54.990.000,00	54.972.400,00	(17.600,00)	99,97		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.990.000,00	54.972.400,00	(17.600,00)	99,97		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.990.000,00	54.972.400,00	(17.600,00)	99,97		
05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	24.999.000,00	24.998.200,00	(800,00)	100,00		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.999.000,00	24.998.200,00	(800,00)	100,00		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.000,00	24.998.200,00	(800,00)	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.358.389.270,00)	(3.149.383.596,00)	209.005.674,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.358.389.270,00)	(3.149.383.596,00)	209.005.674,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.24 KEARSIPAN

SKPD : 2-24.0-00.0-00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Unit Organisasi : 2-24.0-00.0-00.01.001 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.105.221.275,00	2.071.602.128,00	(33.619.147,00)	98,40		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.776.421.275,00	1.742.802.197,00	(33.619.078,00)	98,11		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.331.021.275,00	1.313.512.579,00	(17.508.696,00)	98,68		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.305.221.275,00	1.287.712.579,00	(17.508.696,00)	98,66		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.305.221.275,00	1.287.712.579,00	(17.508.696,00)	98,66		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.305.221.275,00	1.287.712.579,00	(17.508.696,00)	98,66		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.282.000,00	49.282.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.282.000,00	49.282.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	49.282.000,00	49.282.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.282.000,00	49.282.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.921.750,00	177.915.454,00	(6.296,00)	100,00		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.486.250,00	1.485.000,00	(1.250,00)	99,92		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.486.250,00	1.485.000,00	(1.250,00)	99,92		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.486.250,00	1.485.000,00	(1.250,00)	99,92		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.730.000,00	57.725.000,00	(5.000,00)	99,99		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	57.730.000,00	57.725.000,00	(5.000,00)	99,99		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.730.000,00	57.725.000,00	(5.000,00)	99,99		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.094.500,00	44.094.460,00	(40,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	44.094.500,00	44.094.460,00	(40,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.094.500,00	44.094.460,00	(40,00)	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.611.000,00	74.610.994,00	(6,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	74.611.000,00	74.610.994,00	(6,00)	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.611.000,00	74.610.994,00	(6,00)	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.987.500,00	109.070.914,00	(13.916.586,00)	88,68		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	43.083.414,00	(1.916.586,00)	95,74		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	43.083.414,00	(1.916.586,00)	95,74		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	43.083.414,00	(1.916.586,00)	95,74		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.987.500,00	65.987.500,00	(12.000.000,00)	84,61		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	77.987.500,00	65.987.500,00	(12.000.000,00)	84,61		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.987.500,00	65.987.500,00	(12.000.000,00)	84,61		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.208.750,00	93.021.250,00	(2.187.500,00)	97,70		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.168.750,00	64.981.250,00	(2.187.500,00)	96,74		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	67.168.750,00	64.981.250,00	(2.187.500,00)	96,74		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.168.750,00	64.981.250,00	(2.187.500,00)	96,74		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	178.800.000,00	178.799.931,00	(69,00)	100,00		
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	69.999.931,00	(69,00)	100,00		
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	34.999.931,00	(69,00)	100,00		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.999.931,00	(69,00)	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.999.931,00	(69,00)	100,00		
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.105.221.275,00)	(2.071.602.128,00)	33.619.147,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.105.221.275,00)	(2.071.602.128,00)	33.619.147,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Perikanan
Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01.001 Dinas Perikanan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	18.443.035.288,00	17.427.784.025,72	(1.015.251.262,28)	94,50		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.506.049.788,00	3.305.122.114,00	(200.927.674,00)	94,27		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.965.250,00	38.415.250,00	(2.550.000,00)	93,78		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.965.250,00	38.415.250,00	(2.550.000,00)	93,78		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.965.250,00	38.415.250,00	(2.550.000,00)	93,78		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.965.250,00	38.415.250,00	(2.550.000,00)	93,78		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.809.717.288,00	2.761.331.364,00	(48.385.924,00)	98,28		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.750.317.288,00	2.701.931.364,00	(48.385.924,00)	98,24		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.750.317.288,00	2.701.931.364,00	(48.385.924,00)	98,24		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.750.317.288,00	2.701.931.364,00	(48.385.924,00)	98,24		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.024.250,00	344.763.200,00	(105.261.050,00)	76,61		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.250.000,00	4.076.000,00	(3.174.000,00)	56,22		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.250.000,00	4.076.000,00	(3.174.000,00)	56,22		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	4.076.000,00	(3.174.000,00)	56,22		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.005.250,00	44.319.000,00	(15.686.250,00)	73,86		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.005.250,00	44.319.000,00	(15.686.250,00)	73,86		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.005.250,00	44.319.000,00	(15.686.250,00)	73,86		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.050.000,00	30.147.900,00	(2.902.100,00)	91,22		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	33.050.000,00	30.147.900,00	(2.902.100,00)	91,22		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.050.000,00	30.147.900,00	(2.902.100,00)	91,22		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.719.000,00	261.220.300,00	(83.498.700,00)	75,78		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	344.719.000,00	261.220.300,00	(83.498.700,00)	75,78		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.719.000,00	261.220.300,00	(83.498.700,00)	75,78		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	0		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	0		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	0		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	0		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.075.000,00	83.073.800,00	(13.001.200,00)	86,47		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.100.000,00	48.368.800,00	(2.731.200,00)	94,66		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.100.000,00	48.368.800,00	(2.731.200,00)	94,66		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.100.000,00	48.368.800,00	(2.731.200,00)	94,66		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.975.000,00	34.705.000,00	(10.270.000,00)	77,17		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	44.975.000,00	34.705.000,00	(10.270.000,00)	77,17		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.975.000,00	34.705.000,00	(10.270.000,00)	77,17		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.518.000,00	77.538.500,00	(22.979.500,00)	77,14		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.700.000,00	67.817.500,00	(5.882.500,00)	92,02		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	73.700.000,00	67.817.500,00	(5.882.500,00)	92,02		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.700.000,00	67.817.500,00	(5.882.500,00)	92,02		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.328.000,00	5.428.000,00	(9.900.000,00)	35,41		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.328.000,00	5.428.000,00	(9.900.000,00)	35,41		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.328.000,00	5.428.000,00	(9.900.000,00)	35,41		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.490.000,00	4.293.000,00	(7.197.000,00)	37,36		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	11.490.000,00	4.293.000,00	(7.197.000,00)	37,36		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.490.000,00	4.293.000,00	(7.197.000,00)	37,36		
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	8.052.765.500,00	7.809.722.830,00	(243.042.670,00)	96,98		
03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	7.949.359.500,00	7.726.882.830,00	(222.476.670,00)	97,20		
03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	78.617.000,00	42.643.000,00	(35.974.000,00)	54,24		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	78.617.000,00	42.643.000,00	(35.974.000,00)	54,24		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.617.000,00	42.643.000,00	(35.974.000,00)	54,24		
03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	7.870.742.500,00	7.684.239.830,00	(186.502.670,00)	97,63		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.870.742.500,00	7.684.239.830,00	(186.502.670,00)	97,63		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.870.742.500,00	7.684.239.830,00	(186.502.670,00)	97,63		
03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	57.158.000,00	37.987.500,00	(19.170.500,00)	66,46		
03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	25.000.000,00	19.025.000,00	(5.975.000,00)	76,10		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	19.025.000,00	(5.975.000,00)	76,10		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	19.025.000,00	(5.975.000,00)	76,10		
03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	32.158.000,00	18.962.500,00	(13.195.500,00)	58,97		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.158.000,00	18.962.500,00	(13.195.500,00)	58,97		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.158.000,00	18.962.500,00	(13.195.500,00)	58,97		
03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	46.248.000,00	44.852.500,00	(1.395.500,00)	96,98		
03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	46.248.000,00	44.852.500,00	(1.395.500,00)	96,98		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.248.000,00	44.852.500,00	(1.395.500,00)	96,98		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.248.000,00	44.852.500,00	(1.395.500,00)	96,98		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.525.699.250,00	4.995.559.170,00	(530.140.080,00)	90,41		
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000,00	43.229.750,00	(6.770.250,00)	86,46		
04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00	43.229.750,00	(6.770.250,00)	86,46		
04.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	43.229.750,00	(6.770.250,00)	86,46		
04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	43.229.750,00	(6.770.250,00)	86,46		
04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.231.250,00	0,00	(20.231.250,00)	0		
04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.231.250,00	0,00	(20.231.250,00)	0		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.231.250,00	0,00	(20.231.250,00)	0		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.231.250,00	0,00	(20.231.250,00)	0		
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	5.455.468.000,00	4.952.329.420,00	(503.138.580,00)	90,78		
04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	39.939.000,00	(10.061.000,00)	79,88		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	39.939.000,00	(10.061.000,00)	79,88		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	39.939.000,00	(10.061.000,00)	79,88		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.405.468.000,00	4.912.390.420,00	(493.077.580,00)	90,88		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.405.468.000,00	4.912.390.420,00	(493.077.580,00)	90,88		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.405.468.000,00	4.912.390.420,00	(493.077.580,00)	90,88		
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.358.520.750,00	1.317.379.911,72	(41.140.838,28)	96,97		
06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	33.520.750,00	32.338.750,00	(1.182.000,00)	96,47		
06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.520.750,00	32.338.750,00	(1.182.000,00)	96,47		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.520.750,00	32.338.750,00	(1.182.000,00)	96,47		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.520.750,00	32.338.750,00	(1.182.000,00)	96,47		
06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.325.000.000,00	1.285.041.161,72	(39.958.838,28)	96,98		
06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	110.755.800,00	(14.244.200,00)	88,60		
06.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	110.755.800,00	(14.244.200,00)	88,60		
06.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	110.755.800,00	(14.244.200,00)	88,60		
06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000,00	1.174.285.361,72	(25.714.638,28)	97,86		
06.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000,00	1.174.285.361,72	(25.714.638,28)	97,86		
06.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	1.174.285.361,72	(25.714.638,28)	97,86		
	SURPLUS / DEFISIT	(18.443.035.288,00)	(17.427.784.025,72)	1.015.251.262,28	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(18.443.035.288,00)	(17.427.784.025,72)	1.015.251.262,28	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA
SKPD : 3-26.0-00.0-00.01 Dinas Pariwisata
Unit Organisasi : 3-26.0-00.0-00.01.001 Dinas Pariwisata

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.451.328.898,00	3.259.718.717,00	(191.610.181,00)	94,45		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.285.465.148,00	2.219.546.717,00	(65.918.431,00)	97,12		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.781.500,00	36.781.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.781.500,00	36.781.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.781.500,00	36.781.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.781.500,00	36.781.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.789.683.898,00	1.779.988.717,00	(9.695.181,00)	99,46		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.748.328.898,00	1.738.671.717,00	(9.657.181,00)	99,45		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.748.328.898,00	1.738.671.717,00	(9.657.181,00)	99,45		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.748.328.898,00	1.738.671.717,00	(9.657.181,00)	99,45		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.355.000,00	41.317.000,00	(38.000,00)	99,91		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	41.355.000,00	41.317.000,00	(38.000,00)	99,91		
01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.555.000,00	3.517.000,00	(38.000,00)	98,93		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.027.000,00	26.015.000,00	(12.000,00)	99,95		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.027.000,00	26.015.000,00	(12.000,00)	99,95		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	26.027.000,00	26.015.000,00	(12.000,00)	99,95		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.027.000,00	26.015.000,00	(12.000,00)	99,95		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.201.500,00	228.589.000,00	(19.612.500,00)	92,10		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.699.000,00	42.260.000,00	(4.439.000,00)	90,49		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	46.699.000,00	42.260.000,00	(4.439.000,00)	90,49		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.699.000,00	42.260.000,00	(4.439.000,00)	90,49		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.115.500,00	32.100.000,00	(15.500,00)	99,95		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	32.115.500,00	32.100.000,00	(15.500,00)	99,95		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.115.500,00	32.100.000,00	(15.500,00)	99,95		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.887.000,00	140.729.000,00	(15.158.000,00)	90,28		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	155.887.000,00	140.729.000,00	(15.158.000,00)	90,28		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.887.000,00	140.729.000,00	(15.158.000,00)	90,28		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.958.750,00	142.253.000,00	(6.705.750,00)	95,50		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	52.303.000,00	(4.697.000,00)	91,76		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	57.000.000,00	52.303.000,00	(4.697.000,00)	91,76		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	52.303.000,00	(4.697.000,00)	91,76		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.958.750,00	89.950.000,00	(2.008.750,00)	97,82		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	91.958.750,00	89.950.000,00	(2.008.750,00)	97,82		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.958.750,00	89.950.000,00	(2.008.750,00)	97,82		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.812.500,00	5.920.000,00	(29.892.500,00)	16,53		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.362.500,00	2.470.000,00	(29.892.500,00)	7,63		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.362.500,00	2.470.000,00	(29.892.500,00)	7,63		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.362.500,00	2.470.000,00	(29.892.500,00)	7,63		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	663.545.750,00	552.098.000,00	(111.447.750,00)	83,20		
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	217.252.000,00	189.820.000,00	(27.432.000,00)	87,37		
02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	79.775.000,00	77.770.000,00	(2.005.000,00)	97,49		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	79.775.000,00	77.770.000,00	(2.005.000,00)	97,49		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.775.000,00	77.770.000,00	(2.005.000,00)	97,49		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	137.477.000,00	112.050.000,00	(25.427.000,00)	81,50		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	137.477.000,00	112.050.000,00	(25.427.000,00)	81,50		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.477.000,00	112.050.000,00	(25.427.000,00)	81,50		
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	446.293.750,00	362.278.000,00	(84.015.750,00)	81,17		
02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	392.500.000,00	308.635.000,00	(83.865.000,00)	78,63		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	392.500.000,00	308.635.000,00	(83.865.000,00)	78,63		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.500.000,00	308.635.000,00	(83.865.000,00)	78,63		
02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	53.793.750,00	53.643.000,00	(150.750,00)	99,72		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	53.793.750,00	53.643.000,00	(150.750,00)	99,72		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.793.750,00	53.643.000,00	(150.750,00)	99,72		
03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	457.928.000,00	454.324.000,00	(3.604.000,00)	99,21		
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	457.928.000,00	454.324.000,00	(3.604.000,00)	99,21		
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	442.709.000,00	439.224.000,00	(3.485.000,00)	99,21		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	442.709.000,00	439.224.000,00	(3.485.000,00)	99,21		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.709.000,00	439.224.000,00	(3.485.000,00)	99,21		
03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	15.219.000,00	15.100.000,00	(119.000,00)	99,22		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.219.000,00	15.100.000,00	(119.000,00)	99,22		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.219.000,00	15.100.000,00	(119.000,00)	99,22		
05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	44.390.000,00	33.750.000,00	(10.640.000,00)	76,03		
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	44.390.000,00	33.750.000,00	(10.640.000,00)	76,03		
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	44.390.000,00	33.750.000,00	(10.640.000,00)	76,03		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.390.000,00	33.750.000,00	(10.640.000,00)	76,03		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.390.000,00	33.750.000,00	(10.640.000,00)	76,03		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.451.328.898,00)	(3.259.718.717,00)	191.610.181,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.451.328.898,00)	(3.259.718.717,00)	191.610.181,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN
SKPD : 3-27.0-00.0-00.01 Dinas Pertanian
Unit Organisasi : 3-27.0-00.0-00.01.000 Dinas Pertanian

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	13.620.826.524,00	13.342.178.776,00	(278.647.748,00)	97,95		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.992.503.449,00	4.959.561.637,00	(32.941.812,00)	99,34		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.483.259.699,00	4.453.753.608,00	(29.506.091,00)	99,34		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.429.859.699,00	4.400.353.608,00	(29.506.091,00)	99,33		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.429.859.699,00	4.400.353.608,00	(29.506.091,00)	99,33		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.429.859.699,00	4.400.353.608,00	(29.506.091,00)	99,33		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.499.250,00	320.237.314,00	(261.936,00)	99,92		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.606.250,00	107.401.000,00	(205.250,00)	99,81		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	107.606.250,00	107.401.000,00	(205.250,00)	99,81		
01.2.06.04.5.1.01	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.206.250,00	104.001.000,00	(205.250,00)	99,80		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.873.000,00	11.855.500,00	(17.500,00)	99,85		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.873.000,00	11.855.500,00	(17.500,00)	99,85		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.873.000,00	11.855.500,00	(17.500,00)	99,85		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.700.000,00	3.690.000,00	(10.000,00)	99,73		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	3.690.000,00	(10.000,00)	99,73		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.690.000,00	(10.000,00)	99,73		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.945.000,00	194.915.814,00	(29.186,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	194.945.000,00	194.915.814,00	(29.186,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.945.000,00	194.915.814,00	(29.186,00)	99,99		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.500.000,00	54.730.277,00	(769.723,00)	98,61		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.500.000,00	18.730.277,00	(769.723,00)	96,05		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	18.730.277,00	(769.723,00)	96,05		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	18.730.277,00	(769.723,00)	96,05		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.244.500,00	130.840.438,00	(2.404.062,00)	98,20		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.140.000,00	39.135.500,00	(4.500,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.140.000,00	39.135.500,00	(4.500,00)	99,99		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.140.000,00	39.135.500,00	(4.500,00)	99,99		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.614.500,00	19.375.938,00	(2.238.562,00)	89,64		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.614.500,00	19.375.938,00	(2.238.562,00)	89,64		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.614.500,00	19.375.938,00	(2.238.562,00)	89,64		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00	2.750.000,00	(90.000,00)	96,83		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.840.000,00	2.750.000,00	(90.000,00)	96,83		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	2.750.000,00	(90.000,00)	96,83		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.650.000,00	69.579.000,00	(71.000,00)	99,90		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	69.650.000,00	69.579.000,00	(71.000,00)	99,90		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.650.000,00	69.579.000,00	(71.000,00)	99,90		
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	151.081.250,00	151.080.219,00	(1.031,00)	100,00		
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	151.081.250,00	151.080.219,00	(1.031,00)	100,00		
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	151.081.250,00	151.080.219,00	(1.031,00)	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	151.081.250,00	151.080.219,00	(1.031,00)	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.081.250,00	151.080.219,00	(1.031,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.598.314.250,00	7.353.766.510,00	(244.547.740,00)	96,78		
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	710.381.250,00	620.231.250,00	(90.150.000,00)	87,31		
03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	710.381.250,00	620.231.250,00	(90.150.000,00)	87,31		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	704.131.250,00	613.981.250,00	(90.150.000,00)	87,20		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.131.250,00	613.981.250,00	(90.150.000,00)	87,20		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00		
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	6.887.933.000,00	6.733.535.260,00	(154.397.740,00)	97,76		
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.950.400.000,00	2.925.400.000,00	(25.000.000,00)	99,15		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.950.400.000,00	2.925.400.000,00	(25.000.000,00)	99,15		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.950.400.000,00	2.925.400.000,00	(25.000.000,00)	99,15		
03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.338.845.850,00	1.270.150.000,00	(68.695.850,00)	94,87		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	138.845.850,00	138.750.000,00	(95.850,00)	99,93		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.845.850,00	138.750.000,00	(95.850,00)	99,93		
03.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	1.131.400.000,00	(68.600.000,00)	94,28		
03.2.02.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.750.000,00	93.750.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.050.000.000,00	981.400.000,00	(68.600.000,00)	93,47		
03.2.02.08.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.598.687.150,00	2.537.985.260,00	(60.701.890,00)	97,66		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.598.687.150,00	2.537.985.260,00	(60.701.890,00)	97,66		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.598.687.150,00	2.537.985.260,00	(60.701.890,00)	97,66		
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	241.044.000,00	240.370.960,00	(673.040,00)	99,72		
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	90.469.000,00	89.795.960,00	(673.040,00)	99,26		
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	90.469.000,00	89.795.960,00	(673.040,00)	99,26		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	90.469.000,00	89.795.960,00	(673.040,00)	99,26		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.469.000,00	89.795.960,00	(673.040,00)	99,26		
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.575.000,00	150.575.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.575.000,00	150.575.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	150.575.000,00	150.575.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.575.000,00	150.575.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	267.324.575,00	267.060.450,00	(264.125,00)	99,90		
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	267.324.575,00	267.060.450,00	(264.125,00)	99,90		
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	267.324.575,00	267.060.450,00	(264.125,00)	99,90		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	267.324.575,00	267.060.450,00	(264.125,00)	99,90		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.324.575,00	267.060.450,00	(264.125,00)	99,90		
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	370.559.000,00	370.339.000,00	(220.000,00)	99,94		
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	370.559.000,00	370.339.000,00	(220.000,00)	99,94		
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	370.559.000,00	370.339.000,00	(220.000,00)	99,94		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	370.559.000,00	370.339.000,00	(220.000,00)	99,94		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.559.000,00	370.339.000,00	(220.000,00)	99,94		
	SURPLUS / DEFISIT	(13.620.826.524,00)	(13.342.178.776,00)	278.647.748,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(13.620.826.524,00)	(13.342.178.776,00)	278.647.748,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3.30 PERDAGANGAN

SKPD : 3-30.0-00.0-00.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Unit Organisasi : 3-30.0-00.0-00.01.001 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	51.611.000,00	13.798.000,00	(37.813.000,00)	26,73		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.611.000,00	13.798.000,00	(37.813.000,00)	26,73		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	51.611.000,00	13.798.000,00	(37.813.000,00)	26,73		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	3.739.671.264,00	3.628.041.495,00	(111.629.769,00)	97,01		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.511.345.764,00	2.476.954.156,00	(34.391.608,00)	98,63		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.980.150.514,00	1.966.520.417,00	(13.630.097,00)	99,31		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.960.400.514,00	1.946.770.417,00	(13.630.097,00)	99,30		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.960.400.514,00	1.946.770.417,00	(13.630.097,00)	99,30		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.960.400.514,00	1.946.770.417,00	(13.630.097,00)	99,30		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.041.500,00	358.756.023,00	(2.285.477,00)	99,37		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.716.500,00	41.716.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	41.716.500,00	41.716.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.716.500,00	41.716.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	30,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	30,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	30,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.325.000,00	253.139.523,00	(185.477,00)	99,93		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	253.325.000,00	253.139.523,00	(185.477,00)	99,93		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.325.000,00	253.139.523,00	(185.477,00)	99,93		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.500.000,00	82.759.091,00	(17.740.909,00)	82,35		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.500.000,00	18.759.091,00	(17.740.909,00)	51,39		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	36.500.000,00	18.759.091,00	(17.740.909,00)	51,39		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	18.759.091,00	(17.740.909,00)	51,39		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.403.750,00	47.668.625,00	(735.125,00)	98,48		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.554.000,00	33.818.875,00	(735.125,00)	97,87		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.554.000,00	33.818.875,00	(735.125,00)	97,87		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.554.000,00	33.818.875,00	(735.125,00)	97,87		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.849.750,00	10.849.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.849.750,00	10.849.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.849.750,00	10.849.750,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	429.999.500,00	408.558.905,00	(21.440.595,00)	95,01		
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	429.999.500,00	408.558.905,00	(21.440.595,00)	95,01		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	29.999.500,00	15.303.905,00	(14.695.595,00)	51,01		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.999.500,00	15.303.905,00	(14.695.595,00)	51,01		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.500,00	15.303.905,00	(14.695.595,00)	51,01		
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	60.000.000,00	55.606.000,00	(4.394.000,00)	92,68		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	55.606.000,00	(4.394.000,00)	92,68		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	25.606.000,00	(4.394.000,00)	85,35		
02.2.01.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	20.000.000,00	17.649.000,00	(2.351.000,00)	88,25		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.649.000,00	(2.351.000,00)	88,25		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.649.000,00	(2.351.000,00)	88,25		
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	55.000.000,00	6.575.250,00	(48.424.750,00)	11,96		
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	55.000.000,00	6.575.250,00	(48.424.750,00)	11,96		
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	55.000.000,00	6.575.250,00	(48.424.750,00)	11,96		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	6.575.250,00	(48.424.750,00)	11,96		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	6.575.250,00	(8.424.750,00)	43,84		
03.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0		
03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	114.348.500,00	114.348.500,00	0,00	100,00		
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	114.348.500,00	114.348.500,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	114.348.500,00	114.348.500,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	94.523.500,00	94.523.500,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.523.500,00	94.523.500,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	19.825.000,00	19.825.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.825.000,00	19.825.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	35.768.500,00	32.781.600,00	(2.986.900,00)	91,65		
04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.325.000,00	(675.000,00)	95,50		
04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	15.000.000,00	14.325.000,00	(675.000,00)	95,50		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.325.000,00	(675.000,00)	95,50		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.325.000,00	(675.000,00)	95,50		
04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00		
04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00		
04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.768.500,00	9.456.600,00	(1.311.900,00)	87,82		
04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.768.500,00	9.456.600,00	(1.311.900,00)	87,82		
04.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.768.500,00	9.456.600,00	(1.311.900,00)	87,82		
04.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.768.500,00	9.456.600,00	(1.311.900,00)	87,82		
04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	388.209.000,00	387.874.071,00	(334.929,00)	99,91		
04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	358.209.000,00	357.874.071,00	(334.929,00)	99,91		
04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.666.000,00	(334.000,00)	99,17		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.666.000,00	(334.000,00)	99,17		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.666.000,00	(334.000,00)	99,17		
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	318.209.000,00	318.208.071,00	(929,00)	100,00		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	318.209.000,00	318.208.071,00	(929,00)	100,00		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.209.000,00	318.208.071,00	(929,00)	100,00		
04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	50.000.000,00	47.711.000,00	(2.289.000,00)	95,42		
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	37.936.000,00	(2.064.000,00)	94,84		
05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	30.000.000,00	27.936.000,00	(2.064.000,00)	93,12		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.936.000,00	(2.064.000,00)	93,12		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.936.000,00	(2.064.000,00)	93,12		
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.775.000,00	(225.000,00)	97,75		
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.775.000,00	(225.000,00)	97,75		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.775.000,00	(225.000,00)	97,75		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.775.000,00	(225.000,00)	97,75		
06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	35.000.000,00	33.335.499,00	(1.664.501,00)	95,24		
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	35.000.000,00	33.335.499,00	(1.664.501,00)	95,24		
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	35.000.000,00	33.335.499,00	(1.664.501,00)	95,24		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	33.335.499,00	(1.664.501,00)	95,24		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	33.335.499,00	(1.664.501,00)	95,24		
07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	85.000.000,00	84.902.514,00	(97.486,00)	99,89		
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	85.000.000,00	84.902.514,00	(97.486,00)	99,89		
07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	85.000.000,00	84.902.514,00	(97.486,00)	99,89		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	84.902.514,00	(97.486,00)	99,89		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	84.902.514,00	(97.486,00)	99,89		
	SURPLUS / DEFISIT	(3.688.060.264,00)	(3.614.243.495,00)	73.816.769,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.688.060.264,00)	(3.614.243.495,00)	73.816.769,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.001 SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	62.501.451.607,00	56.350.616.943,00	(6.150.834.664,00)	90,16		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.520.855.582,00	24.836.233.553,00	(1.684.622.029,00)	93,65		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.852.770.251,00	6.799.697.182,00	(53.073.069,00)	99,23		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.820.492.251,00	6.769.117.682,00	(51.374.569,00)	99,25		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.820.492.251,00	6.769.117.682,00	(51.374.569,00)	99,25		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.820.492.251,00	6.769.117.682,00	(51.374.569,00)	99,25		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.278.000,00	30.579.500,00	(1.698.500,00)	94,74		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.278.000,00	30.579.500,00	(1.698.500,00)	94,74		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.478.000,00	13.779.500,00	(1.698.500,00)	89,03		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.250.000,00	164.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	134.250.000,00	134.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	134.250.000,00	134.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.250.000,00	134.250.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.285.891.250,00	6.700.342.249,00	(585.549.001,00)	91,96		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.086.250,00	47.083.700,00	(2.550,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	47.086.250,00	47.083.700,00	(2.550,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.086.250,00	47.083.700,00	(2.550,00)	99,99		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	777.421.500,00	586.957.750,00	(190.463.750,00)	75,50		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	777.421.500,00	586.957.750,00	(190.463.750,00)	75,50		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	777.421.500,00	586.957.750,00	(190.463.750,00)	75,50		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	395.670.500,00	334.597.100,00	(61.073.400,00)	84,56		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	395.670.500,00	334.597.100,00	(61.073.400,00)	84,56		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.670.500,00	334.597.100,00	(61.073.400,00)	84,56		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	147.250.000,00	146.648.100,00	(601.900,00)	99,59		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	147.250.000,00	146.648.100,00	(601.900,00)	99,59		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.250.000,00	146.648.100,00	(601.900,00)	99,59		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.563.530.500,00	2.236.197.000,00	(327.333.500,00)	87,23		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.563.530.500,00	2.236.197.000,00	(327.333.500,00)	87,23		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.563.530.500,00	2.236.197.000,00	(327.333.500,00)	87,23		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.354.932.500,00	3.348.858.599,00	(6.073.901,00)	99,82		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.354.932.500,00	3.348.858.599,00	(6.073.901,00)	99,82		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.354.932.500,00	3.348.858.599,00	(6.073.901,00)	99,82		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	994.964.025,00	534.539.600,00	(460.424.425,00)	53,72		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	482.744.406,00	385.414.600,00	(97.329.806,00)	79,84		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	482.744.406,00	385.414.600,00	(97.329.806,00)	79,84		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.744.406,00	385.414.600,00	(97.329.806,00)	79,84		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	464.219.619,00	101.125.000,00	(363.094.619,00)	21,78		
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	136.735.000,00	26.875.000,00	(109.860.000,00)	19,65		
01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.735.000,00	26.875.000,00	(109.860.000,00)	19,65		
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	327.484.619,00	74.250.000,00	(253.234.619,00)	22,67		
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	327.484.619,00	74.250.000,00	(253.234.619,00)	22,67		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.320.344.302,00	4.266.334.895,00	(54.009.407,00)	98,75		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.419.199.072,00	2.392.401.245,00	(26.797.827,00)	98,89		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.419.199.072,00	2.392.401.245,00	(26.797.827,00)	98,89		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.419.199.072,00	2.392.401.245,00	(26.797.827,00)	98,89		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.885.395.230,00	1.858.183.650,00	(27.211.580,00)	98,56		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.885.395.230,00	1.858.183.650,00	(27.211.580,00)	98,56		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	89.400.000,00	86.600.000,00	(2.800.000,00)	96,87		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.795.995.230,00	1.771.583.650,00	(24.411.580,00)	98,64		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.181.491.450,00	904.329.184,00	(277.162.266,00)	76,54		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	191.484.450,00	191.210.029,00	(274.421,00)	99,86		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	191.484.450,00	191.210.029,00	(274.421,00)	99,86		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.484.450,00	191.210.029,00	(274.421,00)	99,86		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	633.891.000,00	540.954.147,00	(92.936.853,00)	85,34		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	633.891.000,00	540.954.147,00	(92.936.853,00)	85,34		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.891.000,00	540.954.147,00	(92.936.853,00)	85,34		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.316.000,00	21.490.008,00	(170.825.992,00)	11,17		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	192.316.000,00	21.490.008,00	(170.825.992,00)	11,17		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.316.000,00	21.490.008,00	(170.825.992,00)	11,17		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.800.000,00	150.675.000,00	(13.125.000,00)	91,99		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	163.800.000,00	150.675.000,00	(13.125.000,00)	91,99		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.800.000,00	150.675.000,00	(13.125.000,00)	91,99		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	792.385.804,00	701.632.443,00	(90.753.361,00)	88,55		
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	473.585.804,00	426.234.378,00	(47.351.426,00)	90,00		
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	473.585.804,00	426.234.378,00	(47.351.426,00)	90,00		
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	473.585.804,00	426.234.378,00	(47.351.426,00)	90,00		
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	206.800.000,00	163.400.000,00	(43.400.000,00)	79,01		
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	206.800.000,00	163.400.000,00	(43.400.000,00)	79,01		
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.800.000,00	163.400.000,00	(43.400.000,00)	79,01		
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	112.000.000,00	111.998.065,00	(1.935,00)	100,00		
01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	112.000.000,00	111.998.065,00	(1.935,00)	100,00		
01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000,00	111.998.065,00	(1.935,00)	100,00		
01.2.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah	2.978.350.500,00	2.867.900.000,00	(110.450.500,00)	96,29		
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.390.200.000,00	1.390.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.390.200.000,00	1.390.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.390.200.000,00	1.390.200.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	798.000.000,00	798.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	798.000.000,00	798.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	798.000.000,00	798.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	790.150.500,00	679.700.000,00	(110.450.500,00)	86,02		
01.2.12.03.5.1	BELANJA OPERASI	790.150.500,00	679.700.000,00	(110.450.500,00)	86,02		
01.2.12.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.150.500,00	679.700.000,00	(110.450.500,00)	86,02		
01.2.13	Penataan Organisasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	169.500.000,00	169.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	169.500.000,00	169.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.500.000,00	169.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.03.5.1.01	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.500.000,00	136.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.450.408.000,00	1.397.208.000,00	(53.200.000,00)	96,33		
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	351.758.000,00	351.758.000,00	0,00	100,00		
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	351.758.000,00	351.758.000,00	0,00	100,00		
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.758.000,00	351.758.000,00	0,00	100,00		
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	409.200.000,00	356.700.000,00	(52.500.000,00)	87,17		
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	409.200.000,00	356.700.000,00	(52.500.000,00)	87,17		
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.200.000,00	356.700.000,00	(52.500.000,00)	87,17		
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	689.450.000,00	688.750.000,00	(700.000,00)	99,90		
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	689.450.000,00	688.750.000,00	(700.000,00)	99,90		
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.450.000,00	688.750.000,00	(700.000,00)	99,90		
02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	34.000.443.400,00	29.563.785.297,00	(4.436.658.103,00)	86,95		
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.359.881.400,00	1.348.523.900,00	(11.357.500,00)	99,16		
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	909.972.150,00	898.836.650,00	(11.135.500,00)	98,78		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	909.972.150,00	898.836.650,00	(11.135.500,00)	98,78		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.972.150,00	898.836.650,00	(11.135.500,00)	98,78		
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	149.933.250,00	149.920.250,00	(13.000,00)	99,99		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	149.933.250,00	149.920.250,00	(13.000,00)	99,99		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.933.250,00	149.920.250,00	(13.000,00)	99,99		
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	299.976.000,00	299.767.000,00	(209.000,00)	99,93		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	299.976.000,00	299.767.000,00	(209.000,00)	99,93		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.576.000,00	285.367.000,00	(209.000,00)	99,93		
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	32.172.840.000,00	27.753.944.317,00	(4.418.895.683,00)	86,27		
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.137.626.000,00	27.718.730.317,00	(4.418.895.683,00)	86,25		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.137.626.000,00	27.718.730.317,00	(4.418.895.683,00)	86,25		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.986.036.000,00	1.543.730.317,00	(442.305.683,00)	77,73		
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	30.151.590.000,00	26.175.000.000,00	(3.976.590.000,00)	86,81		
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	35.214.000,00	35.214.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.214.000,00	35.214.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.614.000,00	19.614.000,00	0,00	100,00		
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	467.722.000,00	461.317.080,00	(6.404.920,00)	98,63		
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	106.050.000,00	100.850.000,00	(5.200.000,00)	95,10		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	106.050.000,00	100.850.000,00	(5.200.000,00)	95,10		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.050.000,00	100.850.000,00	(5.200.000,00)	95,10		
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	261.672.000,00	260.467.080,00	(1.204.920,00)	99,54		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	261.672.000,00	260.467.080,00	(1.204.920,00)	99,54		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.672.000,00	260.467.080,00	(1.204.920,00)	99,54		
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.980.152.625,00	1.950.598.093,00	(29.554.532,00)	98,51		
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.800.000,00	236.800.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	619.998.875,00	619.998.875,00	0,00	100,00		
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	195.520.500,00	195.520.500,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	195.520.500,00	195.520.500,00	0,00	100,00		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.520.500,00	195.520.500,00	0,00	100,00		
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	274.478.375,00	274.478.375,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	274.478.375,00	274.478.375,00	0,00	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.478.375,00	274.478.375,00	0,00	100,00		
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	785.153.750,00	755.599.218,00	(29.554.532,00)	96,24		
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	264.344.750,00	263.561.368,00	(783.382,00)	99,70		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	264.344.750,00	263.561.368,00	(783.382,00)	99,70		
03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	205.100.000,00	205.100.000,00	0,00	100,00		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.244.750,00	58.461.368,00	(783.382,00)	98,68		
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	380.858.500,00	352.087.350,00	(28.771.150,00)	92,45		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	380.858.500,00	352.087.350,00	(28.771.150,00)	92,45		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.858.500,00	352.087.350,00	(28.771.150,00)	92,45		
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	139.950.500,00	139.950.500,00	0,00	100,00		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	139.950.500,00	139.950.500,00	0,00	100,00		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.950.500,00	139.950.500,00	0,00	100,00		
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(62.501.451.607,00)	(56.350.616.943,00)	6.150.834.664,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(62.501.451.607,00)	(56.350.616.943,00)	6.150.834.664,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD
Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.001 Sekretariat DPRD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	40.251.052.055,00	35.370.810.357,00	(4.880.241.698,00)	87,88		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.288.541.055,00	23.055.359.296,00	(1.233.181.759,00)	94,92		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.219.383.740,00	4.194.846.651,00	(24.537.089,00)	99,42		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.368.619.740,00	2.352.347.651,00	(16.272.089,00)	99,31		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.368.619.740,00	2.352.347.651,00	(16.272.089,00)	99,31		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.368.619.740,00	2.352.347.651,00	(16.272.089,00)	99,31		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.850.764.000,00	1.842.499.000,00	(8.265.000,00)	99,55		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.764.000,00	1.842.499.000,00	(8.265.000,00)	99,55		
01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	96.240.000,00	93.540.000,00	(2.700.000,00)	97,19		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.754.524.000,00	1.748.959.000,00	(5.565.000,00)	99,68		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	728.746.000,00	448.899.867,00	(279.846.133,00)	61,60		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	7.960.000,00	(40.000,00)	99,50		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.960.000,00	(40.000,00)	99,50		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.960.000,00	(40.000,00)	99,50		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	52.597.350,00	(47.402.650,00)	52,60		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.266.250,00	27.688.950,00	(577.300,00)	97,96		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.266.250,00	27.688.950,00	(577.300,00)	97,96		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	71.733.750,00	24.908.400,00	(46.825.350,00)	34,72		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.733.750,00	24.908.400,00	(46.825.350,00)	34,72		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	29.790.000,00	(210.000,00)	99,30		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.790.000,00	(210.000,00)	99,30		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.790.000,00	(210.000,00)	99,30		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	288.536.000,00	61.918.500,00	(226.617.500,00)	21,46		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	288.536.000,00	61.918.500,00	(226.617.500,00)	21,46		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.536.000,00	61.918.500,00	(226.617.500,00)	21,46		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	29.999.000,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.999.000,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.999.000,00	(1.000,00)	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.210.000,00	186.635.017,00	(5.574.983,00)	97,10		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	192.210.000,00	186.635.017,00	(5.574.983,00)	97,10		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.210.000,00	186.635.017,00	(5.574.983,00)	97,10		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.200.000,00	607.966.316,00	(23.233.684,00)	96,32		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	521.200.000,00	502.067.320,00	(19.132.680,00)	96,33		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	521.200.000,00	502.067.320,00	(19.132.680,00)	96,33		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.200.000,00	502.067.320,00	(19.132.680,00)	96,33		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.000.000,00	105.898.996,00	(4.101.004,00)	96,27		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	105.898.996,00	(4.101.004,00)	96,27		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	105.898.996,00	(4.101.004,00)	96,27		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.803.000,00	267.181.444,00	(90.621.556,00)	74,67		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.700.000,00	75.326.444,00	(18.373.556,00)	80,39		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	93.700.000,00	75.326.444,00	(18.373.556,00)	80,39		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.700.000,00	75.326.444,00	(18.373.556,00)	80,39		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	9.000.000,00	(11.000.000,00)	45,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	9.000.000,00	(11.000.000,00)	45,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	9.000.000,00	(11.000.000,00)	45,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	244.103.000,00	182.855.000,00	(61.248.000,00)	74,91		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	244.103.000,00	182.855.000,00	(61.248.000,00)	74,91		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.103.000,00	182.855.000,00	(61.248.000,00)	74,91		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.229.893.315,00	13.965.917.018,00	(263.976.297,00)	98,14		
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.176.493.315,00	13.965.917.018,00	(210.576.297,00)	98,51		
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.176.493.315,00	13.965.917.018,00	(210.576.297,00)	98,51		
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	14.176.493.315,00	13.965.917.018,00	(210.576.297,00)	98,51		
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	53.400.000,00	0,00	(53.400.000,00)	0		
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	53.400.000,00	0,00	(53.400.000,00)	0		
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.400.000,00	0,00	(53.400.000,00)	0		
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	3.921.515.000,00	3.570.548.000,00	(350.967.000,00)	91,05		
01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	200.000.000,00	160.850.000,00	(39.150.000,00)	80,43		
01.2.16.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	160.850.000,00	(39.150.000,00)	80,43		
01.2.16.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	160.850.000,00	(39.150.000,00)	80,43		
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.991.515.000,00	1.729.698.000,00	(261.817.000,00)	86,85		
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.991.515.000,00	1.729.698.000,00	(261.817.000,00)	86,85		
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.515.000,00	1.729.698.000,00	(261.817.000,00)	86,85		
01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.730.000.000,00	1.680.000.000,00	(50.000.000,00)	97,11		
01.2.16.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.686.562.500,00	1.680.000.000,00	(6.562.500,00)	99,61		
01.2.16.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.686.562.500,00	1.680.000.000,00	(6.562.500,00)	99,61		
01.2.16.04.5.2	BELANJA MODAL	43.437.500,00	0,00	(43.437.500,00)	0		
01.2.16.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.437.500,00	0,00	(43.437.500,00)	0		
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.962.511.000,00	12.315.451.061,00	(3.647.059.939,00)	77,15		
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	678.700.000,00	515.325.380,00	(163.374.620,00)	75,93		
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	678.700.000,00	515.325.380,00	(163.374.620,00)	75,93		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	678.700.000,00	515.325.380,00	(163.374.620,00)	75,93		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.700.000,00	515.325.380,00	(163.374.620,00)	75,93		
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	7.452.638.000,00	4.829.898.681,00	(2.622.739.319,00)	64,81		
02.2.04.01	Orientasi DPRD	7.309.838.000,00	4.687.098.681,00	(2.622.739.319,00)	64,12		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.309.838.000,00	4.687.098.681,00	(2.622.739.319,00)	64,12		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.309.838.000,00	4.687.098.681,00	(2.622.739.319,00)	64,12		
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	100,00		
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.831.173.000,00	6.970.227.000,00	(860.946.000,00)	89,01		
02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	800.000.000,00	301.250.000,00	(498.750.000,00)	37,66		
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	301.250.000,00	(498.750.000,00)	37,66		
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	301.250.000,00	(498.750.000,00)	37,66		
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	7.031.173.000,00	6.668.977.000,00	(362.196.000,00)	94,85		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.031.173.000,00	6.668.977.000,00	(362.196.000,00)	94,85		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.031.173.000,00	6.668.977.000,00	(362.196.000,00)	94,85		
	SURPLUS / DEFISIT	(40.251.052.055,00)	(35.370.810.357,00)	4.880.241.698,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(40.251.052.055,00)	(35.370.810.357,00)	4.880.241.698,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

SKPD : 5-01.0-00.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Unit Organisasi : 5-01.0-00.0-00.01.001 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	6.272.907.138,00	5.854.664.586,00	(418.242.552,00)	93,33		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.580.107.888,00	3.354.664.745,00	(225.443.143,00)	93,70		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.335.000,00	48.808.500,00	(526.500,00)	98,93		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.335.000,00	48.808.500,00	(526.500,00)	98,93		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.335.000,00	48.808.500,00	(526.500,00)	98,93		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.335.000,00	48.808.500,00	(526.500,00)	98,93		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.655.854.638,00	2.614.220.627,00	(41.634.011,00)	98,43		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.572.908.638,00	2.532.184.627,00	(40.724.011,00)	98,42		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.572.908.638,00	2.532.184.627,00	(40.724.011,00)	98,42		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.572.908.638,00	2.532.184.627,00	(40.724.011,00)	98,42		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	82.946.000,00	82.036.000,00	(910.000,00)	98,90		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	82.946.000,00	82.036.000,00	(910.000,00)	98,90		
01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	53.400.000,00	52.500.000,00	(900.000,00)	98,31		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.546.000,00	29.536.000,00	(10.000,00)	99,97		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	573.478.250,00	403.124.717,00	(170.353.533,00)	70,29		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.418.250,00	48.362.000,00	(56.250,00)	99,88		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	48.418.250,00	48.362.000,00	(56.250,00)	99,88		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.418.250,00	48.362.000,00	(56.250,00)	99,88		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.632.000,00	65.632.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	65.632.000,00	65.632.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.632.000,00	65.632.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.752.000,00	16.914.000,00	(17.838.000,00)	48,67		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	34.752.000,00	16.914.000,00	(17.838.000,00)	48,67		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.752.000,00	16.914.000,00	(17.838.000,00)	48,67		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.676.000,00	272.216.717,00	(152.459.283,00)	64,10		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	424.676.000,00	272.216.717,00	(152.459.283,00)	64,10		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.676.000,00	272.216.717,00	(152.459.283,00)	64,10		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.800.000,00	200.369.151,00	(8.430.849,00)	95,96		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.000.000,00	147.569.151,00	(8.430.849,00)	94,60		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	156.000.000,00	147.569.151,00	(8.430.849,00)	94,60		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	147.569.151,00	(8.430.849,00)	94,60		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.640.000,00	88.141.750,00	(4.498.250,00)	95,14		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.640.000,00	88.141.750,00	(4.498.250,00)	95,14		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	92.640.000,00	88.141.750,00	(4.498.250,00)	95,14		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.640.000,00	88.141.750,00	(4.498.250,00)	95,14		
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.678.527.000,00	1.595.861.425,00	(82.665.575,00)	95,08		
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.182.335.250,00	1.126.054.498,00	(56.280.752,00)	95,24		
02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	224.797.500,00	205.998.540,00	(18.798.960,00)	91,64		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	224.797.500,00	205.998.540,00	(18.798.960,00)	91,64		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.797.500,00	205.998.540,00	(18.798.960,00)	91,64		
02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	299.126.000,00	271.780.960,00	(27.345.040,00)	90,86		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	299.126.000,00	271.780.960,00	(27.345.040,00)	90,86		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.126.000,00	271.780.960,00	(27.345.040,00)	90,86		
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	31.335.000,00	31.335.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.335.000,00	31.335.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.335.000,00	31.335.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	68.102.750,00	68.102.750,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	68.102.750,00	68.102.750,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.102.750,00	68.102.750,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	47.290.000,00	47.208.750,00	(81.250,00)	99,83		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	47.290.000,00	47.208.750,00	(81.250,00)	99,83		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.290.000,00	47.208.750,00	(81.250,00)	99,83		
02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	45.640.500,00	45.330.000,00	(310.500,00)	99,32		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	45.640.500,00	45.330.000,00	(310.500,00)	99,32		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.640.500,00	45.330.000,00	(310.500,00)	99,32		
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	466.043.500,00	456.298.498,00	(9.745.002,00)	97,91		
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	466.043.500,00	456.298.498,00	(9.745.002,00)	97,91		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.043.500,00	456.298.498,00	(9.745.002,00)	97,91		
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	26.337.250,00	8.760.250,00	(17.577.000,00)	33,26		
	Perencanaan Pembangunan Daerah						
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	26.337.250,00	8.760.250,00	(17.577.000,00)	33,26		
	Daerah						
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.337.250,00	8.760.250,00	(17.577.000,00)	33,26		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.337.250,00	8.760.250,00	(17.577.000,00)	33,26		
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	469.854.500,00	461.046.677,00	(8.807.823,00)	98,13		
	Perencanaan Pembangunan Daerah						
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	137.062.000,00	128.693.441,00	(8.368.559,00)	93,89		
	Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	137.062.000,00	128.693.441,00	(8.368.559,00)	93,89		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.062.000,00	128.693.441,00	(8.368.559,00)	93,89		
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	332.792.500,00	332.353.236,00	(439.264,00)	99,87		
	Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	332.792.500,00	332.353.236,00	(439.264,00)	99,87		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.792.500,00	332.353.236,00	(439.264,00)	99,87		
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	194.999.000,00	187.599.220,00	(7.399.780,00)	96,21		
	DAERAH						
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	115.574.000,00	108.474.220,00	(7.099.780,00)	93,86		
	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						
02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan	115.574.000,00	108.474.220,00	(7.099.780,00)	93,86		
	Pengkajian Peraturan						
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	115.574.000,00	108.474.220,00	(7.099.780,00)	93,86		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.574.000,00	108.474.220,00	(7.099.780,00)	93,86		
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	79.425.000,00	79.125.000,00	(300.000,00)	99,62		
02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	79.425.000,00	79.125.000,00	(300.000,00)	99,62		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	79.425.000,00	79.125.000,00	(300.000,00)	99,62		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.425.000,00	79.125.000,00	(300.000,00)	99,62		
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	819.273.250,00	716.539.196,00	(102.734.054,00)	87,46		
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	308.000.000,00	278.804.860,00	(29.195.140,00)	90,52		
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	169.000.000,00	149.242.760,00	(19.757.240,00)	88,31		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	169.000.000,00	149.242.760,00	(19.757.240,00)	88,31		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.000.000,00	149.242.760,00	(19.757.240,00)	88,31		
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	129.000.000,00	119.562.100,00	(9.437.900,00)	92,68		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	129.000.000,00	119.562.100,00	(9.437.900,00)	92,68		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	119.562.100,00	(9.437.900,00)	92,68		
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	309.950.000,00	306.795.829,00	(3.154.171,00)	98,98		
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.651.000,00	80.602.200,00	(2.048.800,00)	97,52		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	82.651.000,00	80.602.200,00	(2.048.800,00)	97,52		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.651.000,00	80.602.200,00	(2.048.800,00)	97,52		
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	194.525.000,00	193.612.629,00	(912.371,00)	99,53		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	194.525.000,00	193.612.629,00	(912.371,00)	99,53		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.525.000,00	193.612.629,00	(912.371,00)	99,53		
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	32.774.000,00	32.581.000,00	(193.000,00)	99,41		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.774.000,00	32.581.000,00	(193.000,00)	99,41		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.774.000,00	32.581.000,00	(193.000,00)	99,41		
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	201.323.250,00	130.938.507,00	(70.384.743,00)	65,04		
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	104.150.250,00	67.378.427,00	(36.771.823,00)	64,69		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	104.150.250,00	67.378.427,00	(36.771.823,00)	64,69		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.150.250,00	67.378.427,00	(36.771.823,00)	64,69		
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	68.137.000,00	45.260.080,00	(22.876.920,00)	66,43		
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	68.137.000,00	45.260.080,00	(22.876.920,00)	66,43		
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.137.000,00	45.260.080,00	(22.876.920,00)	66,43		
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	29.036.000,00	18.300.000,00	(10.736.000,00)	63,03		
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	29.036.000,00	18.300.000,00	(10.736.000,00)	63,03		
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.036.000,00	18.300.000,00	(10.736.000,00)	63,03		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.272.907.138,00)	(5.854.664.586,00)	418.242.552,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.272.907.138,00)	(5.854.664.586,00)	418.242.552,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.001 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	995.713.612.533,00	934.679.546.474,82	(61.034.066.058,18)	93,87		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.196.361.069,00	9.264.385.657,20	(7.931.975.411,80)	53,87		
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	0,00	21.001.041,00	21.001.041,00	0		
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.446.735.017,00	6.446.735.017,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.749.626.052,00	2.796.649.599,20	(7.952.976.452,80)	26,02		
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	978.517.251.464,00	925.415.160.817,62	(53.102.090.646,38)	94,57		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	954.074.803.951,00	907.994.277.141,62	(46.080.526.809,38)	95,17		
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.442.447.513,00	17.420.883.676,00	(7.021.563.837,00)	71,27		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	13.601.777.525,00	12.430.555.906,00	(1.171.221.619,00)	91,39		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.176.806.065,00	3.962.622.421,00	(214.183.644,00)	94,87		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.999.448.215,00	1.989.372.124,00	(10.076.091,00)	99,50		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.991.448.215,00	1.981.372.124,00	(10.076.091,00)	99,49		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.991.448.215,00	1.981.372.124,00	(10.076.091,00)	99,49		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.971.448.215,00	1.961.372.124,00	(10.076.091,00)	99,49		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.05.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	73.500.000,00	0,00	(73.500.000,00)	0		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	73.500.000,00	0,00	(73.500.000,00)	0		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	73.500.000,00	0,00	(73.500.000,00)	0		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	0,00	(73.500.000,00)	0		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	980.882.850,00	901.089.282,00	(79.793.568,00)	91,87		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.994.500,00	2.992.000,00	(2.500,00)	99,92		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.994.500,00	2.992.000,00	(2.500,00)	99,92		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.994.500,00	2.992.000,00	(2.500,00)	99,92		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	202.258.350,00	202.256.500,00	(1.850,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	202.258.350,00	202.256.500,00	(1.850,00)	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.258.350,00	202.256.500,00	(1.850,00)	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	207.590.000,00	207.590.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	207.590.000,00	207.590.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.590.000,00	207.590.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	1.800.000,00	(3.200.000,00)	36,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	1.800.000,00	(3.200.000,00)	36,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.800.000,00	(3.200.000,00)	36,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563.040.000,00	486.450.782,00	(76.589.218,00)	86,40		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	563.040.000,00	486.450.782,00	(76.589.218,00)	86,40		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.040.000,00	486.450.782,00	(76.589.218,00)	86,40		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.047.395.000,00	1.008.086.700,00	(39.308.300,00)	96,25		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	23.694.200,00	(3.305.800,00)	87,76		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	23.694.200,00	(3.305.800,00)	87,76		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	23.694.200,00	(3.305.800,00)	87,76		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.020.395.000,00	984.392.500,00	(36.002.500,00)	96,47		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.020.395.000,00	984.392.500,00	(36.002.500,00)	96,47		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	402.000.000,00	402.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.395.000,00	582.392.500,00	(36.002.500,00)	94,18		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.080.000,00	61.574.315,00	(11.505.685,00)	84,26		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.450.000,00	53.475.315,00	(4.974.685,00)	91,49		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	58.450.000,00	53.475.315,00	(4.974.685,00)	91,49		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.450.000,00	53.475.315,00	(4.974.685,00)	91,49		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.630.000,00	8.099.000,00	(5.531.000,00)	59,42		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.630.000,00	8.099.000,00	(5.531.000,00)	59,42		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.630.000,00	8.099.000,00	(5.531.000,00)	59,42		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0		
01.2.13	Penataan Organisasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.13.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.041.073.460,00	8.142.385.749,00	(898.687.711,00)	90,06		
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.555.591.250,00	2.099.537.883,00	(456.053.367,00)	82,15		
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	239.257.250,00	192.439.250,00	(46.818.000,00)	80,43		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	239.257.250,00	192.439.250,00	(46.818.000,00)	80,43		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.257.250,00	192.439.250,00	(46.818.000,00)	80,43		
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	179.350.000,00	179.350.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	179.350.000,00	179.350.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.350.000,00	179.350.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	110.350.500,00	103.038.000,00	(7.312.500,00)	93,37		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	110.350.500,00	103.038.000,00	(7.312.500,00)	93,37		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.350.500,00	103.038.000,00	(7.312.500,00)	93,37		
02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	116.343.750,00	83.368.750,00	(32.975.000,00)	71,66		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	116.343.750,00	83.368.750,00	(32.975.000,00)	71,66		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.343.750,00	83.368.750,00	(32.975.000,00)	71,66		
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	926.095.250,00	671.302.543,00	(254.792.707,00)	72,49		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	926.095.250,00	671.302.543,00	(254.792.707,00)	72,49		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.095.250,00	671.302.543,00	(254.792.707,00)	72,49		
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	791.009.500,00	732.409.840,00	(58.599.660,00)	92,59		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	791.009.500,00	732.409.840,00	(58.599.660,00)	92,59		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	791.009.500,00	732.409.840,00	(58.599.660,00)	92,59		
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	193.185.000,00	137.629.500,00	(55.555.500,00)	71,24		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	193.185.000,00	137.629.500,00	(55.555.500,00)	71,24		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.185.000,00	137.629.500,00	(55.555.500,00)	71,24		
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	224.501.000,00	210.741.186,00	(13.759.814,00)	93,87		
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100.231.000,00	88.211.150,00	(12.019.850,00)	88,01		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.231.000,00	88.211.150,00	(12.019.850,00)	88,01		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.231.000,00	88.211.150,00	(12.019.850,00)	88,01		
02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31.937.000,00	31.937.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.937.000,00	31.937.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.937.000,00	31.937.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	82.333.000,00	80.593.036,00	(1.739.964,00)	97,89		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	82.333.000,00	80.593.036,00	(1.739.964,00)	97,89		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.333.000,00	80.593.036,00	(1.739.964,00)	97,89		
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	752.490.000,00	737.964.180,00	(14.525.820,00)	98,07		
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	188.700.000,00	188.624.680,00	(75.320,00)	99,96		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	188.700.000,00	188.624.680,00	(75.320,00)	99,96		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.700.000,00	188.624.680,00	(75.320,00)	99,96		
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	483.790.000,00	469.339.500,00	(14.450.500,00)	97,01		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	483.790.000,00	469.339.500,00	(14.450.500,00)	97,01		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.790.000,00	469.339.500,00	(14.450.500,00)	97,01		
02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.508.491.210,00	5.094.142.500,00	(414.348.710,00)	92,48		
02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	999.245.608,00	999.245.608,00	0,00	100,00		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	999.245.608,00	999.245.608,00	0,00	100,00		
02.2.04.04.5.1.03	Belanja Bunga	999.245.608,00	999.245.608,00	0,00	100,00		
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	717.530.909,00	310.440.000,00	(407.090.909,00)	43,27		
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	717.530.909,00	310.440.000,00	(407.090.909,00)	43,27		
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	717.530.909,00	310.440.000,00	(407.090.909,00)	43,27		
02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.791.714.693,00	3.784.456.892,00	(7.257.801,00)	99,81		
02.2.04.10.5.4	BELANJA TRANSFER	3.791.714.693,00	3.784.456.892,00	(7.257.801,00)	99,81		
02.2.04.10.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.791.714.693,00	3.784.456.892,00	(7.257.801,00)	99,81		
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	383.898.000,00	325.547.736,00	(58.350.264,00)	84,80		
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	383.898.000,00	325.547.736,00	(58.350.264,00)	84,80		
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	50.500.000,00	44.773.600,00	(5.726.400,00)	88,66		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.500.000,00	44.773.600,00	(5.726.400,00)	88,66		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	44.773.600,00	(5.726.400,00)	88,66		
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	85,00		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	85,00		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	85,00		
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	108.498.000,00	78.974.136,00	(29.523.864,00)	72,79		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	108.498.000,00	78.974.136,00	(29.523.864,00)	72,79		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.498.000,00	78.974.136,00	(29.523.864,00)	72,79		
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70.100.000,00	48.500.000,00	(21.600.000,00)	69,19		
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	70.100.000,00	48.500.000,00	(21.600.000,00)	69,19		
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.100.000,00	48.500.000,00	(21.600.000,00)	69,19		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
	SURPLUS / DEFISIT	982.111.835.008,00	922.248.990.568,82	(59.862.844.439,18)	93,90		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.765.027.909,00	15.765.207.909,21	180.000,21	100,00		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.765.027.909,00	15.765.207.909,21	180.000,21	100,00		
00.0.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	49.269.873.688,00	49.269.873.688,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	48.269.873.688,00	48.269.873.688,00	0,00	100,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	(33.504.845.779,00)	(33.504.665.778,79)	180.000,21	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	948.606.989.229,00	888.744.324.790,03	(59.862.844.439,18)	93,69		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.02 Badan Pendapatan Daerah
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.02.001 Badan Pendapatan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	57.436.224.013,00	13.006.855.252,00	(44.429.368.761,00)	22,65		
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57.436.224.013,00	13.006.855.252,00	(44.429.368.761,00)	22,65		
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	47.218.977.384,00	11.169.142.432,00	(36.049.834.952,00)	23,65		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	6.111.831.530,00	1.822.787.500,00	(4.289.044.030,00)	29,82		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.105.415.099,00	14.925.320,00	(4.090.489.779,00)	0,36		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.085.750.683,00	4.374.021.109,00	(711.729.574,00)	86,01		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.067.087.052,00	2.918.844.587,00	(148.242.465,00)	95,17		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.230.459.802,00	2.214.912.880,00	(15.546.922,00)	99,30		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.230.459.802,00	2.214.912.880,00	(15.546.922,00)	99,30		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.230.459.802,00	2.214.912.880,00	(15.546.922,00)	99,30		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.230.459.802,00	2.214.912.880,00	(15.546.922,00)	99,30		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.226.000,00	68.221.340,00	(60.004.660,00)	53,20		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	128.226.000,00	68.221.340,00	(60.004.660,00)	53,20		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	128.226.000,00	68.221.340,00	(60.004.660,00)	53,20		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.226.000,00	68.221.340,00	(60.004.660,00)	53,20		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	372.210.500,00	361.203.374,00	(11.007.126,00)	97,04		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.926.250,00	5.921.000,00	(5.250,00)	99,91		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.926.250,00	5.921.000,00	(5.250,00)	99,91		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.926.250,00	5.921.000,00	(5.250,00)	99,91		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.751.250,00	112.510.790,00	(9.240.460,00)	92,41		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	121.751.250,00	112.510.790,00	(9.240.460,00)	92,41		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.751.250,00	112.510.790,00	(9.240.460,00)	92,41		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.868.000,00	44.330.000,00	(538.000,00)	98,80		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	44.868.000,00	44.330.000,00	(538.000,00)	98,80		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.868.000,00	44.330.000,00	(538.000,00)	98,80		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.665.000,00	197.441.584,00	(1.223.416,00)	99,38		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	198.665.000,00	197.441.584,00	(1.223.416,00)	99,38		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.665.000,00	197.441.584,00	(1.223.416,00)	99,38		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.000.000,00	221.000.543,00	(57.999.457,00)	79,21		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.000.000,00	143.600.543,00	(48.399.457,00)	74,79		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	192.000.000,00	143.600.543,00	(48.399.457,00)	74,79		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	143.600.543,00	(48.399.457,00)	74,79		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.000.000,00	77.400.000,00	(9.600.000,00)	88,97		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	87.000.000,00	77.400.000,00	(9.600.000,00)	88,97		
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	60.600.000,00	51.000.000,00	(9.600.000,00)	84,16		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.190.750,00	53.506.450,00	(3.684.300,00)	93,56		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.785.750,00	29.568.450,00	(1.217.300,00)	96,05		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.785.750,00	29.568.450,00	(1.217.300,00)	96,05		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.785.750,00	29.568.450,00	(1.217.300,00)	96,05		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.280.000,00	13.833.000,00	(2.447.000,00)	84,97		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.280.000,00	13.833.000,00	(2.447.000,00)	84,97		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.280.000,00	13.833.000,00	(2.447.000,00)	84,97		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.125.000,00	10.105.000,00	(20.000,00)	99,80		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.125.000,00	10.105.000,00	(20.000,00)	99,80		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.125.000,00	10.105.000,00	(20.000,00)	99,80		
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.018.663.631,00	1.455.176.522,00	(563.487.109,00)	72,09		
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.018.663.631,00	1.455.176.522,00	(563.487.109,00)	72,09		
04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	370.999.750,00	286.578.562,00	(84.421.188,00)	77,24		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	370.999.750,00	286.578.562,00	(84.421.188,00)	77,24		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.999.750,00	286.578.562,00	(84.421.188,00)	77,24		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	49.000.000,00	38.398.000,00	(10.602.000,00)	78,36		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	49.000.000,00	38.398.000,00	(10.602.000,00)	78,36		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	38.398.000,00	(10.602.000,00)	78,36		
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	129.179.500,00	126.157.040,00	(3.022.460,00)	97,66		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	129.179.500,00	126.157.040,00	(3.022.460,00)	97,66		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.179.500,00	126.157.040,00	(3.022.460,00)	97,66		
04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60.680.250,00	49.406.260,00	(11.273.990,00)	81,42		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	51.680.250,00	49.406.260,00	(2.273.990,00)	95,60		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.680.250,00	49.406.260,00	(2.273.990,00)	95,60		
04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0		
04.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0		
04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100.476.250,00	89.195.680,00	(11.280.570,00)	88,77		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	100.476.250,00	89.195.680,00	(11.280.570,00)	88,77		
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.476.250,00	89.195.680,00	(11.280.570,00)	88,77		
04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	75.250.000,00	50.025.000,00	(25.225.000,00)	66,48		
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	75.250.000,00	50.025.000,00	(25.225.000,00)	66,48		
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.250.000,00	50.025.000,00	(25.225.000,00)	66,48		
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	1.161.074.131,00	743.665.980,00	(417.408.151,00)	64,05		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.158.611.631,00	743.665.980,00	(414.945.651,00)	64,19		
04.2.01.11.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	0		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.611.631,00	743.665.980,00	(14.945.651,00)	98,03		
04.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	2.462.500,00	0,00	(2.462.500,00)	0		
04.2.01.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.462.500,00	0,00	(2.462.500,00)	0		
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	72.003.750,00	71.750.000,00	(253.750,00)	99,65		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	72.003.750,00	71.750.000,00	(253.750,00)	99,65		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.003.750,00	71.750.000,00	(253.750,00)	99,65		
	SURPLUS / DEFISIT	52.350.473.330,00	8.632.834.143,00	(43.717.639.187,00)	16,49		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	52.350.473.330,00	8.632.834.143,00	(43.717.639.187,00)	16,49		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.001 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	15.664.403.842,00	6.290.100.562,00	(9.374.303.280,00)	40,16		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.759.898.592,00	4.467.375.000,00	(9.292.523.592,00)	32,47		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.014.221.592,00	3.807.178.467,00	(9.207.043.125,00)	29,25		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.014.221.592,00	3.807.178.467,00	(9.207.043.125,00)	29,25		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.014.221.592,00	3.807.178.467,00	(9.207.043.125,00)	29,25		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	13.014.221.592,00	3.807.178.467,00	(9.207.043.125,00)	29,25		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.500.000,00	46.202.715,00	(24.297.285,00)	65,54		
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000,00	18.500.000,00	(6.500.000,00)	74,00		
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	18.500.000,00	(6.500.000,00)	74,00		
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	18.500.000,00	(6.500.000,00)	74,00		
01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	21.500.000,00	6.199.500,00	(15.300.500,00)	28,83		
01.2.05.07.5.1	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	6.199.500,00	(15.300.500,00)	28,83		
01.2.05.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	6.199.500,00	(15.300.500,00)	28,83		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000,00	21.503.215,00	(2.496.785,00)	89,60		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	21.503.215,00	(2.496.785,00)	89,60		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	21.503.215,00	(2.496.785,00)	89,60		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	477.677.000,00	456.678.068,00	(20.998.932,00)	95,60		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.324.000,00	34.324.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	34.324.000,00	34.324.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.324.000,00	34.324.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.595.000,00	45.595.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	45.595.000,00	45.595.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.595.000,00	45.595.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.550.000,00	8.106.500,00	(18.443.500,00)	30,53		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	26.550.000,00	8.106.500,00	(18.443.500,00)	30,53		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.550.000,00	8.106.500,00	(18.443.500,00)	30,53		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.708.000,00	368.652.568,00	(55.432,00)	99,98		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	368.708.000,00	368.652.568,00	(55.432,00)	99,98		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.708.000,00	368.652.568,00	(55.432,00)	99,98		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.950.000,00	114.815.250,00	(16.134.750,00)	87,68		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.350.000,00	11.188.500,00	(3.161.500,00)	77,97		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.350.000,00	11.188.500,00	(3.161.500,00)	77,97		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	11.188.500,00	(3.161.500,00)	77,97		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	32.626.750,00	(2.373.250,00)	93,22		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.626.750,00	(2.373.250,00)	93,22		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.626.750,00	(2.373.250,00)	93,22		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.600.000,00	71.000.000,00	(10.600.000,00)	87,01		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	81.600.000,00	71.000.000,00	(10.600.000,00)	87,01		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.600.000,00	71.000.000,00	(10.600.000,00)	87,01		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.550.000,00	42.500.500,00	(24.049.500,00)	63,86		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.980.000,00	33.970.500,00	(7.009.500,00)	82,90		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.980.000,00	33.970.500,00	(7.009.500,00)	82,90		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.980.000,00	33.970.500,00	(7.009.500,00)	82,90		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.010.000,00	4.030.000,00	(10.980.000,00)	26,85		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.010.000,00	4.030.000,00	(10.980.000,00)	26,85		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.010.000,00	4.030.000,00	(10.980.000,00)	26,85		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.560.000,00	4.500.000,00	(6.060.000,00)	42,61		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	10.560.000,00	4.500.000,00	(6.060.000,00)	42,61		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	4.500.000,00	(6.060.000,00)	42,61		
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.646.621.750,00	1.570.886.490,00	(75.735.260,00)	95,40		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	491.791.500,00	464.797.532,00	(26.993.968,00)	94,51		
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	333.166.500,00	333.157.289,00	(9.211,00)	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	333.166.500,00	333.157.289,00	(9.211,00)	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.166.500,00	333.157.289,00	(9.211,00)	100,00		
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	68.625.000,00	54.522.474,00	(14.102.526,00)	79,45		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	68.625.000,00	54.522.474,00	(14.102.526,00)	79,45		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.625.000,00	54.522.474,00	(14.102.526,00)	79,45		
02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50.000.000,00	42.908.040,00	(7.091.960,00)	85,82		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	42.908.040,00	(7.091.960,00)	85,82		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	42.908.040,00	(7.091.960,00)	85,82		
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00	12.590.880,00	(2.409.120,00)	83,94		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	12.590.880,00	(2.409.120,00)	83,94		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.590.880,00	(2.409.120,00)	83,94		
02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	25.000.000,00	21.618.849,00	(3.381.151,00)	86,48		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	21.618.849,00	(3.381.151,00)	86,48		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.618.849,00	(3.381.151,00)	86,48		
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.042.449.250,00	1.022.293.823,00	(20.155.427,00)	98,07		
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	138.500.000,00	129.973.180,00	(8.526.820,00)	93,84		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	138.500.000,00	129.973.180,00	(8.526.820,00)	93,84		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.500.000,00	129.973.180,00	(8.526.820,00)	93,84		
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	78.198.000,00	76.921.330,00	(1.276.670,00)	98,37		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.198.000,00	76.921.330,00	(1.276.670,00)	98,37		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.198.000,00	76.921.330,00	(1.276.670,00)	98,37		
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	825.751.250,00	815.399.313,00	(10.351.937,00)	98,75		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	825.751.250,00	815.399.313,00	(10.351.937,00)	98,75		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.751.250,00	815.399.313,00	(10.351.937,00)	98,75		
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	11.350.000,00	8.053.886,00	(3.296.114,00)	70,96		
02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	11.350.000,00	8.053.886,00	(3.296.114,00)	70,96		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.350.000,00	8.053.886,00	(3.296.114,00)	70,96		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	8.053.886,00	(3.296.114,00)	70,96		
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	101.031.000,00	75.741.249,00	(25.289.751,00)	74,97		
02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	53.031.000,00	34.681.486,00	(18.349.514,00)	65,40		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	53.031.000,00	34.681.486,00	(18.349.514,00)	65,40		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.031.000,00	34.681.486,00	(18.349.514,00)	65,40		
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	20.500.000,00	17.559.763,00	(2.940.237,00)	85,66		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.500.000,00	17.559.763,00	(2.940.237,00)	85,66		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	17.559.763,00	(2.940.237,00)	85,66		
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	27.500.000,00	23.500.000,00	(4.000.000,00)	85,45		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	27.500.000,00	23.500.000,00	(4.000.000,00)	85,45		
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	23.500.000,00	(4.000.000,00)	85,45		
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	257.883.500,00	251.839.072,00	(6.044.428,00)	97,66		
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	257.883.500,00	251.839.072,00	(6.044.428,00)	97,66		
02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	257.883.500,00	251.839.072,00	(6.044.428,00)	97,66		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	257.883.500,00	251.839.072,00	(6.044.428,00)	97,66		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.883.500,00	251.839.072,00	(6.044.428,00)	97,66		
	SURPLUS / DEFISIT	(15.664.403.842,00)	(6.290.100.562,00)	9.374.303.280,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(15.664.403.842,00)	(6.290.100.562,00)	9.374.303.280,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH

SKPD : 5-06.0-00.0-00.01 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Unit Organisasi : 5-06.0-00.0-00.01.001 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.334.831.900,00	2.292.886.180,00	(41.945.720,00)	98,20		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.019.322.650,00	2.005.467.180,00	(13.855.470,00)	99,31		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.363.257.850,00	1.354.096.137,00	(9.161.713,00)	99,33		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.333.857.850,00	1.324.696.137,00	(9.161.713,00)	99,31		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.333.857.850,00	1.324.696.137,00	(9.161.713,00)	99,31		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.333.857.850,00	1.324.696.137,00	(9.161.713,00)	99,31		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	481.280.750,00	481.136.968,00	(143.782,00)	99,97		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.081.250,00	2.081.000,00	(250,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.081.250,00	2.081.000,00	(250,00)	99,99		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.081.250,00	2.081.000,00	(250,00)	99,99		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.633.000,00	125.587.000,00	(46.000,00)	99,96		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	125.633.000,00	125.587.000,00	(46.000,00)	99,96		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.633.000,00	125.587.000,00	(46.000,00)	99,96		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.890.500,00	36.889.800,00	(700,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	36.890.500,00	36.889.800,00	(700,00)	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.890.500,00	36.889.800,00	(700,00)	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.676.000,00	316.579.168,00	(96.832,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	316.676.000,00	316.579.168,00	(96.832,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.676.000,00	316.579.168,00	(96.832,00)	99,97		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	79.902.200,00	(97.800,00)	99,88		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	79.902.200,00	(97.800,00)	99,88		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.902.200,00	(97.800,00)	99,88		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.902.200,00	(97.800,00)	99,88		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.034.050,00	66.581.875,00	(4.452.175,00)	93,73		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.665.300,00	52.213.875,00	(4.451.425,00)	92,14		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.665.300,00	52.213.875,00	(4.451.425,00)	92,14		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.665.300,00	52.213.875,00	(4.451.425,00)	92,14		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.368.750,00	2.368.000,00	(750,00)	99,97		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.368.750,00	2.368.000,00	(750,00)	99,97		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.368.750,00	2.368.000,00	(750,00)	99,97		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	315.509.250,00	287.419.000,00	(28.090.250,00)	91,10		
02.2.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	45.113.750,00	33.266.000,00	(11.847.750,00)	73,74		
02.2.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	27.149.500,00	15.683.000,00	(11.466.500,00)	57,77		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.149.500,00	15.683.000,00	(11.466.500,00)	57,77		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.149.500,00	15.683.000,00	(11.466.500,00)	57,77		
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	17.964.250,00	17.583.000,00	(381.250,00)	97,88		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.964.250,00	17.583.000,00	(381.250,00)	97,88		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.964.250,00	17.583.000,00	(381.250,00)	97,88		
02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	73.436.750,00	58.408.000,00	(15.028.750,00)	79,54		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	27.644.500,00	26.218.000,00	(1.426.500,00)	94,84		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.644.500,00	26.218.000,00	(1.426.500,00)	94,84		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.644.500,00	26.218.000,00	(1.426.500,00)	94,84		
02.2.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	17.964.000,00	11.888.000,00	(6.076.000,00)	66,18		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.964.000,00	11.888.000,00	(6.076.000,00)	66,18		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.964.000,00	11.888.000,00	(6.076.000,00)	66,18		
02.2.02.04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	14.566.750,00	8.403.000,00	(6.163.750,00)	57,69		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	14.566.750,00	8.403.000,00	(6.163.750,00)	57,69		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.566.750,00	8.403.000,00	(6.163.750,00)	57,69		
02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	13.261.500,00	11.899.000,00	(1.362.500,00)	89,73		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.261.500,00	11.899.000,00	(1.362.500,00)	89,73		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.261.500,00	11.899.000,00	(1.362.500,00)	89,73		
02.2.03	Monitoring dan Evaluasi	196.958.750,00	195.745.000,00	(1.213.750,00)	99,38		
02.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	196.958.750,00	195.745.000,00	(1.213.750,00)	99,38		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	196.958.750,00	195.745.000,00	(1.213.750,00)	99,38		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.958.750,00	195.745.000,00	(1.213.750,00)	99,38		
	SURPLUS / DEFISIT	(2.334.831.900,00)	(2.292.886.180,00)	41.945.720,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.334.831.900,00)	(2.292.886.180,00)	41.945.720,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT
SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat
Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.001 Inspektorat

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.313.143.967,00	4.031.911.244,00	(281.232.723,00)	93,48		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.462.799.717,00	3.248.517.096,00	(214.282.621,00)	93,81		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.213.144.967,00	2.177.682.630,00	(35.462.337,00)	98,40		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.213.144.967,00	2.177.682.630,00	(35.462.337,00)	98,40		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.213.144.967,00	2.177.682.630,00	(35.462.337,00)	98,40		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.213.144.967,00	2.177.682.630,00	(35.462.337,00)	98,40		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.474.000,00	57.030.180,00	(48.443.820,00)	54,07		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.044.000,00	0,00	(22.044.000,00)	0		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.044.000,00	0,00	(22.044.000,00)	0		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.044.000,00	0,00	(22.044.000,00)	0		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83.430.000,00	57.030.180,00	(26.399.820,00)	68,36		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	83.430.000,00	57.030.180,00	(26.399.820,00)	68,36		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.430.000,00	57.030.180,00	(26.399.820,00)	68,36		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	785.548.000,00	731.537.333,00	(54.010.667,00)	93,12		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.090.000,00	125.090.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	125.090.000,00	125.090.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.090.000,00	125.090.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.333.000,00	40.050.452,00	(282.548,00)	99,30		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.333.000,00	40.050.452,00	(282.548,00)	99,30		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.333.000,00	40.050.452,00	(282.548,00)	99,30		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	66,67		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	66,67		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	66,67		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	549.271.881,00	(50.728.119,00)	91,55		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	549.271.881,00	(50.728.119,00)	91,55		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	549.271.881,00	(50.728.119,00)	91,55		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.920.000,00	175.971.203,00	(51.948.797,00)	77,21		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	94.310.625,00	82.370.000,00	(11.940.625,00)	87,34		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	94.310.625,00	82.370.000,00	(11.940.625,00)	87,34		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.310.625,00	82.370.000,00	(11.940.625,00)	87,34		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.400.000,00	38.141.828,00	(36.258.172,00)	51,27		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	74.400.000,00	38.141.828,00	(36.258.172,00)	51,27		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	38.141.828,00	(36.258.172,00)	51,27		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.209.375,00	55.459.375,00	(3.750.000,00)	93,67		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	59.209.375,00	55.459.375,00	(3.750.000,00)	93,67		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.209.375,00	55.459.375,00	(3.750.000,00)	93,67		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.712.750,00	106.295.750,00	(24.417.000,00)	81,32		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.469.000,00	39.052.000,00	(24.417.000,00)	61,53		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	63.469.000,00	39.052.000,00	(24.417.000,00)	61,53		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.469.000,00	39.052.000,00	(24.417.000,00)	61,53		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.293.750,00	29.293.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	29.293.750,00	29.293.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.293.750,00	29.293.750,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	704.218.250,00	698.193.148,00	(6.025.102,00)	99,14		
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	439.406.000,00	434.755.648,00	(4.650.352,00)	98,94		
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36.950.000,00	35.775.000,00	(1.175.000,00)	96,82		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.950.000,00	35.775.000,00	(1.175.000,00)	96,82		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.950.000,00	35.775.000,00	(1.175.000,00)	96,82		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	217.025.000,00	216.849.648,00	(175.352,00)	99,92		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	217.025.000,00	216.849.648,00	(175.352,00)	99,92		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.025.000,00	216.849.648,00	(175.352,00)	99,92		
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	18.000.000,00	17.625.000,00	(375.000,00)	97,92		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.625.000,00	(375.000,00)	97,92		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.625.000,00	(375.000,00)	97,92		
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	32.850.000,00	32.700.000,00	(150.000,00)	99,54		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.850.000,00	32.700.000,00	(150.000,00)	99,54		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.850.000,00	32.700.000,00	(150.000,00)	99,54		
02.2.01.05	Pengawasan Desa	78.599.750,00	77.474.750,00	(1.125.000,00)	98,57		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	78.599.750,00	77.474.750,00	(1.125.000,00)	98,57		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.599.750,00	77.474.750,00	(1.125.000,00)	98,57		
02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	22.681.250,00	22.231.250,00	(450.000,00)	98,02		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	22.681.250,00	22.231.250,00	(450.000,00)	98,02		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.681.250,00	22.231.250,00	(450.000,00)	98,02		
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	33.300.000,00	32.100.000,00	(1.200.000,00)	96,40		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	33.300.000,00	32.100.000,00	(1.200.000,00)	96,40		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	32.100.000,00	(1.200.000,00)	96,40		
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	264.812.250,00	263.437.500,00	(1.374.750,00)	99,48		
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	62.849.750,00	61.500.000,00	(1.349.750,00)	97,85		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	62.849.750,00	61.500.000,00	(1.349.750,00)	97,85		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.849.750,00	61.500.000,00	(1.349.750,00)	97,85		
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	201.962.500,00	201.937.500,00	(25.000,00)	99,99		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	201.962.500,00	201.937.500,00	(25.000,00)	99,99		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.962.500,00	201.937.500,00	(25.000,00)	99,99		
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	146.126.000,00	85.201.000,00	(60.925.000,00)	58,31		
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	146.126.000,00	85.201.000,00	(60.925.000,00)	58,31		
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51.126.000,00	49.451.000,00	(1.675.000,00)	96,72		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.126.000,00	49.451.000,00	(1.675.000,00)	96,72		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.126.000,00	49.451.000,00	(1.675.000,00)	96,72		
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	95.000.000,00	35.750.000,00	(59.250.000,00)	37,63		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	35.750.000,00	(59.250.000,00)	37,63		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	35.750.000,00	(59.250.000,00)	37,63		
	SURPLUS / DEFISIT	(4.313.143.967,00)	(4.031.911.244,00)	281.232.723,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.313.143.967,00)	(4.031.911.244,00)	281.232.723,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Kei Kecil

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.001 Kecamatan Kei Kecil

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.767.411.728,00	1.725.078.406,00	(42.333.322,00)	97,60		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.405.389.478,00	1.394.671.656,00	(10.717.822,00)	99,24		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.221.022.853,00	1.218.578.269,00	(2.444.584,00)	99,80		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.217.422.853,00	1.214.978.269,00	(2.444.584,00)	99,80		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.217.422.853,00	1.214.978.269,00	(2.444.584,00)	99,80		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.217.422.853,00	1.214.978.269,00	(2.444.584,00)	99,80		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.143.250,00	73.852.675,00	(290.575,00)	99,61		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.486.250,00	1.485.000,00	(1.250,00)	99,92		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.486.250,00	1.485.000,00	(1.250,00)	99,92		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.486.250,00	1.485.000,00	(1.250,00)	99,92		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.776.750,00	27.776.750,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	27.776.750,00	27.776.750,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.776.750,00	27.776.750,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.511.000,00	6.510.568,00	(432,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.511.000,00	6.510.568,00	(432,00)	99,99		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.511.000,00	6.510.568,00	(432,00)	99,99		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.719.250,00	35.430.357,00	(288.893,00)	99,19		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	35.719.250,00	35.430.357,00	(288.893,00)	99,19		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.719.250,00	35.430.357,00	(288.893,00)	99,19		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.788.125,00	58.360.712,00	(6.427.413,00)	90,08		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.200.000,00	27.773.462,00	(6.426.538,00)	81,21		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.200.000,00	27.773.462,00	(6.426.538,00)	81,21		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	27.773.462,00	(6.426.538,00)	81,21		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.588.125,00	30.587.250,00	(875,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.588.125,00	30.587.250,00	(875,00)	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.588.125,00	30.587.250,00	(875,00)	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.435.250,00	43.880.000,00	(1.555.250,00)	96,58		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.537.750,00	27.982.500,00	(1.555.250,00)	94,73		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.537.750,00	27.982.500,00	(1.555.250,00)	94,73		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.537.750,00	27.982.500,00	(1.555.250,00)	94,73		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	610.000,00	610.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	610.000,00	610.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.000,00	610.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.287.500,00	15.287.500,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.287.500,00	15.287.500,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.287.500,00	15.287.500,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.813.750,00	75.813.500,00	(250,00)	100,00		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75.813.750,00	75.813.500,00	(250,00)	100,00		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	69.501.250,00	69.501.000,00	(250,00)	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	69.501.250,00	69.501.000,00	(250,00)	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.501.250,00	69.501.000,00	(250,00)	100,00		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.312.500,00	6.312.500,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.312.500,00	6.312.500,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.312.500,00	6.312.500,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	222.656.250,00	191.041.000,00	(31.615.250,00)	85,80		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.656.250,00	22.656.250,00	0,00	100,00		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.428.000,00	8.428.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.428.000,00	8.428.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.428.000,00	8.428.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	14.228.250,00	14.228.250,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.228.250,00	14.228.250,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.228.250,00	14.228.250,00	0,00	100,00		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	168.384.750,00	(31.615.250,00)	84,19		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00	168.384.750,00	(31.615.250,00)	84,19		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	199.050.000,00	168.384.750,00	(30.665.250,00)	84,59		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.050.000,00	168.384.750,00	(30.665.250,00)	84,59		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	950.000,00	0,00	(950.000,00)	0		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	950.000,00	0,00	(950.000,00)	0		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.121.250,00	19.121.250,00	0,00	100,00		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.121.250,00	19.121.250,00	0,00	100,00		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.121.250,00	19.121.250,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.121.250,00	19.121.250,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.121.250,00	19.121.250,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.487.500,00	16.487.500,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.487.500,00	16.487.500,00	0,00	100,00		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.487.500,00	16.487.500,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	16.487.500,00	16.487.500,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.487.500,00	16.487.500,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.943.500,00	27.943.500,00	0,00	100,00		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.943.500,00	27.943.500,00	0,00	100,00		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.891.750,00	3.891.750,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.891.750,00	3.891.750,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.891.750,00	3.891.750,00	0,00	100,00		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24.051.750,00	24.051.750,00	0,00	100,00		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	24.051.750,00	24.051.750,00	0,00	100,00		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.051.750,00	24.051.750,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.767.411.728,00)	(1.725.078.406,00)	42.333.322,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.767.411.728,00)	(1.725.078.406,00)	42.333.322,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Kei Kecil Barat
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.001 Kecamatan Kei Kecil Barat

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.069.602.110,00	1.043.213.248,00	(26.388.862,00)	97,53		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	834.475.110,00	808.507.248,00	(25.967.862,00)	96,89		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	709.352.110,00	687.166.248,00	(22.185.862,00)	96,87		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	691.352.110,00	669.166.248,00	(22.185.862,00)	96,79		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	691.352.110,00	669.166.248,00	(22.185.862,00)	96,79		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	691.352.110,00	669.166.248,00	(22.185.862,00)	96,79		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.577.000,00	16.390.000,00	(1.187.000,00)	93,25		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.577.000,00	16.390.000,00	(1.187.000,00)	93,25		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	17.577.000,00	16.390.000,00	(1.187.000,00)	93,25		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.577.000,00	16.390.000,00	(1.187.000,00)	93,25		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.651.000,00	84.111.000,00	(2.540.000,00)	97,07		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.408.000,00	12.408.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.408.000,00	12.408.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.408.000,00	12.408.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.273.000,00	60.733.000,00	(2.540.000,00)	95,99		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	63.273.000,00	60.733.000,00	(2.540.000,00)	95,99		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.273.000,00	60.733.000,00	(2.540.000,00)	95,99		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.095.000,00	16.065.000,00	(30.000,00)	99,81		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.295.000,00	1.265.000,00	(30.000,00)	97,68		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.295.000,00	1.265.000,00	(30.000,00)	97,68		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.295.000,00	1.265.000,00	(30.000,00)	97,68		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000,00	4.775.000,00	(25.000,00)	99,48		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.800.000,00	4.775.000,00	(25.000,00)	99,48		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.775.000,00	(25.000,00)	99,48		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.775.000,00	(25.000,00)	99,48		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	103.250.000,00	102.990.000,00	(260.000,00)	99,75		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	103.250.000,00	102.990.000,00	(260.000,00)	99,75		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	70.000.000,00	69.940.000,00	(60.000,00)	99,91		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.940.000,00	(60.000,00)	99,91		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.940.000,00	(60.000,00)	99,91		
02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.250.000,00	33.050.000,00	(200.000,00)	99,40		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.250.000,00	33.050.000,00	(200.000,00)	99,40		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.250.000,00	33.050.000,00	(200.000,00)	99,40		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.250.000,00	36.243.000,00	(7.000,00)	99,98		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.250.000,00	36.243.000,00	(7.000,00)	99,98		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15.000.000,00	14.993.000,00	(7.000,00)	99,95		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.993.000,00	(7.000,00)	99,95		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.993.000,00	(7.000,00)	99,95		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.800.000,00	26.684.000,00	(116.000,00)	99,57		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.800.000,00	26.684.000,00	(116.000,00)	99,57		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.800.000,00	26.684.000,00	(116.000,00)	99,57		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.800.000,00	26.684.000,00	(116.000,00)	99,57		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	26.684.000,00	(116.000,00)	99,57		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.827.000,00	53.789.000,00	(38.000,00)	99,93		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.827.000,00	53.789.000,00	(38.000,00)	99,93		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	53.827.000,00	53.789.000,00	(38.000,00)	99,93		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	53.827.000,00	53.789.000,00	(38.000,00)	99,93		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.827.000,00	53.789.000,00	(38.000,00)	99,93		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.069.602.110,00)	(1.043.213.248,00)	26.388.862,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.069.602.110,00)	(1.043.213.248,00)	26.388.862,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Kei Kecil Timur

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.001 Kecamatan Kei Kecil Timur

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.039.356.376,00	1.007.740.457,00	(31.615.919,00)	96,96		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	882.278.126,00	852.871.957,00	(29.406.169,00)	96,67		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	765.156.376,00	747.499.885,00	(17.656.491,00)	97,69		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	739.356.376,00	721.699.885,00	(17.656.491,00)	97,61		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	739.356.376,00	721.699.885,00	(17.656.491,00)	97,61		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	739.356.376,00	721.699.885,00	(17.656.491,00)	97,61		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.511.750,00	30.282.052,00	(6.229.698,00)	82,94		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	698.750,00	0,00	(698.750,00)	0		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	698.750,00	0,00	(698.750,00)	0		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	698.750,00	0,00	(698.750,00)	0		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000,00	2.809.000,00	(191.000,00)	93,63		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.809.000,00	(191.000,00)	93,63		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.809.000,00	(191.000,00)	93,63		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000,00	994.000,00	(6.000,00)	99,40		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	994.000,00	(6.000,00)	99,40		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	994.000,00	(6.000,00)	99,40		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.813.000,00	21.479.052,00	(5.333.948,00)	80,11		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	26.813.000,00	21.479.052,00	(5.333.948,00)	80,11		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.813.000,00	21.479.052,00	(5.333.948,00)	80,11		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.000.000,00	57.160.020,00	(4.839.980,00)	92,19		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	7.296.020,00	(4.703.980,00)	60,80		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	7.296.020,00	(4.703.980,00)	60,80		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	7.296.020,00	(4.703.980,00)	60,80		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.000.000,00	49.864.000,00	(136.000,00)	99,73		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.864.000,00	(136.000,00)	99,73		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.864.000,00	(136.000,00)	99,73		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.610.000,00	17.930.000,00	(680.000,00)	96,35		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.610.000,00	3.530.000,00	(80.000,00)	97,78		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.610.000,00	3.530.000,00	(80.000,00)	97,78		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.610.000,00	3.530.000,00	(80.000,00)	97,78		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.400.000,00	(600.000,00)	96,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.400.000,00	(600.000,00)	96,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.400.000,00	(600.000,00)	96,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.999.750,00	85.523.500,00	(476.250,00)	99,45		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85.999.750,00	85.523.500,00	(476.250,00)	99,45		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	79.999.750,00	79.555.500,00	(444.250,00)	99,44		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	79.999.750,00	79.555.500,00	(444.250,00)	99,44		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.999.750,00	79.555.500,00	(444.250,00)	99,44		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.000.000,00	5.968.000,00	(32.000,00)	99,47		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.968.000,00	(32.000,00)	99,47		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.968.000,00	(32.000,00)	99,47		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.000.000,00	16.933.000,00	(1.067.000,00)	94,07		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.000.000,00	16.933.000,00	(1.067.000,00)	94,07		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.000.000,00	12.664.000,00	(336.000,00)	97,42		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.664.000,00	(336.000,00)	97,42		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.664.000,00	(336.000,00)	97,42		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.000.000,00	4.269.000,00	(731.000,00)	85,38		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.269.000,00	(731.000,00)	85,38		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.269.000,00	(731.000,00)	85,38		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	14.654.000,00	(346.000,00)	97,69		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000,00	14.654.000,00	(346.000,00)	97,69		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	14.654.000,00	(346.000,00)	97,69		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.654.000,00	(346.000,00)	97,69		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.654.000,00	(346.000,00)	97,69		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.078.500,00	4.808.000,00	(270.500,00)	94,67		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.078.500,00	4.808.000,00	(270.500,00)	94,67		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.078.500,00	4.808.000,00	(270.500,00)	94,67		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.078.500,00	4.808.000,00	(270.500,00)	94,67		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.078.500,00	4.808.000,00	(270.500,00)	94,67		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.000.000,00	32.950.000,00	(50.000,00)	99,85		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.000.000,00	32.950.000,00	(50.000,00)	99,85		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	30.000.000,00	29.950.000,00	(50.000,00)	99,83		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.950.000,00	(50.000,00)	99,83		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.950.000,00	(50.000,00)	99,83		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.039.356.376,00)	(1.007.740.457,00)	31.615.919,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.039.356.376,00)	(1.007.740.457,00)	31.615.919,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Kei Besar Utara Timur

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.001 Kecamatan Kei Besar Utara Timur

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.151.324.865,00	1.145.899.870,00	(5.424.995,00)	99,53		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	886.324.865,00	880.899.870,00	(5.424.995,00)	99,39		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	756.924.865,00	751.499.870,00	(5.424.995,00)	99,28		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	756.924.865,00	751.499.870,00	(5.424.995,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	756.924.865,00	751.499.870,00	(5.424.995,00)	99,28		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	756.924.865,00	751.499.870,00	(5.424.995,00)	99,28		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.612.500,00	3.612.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.612.500,00	3.612.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.612.500,00	3.612.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.019.500,00	10.019.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.019.500,00	10.019.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.019.500,00	10.019.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.368.000,00	34.368.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	34.368.000,00	34.368.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.368.000,00	34.368.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.151.324.865,00)	(1.145.899.870,00)	5.424.995,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.151.324.865,00)	(1.145.899.870,00)	5.424.995,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Kei Besar Selatan

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.001 Kecamatan Kei Besar Selatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.330.585.068,00	1.303.995.484,00	(26.589.584,00)	98,00		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.070.585.068,00	1.044.142.484,00	(26.442.584,00)	97,53		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	901.879.568,00	875.437.484,00	(26.442.084,00)	97,07		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	901.879.568,00	875.437.484,00	(26.442.084,00)	97,07		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	901.879.568,00	875.437.484,00	(26.442.084,00)	97,07		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	901.879.568,00	875.437.484,00	(26.442.084,00)	97,07		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.743.000,00	98.743.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.305.500,00	31.305.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	31.305.500,00	31.305.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.305.500,00	31.305.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.069.500,00	23.069.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.069.500,00	23.069.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.069.500,00	23.069.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.368.000,00	34.368.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	34.368.000,00	34.368.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.368.000,00	34.368.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.062.500,00	22.062.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.062.500,00	12.062.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	12.062.500,00	12.062.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.062.500,00	12.062.000,00	(500,00)	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.000.000,00	49.853.000,00	(147.000,00)	99,71		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.000.000,00	49.853.000,00	(147.000,00)	99,71		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	50.000.000,00	49.853.000,00	(147.000,00)	99,71		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.853.000,00	(147.000,00)	99,71		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.853.000,00	(147.000,00)	99,71		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.330.585.068,00)	(1.303.995.484,00)	26.589.584,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.330.585.068,00)	(1.303.995.484,00)	26.589.584,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Manyeuw
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.06.001 Kecamatan Manyeuw

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	931.260.483,00	921.598.886,00	(9.661.597,00)	98,96		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	763.640.233,00	754.022.886,00	(9.617.347,00)	98,74		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	657.178.483,00	647.719.326,00	(9.459.157,00)	98,56		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	631.260.483,00	621.801.326,00	(9.459.157,00)	98,50		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	631.260.483,00	621.801.326,00	(9.459.157,00)	98,50		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	631.260.483,00	621.801.326,00	(9.459.157,00)	98,50		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.918.000,00	25.918.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.918.000,00	25.918.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.000,00	118.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.923.000,00	61.866.560,00	(56.440,00)	99,91		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	705.000,00	705.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	705.000,00	705.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.000,00	705.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.905.000,00	17.895.000,00	(10.000,00)	99,94		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	17.905.000,00	17.895.000,00	(10.000,00)	99,94		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.905.000,00	17.895.000,00	(10.000,00)	99,94		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.813.000,00	26.766.560,00	(46.440,00)	99,83		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	26.813.000,00	26.766.560,00	(46.440,00)	99,83		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.813.000,00	26.766.560,00	(46.440,00)	99,83		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.400.000,00	14.300.000,00	(100.000,00)	99,31		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	14.300.000,00	(100.000,00)	99,31		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.300.000,00	(100.000,00)	99,31		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.300.000,00	(100.000,00)	99,31		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.138.750,00	30.137.000,00	(1.750,00)	99,99		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.887.500,00	14.887.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	14.887.500,00	14.887.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.887.500,00	14.887.000,00	(500,00)	100,00		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.181.250,00	13.180.000,00	(1.250,00)	99,99		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	13.181.250,00	13.180.000,00	(1.250,00)	99,99		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.181.250,00	13.180.000,00	(1.250,00)	99,99		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	78.272.750,00	78.267.500,00	(5.250,00)	99,99		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	78.272.750,00	78.267.500,00	(5.250,00)	99,99		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	78.272.750,00	78.267.500,00	(5.250,00)	99,99		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	78.272.750,00	78.267.500,00	(5.250,00)	99,99		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.272.750,00	78.267.500,00	(5.250,00)	99,99		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.781.500,00	18.759.500,00	(22.000,00)	99,88		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.781.500,00	18.759.500,00	(22.000,00)	99,88		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.987.500,00	13.986.500,00	(1.000,00)	99,99		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.987.500,00	13.986.500,00	(1.000,00)	99,99		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.987.500,00	13.986.500,00	(1.000,00)	99,99		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.794.000,00	4.773.000,00	(21.000,00)	99,56		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.794.000,00	4.773.000,00	(21.000,00)	99,56		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.794.000,00	4.773.000,00	(21.000,00)	99,56		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.198.750,00	29.190.000,00	(8.750,00)	99,97		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.198.750,00	29.190.000,00	(8.750,00)	99,97		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.198.750,00	29.190.000,00	(8.750,00)	99,97		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.198.750,00	29.190.000,00	(8.750,00)	99,97		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.198.750,00	29.190.000,00	(8.750,00)	99,97		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.888.500,00	15.888.000,00	(500,00)	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.888.500,00	15.888.000,00	(500,00)	100,00		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.888.500,00	15.888.000,00	(500,00)	100,00		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.888.500,00	15.888.000,00	(500,00)	100,00		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.888.500,00	15.888.000,00	(500,00)	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.478.750,00	25.471.000,00	(7.750,00)	99,97		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.478.750,00	25.471.000,00	(7.750,00)	99,97		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.806.250,00	2.806.000,00	(250,00)	99,99		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.806.250,00	2.806.000,00	(250,00)	99,99		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.806.250,00	2.806.000,00	(250,00)	99,99		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.672.500,00	22.665.000,00	(7.500,00)	99,97		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	22.672.500,00	22.665.000,00	(7.500,00)	99,97		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.672.500,00	22.665.000,00	(7.500,00)	99,97		
	SURPLUS / DEFISIT	(931.260.483,00)	(921.598.886,00)	9.661.597,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(931.260.483,00)	(921.598.886,00)	9.661.597,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Hoat Sorbay

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.07.001 Kecamatan Hoat Sorbay

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	993.640.337,00	954.588.079,00	(39.052.258,00)	96,07		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	777.814.837,00	738.762.829,00	(39.052.008,00)	94,98		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	693.648.087,00	654.827.879,00	(38.820.208,00)	94,40		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	693.648.087,00	654.827.879,00	(38.820.208,00)	94,40		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	693.648.087,00	654.827.879,00	(38.820.208,00)	94,40		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	693.648.087,00	654.827.879,00	(38.820.208,00)	94,40		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.503.000,00	64.271.200,00	(231.800,00)	99,64		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.417.500,00	22.185.700,00	(231.800,00)	98,97		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	22.417.500,00	22.185.700,00	(231.800,00)	98,97		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.417.500,00	22.185.700,00	(231.800,00)	98,97		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.057.500,00	7.057.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.057.500,00	7.057.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.057.500,00	7.057.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.368.000,00	34.368.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	34.368.000,00	34.368.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.368.000,00	34.368.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.333.750,00	6.333.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.693.750,00	3.693.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.693.750,00	3.693.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.693.750,00	3.693.750,00	0,00	100,00		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.996.500,00	77.996.500,00	0,00	100,00		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77.996.500,00	77.996.500,00	0,00	100,00		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	70.462.000,00	70.462.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.462.000,00	70.462.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.462.000,00	70.462.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.534.500,00	7.534.500,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.534.500,00	7.534.500,00	0,00	100,00		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.534.500,00	7.534.500,00	0,00	100,00		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.529.000,00	42.528.750,00	(250,00)	100,00		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.529.000,00	42.528.750,00	(250,00)	100,00		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.901.000,00	22.901.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.901.000,00	22.901.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.901.000,00	22.901.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	19.628.000,00	19.627.750,00	(250,00)	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.628.000,00	19.627.750,00	(250,00)	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.628.000,00	19.627.750,00	(250,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	100,00		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(993.640.337,00)	(954.588.079,00)	39.052.258,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(993.640.337,00)	(954.588.079,00)	39.052.258,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.08.001 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	812.279.799,00	799.266.164,00	(13.013.635,00)	98,40		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	623.809.799,00	610.889.164,00	(12.920.635,00)	97,93		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	529.680.049,00	516.816.164,00	(12.863.885,00)	97,57		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	512.280.049,00	499.416.164,00	(12.863.885,00)	97,49		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	512.280.049,00	499.416.164,00	(12.863.885,00)	97,49		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	512.280.049,00	499.416.164,00	(12.863.885,00)	97,49		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.656.750,00	29.656.000,00	(750,00)	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.523.750,00	10.523.000,00	(750,00)	99,99		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.523.750,00	10.523.000,00	(750,00)	99,99		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.523.750,00	10.523.000,00	(750,00)	99,99		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.133.000,00	9.133.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.133.000,00	9.133.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.133.000,00	9.133.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.473.000,00	58.417.000,00	(56.000,00)	99,90		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.848.000,00	40.792.000,00	(56.000,00)	99,86		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.848.000,00	40.792.000,00	(56.000,00)	99,86		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.848.000,00	40.792.000,00	(56.000,00)	99,86		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.625.000,00	17.625.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	17.625.000,00	17.625.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.625.000,00	17.625.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.000.000,00	74.907.000,00	(93.000,00)	99,88		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75.000.000,00	74.907.000,00	(93.000,00)	99,88		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	75.000.000,00	74.907.000,00	(93.000,00)	99,88		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.907.000,00	(93.000,00)	99,88		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.907.000,00	(93.000,00)	99,88		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	100,00		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.503.000,00	46.503.000,00	0,00	100,00		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	46.503.000,00	46.503.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	46.503.000,00	46.503.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.503.000,00	46.503.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.503.000,00	46.503.000,00	0,00	100,00		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43.077.000,00	43.077.000,00	0,00	100,00		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.077.000,00	43.077.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	43.077.000,00	43.077.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	43.077.000,00	43.077.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.077.000,00	43.077.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(812.279.799,00)	(799.266.164,00)	13.013.635,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(812.279.799,00)	(799.266.164,00)	13.013.635,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Kei Besar Selatan Barat

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.09.001 Kecamatan Kei Besar Selatan Barat

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	878.174.272,00	851.778.856,00	(26.395.416,00)	96,99		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	581.674.272,00	561.488.356,00	(20.185.916,00)	96,53		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	454.324.522,00	441.394.656,00	(12.929.866,00)	97,15		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	450.174.522,00	439.194.656,00	(10.979.866,00)	97,56		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	450.174.522,00	439.194.656,00	(10.979.866,00)	97,56		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	450.174.522,00	439.194.656,00	(10.979.866,00)	97,56		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0		
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0		
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0		
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0		
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0		
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0		
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.500.000,00	65.103.861,00	(5.396.139,00)	92,35		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000,00	10.883.000,00	(117.000,00)	98,94		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.883.000,00	(117.000,00)	98,94		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.883.000,00	(117.000,00)	98,94		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	39.720.861,00	(5.279.139,00)	88,27		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	39.720.861,00	(5.279.139,00)	88,27		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	39.720.861,00	(5.279.139,00)	88,27		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.649.750,00	54.989.839,00	(659.911,00)	98,81		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.811.250,00	8.811.250,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.811.250,00	8.811.250,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.811.250,00	8.811.250,00	0,00	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.838.500,00	46.178.589,00	(659.911,00)	98,59		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	46.838.500,00	46.178.589,00	(659.911,00)	98,59		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.838.500,00	46.178.589,00	(659.911,00)	98,59		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000,00	81.900.000,00	(1.100.000,00)	98,67		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	83.000.000,00	81.900.000,00	(1.100.000,00)	98,67		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	66.500.000,00	65.800.000,00	(700.000,00)	98,95		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	66.500.000,00	65.800.000,00	(700.000,00)	98,95		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.500.000,00	65.800.000,00	(700.000,00)	98,95		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.500.000,00	16.100.000,00	(400.000,00)	97,58		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.100.000,00	(400.000,00)	97,58		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.100.000,00	(400.000,00)	97,58		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94.000.000,00	90.250.000,00	(3.750.000,00)	96,01		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94.000.000,00	90.250.000,00	(3.750.000,00)	96,01		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	94.000.000,00	90.250.000,00	(3.750.000,00)	96,01		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	94.000.000,00	90.250.000,00	(3.750.000,00)	96,01		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	90.250.000,00	(3.750.000,00)	96,01		
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	13.640.500,00	(1.359.500,00)	90,94		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00	13.640.500,00	(1.359.500,00)	90,94		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000,00	13.640.500,00	(1.359.500,00)	90,94		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.640.500,00	(1.359.500,00)	90,94		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.640.500,00	(1.359.500,00)	90,94		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(878.174.272,00)	(851.778.856,00)	26.395.416,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(878.174.272,00)	(851.778.856,00)	26.395.416,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Kei Besar Utara Barat

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10.001 Kecamatan Kei Besar Utara Barat

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.089.690.829,00	1.070.314.589,00	(19.376.240,00)	98,22		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	886.286.829,00	867.018.589,00	(19.268.240,00)	97,83		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	739.690.829,00	721.649.589,00	(18.041.240,00)	97,56		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	739.690.829,00	721.649.589,00	(18.041.240,00)	97,56		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	739.690.829,00	721.649.589,00	(18.041.240,00)	97,56		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	739.690.829,00	721.649.589,00	(18.041.240,00)	97,56		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.173.500,00	105.946.500,00	(1.227.000,00)	98,86		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.602.500,00	3.602.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.602.500,00	3.602.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.602.500,00	3.602.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	34.998.000,00	(2.000,00)	99,99		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.998.000,00	(2.000,00)	99,99		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.998.000,00	(2.000,00)	99,99		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.571.000,00	47.346.000,00	(1.225.000,00)	97,48		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	48.571.000,00	47.346.000,00	(1.225.000,00)	97,48		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.571.000,00	47.346.000,00	(1.225.000,00)	97,48		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	100,00		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.617.500,00	20.617.500,00	0,00	100,00		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.030.000,00	12.030.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.030.000,00	12.030.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.030.000,00	12.030.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.587.500,00	8.587.500,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.587.500,00	8.587.500,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.587.500,00	8.587.500,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.000.000,00	79.999.500,00	(500,00)	100,00		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80.000.000,00	79.999.500,00	(500,00)	100,00		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	80.000.000,00	79.999.500,00	(500,00)	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.999.500,00	(500,00)	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.999.500,00	(500,00)	100,00		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.000.000,00	48.999.000,00	(1.000,00)	100,00		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.000.000,00	48.999.000,00	(1.000,00)	100,00		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.000.000,00	23.999.500,00	(500,00)	100,00		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.999.500,00	(500,00)	100,00		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.999.500,00	(500,00)	100,00		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.000.000,00	24.999.500,00	(500,00)	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.999.500,00	(500,00)	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.999.500,00	(500,00)	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.404.000,00	34.404.000,00	0,00	100,00		
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.404.000,00	34.404.000,00	0,00	100,00		
04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.404.000,00	34.404.000,00	0,00	100,00		
04.7.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.404.000,00	34.404.000,00	0,00	100,00		
04.7.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.404.000,00	34.404.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.000.000,00	39.893.500,00	(106.500,00)	99,73		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000,00	39.893.500,00	(106.500,00)	99,73		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	40.000.000,00	39.893.500,00	(106.500,00)	99,73		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.893.500,00	(106.500,00)	99,73		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.893.500,00	(106.500,00)	99,73		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.089.690.829,00)	(1.070.314.589,00)	19.376.240,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.089.690.829,00)	(1.070.314.589,00)	19.376.240,00	0		





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.11 Kecamatan Kei Besar

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.11.001 Kecamatan Kei Besar

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.084.861.118,00	1.034.318.732,00	(50.542.386,00)	95,34		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	867.823.618,00	829.571.232,00	(38.252.386,00)	95,59		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	734.861.118,00	714.318.732,00	(20.542.386,00)	97,20		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	734.861.118,00	714.318.732,00	(20.542.386,00)	97,20		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	734.861.118,00	714.318.732,00	(20.542.386,00)	97,20		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	734.861.118,00	714.318.732,00	(20.542.386,00)	97,20		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.256.250,00	51.546.250,00	(17.710.000,00)	74,43		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.248.000,00	24.248.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	24.248.000,00	24.248.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.248.000,00	24.248.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.877.500,00	6.877.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.877.500,00	6.877.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.877.500,00	6.877.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.630.750,00	17.920.750,00	(17.710.000,00)	50,30		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	35.630.750,00	17.920.750,00	(17.710.000,00)	50,30		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.630.750,00	17.920.750,00	(17.710.000,00)	50,30		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.806.250,00	47.806.250,00	0,00	100,00		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.446.250,00	17.446.250,00	0,00	100,00		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.446.250,00	17.446.250,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.446.250,00	17.446.250,00	0,00	100,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00		
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.750.000,00	56.760.000,00	(5.990.000,00)	90,45		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	62.750.000,00	56.760.000,00	(5.990.000,00)	90,45		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.750.000,00	6.760.000,00	(5.990.000,00)	53,02		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.750.000,00	6.760.000,00	(5.990.000,00)	53,02		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	6.760.000,00	(5.990.000,00)	53,02		
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.075.000,00	25.775.000,00	(6.300.000,00)	80,36		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.075.000,00	25.775.000,00	(6.300.000,00)	80,36		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.362.500,00	19.062.500,00	(3.300.000,00)	85,24		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.362.500,00	19.062.500,00	(3.300.000,00)	85,24		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.362.500,00	19.062.500,00	(3.300.000,00)	85,24		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9.712.500,00	6.712.500,00	(3.000.000,00)	69,11		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.712.500,00	6.712.500,00	(3.000.000,00)	69,11		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.712.500,00	6.712.500,00	(3.000.000,00)	69,11		
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.212.500,00	16.212.500,00	0,00	100,00		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.212.500,00	16.212.500,00	0,00	100,00		
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.318.750,00	6.318.750,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.318.750,00	6.318.750,00	0,00	100,00		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.318.750,00	6.318.750,00	0,00	100,00		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.893.750,00	9.893.750,00	0,00	100,00		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	9.893.750,00	9.893.750,00	0,00	100,00		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.893.750,00	9.893.750,00	0,00	100,00		
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00		
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00		
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00		
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.084.861.118,00)	(1.034.318.732,00)	50.542.386,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.084.861.118,00)	(1.034.318.732,00)	50.542.386,00	0		

LANGGUR, 4 OKTOBER 2024

Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO



 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN Tahun Anggaran 2023					
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	375.123.307.116,00	211.366.434.238,00	0,00	0,00
		327.680.963.681,04	190.276.934.691,24	0,00	0,00
1.01	PENDIDIKAN	186.103.277.684,00	34.350.271.862,00	0,00	0,00
		144.631.530.548,89	30.079.675.898,00	0,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	121.690.129.698,00	358.125.000,00	0,00	0,00
		107.216.521.273,00	356.191.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.816.250,00	0,00	0,00	0,00
		274.819.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	171.816.250,00	0,00	0,00	0,00
		171.569.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	119.166.919.198,00	0,00	0,00	0,00
		105.068.595.831,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93.869.519.198,00	0,00	0,00	0,00
		81.378.725.055,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86.076.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.211.324.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.604.070.776,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	134.800.500,00	0,00	0,00	0,00
		131.788.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	134.800.500,00	0,00	0,00	0,00
		131.788.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.741.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.129.225,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	114.741.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.129.225,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	909.309.000,00	198.500.000,00	0,00	0,00
		711.612.101,00	197.786.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.070.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	187.250.000,00	0,00	0,00
		0,00	186.536.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.725.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
		12.725.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	196.116.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.378.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	178.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		146.459.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	501.613.000,00	0,00	0,00	0,00
		414.978.901,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	159.625.000,00	0,00	0,00
		0,00	158.405.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	159.625.000,00	0,00	0,00
		0,00	158.405.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.662.500,00	0,00	0,00	0,00
		570.727.366,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		261.479.866,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.662.500,00	0,00	0,00	0,00
		309.247.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.045.000,00	0,00	0,00	0,00
		307.724.250,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.105.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.336.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		222.438.250,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.13	Penataan Organisasi	85.836.250,00	0,00	0,00	0,00
		39.125.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	85.836.250,00	0,00	0,00	0,00
		39.125.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	63.848.597.662,00	33.714.046.950,00	0,00	0,00
		37.415.009.275,89	29.723.484.898,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41.045.381.629,00	8.395.705.528,00	0,00	0,00
		27.043.216.344,56	7.564.964.274,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.687.065.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.641.980.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.267.141.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.027.616.975,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.503.555.649,00	413.897.894,00	0,00	0,00
		1.343.989.081,00	407.224.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.459.855.716,00	1.970.323.900,00	0,00	0,00
		4.368.759.507,00	1.555.112.845,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.689.780.056,00	718.947.106,00	0,00	0,00
		2.076.271.275,00	679.316.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.562.576.066,00	2.058.969.680,00	0,00	0,00
		2.443.177.170,00	1.781.483.605,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	150.001.175,00	302.163.200,00	0,00	0,00
		148.336.175,00	285.472.150,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.177.740.000,00	296.433.600,00	0,00	0,00
		1.105.109.400,00	288.487.600,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	30.000.000,00	2.070.000.000,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	2.056.300.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	908.850.250,00	0,00	0,00	0,00
		695.796.510,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.292.347.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.742.082.684,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	16.125.350.017,00	564.970.148,00	0,00	0,00
		5.327.250.707,56	511.568.074,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	191.118.500,00	0,00	0,00	0,00
		92.846.360,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15.112.148.133,00	23.497.030.582,00	0,00	0,00
		9.298.118.302,33	20.383.343.114,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	3.930.363.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.561.554.726,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	3.052.619.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.815.431.330,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	0,00	7.179.819.756,00	0,00	0,00
		0,00	6.216.088.728,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	3.608.375.877,00	0,00	0,00
		0,00	3.366.472.650,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.247.848.000,00	1.139.157.219,00	0,00	0,00
		1.602.330.700,00	842.248.850,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	886.208.933,00	0,00	0,00
		0,00	775.762.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	0,00	181.735.663,00	0,00	0,00
		0,00	181.366.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0,00	1.180.282.201,00	0,00	0,00
		0,00	769.478.380,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.367.923.167,00	987.727.800,00	0,00	0,00
		814.270.365,00	588.474.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	456.250.000,00	0,00	0,00
		0,00	400.850.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.381.244.750,00	0,00	0,00	0,00
		1.804.563.029,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	97.718.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.872.895.400,00	736.654.600,00	0,00	0,00
		5.032.538.205,33	708.662.450,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	68.736.000,00	157.836.500,00	0,00	0,00
		44.416.003,00	156.954.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	75.782.250,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.261.526.150,00	1.819.471.840,00	0,00	0,00
		949.939.690,00	1.775.177.510,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	649.464.000,00	0,00	0,00
		0,00	648.353.500,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	545.601.150,00	1.011.687.440,00	0,00	0,00
		496.592.575,00	977.789.010,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	56.529.500,00	150.145.400,00	0,00	0,00
		16.657.500,00	149.035.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	329.467.750,00	0,00	0,00	0,00
		198.261.865,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	247.602.750,00	0,00	0,00	0,00
		238.427.750,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.082.325.000,00	8.175.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.429.541.750,00	1.839.000,00	0,00	0,00
		123.734.939,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	151.680.750,00	0,00	0,00	0,00
		123.734.939,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	2.277.861.000,00	1.839.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	564.550.500,00	257.850.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	377.310.000,00	257.850.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	153.654.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0,00	257.850.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	223.656.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	187.240.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	187.240.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0,00	20.250.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	20.250.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.2.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	20.250.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	KESEHATAN	132.654.039.138,00	80.452.737.977,00	0,00	0,00
		136.378.015.589,48	65.520.777.521,00	0,00	0,00
1.02.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.734.982,80	0,00	0,00	0,00
1.02.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.734.982,80	0,00	0,00	0,00
1.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.734.982,80	0,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.206.259.551,00	3.349.077.900,00	0,00	0,00
		81.820.605.848,00	3.122.846.636,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	224.569.300,00	0,00	0,00	0,00
		222.448.511,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.099.800,00	0,00	0,00	0,00
		26.096.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.469.500,00	0,00	0,00	0,00
		196.352.511,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.388.317.601,00	0,00	0,00	0,00
		48.516.277.745,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.279.952.601,00	0,00	0,00	0,00
		48.408.009.745,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.103.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52.165.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.165.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.363.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.362.892.450,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.363.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.362.892.450,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	708.649.500,00	0,00	0,00	0,00
		705.687.374,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.937.500,00	0,00	0,00	0,00
		186.909.125,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.125.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.926.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353.587.000,00	0,00	0,00	0,00
		350.727.249,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	625.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	621.395.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	399.950.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	221.445.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.332.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.184.764,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.143.041,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.509.723,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.532.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.532.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.201.150,00	277.100.400,00	0,00	0,00
		319.754.750,00	256.385.050,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		254.908.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.746.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.331.150,00	277.100.400,00	0,00	0,00
		12.100.000,00	256.385.050,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	19.986.190.000,00	2.446.977.500,00	0,00	0,00
		28.555.360.254,00	2.245.066.586,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	19.986.190.000,00	2.446.977.500,00	0,00	0,00
		28.555.360.254,00	2.245.066.586,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	52.170.167.387,00	76.327.747.277,00	0,00	0,00
		51.219.195.949,68	61.733.460.885,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.259.015.952,00	75.692.033.895,00	0,00	0,00
		2.346.382.928,00	61.159.861.580,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	2.352.275.952,00	72.362.872.775,00	0,00	0,00
		1.534.601.500,00	58.011.969.593,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	266.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
		257.500.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	518.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		459.366.364,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0,00	666.994.500,00	0,00	0,00
		0,00	653.639.500,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.500.000,00	805.161.120,00	0,00	0,00
		0,00	719.630.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	1.833.005.500,00	0,00	0,00
		0,00	1.750.622.487,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.915.064,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.371.735.325,00	566.963.382,00	0,00	0,00
		40.406.385.086,68	536.249.305,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	104.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.344.395,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.995.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	104.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.878.593,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	104.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.774.816,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	99.892.250,00	0,00	0,00	0,00
		98.490.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	104.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.790.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	58.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.025.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.951.580,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	102.086.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.925.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	104.423.500,00	0,00	0,00	0,00
		104.318.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.384.500,00	0,00	0,00	0,00
		99.894.184,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7.857.109.655,00	566.963.382,00	0,00	0,00
		27.700.597.103,68	536.249.305,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.051.180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	27.184.964.420,00	0,00	0,00	0,00
		7.820.000.494,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.473.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.490.664.721,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.954.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	225.850.000,00	68.750.000,00	0,00	0,00
		186.276.369,00	37.350.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	225.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.276.369,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	0,00	68.750.000,00	0,00	0,00
		0,00	37.350.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.313.566.110,00	0,00	0,00	0,00
		8.280.151.566,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	7.676.278.010,00	0,00	0,00	0,00
		7.653.020.316,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	637.288.100,00	0,00	0,00	0,00
		627.131.250,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.804.087.200,00	775.912.800,00	0,00	0,00
		2.758.462.609,00	664.470.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.859.911,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.859.911,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.779.087.200,00	775.912.800,00	0,00	0,00
		2.735.602.698,00	664.470.000,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.779.087.200,00	775.912.800,00	0,00	0,00
		2.735.602.698,00	664.470.000,00	0,00	0,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	423.525.000,00	0,00	0,00	0,00
		382.016.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.700.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.998.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.998.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	273.525.000,00	0,00	0,00	0,00
		235.818.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	273.525.000,00	0,00	0,00	0,00
		235.818.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.665.897.957,00	87.258.693.068,00	0,00	0,00
		13.056.758.165,67	86.369.962.772,24	0,00	0,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.332.395.827,00	221.619.100,00	0,00	0,00
		4.309.096.726,00	221.421.250,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.251.500,00	0,00	0,00	0,00
		87.953.250,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.251.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.991.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.961.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.236.475.986,00	0,00	0,00	0,00
		3.215.463.913,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.109.083.086,00	0,00	0,00	0,00
		3.088.463.263,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.150.900,00	0,00	0,00	0,00
		98.950.900,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.242.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.242.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.807.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	611.926.250,00	221.619.100,00	0,00	0,00
		611.639.403,00	221.421.250,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	221.619.100,00	0,00	0,00
		0,00	221.421.250,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.988.750,00	0,00	0,00	0,00
		59.988.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.085.500,00	0,00	0,00	0,00
		57.085.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.964.250,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	431.852.000,00	0,00	0,00	0,00
		431.600.903,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.668.525,00	0,00	0,00	0,00
		236.202.444,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.299.975,00	0,00	0,00	0,00
		182.833.894,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.368.550,00	0,00	0,00	0,00
		53.368.550,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.073.566,00	0,00	0,00	0,00
		157.837.716,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.998.950,00	0,00	0,00	0,00
		58.763.450,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.001.266,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.001.266,00	0,00	0,00	0,00
		15.630.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.443.350,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	14.443.000,00	0,00	0,00	0,00
		555.139.650,00	5.326.017.478,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	550.699.512,00	5.048.868.745,29	0,00	0,00
		30.500.000,00	579.510.628,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	30.500.000,00	480.015.000,00	0,00	0,00
		30.500.000,00	579.510.628,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.500.000,00	480.015.000,00	0,00	0,00
		524.639.650,00	4.746.506.850,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	520.199.512,00	4.568.853.745,29	0,00	0,00
		274.823.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	272.496.512,00	0,00	0,00	0,00
		249.816.150,00	4.746.506.850,00	0,00	0,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	247.703.000,00	4.568.853.745,29	0,00	0,00
		50.972.000,00	249.953.500,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	49.933.167,00	207.874.470,95	0,00	0,00
		50.972.000,00	249.953.500,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	49.933.167,00	207.874.470,95	0,00	0,00
		43.472.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	42.433.167,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	175.000.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	0,00	133.563.470,95	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.953.500,00	0,00	0,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	74.311.000,00	0,00	0,00
		2.225.142.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.224.142.000,00	129.594.000,00	0,00	0,00
		2.225.142.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
		2.224.142.000,00	129.594.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.125.142.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		2.125.142.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	79.594.000,00	0,00	0,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	190.014.270,00	0,00	0,00
		0,00	188.573.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	190.014.270,00	0,00	0,00
		0,00	188.573.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	0,00	190.014.270,00	0,00	0,00
		0,00	188.573.000,00	0,00	0,00
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	72.105.000,00	369.231.800,00	0,00	0,00
		72.105.000,00	281.843.800,00	0,00	0,00
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	72.105.000,00	369.231.800,00	0,00	0,00
		72.105.000,00	281.843.800,00	0,00	0,00
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	72.105.000,00	344.140.300,00	0,00	0,00
		72.105.000,00	256.752.300,00	0,00	0,00
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	25.091.500,00	0,00	0,00
		0,00	25.091.500,00	0,00	0,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	170.442.250,00	0,00	0,00	0,00
		170.442.250,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	170.442.250,00	0,00	0,00	0,00
		170.442.250,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	29.781.250,00	0,00	0,00	0,00
		29.781.250,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	23.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	117.361.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.361.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	739.125.000,00	8.688.238.100,00	0,00	0,00
		405.865.000,00	8.681.100.100,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	739.125.000,00	8.688.238.100,00	0,00	0,00
		405.865.000,00	8.681.100.100,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	615.750.000,00	8.688.238.100,00	0,00	0,00
		295.165.000,00	8.681.100.100,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	123.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.045.424.480,00	72.083.618.820,00	0,00	0,00
		4.801.106.563,67	71.610.687.406,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	5.045.424.480,00	72.083.618.820,00	0,00	0,00
		4.801.106.563,67	71.610.687.406,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	546.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		483.931.625,67	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.079.841.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.255.184.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	250.000.000,00	3.211.200.000,00	0,00	0,00
		250.000.000,00	3.148.915.000,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	2.497.693.480,00	56.339.677.820,00	0,00	0,00
		2.146.474.938,00	56.011.327.406,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	309.000.000,00	12.532.741.000,00	0,00	0,00
		309.000.000,00	12.450.445.000,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	244.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		239.445.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	117.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.071.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	109.401.750,00	0,00	0,00	0,00
		108.791.004,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	53.008.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.397.254,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	53.008.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.397.254,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	56.393.750,00	0,00	0,00	0,00
		56.393.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	56.393.750,00	0,00	0,00	0,00
		56.393.750,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	365.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		364.576.943,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	365.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		364.576.943,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	365.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		364.576.943,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.650.150.395,00	8.935.031.331,00	0,00	0,00
		18.473.869.370,00	7.937.476.500,00	0,00	0,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.593.887.951,00	71.575.000,00	0,00	0,00
		2.464.184.870,00	59.518.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.753.275.201,00	0,00	0,00	0,00
		1.709.537.508,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.695.275.201,00	0,00	0,00	0,00
		1.659.173.508,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.364.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.373.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.257.724,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.373.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.257.724,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.531.000,00	61.125.000,00	0,00	0,00
		421.644.923,00	59.518.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.497.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.497.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	61.125.000,00	0,00	0,00
		0,00	59.518.000,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.438.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.794.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.765.500,00	0,00	0,00	0,00
		51.167.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.830.000,00	0,00	0,00	0,00
		265.185.923,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	625.000,00	7.325.000,00	0,00	0,00
		625.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	625.000,00	7.325.000,00	0,00	0,00
		625.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.063.750,00	3.125.000,00	0,00	0,00
		82.584.715,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.503.465,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.863.750,00	3.125.000,00	0,00	0,00
		27.731.250,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.585.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.655.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.930.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6.791.786.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.150.491.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.586.786.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.945.491.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	847.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	5.719.461.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.825.491.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	16.081.206.000,00	59.875.000,00	0,00	0,00
		10.806.618.500,00	59.163.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	15.946.206.000,00	59.875.000,00	0,00	0,00
		10.756.618.500,00	59.163.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	15.676.206.000,00	59.875.000,00	0,00	0,00
		10.486.618.500,00	59.163.000,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		270.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	183.270.444,00	8.803.581.331,00	0,00	0,00
		52.575.000,00	7.818.795.500,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	183.270.444,00	8.803.581.331,00	0,00	0,00
		52.575.000,00	7.818.795.500,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	130.695.444,00	8.803.581.331,00	0,00	0,00
		0,00	7.818.795.500,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.575.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.474.971.387,00	369.700.000,00	0,00	0,00
		11.729.597.049,00	369.042.000,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.042.841.637,00	354.750.000,00	0,00	0,00
		9.768.571.127,00	354.092.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.668.362,00	0,00	0,00	0,00
		6.403.308.087,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.350.792.362,00	0,00	0,00	0,00
		6.258.438.337,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149.876.000,00	0,00	0,00	0,00
		144.869.750,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.451.101.875,00	0,00	0,00	0,00
		1.321.137.243,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.829.500,00	0,00	0,00	0,00
		18.827.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	521.585.875,00	0,00	0,00	0,00
		500.805.880,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.230.500,00	0,00	0,00	0,00
		123.920.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.045.625,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	79.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.687.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	683.086.000,00	0,00	0,00	0,00
		610.601.238,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	149.375.000,00	0,00	0,00
		0,00	148.717.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	58.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	58.500.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	55.375.000,00	0,00	0,00
		0,00	54.717.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	35.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	35.500.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.488.365.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.461.192.472,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		108.246.972,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.346.995.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.346.995.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.705.900,00	205.375.000,00	0,00	0,00
		582.933.325,00	205.375.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	514.966.900,00	0,00	0,00	0,00
		506.982.575,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.004.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00
		43.427.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.625.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00
		14.443.750,00	9.375.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.080.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	728.337.750,00	0,00	0,00	0,00
		705.501.622,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	653.347.000,00	0,00	0,00	0,00
		643.790.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.475.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	224.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		219.248.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	289.975.000,00	0,00	0,00	0,00
		289.975.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	19.242.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.692.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	49.990.750,00	0,00	0,00	0,00
		43.258.022,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	19.991.250,00	0,00	0,00	0,00
		17.234.272,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	29.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		26.023.750,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.453.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.453.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.542.860.250,00	0,00	0,00	0,00
		1.096.646.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.775.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.775.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	156.494.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.117.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	105.994.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.832.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.285.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.336.366.250,00	0,00	0,00	0,00
		891.753.300,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	2.336.366.250,00	0,00	0,00	0,00
		891.753.300,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.04	PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	160.931.750,00	14.950.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	158.878.100,00	14.950.000,00	0,00	0,00
		101.248.750,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.745.500,00	0,00	0,00	0,00
		36.504.750,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.384.500,00	0,00	0,00	0,00
		64.744.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	64.361.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.683.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	58.132.600,00	14.950.000,00	0,00	0,00
		59.683.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00
1.06	SOSIAL	58.132.600,00	14.950.000,00	0,00	0,00
		3.574.970.555,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.411.192.958,00	0,00	0,00	0,00
		2.733.188.255,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.663.099.835,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.388.412,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	145.388.412,00	0,00	0,00	0,00
		2.173.598.655,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.152.920.506,00	0,00	0,00	0,00
		2.120.798.655,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.100.120.506,00	0,00	0,00	0,00
		52.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.183.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207.363.328,00	0,00	0,00	0,00
		28.896.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.396.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.796.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.496.000,00	0,00	0,00	0,00
		152.491.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.471.328,00	0,00	0,00	0,00
		100.689.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.352.321,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.415.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.434.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.643.571,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.274.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.274.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.242.600,00	0,00	0,00	0,00
		51.836.768,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.552.550,00	0,00	0,00	0,00
		15.164.375,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.710.050,00	0,00	0,00	0,00
		29.612.393,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.060.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	29.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.238.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	29.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.238.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	102.814.500,00	0,00	0,00	0,00
		70.314.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	102.814.500,00	0,00	0,00	0,00
		70.314.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	82.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.164.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.164.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	108.713.750,00	0,00	0,00	0,00
		103.866.493,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	103.925.750,00	0,00	0,00	0,00
		99.078.493,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	44.076.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.556.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	59.849.750,00	0,00	0,00	0,00
		55.522.493,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4.788.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	4.788.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.788.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	180.204.000,00	0,00	0,00	0,00
		136.393.850,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	180.204.000,00	0,00	0,00	0,00
		136.393.850,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	114.644.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.881.660,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	65.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.512.190,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	350.054.250,00	0,00	0,00	0,00
		337.522.480,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	350.054.250,00	0,00	0,00	0,00
		337.522.480,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	323.229.250,00	0,00	0,00	0,00
		311.137.480,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	26.825.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.385.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	99.995.800,00	0,00	0,00	0,00
		99.995.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	99.995.800,00	0,00	0,00	0,00
		99.995.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12.995.550,00	0,00	0,00	0,00
		12.995.550,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	87.000.250,00	0,00	0,00	0,00
		87.000.250,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	55.740.661.299,00	1.153.654.183,00	0,00	175.591.979.200,00
		50.143.349.805,00	277.925.000,00	0,00	180.727.250.600,00
2.07	TENAGA KERJA	140.768.500,00	0,00	0,00	0,00
		87.067.850,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.575.250,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.575.250,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	6.575.250,00	0,00	0,00	0,00
		35.768.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	32.781.600,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	14.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	14.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.768.500,00	0,00	0,00	0,00
		9.456.600,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.768.500,00	0,00	0,00	0,00
		9.456.600,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.711.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.936.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.936.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.775.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.775.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	607.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		510.270.717,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	490.234.000,00	0,00	0,00	0,00
		400.234.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	15.279.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.279.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	15.279.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.279.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	474.955.000,00	0,00	0,00	0,00
		384.955.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	474.955.000,00	0,00	0,00	0,00
		384.955.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.699.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.699.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.699.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	47.141.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.337.517,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47.141.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.337.517,00	0,00	0,00	0,00
		47.141.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	40.337.517,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09	PANGAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.172.814.000,00	32.125.000,00	0,00	0,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.168.815.738,00	32.125.000,00	0,00	0,00
		453.261.000,00	30.875.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	451.358.014,00	30.875.000,00	0,00	0,00
		46.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.321.000,00	0,00	0,00	0,00
		286.072.064,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.831.250,00	0,00	0,00	0,00
		1.831.250,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.788.750,00	0,00	0,00	0,00
		48.788.750,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.469.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.469.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.232.000,00	0,00	0,00	0,00
		222.983.064,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	30.875.000,00	0,00	0,00
		0,00	30.875.000,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	30.875.000,00	0,00	0,00
		0,00	30.875.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.145.950,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.745.950,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.140.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	508.766.000,00	0,00	0,00	0,00
		506.950.130,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	96.358.500,00	0,00	0,00	0,00
		96.256.830,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	29.933.750,00	0,00	0,00	0,00
		29.891.700,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	13.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.420.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	53.004.750,00	0,00	0,00	0,00
		52.945.130,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	412.407.500,00	0,00	0,00	0,00
		410.693.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	165.877.000,00	0,00	0,00	0,00
		164.166.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	246.530.500,00	0,00	0,00	0,00
		246.526.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	54.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.581.194,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	54.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.581.194,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	54.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.581.194,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	155.927.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		155.926.400,00	1.250.000,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	155.927.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		155.926.400,00	1.250.000,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	155.927.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		155.926.400,00	1.250.000,00	0,00	0,00
2.10	PERTANAHAN	611.836.000,00	568.124.525,00	0,00	0,00
		253.123.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	511.836.000,00	568.124.525,00	0,00	0,00
		159.723.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	511.836.000,00	568.124.525,00	0,00	0,00
		159.723.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	511.836.000,00	568.124.525,00	0,00	0,00
		159.723.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	7.699.712.861,00	170.891.850,00	0,00	0,00
		6.972.428.985,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.137.014.311,00	117.939.350,00	0,00	0,00
		2.000.909.139,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.799.650,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.249.650,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.514.831.211,00	0,00	0,00	0,00
		1.501.533.095,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.452.206.211,00	0,00	0,00	0,00
		1.440.831.595,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	62.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.701.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.674.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.429.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.674.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.429.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.007.250,00	8.711.250,00	0,00	0,00
		244.447.019,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.565.000,00	8.711.250,00	0,00	0,00
		42.883.530,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.105.500,00	0,00	0,00	0,00
		22.780.750,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.336.750,00	0,00	0,00	0,00
		169.792.739,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	109.228.100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	79.875.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	29.353.100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.188.750,00	0,00	0,00	0,00
		90.243.247,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.064.247,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.188.750,00	0,00	0,00	0,00
		33.179.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.012.600,00	0,00	0,00	0,00
		109.457.128,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.522.600,00	0,00	0,00	0,00
		66.588.850,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.350.278,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.518.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	306.046.100,00	3.075.000,00	0,00	0,00
		241.213.675,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	219.417.600,00	3.075.000,00	0,00	0,00
		188.263.675,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	97.437.500,00	0,00	0,00	0,00
		89.332.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	103.508.100,00	3.075.000,00	0,00	0,00
		82.702.929,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	18.472.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.228.246,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	86.628.500,00	0,00	0,00	0,00
		52.950.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	686.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.942.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	25.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	25.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	25.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	266.315.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136.592.400,00	0,00	0,00	0,00
		266.315.000,00	0,00	0,00	0,00
		136.592.400,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	47.180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	40.585.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	119.685.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	57.157.400,00	0,00	0,00	0,00
		44.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.950.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.734.387.450,00	49.877.500,00	0,00	0,00
		4.538.213.771,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.734.387.450,00	49.877.500,00	0,00	0,00
		4.538.213.771,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4.638.387.450,00	49.877.500,00	0,00	0,00
		4.442.213.771,00	0,00	0,00	0,00
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.901.339.269,00	62.375.000,00	0,00	0,00
		2.863.217.752,00	57.375.000,00	0,00	0,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.399.192.519,00	57.375.000,00	0,00	0,00
		2.361.071.002,00	57.375.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.768.714.469,00	0,00	0,00	0,00
		1.730.595.452,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.768.714.469,00	0,00	0,00	0,00
		1.730.595.452,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.979.300,00	0,00	0,00	0,00
		280.977.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.231.050,00	0,00	0,00	0,00
		17.229.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.202.250,00	0,00	0,00	0,00
		108.202.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.101.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.101.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.445.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.445.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	57.375.000,00	0,00	0,00
		0,00	57.375.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	28.750.000,00	0,00	0,00
		0,00	28.750.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	28.625.000,00	0,00	0,00
		0,00	28.625.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.800.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.698.750,00	0,00	0,00	0,00
		197.697.750,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.427.500,00	0,00	0,00	0,00
		130.427.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.490.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.043.750,00	0,00	0,00	0,00
		28.043.750,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.737.500,00	0,00	0,00	0,00
		30.737.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	431.584.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		431.584.250,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	431.584.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		431.584.250,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	263.834.250,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		263.834.250,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	70.562.500,00	0,00	0,00	0,00
		70.562.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	70.562.500,00	0,00	0,00	0,00
		70.562.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	70.562.500,00	0,00	0,00	0,00
		70.562.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.886.482.487,00	7.625.000,00	0,00	175.591.979.200,00
		4.546.882.769,00	0,00	0,00	180.727.250.600,00
2.13.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	148.569.795.000,00
2.13.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	148.569.795.000,00
2.13.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	148.569.795.000,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.277.590.487,00	7.625.000,00	0,00	0,00
		2.215.345.343,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.942.882.487,00	0,00	0,00	0,00
		1.895.455.102,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.901.482.487,00	0,00	0,00	0,00
		1.854.055.102,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.491.750,00	7.625.000,00	0,00	0,00
		205.335.280,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.113.750,00	0,00	0,00	0,00
		1.113.750,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	7.625.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.097.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.096.750,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.281.000,00	0,00	0,00	0,00
		124.124.780,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.013.750,00	0,00	0,00	0,00
		72.130.461,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.167.461,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.963.750,00	0,00	0,00	0,00
		56.963.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.202.500,00	0,00	0,00	0,00
		42.424.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.102.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.022.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.022.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		538.885.102,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		538.885.102,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		538.885.102,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.760.600.000,00	0,00	0,00	175.591.979.200,00
		1.664.389.072,00	0,00	0,00	32.157.455.600,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.760.600.000,00	0,00	0,00	175.591.979.200,00
		1.664.389.072,00	0,00	0,00	32.157.455.600,00
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.540.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.469.566.272,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.526.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	175.591.979.200,00
		0,00	0,00	0,00	32.157.455.600,00
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.240.800,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.556.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	128.292.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.263.252,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	128.292.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.263.252,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	93.292.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.263.252,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.902.074.788,00	0,00	0,00	0,00
		6.526.740.575,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.894.584.747,00	0,00	0,00	0,00
		1.851.336.575,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.414.624.997,00	0,00	0,00	0,00
		1.404.740.507,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.414.624.997,00	0,00	0,00	0,00
		1.404.740.507,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.891.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.195.380,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.891.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.195.380,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.295.500,00	0,00	0,00	0,00
		200.318.780,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.585.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.095.780,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.022.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.022.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.617.500,00	0,00	0,00	0,00
		8.130.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.071.000,00	0,00	0,00	0,00
		172.071.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.286.250,00	0,00	0,00	0,00
		110.991.908,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.269.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.106.908,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.816.250,00	0,00	0,00	0,00
		64.616.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.487.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.090.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.052.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.895.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.770.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.425.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.425.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	211.811.250,00	0,00	0,00	0,00
		211.585.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	21.131.250,00	0,00	0,00	0,00
		21.131.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	21.131.250,00	0,00	0,00	0,00
		21.131.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	190.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		190.454.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	34.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.079.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	156.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		156.375.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.139.778.791,00	0,00	0,00	0,00
		2.951.194.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	934.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		876.148.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	143.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	529.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		514.768.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.380.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	822.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		822.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	822.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		822.600.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.016.828.791,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	940.795.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		297.804.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	230.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		641.629.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	633.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.595.791,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	42.595.500,00	0,00	0,00	0,00
		365.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	311.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		365.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	311.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.655.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.512.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.655.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.512.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	234.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.295.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15	PERHUBUNGAN	1.277.725.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.381.616.361,00	180.387.808,00	0,00	0,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.873.794.865,00	57.000.000,00	0,00	0,00
		2.369.679.617,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.270.188.665,00	0,00	0,00	0,00
		1.838.400.742,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.805.376.810,00	0,00	0,00	0,00
		1.800.000.742,00	0,00	0,00	0,00
		1.766.976.810,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.474.500,00	0,00	0,00	0,00
		278.708.692,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.927.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.926.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.657.500,00	0,00	0,00	0,00
		69.814.899,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.937.500,00	0,00	0,00	0,00
		30.139.300,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.923.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.203.900,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.728.500,00	0,00	0,00	0,00
		145.274.593,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.392.875,00	0,00	0,00	0,00
		61.777.052,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.292.552,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.392.875,00	0,00	0,00	0,00
		39.484.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.411.500,00	0,00	0,00	0,00
		124.326.111,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.734.111,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.395.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.241.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.197.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.574.998.936,00	57.000.000,00	0,00	0,00
		6.392.831.200,00	57.000.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	17.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00
		5.298.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0,00	57.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	57.000.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.298.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.436.236.936,00	0,00	0,00	0,00
		6.273.480.200,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.436.236.936,00	0,00	0,00	0,00
		6.273.480.200,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.762.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.153.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.762.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.153.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	436.937.808,00	123.387.808,00	0,00	0,00
		210.775.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.06.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	336.937.808,00	123.387.808,00	0,00	0,00
		111.875.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	50.675.000,00	123.387.808,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	191.262.808,00	0,00	0,00	0,00
		16.975.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	2.619.103.006,00	13.750.000,00	0,00	0,00
		2.503.449.034,00	13.050.000,00	0,00	0,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.194.376.506,00	13.750.000,00	0,00	0,00
		2.106.046.809,00	13.050.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.650.833.256,00	0,00	0,00	0,00
		1.634.684.246,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.607.033.256,00	0,00	0,00	0,00
		1.590.884.246,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	422.731.500,00	0,00	0,00	0,00
		369.743.701,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.404.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.172.500,00	0,00	0,00	0,00
		69.025.510,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.163.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.349.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.696.000,00	0,00	0,00	0,00
		237.990.191,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.975.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	13.750.000,00	0,00	0,00
		0,00	13.050.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	13.750.000,00	0,00	0,00
		0,00	13.050.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.985.712,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.985.712,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.411.750,00	0,00	0,00	0,00
		82.633.150,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.754.250,00	0,00	0,00	0,00
		48.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.935.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.787.500,00	0,00	0,00	0,00
		22.948.150,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	372.604.750,00	0,00	0,00	0,00
		348.702.225,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	372.604.750,00	0,00	0,00	0,00
		348.702.225,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	78.362.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.370.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	163.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		142.958.225,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	25.331.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.331.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	105.911.750,00	0,00	0,00	0,00
		105.043.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	52.121.750,00	0,00	0,00	0,00
		48.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.121.750,00	0,00	0,00	0,00
		48.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	15.521.750,00	0,00	0,00	0,00
		12.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.895.044.133,00	0,00	0,00	0,00
		2.726.673.840,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.072.701.383,00	0,00	0,00	0,00
		1.957.545.555,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.431.678.558,00	0,00	0,00	0,00
		1.383.246.664,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.386.674.808,00	0,00	0,00	0,00
		1.339.742.914,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.003.750,00	0,00	0,00	0,00
		43.503.750,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.847.375,00	0,00	0,00	0,00
		386.566.602,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.875.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.875.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.139.375,00	0,00	0,00	0,00
		99.539.375,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.770.500,00	0,00	0,00	0,00
		39.769.667,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.062.500,00	0,00	0,00	0,00
		241.382.560,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.993.750,00	0,00	0,00	0,00
		83.258.289,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.664.539,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.993.750,00	0,00	0,00	0,00
		34.593.750,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.481.700,00	0,00	0,00	0,00
		86.474.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.999.200,00	0,00	0,00	0,00
		41.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.880.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.602.500,00	0,00	0,00	0,00
		39.604.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.020.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.020.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.020.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	59.941.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.949.700,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.941.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	54.949.700,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	28.699.700,00	0,00	0,00	0,00
		29.941.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	26.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		237.530.250,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	232.859.925,00	0,00	0,00	0,00
		237.530.250,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	232.859.925,00	0,00	0,00	0,00
		237.530.250,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	232.859.925,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.663.580,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	27.663.580,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	27.663.580,00	0,00	0,00	0,00
		119.221.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	117.984.580,00	0,00	0,00	0,00
		119.221.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	117.984.580,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.945.600,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	19.221.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.038.980,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.350.650.500,00	0,00	0,00	0,00
		312.650.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.350.650.500,00	0,00	0,00	0,00
		312.650.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.350.650.500,00	0,00	0,00	0,00
		312.650.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18	PENANAMAN MODAL	3.941.817.914,00	51.750.000,00	0,00	0,00
		3.858.616.868,00	51.750.000,00	0,00	0,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.065.517.914,00	51.750.000,00	0,00	0,00
		3.023.610.342,00	51.750.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.395.069.164,00	0,00	0,00	0,00
		2.380.018.085,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.357.269.164,00	0,00	0,00	0,00
		2.342.218.085,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.643.920,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	81.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.643.920,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.748.500,00	0,00	0,00	0,00
		296.025.912,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.967.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.967.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.998.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.999.578,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.781.000,00	0,00	0,00	0,00
		175.060.334,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	51.750.000,00	0,00	0,00
		0,00	51.750.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	51.750.000,00	0,00	0,00
		0,00	51.750.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.047.275,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.647.275,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.013.750,00	0,00	0,00	0,00
		122.938.650,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.823.750,00	0,00	0,00	0,00
		31.759.550,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.999.100,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	58.936.500,00	0,00	0,00	0,00
		58.936.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	58.936.500,00	0,00	0,00	0,00
		58.936.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.778.016,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.778.016,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	25.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.880.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	34.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.898.016,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.237.958,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.237.958,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.237.958,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.446.888,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	180.446.888,00	0,00	0,00	0,00
		120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	115.448.892,00	0,00	0,00	0,00
		65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	64.997.996,00	0,00	0,00	0,00
		571.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		566.543.664,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	571.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		566.543.664,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	65.535.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.481.203,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	332.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		328.137.461,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	172.925.000,00	0,00	0,00	0,00
		172.925.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.447.768.185,00	66.625.000,00	0,00	0,00
		3.969.471.513,00	66.625.000,00	0,00	0,00
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.830.447.685,00	21.625.000,00	0,00	0,00
		1.795.608.263,00	21.625.000,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.414.743.585,00	0,00	0,00	0,00
		1.381.726.913,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.378.143.585,00	0,00	0,00	0,00
		1.345.126.913,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.702.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.702.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.997.500,00	21.625.000,00	0,00	0,00
		237.555.350,00	21.625.000,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.087.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.087.500,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	21.625.000,00	0,00	0,00
		0,00	21.625.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.998.750,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.469.100,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.321.400,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.521.400,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.004.600,00	0,00	0,00	0,00
		42.004.600,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.924.600,00	0,00	0,00	0,00
		24.924.600,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.580.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.069.685.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.036.228.250,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	832.175.500,00	0,00	0,00	0,00
		798.718.250,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	25.176.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.176.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	221.030.250,00	0,00	0,00	0,00
		187.629.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	74.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.410.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	511.559.250,00	0,00	0,00	0,00
		511.503.250,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	237.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		237.510.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	237.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		237.510.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.287.635.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
		877.635.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.635.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.635.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	28.635.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.635.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	729.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
		669.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	129.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
		129.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		540.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	530.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	530.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		260.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		260.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20	STATISTIK	19.853.750,00	0,00	0,00	0,00
		19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	19.853.750,00	0,00	0,00	0,00
		19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19.853.750,00	0,00	0,00	0,00
		19.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19.853.750,00	0,00	0,00	0,00
2.21	PERSANDIAN	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.444.500,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	42.810.075,00	0,00	0,00	0,00
		49.444.500,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.810.075,00	0,00	0,00	0,00
		49.444.500,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	42.810.075,00	0,00	0,00	0,00
		49.444.500,00	0,00	0,00	0,00
2.22	KEBUDAYAAN	42.810.075,00	0,00	0,00	0,00
		3.358.389.270,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.149.383.596,00	0,00	0,00	0,00
		1.808.406.520,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.749.836.246,00	0,00	0,00	0,00
		1.481.710.770,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.424.848.136,00	0,00	0,00	0,00
		1.459.510.770,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.402.848.136,00	0,00	0,00	0,00
		22.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		232.187.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232.185.710,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.998.750,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.087.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.087.000,00	0,00	0,00	0,00
		108.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.099.960,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.489.900,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.499.900,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.018.750,00	0,00	0,00	0,00
		29.312.500,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.293.750,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.018.750,00	0,00	0,00	0,00
		10.018.750,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.019.583.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.019.583.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.983.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		949.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	239.993.750,00	0,00	0,00	0,00
		239.993.750,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	239.993.750,00	0,00	0,00	0,00
		239.993.750,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	39.993.750,00	0,00	0,00	0,00
		39.993.750,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	109.989.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.970.600,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	79.989.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.970.600,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	54.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.972.400,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	24.999.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.998.200,00	0,00	0,00	0,00
2.23	PERPUSTAKAAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24	KEARSIPAN	1.955.221.275,00	0,00	0,00	0,00
		1.921.602.128,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.776.421.275,00	0,00	0,00	0,00
		1.742.802.197,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.331.021.275,00	0,00	0,00	0,00
		1.313.512.579,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.305.221.275,00	0,00	0,00	0,00
		1.287.712.579,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.282.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.282.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.282.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.282.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.921.750,00	0,00	0,00	0,00
		177.915.454,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.486.250,00	0,00	0,00	0,00
		1.485.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.725.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.094.500,00	0,00	0,00	0,00
		44.094.460,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.611.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.610.994,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.987.500,00	0,00	0,00	0,00
		109.070.914,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.083.414,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.987.500,00	0,00	0,00	0,00
		65.987.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.208.750,00	0,00	0,00	0,00
		93.021.250,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.168.750,00	0,00	0,00	0,00
		64.981.250,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	178.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.799.931,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.999.931,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.999.931,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.868.018.474,00	1.246.075.000,00	0,00	0,00
		36.401.930.163,72	1.168.725.000,00	0,00	0,00
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	18.434.285.288,00	8.750.000,00	0,00	0,00
		17.427.784.025,72	0,00	0,00	0,00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.497.299.788,00	8.750.000,00	0,00	0,00
		3.305.122.114,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.965.250,00	0,00	0,00	0,00
		38.415.250,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.965.250,00	0,00	0,00	0,00
		38.415.250,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.809.717.288,00	0,00	0,00	0,00
		2.761.331.364,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.750.317.288,00	0,00	0,00	0,00
		2.701.931.364,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.024.250,00	0,00	0,00	0,00
		344.763.200,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.076.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.005.250,00	0,00	0,00	0,00
		44.319.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.147.900,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.719.000,00	0,00	0,00	0,00
		261.220.300,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.073.800,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.368.800,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.975.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.705.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.518.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.538.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.817.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.328.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.428.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.293.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	8.052.765.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.809.722.830,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	7.949.359.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.726.882.830,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	78.617.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.643.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	7.870.742.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.684.239.830,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	57.158.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.987.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.025.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	32.158.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.962.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	46.248.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.852.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	46.248.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.852.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.525.699.250,00	0,00	0,00	0,00
		4.995.559.170,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.229.750,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.229.750,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.231.250,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.231.250,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	5.455.468.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.952.329.420,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.939.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.405.468.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.912.390.420,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.358.520.750,00	0,00	0,00	0,00
		1.317.379.911,72	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	33.520.750,00	0,00	0,00	0,00
		32.338.750,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.520.750,00	0,00	0,00	0,00
		32.338.750,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.325.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.285.041.161,72	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.755.800,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.174.285.361,72	0,00	0,00	0,00
3.26	PARIWISATA	3.451.328.898,00	0,00	0,00	0,00
		3.259.718.717,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.285.465.148,00	0,00	0,00	0,00
		2.219.546.717,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.781.500,00	0,00	0,00	0,00
		36.781.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.781.500,00	0,00	0,00	0,00
		36.781.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.789.683.898,00	0,00	0,00	0,00
		1.779.988.717,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.748.328.898,00	0,00	0,00	0,00
		1.738.671.717,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.355.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.317.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.027.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.015.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.027.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.015.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.201.500,00	0,00	0,00	0,00
		228.589.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.699.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.260.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.115.500,00	0,00	0,00	0,00
		32.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.887.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.729.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.958.750,00	0,00	0,00	0,00
		142.253.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.303.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.958.750,00	0,00	0,00	0,00
		89.950.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.812.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.920.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.362.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.470.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	663.545.750,00	0,00	0,00	0,00
		552.098.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	217.252.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.820.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	79.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.770.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	137.477.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.050.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	446.293.750,00	0,00	0,00	0,00
		362.278.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	392.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		308.635.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	53.793.750,00	0,00	0,00	0,00
		53.643.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	457.928.000,00	0,00	0,00	0,00
		454.324.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	457.928.000,00	0,00	0,00	0,00
		454.324.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	442.709.000,00	0,00	0,00	0,00
		439.224.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	15.219.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	44.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	44.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	44.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PERTANIAN	12.414.576.524,00	1.206.250.000,00	0,00	0,00
		12.204.528.776,00	1.137.650.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.992.503.449,00	0,00	0,00	0,00
		4.959.561.637,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.483.259.699,00	0,00	0,00	0,00
		4.453.753.608,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.429.859.699,00	0,00	0,00	0,00
		4.400.353.608,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.499.250,00	0,00	0,00	0,00
		320.237.314,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.375.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.606.250,00	0,00	0,00	0,00
		107.401.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.873.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.855.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.690.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.945.000,00	0,00	0,00	0,00
		194.915.814,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.730.277,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.730.277,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.244.500,00	0,00	0,00	0,00
		130.840.438,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.135.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.614.500,00	0,00	0,00	0,00
		19.375.938,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.579.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	151.081.250,00	0,00	0,00	0,00
		151.080.219,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	151.081.250,00	0,00	0,00	0,00
		151.080.219,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	151.081.250,00	0,00	0,00	0,00
		151.080.219,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.392.064.250,00	1.206.250.000,00	0,00	0,00
		6.216.116.510,00	1.137.650.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	704.131.250,00	6.250.000,00	0,00	0,00
		613.981.250,00	6.250.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	704.131.250,00	6.250.000,00	0,00	0,00
		613.981.250,00	6.250.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.687.933.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
		5.602.135.260,00	1.131.400.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.950.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.925.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	138.845.850,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
		138.750.000,00	1.131.400.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.598.687.150,00	0,00	0,00	0,00
		2.537.985.260,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	241.044.000,00	0,00	0,00	0,00
		240.370.960,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	90.469.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.795.960,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	90.469.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.795.960,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.575.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.575.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	267.324.575,00	0,00	0,00	0,00
		267.060.450,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	267.324.575,00	0,00	0,00	0,00
		267.060.450,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	267.324.575,00	0,00	0,00	0,00
		267.060.450,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	370.559.000,00	0,00	0,00	0,00
		370.339.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	370.559.000,00	0,00	0,00	0,00
		370.339.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	370.559.000,00	0,00	0,00	0,00
		370.339.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PERDAGANGAN	3.102.828.264,00	31.075.000,00	0,00	0,00
		3.066.339.740,00	31.075.000,00	0,00	0,00
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.500.095.764,00	11.250.000,00	0,00	0,00
		2.465.704.156,00	11.250.000,00	0,00	0,00
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.980.150.514,00	0,00	0,00	0,00
		1.966.520.417,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.960.400.514,00	0,00	0,00	0,00
		1.946.770.417,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.041.500,00	0,00	0,00	0,00
		358.756.023,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.716.500,00	0,00	0,00	0,00
		41.716.500,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		253.139.523,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00
		0,00	11.250.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00
		0,00	11.250.000,00	0,00	0,00
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.759.091,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.759.091,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.403.750,00	0,00	0,00	0,00
		47.668.625,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.554.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.818.875,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.849.750,00	0,00	0,00	0,00
		10.849.750,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	94.523.500,00	19.825.000,00	0,00	0,00
		94.523.500,00	19.825.000,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	94.523.500,00	19.825.000,00	0,00	0,00
		94.523.500,00	19.825.000,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	94.523.500,00	19.825.000,00	0,00	0,00
		94.523.500,00	19.825.000,00	0,00	0,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	388.209.000,00	0,00	0,00	0,00
		387.874.071,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	358.209.000,00	0,00	0,00	0,00
		357.874.071,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.666.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	318.209.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	318.208.071,00	0,00	0,00	0,00
		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.335.499,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	33.335.499,00	0,00	0,00	0,00
		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.335.499,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	84.902.514,00	0,00	0,00	0,00
		85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.902.514,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.902.514,00	0,00	0,00	0,00
		85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31	PERINDUSTRIAN	464.999.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	443.558.905,00	0,00	0,00	0,00
		429.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		408.558.905,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	429.999.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	408.558.905,00	0,00	0,00	0,00
		29.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		15.303.905,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	55.606.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.649.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		320.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	102.261.847.793,00	490.655.869,00	0,00	0,00
		91.574.268.900,00	147.158.400,00	0,00	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	62.125.966.988,00	375.484.619,00	0,00	0,00
		56.228.366.943,00	122.250.000,00	0,00	0,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.145.370.963,00	375.484.619,00	0,00	0,00
		24.713.983.553,00	122.250.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.852.770.251,00	0,00	0,00	0,00
		6.799.697.182,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.820.492.251,00	0,00	0,00	0,00
		6.769.117.682,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.278.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.579.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		164.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	134.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		134.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.285.891.250,00	0,00	0,00	0,00
		6.700.342.249,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.086.250,00	0,00	0,00	0,00
		47.083.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	777.421.500,00	0,00	0,00	0,00
		586.957.750,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	395.670.500,00	0,00	0,00	0,00
		334.597.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	147.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		146.648.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.563.530.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.236.197.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.354.932.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.348.858.599,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	619.479.406,00	375.484.619,00	0,00	0,00
		412.289.600,00	122.250.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	48.000.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	482.744.406,00	0,00	0,00	0,00
		385.414.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.735.000,00	327.484.619,00	0,00	0,00
		26.875.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.320.344.302,00	0,00	0,00	0,00
		4.266.334.895,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.419.199.072,00	0,00	0,00	0,00
		2.392.401.245,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.885.395.230,00	0,00	0,00	0,00
		1.858.183.650,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.181.491.450,00	0,00	0,00	0,00
		904.329.184,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	191.484.450,00	0,00	0,00	0,00
		191.210.029,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	633.891.000,00	0,00	0,00	0,00
		540.954.147,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.316.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.490.008,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.675.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	792.385.804,00	0,00	0,00	0,00
		701.632.443,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	473.585.804,00	0,00	0,00	0,00
		426.234.378,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	206.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		163.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.998.065,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.978.350.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.867.900.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.390.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.390.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	798.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		798.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	790.150.500,00	0,00	0,00	0,00
		679.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	169.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		169.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	160.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		160.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.450.408.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.397.208.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	351.758.000,00	0,00	0,00	0,00
		351.758.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	409.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		356.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	689.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		688.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	34.000.443.400,00	0,00	0,00	0,00
		29.563.785.297,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.359.881.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.348.523.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	909.972.150,00	0,00	0,00	0,00
		898.836.650,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	149.933.250,00	0,00	0,00	0,00
		149.920.250,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	299.976.000,00	0,00	0,00	0,00
		299.767.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	32.172.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.753.944.317,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.137.626.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.718.730.317,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	35.214.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.214.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	467.722.000,00	0,00	0,00	0,00
		461.317.080,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	106.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.850.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	261.672.000,00	0,00	0,00	0,00
		260.467.080,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.980.152.625,00	0,00	0,00	0,00
		1.950.598.093,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	475.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		475.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	619.998.875,00	0,00	0,00	0,00
		619.998.875,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	195.520.500,00	0,00	0,00	0,00
		195.520.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	274.478.375,00	0,00	0,00	0,00
		274.478.375,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	785.153.750,00	0,00	0,00	0,00
		755.599.218,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	264.344.750,00	0,00	0,00	0,00
		263.561.368,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	380.858.500,00	0,00	0,00	0,00
		352.087.350,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	139.950.500,00	0,00	0,00	0,00
		139.950.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	40.135.880.805,00	115.171.250,00	0,00	0,00
		35.345.901.957,00	24.908.400,00	0,00	0,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.173.369.805,00	115.171.250,00	0,00	0,00
		23.030.450.896,00	24.908.400,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.219.383.740,00	0,00	0,00	0,00
		4.194.846.651,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.368.619.740,00	0,00	0,00	0,00
		2.352.347.651,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.850.764.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.842.499.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.012.250,00	71.733.750,00	0,00	0,00
		423.991.467,00	24.908.400,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.960.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.266.250,00	71.733.750,00	0,00	0,00
		27.688.950,00	24.908.400,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.790.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	288.536.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.918.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.999.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.635.017,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		607.966.316,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	521.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		502.067.320,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.898.996,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.803.000,00	0,00	0,00	0,00
		267.181.444,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.326.444,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	244.103.000,00	0,00	0,00	0,00
		182.855.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.229.893.315,00	0,00	0,00	0,00
		13.965.917.018,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.176.493.315,00	0,00	0,00	0,00
		13.965.917.018,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	53.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	3.878.077.500,00	43.437.500,00	0,00	0,00
		3.570.548.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		160.850.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.991.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.729.698.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.686.562.500,00	43.437.500,00	0,00	0,00
		1.680.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.962.511.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.315.451.061,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	678.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		515.325.380,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	678.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		515.325.380,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	7.452.638.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.829.898.681,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	7.309.838.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.687.098.681,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	142.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		142.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.831.173.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.970.227.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	7.031.173.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.668.977.000,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	38.415.212.986,00	35.212.500,00	717.530.909,00	3.791.714.693,00
		27.123.581.451,00	23.750.000,00	310.440.000,00	3.784.456.892,00
5.01	PERENCANAAN	6.077.908.138,00	0,00	0,00	0,00
		5.667.065.366,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.580.107.888,00	0,00	0,00	0,00
		3.354.664.745,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.335.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.808.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.335.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.808.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.655.854.638,00	0,00	0,00	0,00
		2.614.220.627,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.572.908.638,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.184.627,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	82.946.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.036.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	573.478.250,00	0,00	0,00	0,00
		403.124.717,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.418.250,00	0,00	0,00	0,00
		48.362.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.632.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.632.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.752.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.914.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.676.000,00	0,00	0,00	0,00
		272.216.717,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.369.151,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		147.569.151,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.141.750,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.640.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	88.141.750,00	0,00	0,00	0,00
		1.678.527.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.595.861.425,00	0,00	0,00	0,00
		1.182.335.250,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.126.054.498,00	0,00	0,00	0,00
		224.797.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	205.998.540,00	0,00	0,00	0,00
		299.126.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	271.780.960,00	0,00	0,00	0,00
		31.335.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	31.335.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.102.750,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	68.102.750,00	0,00	0,00	0,00
		47.290.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	47.208.750,00	0,00	0,00	0,00
		45.640.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	45.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		466.043.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	456.298.498,00	0,00	0,00	0,00
		26.337.250,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8.760.250,00	0,00	0,00	0,00
		26.337.250,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	8.760.250,00	0,00	0,00	0,00
		469.854.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	461.046.677,00	0,00	0,00	0,00
		137.062.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	128.693.441,00	0,00	0,00	0,00
		332.792.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	332.353.236,00	0,00	0,00	0,00
		819.273.250,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	716.539.196,00	0,00	0,00	0,00
		308.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		278.804.860,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		169.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	149.242.760,00	0,00	0,00	0,00
		129.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	119.562.100,00	0,00	0,00	0,00
		309.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		306.795.829,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.651.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.602.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	194.525.000,00	0,00	0,00	0,00
		193.612.629,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	32.774.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.581.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	201.323.250,00	0,00	0,00	0,00
		130.938.507,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	104.150.250,00	0,00	0,00	0,00
		67.378.427,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	68.137.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.260.080,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	29.036.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02	KEUANGAN	14.166.820.106,00	11.462.500,00	717.530.909,00	3.791.714.693,00
		12.709.680.123,00	0,00	310.440.000,00	3.784.456.892,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.243.893.117,00	0,00	0,00	0,00
		6.881.467.008,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.229.908.017,00	0,00	0,00	0,00
		4.204.285.004,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.221.908.017,00	0,00	0,00	0,00
		4.196.285.004,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.226.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.221.340,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	128.226.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.221.340,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.353.093.350,00	0,00	0,00	0,00
		1.262.292.656,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.920.750,00	0,00	0,00	0,00
		8.913.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	324.009.600,00	0,00	0,00	0,00
		314.767.290,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	252.458.000,00	0,00	0,00	0,00
		251.920.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	761.705.000,00	0,00	0,00	0,00
		683.892.366,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.326.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.229.087.243,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.294.743,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.107.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.061.792.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.270.750,00	0,00	0,00	0,00
		115.080.765,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.235.750,00	0,00	0,00	0,00
		83.043.765,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.932.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.105.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.13	Penataan Organisasi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.531.827.858,00	0,00	717.530.909,00	3.791.714.693,00
		4.047.488.857,00	0,00	310.440.000,00	3.784.456.892,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.555.591.250,00	0,00	0,00	0,00
		2.099.537.883,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	239.257.250,00	0,00	0,00	0,00
		192.439.250,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	179.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		179.350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	110.350.500,00	0,00	0,00	0,00
		103.038.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	116.343.750,00	0,00	0,00	0,00
		83.368.750,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	926.095.250,00	0,00	0,00	0,00
		671.302.543,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	791.009.500,00	0,00	0,00	0,00
		732.409.840,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	193.185.000,00	0,00	0,00	0,00
		137.629.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	224.501.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.741.186,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100.231.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.211.150,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31.937.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.937.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	82.333.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.593.036,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	752.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		737.964.180,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	188.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.624.680,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	483.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		469.339.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	999.245.608,00	0,00	717.530.909,00	3.791.714.693,00
		999.245.608,00	0,00	310.440.000,00	3.784.456.892,00
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	999.245.608,00	0,00	0,00	0,00
		999.245.608,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	717.530.909,00	0,00
		0,00	0,00	310.440.000,00	0,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	3.791.714.693,00
		0,00	0,00	0,00	3.784.456.892,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	383.898.000,00	0,00	0,00	0,00
		325.547.736,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	383.898.000,00	0,00	0,00	0,00
		325.547.736,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	124.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		124.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.773.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	108.498.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.974.136,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.007.201.131,00	11.462.500,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.455.176.522,00	0,00	0,00	0,00
		2.007.201.131,00	11.462.500,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.455.176.522,00	0,00	0,00	0,00
		370.999.750,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	286.578.562,00	0,00	0,00	0,00
		49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	38.398.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.179.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	126.157.040,00	0,00	0,00	0,00
		51.680.250,00	9.000.000,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	49.406.260,00	0,00	0,00	0,00
		100.476.250,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89.195.680,00	0,00	0,00	0,00
		75.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	50.025.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.158.611.631,00	2.462.500,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	743.665.980,00	0,00	0,00	0,00
		72.003.750,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	71.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.406.520.342,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.038.261.490,00	0,00	0,00	0,00
		13.759.898.592,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.467.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.014.221.592,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.807.178.467,00	0,00	0,00	0,00
		13.014.221.592,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.807.178.467,00	0,00	0,00	0,00
		70.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	46.202.715,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.199.500,00	0,00	0,00	0,00
		24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.503.215,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	477.677.000,00	0,00	0,00	0,00
		456.678.068,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.324.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.324.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.595.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.595.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.106.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.708.000,00	0,00	0,00	0,00
		368.652.568,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.815.250,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.188.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.626.750,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.500.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.970.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.030.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.646.621.750,00	0,00	0,00	0,00
		1.570.886.490,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	491.791.500,00	0,00	0,00	0,00
		464.797.532,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	333.166.500,00	0,00	0,00	0,00
		333.157.289,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	68.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.522.474,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.908.040,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.590.880,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.618.849,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.042.449.250,00	0,00	0,00	0,00
		1.022.293.823,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	138.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.973.180,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	78.198.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.921.330,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	825.751.250,00	0,00	0,00	0,00
		815.399.313,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	11.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.053.886,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	11.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.053.886,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	101.031.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.741.249,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	53.031.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.681.486,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.559.763,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	257.883.500,00	0,00	0,00	0,00
		251.839.072,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	257.883.500,00	0,00	0,00	0,00
		251.839.072,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	257.883.500,00	0,00	0,00	0,00
		251.839.072,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	257.883.500,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	251.839.072,00	0,00	0,00	0,00
		194.999.000,00	0,00	0,00	0,00
		187.599.220,00	0,00	0,00	0,00
		194.999.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	187.599.220,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	115.574.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	108.474.220,00	0,00	0,00	0,00
		115.574.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	108.474.220,00	0,00	0,00	0,00
		79.425.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	79.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.425.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	79.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.311.081.900,00	23.750.000,00	0,00	0,00
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.269.136.180,00	23.750.000,00	0,00	0,00
		1.995.572.650,00	23.750.000,00	0,00	0,00
5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.981.717.180,00	23.750.000,00	0,00	0,00
		1.363.257.850,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.354.096.137,00	0,00	0,00	0,00
		1.333.857.850,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.324.696.137,00	0,00	0,00	0,00
		29.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		481.280.750,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	481.136.968,00	0,00	0,00	0,00
		2.081.250,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.081.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.633.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.587.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.890.500,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.889.800,00	0,00	0,00	0,00
		316.676.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	316.579.168,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.750.000,00	0,00	0,00
		0,00	23.750.000,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00
		0,00	8.750.000,00	0,00	0,00
5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.902.200,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.902.200,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.034.050,00	0,00	0,00	0,00
		66.581.875,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.665.300,00	0,00	0,00	0,00
		52.213.875,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.368.750,00	0,00	0,00	0,00
		2.368.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	315.509.250,00	0,00	0,00	0,00
		287.419.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	45.113.750,00	0,00	0,00	0,00
		33.266.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02.2.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	27.149.500,00	0,00	0,00	0,00
		15.683.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	17.964.250,00	0,00	0,00	0,00
		17.583.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	73.436.750,00	0,00	0,00	0,00
		58.408.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	27.644.500,00	0,00	0,00	0,00
		26.218.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02.2.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	17.964.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.888.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02.2.02.04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	14.566.750,00	0,00	0,00	0,00
		8.403.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	13.261.500,00	0,00	0,00	0,00
		11.899.000,00	0,00	0,00	0,00
5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi	196.958.750,00	0,00	0,00	0,00
		195.745.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.06.02.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	196.958.750,00	0,00	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	195.745.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.313.143.967,00	0,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT	4.031.911.244,00	0,00	0,00	0,00
		4.313.143.967,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.031.911.244,00	0,00	0,00	0,00
		3.462.799.717,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.248.517.096,00	0,00	0,00	0,00
		2.213.144.967,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.177.682.630,00	0,00	0,00	0,00
		2.213.144.967,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.177.682.630,00	0,00	0,00	0,00
		105.474.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57.030.180,00	0,00	0,00	0,00
		22.044.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.430.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.030.180,00	0,00	0,00	0,00
		785.548.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	731.537.333,00	0,00	0,00	0,00
		11.125.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.090.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.333.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.050.452,00	0,00	0,00	0,00
		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.271.881,00	0,00	0,00	0,00
		227.920.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	175.971.203,00	0,00	0,00	0,00
		94.310.625,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.400.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.141.828,00	0,00	0,00	0,00
		59.209.375,00	0,00	0,00	0,00
		55.459.375,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.712.750,00	0,00	0,00	0,00
		106.295.750,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.469.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.052.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.950.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.293.750,00	0,00	0,00	0,00
		29.293.750,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	704.218.250,00	0,00	0,00	0,00
		698.193.148,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	439.406.000,00	0,00	0,00	0,00
		434.755.648,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.775.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	217.025.000,00	0,00	0,00	0,00
		216.849.648,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.625.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	32.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.700.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	78.599.750,00	0,00	0,00	0,00
		77.474.750,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	22.681.250,00	0,00	0,00	0,00
		22.231.250,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.100.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	264.812.250,00	0,00	0,00	0,00
		263.437.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	62.849.750,00	0,00	0,00	0,00
		61.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	201.962.500,00	0,00	0,00	0,00
		201.937.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	146.126.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.201.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	146.126.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.201.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51.126.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.451.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	12.035.611.985,00	16.575.000,00	0,00	0,00
		11.746.167.771,00	15.625.000,00	0,00	0,00
7.01	KECAMATAN	12.035.611.985,00	16.575.000,00	0,00	0,00
		11.746.167.771,00	15.625.000,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.564.477.235,00	15.625.000,00	0,00	0,00
		9.327.221.271,00	15.625.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.163.718.860,00	0,00	0,00	0,00
		7.976.908.102,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.068.850.860,00	0,00	0,00	0,00
		7.883.990.102,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73.968.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.718.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.577.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.390.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.577.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.390.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	759.061.500,00	0,00	0,00	0,00
		725.379.098,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.565.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207.584.500,00	0,00	0,00	0,00
		207.031.950,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.318.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.317.568,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.964.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384.924.000,00	0,00	0,00	0,00
		352.500.580,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	15.625.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.625.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	15.625.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.625.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.549.125,00	0,00	0,00	0,00
		363.491.821,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.446.250,00	0,00	0,00	0,00
		17.446.250,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.646.250,00	0,00	0,00	0,00
		88.385.732,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.456.625,00	0,00	0,00	0,00
		257.659.839,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.370.750,00	0,00	0,00	0,00
		245.052.250,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.385.750,00	0,00	0,00	0,00
		68.774.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.030.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.190.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.110.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.081.250,00	0,00	0,00	0,00
		94.480.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.683.750,00	0,00	0,00	0,00
		47.657.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	867.082.750,00	0,00	0,00	0,00
		859.157.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	867.082.750,00	0,00	0,00	0,00
		859.157.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	744.735.750,00	0,00	0,00	0,00
		743.432.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	122.347.000,00	0,00	0,00	0,00
		115.725.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	569.331.750,00	950.000,00	0,00	0,00
		531.269.250,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	370.281.750,00	0,00	0,00	0,00
		362.884.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	205.929.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.291.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	144.852.750,00	0,00	0,00	0,00
		141.093.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199.050.000,00	950.000,00	0,00	0,00
		168.384.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	199.050.000,00	950.000,00	0,00	0,00
		168.384.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	439.127.000,00	0,00	0,00	0,00
		434.906.250,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	404.723.000,00	0,00	0,00	0,00
		400.502.250,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	404.723.000,00	0,00	0,00	0,00
		400.502.250,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.404.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.404.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.404.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.404.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	124.854.500,00	0,00	0,00	0,00
		123.224.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	124.854.500,00	0,00	0,00	0,00
		123.224.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	124.854.500,00	0,00	0,00	0,00
		123.224.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	470.738.750,00	0,00	0,00	0,00
		470.389.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	470.738.750,00	0,00	0,00	0,00
		470.389.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	26.016.750,00	0,00	0,00	0,00
		26.016.500,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	399.722.000,00	0,00	0,00	0,00
		399.373.000,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	17.322.395.377,00	0,00	0,00	0,00
		4.012.387.292,00	0,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.322.395.377,00	0,00	0,00	0,00
		4.012.387.292,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	254.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		243.773.160,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	254.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		243.773.160,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.998.660,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.775.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	13.508.413.377,00	0,00	0,00	0,00
		523.286.902,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	13.508.413.377,00	0,00	0,00	0,00
		523.286.902,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	165.632.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.662.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.342.781.377,00	0,00	0,00	0,00
		465.624.202,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	113.209.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.546.980,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	113.209.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.546.980,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	83.209.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.846.980,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.700.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	466.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		433.941.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	466.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		433.941.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		368.041.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	66.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.900.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.980.073.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.722.839.250,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.980.073.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.722.839.250,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	386.974.000,00	0,00	0,00	0,00
		280.570.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	168.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.900.000,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.321.549.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.319.775.500,00	0,00	0,00	0,00
		102.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.593.750,00	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH	643.080.198.997,00	214.308.606.790,00	717.530.909,00
		552.714.560.307,76	191.910.118.091,24	310.440.000,00	184.511.707.492,00

LANGGUR, 4 OKTOBER 2024
Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REK.	URAIAN	2023	2022
10.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	15.765.207.909,21	19.437.548.004,73
	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		19.188.618.518,07
	Sub Total	15.765.207.909,21	248.929.486,66
10.2	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	36.264.901.219,83	15.765.207.909,21
	Sub Total	36.264.901.219,83	15.765.207.909,21
10.3	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(248.929.486,66)
10.4	Lain-lain	0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	36.264.901.219,83	15.765.207.909,21

LANGGUR, 4 OKTOBER 2024

Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023 DAN 2022

NO. URUT	URAIAN	2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	848.547.195.485,56	763.866.944.876,31	84.680.250.609,25	11,09
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	75.346.963.469,94	50.583.426.840,08	24.763.536.629,86	48,96
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	12.374.063.655,00	13.211.770.387,00	(837.706.732,00)	(6,34)
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.151.535.600,00	2.684.472.600,00	(532.937.000,00)	(19,85)
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	6.446.735.017,00	5.556.126.850,54	890.608.166,46	16,03
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	54.374.629.197,94	29.131.057.002,54	25.243.572.195,40	86,66
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	773.146.162.106,62	693.109.961.726,12	80.036.200.380,50	11,55
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	751.794.716.501,62	674.742.488.479,12	77.052.228.022,50	11,42
7.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	6.207.486.000,00	0,00	6.207.486.000,00	0,00
7.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	15.143.959.605,00	17.940.873.247,00	(2.796.913.642,00)	(15,59)
7.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	426.600.000,00	(426.600.000,00)	(100,00)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	54.069.909,00	20.173.556.310,11	(20.119.486.401,11)	(99,73)
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	54.069.909,00	9.289.127.860,00	(9.235.057.951,00)	(99,42)
7.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	10.884.428.450,11	(10.884.428.450,11)	(100,00)
8	BEBAN	697.976.359.033,33	725.725.347.523,14	(27.748.988.489,81)	(3,82)
8.1.1	Beban Pegawai - LO	246.544.202.554,00	242.084.010.537,99	4.460.192.016,01	1,84
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	220.631.071.514,19	251.849.722.164,79	(31.218.650.650,60)	(12,40)
8.1.3	Beban Bunga	999.245.608,00	709.426.734,00	289.818.874,00	40,85
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	48.504.476.313,00	39.540.818.929,00	8.963.657.384,00	22,67
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	14.612.755.000,00	11.169.836.000,00	3.442.919.000,00	30,82
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	507.530.924,17	1.129.241.509,89	(621.710.585,72)	(55,06)
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	40.453.099.040,22	50.409.864.353,47	(9.956.765.313,25)	(19,75)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.695.591.950,00	12.119.459.958,00	576.131.992,00	4,75
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.391.030.756,75	66.885.365.208,00	9.505.665.548,75	14,21
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	1.164.692.571,00	623.855.493,00	540.837.078,00	86,69
8.3.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	35.472.662.802,00	2.376.105.992,00	33.096.556.810,00	1.392,89
8.3.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	46.827.640.643,00	(46.827.640.643,00)	(100,00)
8.3.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	150.570.836.452,23	38.141.597.353,17	112.429.239.099,06	294,77
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00		0,00	0,00
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.113.043.404,00	1.190.000.000,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(1.883.769.949,85)	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3.229.273.454,15	1.190.000.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	153.800.109.906,38	38.141.597.353,17	115.658.512.553,21	303,23
	POS LUAR BIASA	0,00		0,00	0,00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	310.440.000,00	668.857.600,00	(358.417.600,00)	(53,59)
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(310.440.000,00)	(668.857.600,00)	358.417.600,00	(53,59)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	153.489.669.906,38	37.472.739.753,17	116.016.930.153,21	309,60

LANGGUR, 4 OKTOBER 2024
Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

KODE REK.	URAIAN	2023	2022
3	EKUITAS AWAL	1.622.449.043.822,40	1.584.894.572.266,47
3.1.1.2	SURPLUS/DEFISIT-LO	153.489.669.906,38	38.662.739.753,17
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi ekuitas lainnya	(4.924.661.448,52)	(1.108.268.197,24)
	EKUITAS AKHIR	1.771.014.052.280,26	1.622.449.043.822,40

LANGGUR, 4 OKTOBER 2024

Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NERACA
Per 31 December 2023 dan 2022

KODE AKUN	URAIAN	2023	2022
1	ASET		
1 1	ASET LANCAR		
1 1 1 1	Kas di Kas Daerah	30.739.796.985,95	5.996.478.685,03
1 1 1 2	Kas di Bendahara Penerimaan	54.184.710,00	0,00
1 1 1 3	Kas di Bendahara Pengeluaran	106.597.638,00	117.654.963,35
1 1 1 4	Kas di BLUD	4.630.553.158,00	9.433.167.799,00
1 1 1 5	Kas di Bendahara FKTP	50.562.893,36	106.760.664,04
1 1 1 6	Kas Di Bendahara BOS	103.360.272,61	141.127.761,88
1 1 1 8	Kas Di Bendahara BOK	1.005.504.340,00	0,00
1 1 3	Piutang Pajak	14.387.211.800,89	13.203.291.618,89
1 1 10 1 1	Penyisihan Piutang Pajak	(9.423.107.957,06)	(8.589.943.925,96)
1 1 4	Piutang Retribusi	2.381.629.820,05	2.222.592.720,05
1 1 10 1 2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.205.141.757,55)	(2.116.932.532,55)
1 1 6	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	9.148.400.299,00	8.939.838.046,06
1 1 10 1 4	Penyisihan Piutang	(4.875.235.527,25)	(3.354.213.367,58)
1 1 8 1	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	1.888.035.634,00	4.164.959.705,00
1 1 9	Piutang Lainnya	478.049.543,76	248.929.486,66
	Penyisihan Piutang TPTGR lancar	(15.184.672,70)	
1 1 12	Persediaan	31.352.905.432,80	11.462.120.837,63
	JUMLAH ASET LANCAR	79.808.122.613,86	41.975.832.461,50
1 2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1 2 2	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
1 2 3	Investasi Jangka Panjang Permanen	48.025.602.631,00	45.141.832.681,15
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	48.025.602.631,00	45.141.832.681,15
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	48.025.602.631,00	45.141.832.681,15
1 3	ASET TETAP		
1 3 1	Tanah	118.726.134.489,00	116.931.607.761,00
1 3 2	Peralatan dan Mesin	459.603.882.054,43	427.795.386.778,03
1 3 3	Gedung dan Bangunan	623.321.365.268,76	567.470.448.370,76
1 3 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.404.602.739.672,02	1.305.246.544.566,72
1 3 5	Aset Tetap Lainnya	28.639.641.409,56	28.074.826.306,56
1 3 6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	159.567.318.268,00	150.922.692.581,00
1 3 7	Akumulasi Penyusutan	(1.138.840.322.256,53)	(1.010.878.343.556,56)
	JUMLAH ASET TETAP	1.655.620.758.905,24	1.585.563.162.807,51
1 5	ASET LAINNYA		
1 5 1 1	Piutang Penjualan Angsuran	1.771.500.963,10	1.777.250.963,10
	Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran	(1.771.500.963,10)	(1.777.250.963,10)
1 5 1 2	Tuntutan Ganti Rugi	3.653.014.966,81	3.525.070.716,81
	Penyisihan Piutang TPGR	(3.525.070.716,81)	(3.431.688.687,10)
1 5 3	Aset Tidak Berwujud	12.632.569.288,00	10.960.440.288,00
1 5 5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.040.584.060,00)	(4.204.775.375,67)
1 5 4	Aset Lain-lain	18.153.285.490,28	19.511.308.683,28
	Penyisihan Piutang Non Lancar	(947.226.900,00)	(947.226.900,00)
1 5 6	Penyusutan Aset Lainnya	(16.172.516.066,98)	(16.172.516.066,98)
		0	0
	JUMLAH ASET LAINNYA	9.753.472.001,30	9.240.612.658,34
	JUMLAH ASET	1.793.207.956.151,40	1.681.921.440.608,50

KODE AKUN	URAIAN	2023	2022
2	KEWAJIBAN		
2 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2 1 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	425.658.778,09	29.981.964,09
2 1 2	Utang Pinjaman		48.269.873.705,00
2 1 6	Utang Belanja	15.749.252.805,00	10.682.530.877,01
2 1 7	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.018.992.288,05	490.010.240,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22.193.903.871,14	59.472.396.786,10
2 2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2 2 1 1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
		0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	22.193.903.871,14	59.472.396.786,10
3	EKUITAS		
3 1	EKUITAS	1.771.014.052.280,26	1.622.449.043.822,40
	JUMLAH EKUITAS	1.771.014.052.280,26	1.622.449.043.822,40
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.793.207.956.151,40	1.681.921.440.608,50

LANGGUR, 4 OKTOBER 2024
Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

KODE REK.	URAIAN	2023	2022
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
	<i>Arus Kas Masuk</i>		
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	11.190.143.473,00	12.056.543.681,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.992.498.500,00	2.559.104.600,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.446.735.017,00	3.211.782.587,06
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	54.171.855.082,00	37.066.465.653,36
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	907.994.277.141,62	810.826.028.947,00
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - LRA	17.420.883.676,00	16.548.537.242,00
4 . 3 . 3	Pendapatan Hibah		0,00
4 . 3 . 4	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Udangan		10.884.428.450,11
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	999.216.392.889,62	893.152.891.160,53
	<i>Arus Kas Keluar</i>		
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	245.328.012.957,00	240.096.047.701,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.869.780.409,76	251.935.384.712,66
5 . 1 . 5	Belanja Bunga	999.245.608,00	709.426.734,00
5 . 1 . 6	Belanja Hibah	46.904.766.333,00	39.534.257.729,00
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Sosial	14.612.755.000,00	11.169.836.000,00
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	184.511.707.492,00	187.443.767.395,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	310.440.000,00	668.857.600,00
	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	737.536.707.799,76	731.557.577.871,66
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	261.679.685.089,86	161.595.313.288,87
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
	<i>Arus Kas Masuk</i>		
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0,00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	0,00	0,00
	<i>Arus Kas Keluar</i>		
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	1.032.948.772,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.629.682.986,00	37.012.000.249,73
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.615.372.183,00	17.665.831.432,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.929.442.922,24	154.050.191.850,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	735.620.000,00	727.625.299,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	2.800.000.000,00
	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	192.910.118.091,24	213.288.597.602,73
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(192.910.118.091,24)	(213.288.597.602,73)
	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
	<i>Arus Kas Masuk</i>		
6.2.2.2	Penerimaan pinjaman daerah Daerah	0,00	58.967.721.950,00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	0,00	58.967.721.950,00
	<i>Arus Kas Keluar</i>		
6.2.2.2	Pengeluaran pinjaman daerah Daerah	48.269.873.688,00	10.697.848.245,00
	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	48.269.873.688,00	10.697.848.245,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(48.269.873.688,00)	48.269.873.705,00

KODE REK.	URAIAN	2023	2022
9.1.1.1	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
	<i>Arus Kas Masuk</i>		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	56.911.655.763,75	56.011.002.794,44
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	56.911.655.763,75	56.011.002.794,44
9.2.1.1	<i>Arus Kas Keluar</i>		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	56.515.978.949,75	56.016.629.175,36
	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	56.515.978.949,75	56.016.629.175,36
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	395.676.814,00	(5.626.380,92)
	Kenaikan / (Penurunan) Kas	20.895.370.124,62	(3.429.036.989,78)
	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara	15.795.189.873,30	19.473.156.349,74
	Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		
	Koreksi Silpa Tahun Lalu		(248.929.486,66)
	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara	36.690.559.997,92	15.795.189.873,30
	Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		

LANGGUR, 4 OKTOBER 2024
Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Lampiran VII Perda Pertanggungjawaban APBD 2023

Nomor : 4

Tanggal : 4 Oktober 2024

Catatan atas Laporan Keuangan



BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara yang pada hakekatnya merupakan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial ekonomi daerah, dan juga dikaitkan tolak ukur Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Pelaksanaan APBD tersebut harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota menyampaikan rancangan undang-undang/peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada lembaga perwakilan berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara yang disusun dan disajikan dengan basis akrual dapat menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel serta memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023.

a. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023**

- diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 /PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 – 2023;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

28. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Kabupaten Maluku Tengga Tahun Anggaran 2023;
32. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 84 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tahun tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
34. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 85 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 Tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 72 Tahun 2023, tanggal 14 Desember 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 68 Tahun 2023, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023.

b. Pendekatan dan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari PPKD (BUD) dan SKPD (Dinas/Badan/Kantor). Penyusunan LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal didasarkan pada LRA OPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan dana transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Hibah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, dan Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

c) Neraca

Data mengenai Kas Umum Daerah, Investasi Daerah, Dana Cadangan, Tuntutan Perbendaharaan, Piutang Dana Perimbangan, Investasi Non Permanen, Aset Tetap, Utang Bunga, dan Utang Luar Negeri (jangka pendek dan jangka panjang), Pendapatan di terima dimuka berdasarkan pada Neraca PPKD (BUD). Sedangkan data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Tuntutan Ganti Rugi, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, didasarkan pada Neraca SKPD.

d) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

e) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran Kas yang dikelola PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2023.

f) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan mengenai kondisi umum Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, penjelasan dan daftar mengenai suatu pos yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2. Entitas

Entitas dalam Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari empat urusan, yaitu :

I. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar, yang meliputi :

- a) Dinas Pendidikan;
- b) Dinas Kesehatan;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023**

- c) RSUD Karel Sadsuitubun Langgur;
- d) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang;
- e) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g) Satuan Polisi Pamong Praja;
- h) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i) Dinas Pemadam Kebaran;
- j) Dinas Sosial Daerah.

II. Urusan Pemerintahan Wajib yang Bukan Pelayanan Dasar, yang meliputi :

- a) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Dinas Ketahanan Pangan;
- c) Dinas Lingkungan Hidup;
- d) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f) Dinas Perhubungan;
- g) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah;
- k) Dinas Kebudayaan;
- l) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.

III. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang meliputi :

- a) Dinas Perikanan;
- b) Dinas Pariwisata;
- c) Dinas Pertanian;
- d) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan.

IV. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, yang meliputi :

- a) Sekretariat Daerah;
- b) Sekretariat DPRD.

V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, yang meliputi :

- a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c) Badan Pendapatan Daerah;
- d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- e) Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

VI. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

VII. Unsur Kewilayaan, yang meliputi :

- a) Kecamatan Kei Kecil;
- b) Kecamatan Kei Kecil Barat;
- c) Kecamatan Kei Kecil Timur;
- d) Kecamatan Kei Besar;
- e) Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
- f) Kecamatan Kei Besar Selatan;
- g) Kecamatan Manyeuw;
- h) Kecamatan Hoat Sorbay;
- i) Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
- j) Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
- k) Kecamatan Kei Besar Utara Barat.

VIII. Unsur Pemerintahan Umum yang meliputi :

Badan Kesatuan Bngsa dan Politik.

c. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara disajikan dengan urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Bab ini menguraikan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan, Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Target APBD.

Bab ini menguraikan tentang Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah, Target Kinerja APBD, Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan, Realisasi dan Rencana Keuangan serta Prosedur dan Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

Bab ini menguraikan tentang Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal dan Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja.

Bab IV Kebijakan Akuntansi.

Bab ini menguraikan tentang Entitas Pelaporan, Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

Bab ini menguraikan tentang Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca, Komponen Laporan Perubahan Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, Pembiayaan pada LRA, Komponen Laporan Operasional, Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Komponen Laporan Arus Kas.

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Bab VII Penutup.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maluku Tenggara di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,73 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2022 Laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,65 persen dipengaruhi oleh Peningkatan belanja pemerintah akan mendorong sektor sektor lain untuk tumbuh, demikian pula dengan pola konsumsi masyarakat akan mampu tumbuh sebagai dampak membaiknya pendapatan masyarakat. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2023 Atas dasar harga berlaku berada pada kisaran Rp. 4.110.597,05 (Juta Rupiah), sedangkan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2023 Atas dasar harga konstan 2010 berkisar Rp. 2.252.969,02 juta. Selanjutnya Kondisi inflasi Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,32 persen persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang tercatat sebesar 4,52 persen, kondisi tersebut dipengaruhi oleh lancarnya pasokan bahan komoditas pangan yang berasal dari dalam wilayah maupun luar wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Gambaran makro ekonomi Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara yakni sebagai berikut :

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 21,79 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,73 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,91 persen;
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,84 persen;
5. Tingkat Inflasi sebesar 3,32 persen;
6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp4.110.597,05 (Juta Rupiah).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

a. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Maluku Tenggara (Dalam Ribuan)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kab Maluku Tenggara (%)	21,19	21,79	+0,6
2	Kab. Maluku Tenggara (Ribu Orang)	21.380	22.020	+990
3	Provinsi Maluku (%)	15,97	16,42	0,45
4	Nasional (%)	9,57	9,32	-0,21
5	Peringkat Provinsi	7	7	-
6	Peringkat Nasional	318	317	-1

Sumber Dokumen: BPS Kab. Maluku Tenggara

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *World Bank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2023 sebesar 21,19 persen jika dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2022 sebesar 21,19 persen, mengalami peningkatan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

sebesar 0,60 persen. Persentase penduduk miskin Kabupaten Maluku Tenggara masih berada diatas Provinsi maupun nasional.

Tabel 2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara	3,78	3,85	+0.07
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Maluku	2,90	3,08	+0,18
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	0,11
4	Peringkat Provinsi	7	7	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, BPS juga menghasilkan indikator lain terkait kemiskinan yang memang harus diperhatikan. Indikator tersebut yaitu indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Maluku Tenggara	1,13	1,06	-0,06
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku	0,80	0,88	+0,08
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,26	-0,16
4	Peringkat Provinsi	7	7	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari :

- 1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- 4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 adalah sebesar 5,73 persen, jika dibandingkan dengan dengan tahun 2022 sebesar 5,74 persen angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,01 persen selanjutnya jika dibandingkan dengan dengan Tingkat pengangguran Provinsi dan Nasional, maka Kab. Maluku Tenggara masih dibawah Provinsi, sedangkan jika dibandingkan dengan Kab/ Kota yang berada di Provinsi Maluku, maka Tingkat Pengangguran pada Kab. Maluku Tenggara berada di Posisi 6 dari 11 Kabupaten Kota di Provinsi Maluku secara jelas dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel. 4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maluku Tenggara

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maluku Tenggara (%)	5,74	5,73	-0,01
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Maluku (%)	6,87	6,31	-0,056
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	-0,54
4	Peringkat Provinsi	6	6	-

Sumber Dokumen: BPS Kab. Maluku Tenggara

c. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 belum dihitung, sebagaimana dijelaskan Tabel 5 di bawah ini :



Tabel 5
Gini Ratio Kabupaten Maluku Tenggara

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara	0,265	0,244	-0,021
2	Tingkat Provinsi Maluku	0,306	0,288	-0,018
3	Tingkat Nasional	0,381	0,388	+00,007

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Maluku Tenggara

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Maluku Tenggara yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,244 Angka ini turun jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* tahun 2022 sebesar 0,265 persen dan lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* provinsi maupun Nasional.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- 1) Rendah (< 60);
- 2) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- 3) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$);
- 4) Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 adalah sebesar 66,57 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maluku Tenggara

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Maluku Tenggara	69,23	69,91	+0,01
2	Provinsi Maluku	69,71	70,22	+0,51
3	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	+0,62
4	Peringkat Provinsi	5	5	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Maluku Tenggara



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 adalah sebesar 66,57 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 66,88 poin mengalami penurunan sebesar 0,31 poin. Penurunan IPM tersebut disebabkan menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 66,57 tahun pada Tahun 2023, lebih lama 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 12,82 tahun dengan harapan lama sekolah 9,76 tahun. Sementara Standar Hidup IPM di Kabupaten Maluku Tenggara pada saat ini berada pada urutan 5 dari 11 Kab/Kota yang ada di Provinsi Maluku.

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2022.

Tabel 7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB Seri 2023 (atas harga berlaku Manrut Lapangan Usaha 2023) (Rp)	3.431,33 (juta rupiah)	3.784,95 (juta rupiah)	4.110,60 (juta rupiah)	53,172,12 (milyar rupiah)	3.431,33 (juta rupiah)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,42	5,65	4.48	4,77	5,04
3	Peringkat Provinsi	3	4			

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Maluku Tenggara

Selama kurun waktu periode tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 4,48 persen, tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 5,65. Walaupun pertumbuhan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara mengalami penurunan, namun masih diatas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku dan dibawah pertumbuhan Ekonomi nasional. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Maluku Tenggara menempati



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

urutan 4 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Maluku.

f. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi :

- 1) Inflasi ringan (*creeping inflation*): Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10 persen dalam satu tahun;
- 2) Inflasi Sedang (*Gallop ing Inflation*): Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30 persen setahun;
- 3) Inflasi Berat (*High Inflation*): kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100 persen setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan;
- 4) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*): Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100 persen setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Tingkat Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 adalah sebesar 3,32 persen dengan katagori rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 8 di bawah ini :

Tabel 8

Tingkat Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	4,52	3,32	,-1.20
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	4,05	6,65	+2,6
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	+2,9

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Maluku Tenggara

Tingkat inflasi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,32 persen, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2022 adalah sebesar 4,52 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

- Tahun 2022. Dengan demikian inflasi Kabupaten Maluku Tenggara masih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi dan lebih tinggi dari Inflasi Nasional.
- g. Struktur Perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara
- Struktur perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel 9 dan tabel 10 di bawah ini :

Tabel 9
PDRB seri 2020 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(Dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.012,56	1.135,67	1.266,48
2	Pertambangan dan Pengalihan	15,76	16,77	18,44
3	Industri Pengolahan	44,39	50,28	53,17
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,95	3,20	3,24
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.012,56	1.135,67	1.266,48
6	Konstruksi	15,76	16,77	18,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran	44,39	50,28	53,17
8	Transportasi dan Pergudangan	2,95	3,20	3,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,76	13,79	14,93
10	Informasi dan Komunikasi	381,06	412,58	449,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	417,95	464,77	514,18
12	Real Estat	95,84	113,58	124,18
13	Jasa Perusahaan	71,00	75,61	79,67
14	Administrsi Pemerintahan	37,44	39,58	42,86
15	Jasa Pendidikan	143,44	157,70	167,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,34	5,59	5,93
17	Jasa Lainnya	12,15	13,16	14,09
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten	3.431,33 (Juta)	853,27 (Juta)	931,18 (Juta)

Tabel 10
PDRB seri 2020 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

(Dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	623,08	663,40	710,00
2	Pertambangan dan Pengalihan	10,02	10,33	10,82
3	Industri Pengolahan	26,51	29,07	29,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,25	2,37	2,37
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,78	8,25	8,72



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
6	Konstruksi	213,77	224,26	233,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran	269,15	285,99	304,70
8	Transportasi dan Pergudangan	54,50	58,08	59,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41,49	43,53	44,77
10	Informasi dan Komunikasi	26,79	27,46	28,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	90,81	90,91	95,13
12	Real Estat	3,73	3,87	4,04
13	Jasa Perusahaan	8,34	8,80	9,19
14	Administrsi Pemerintahan	452,87	479,22	486,35
15	Jasa Pendidikan	103,02	108,43	112,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,29	72,77	78,67
17	Jasa Lainnya	30,65	32,18	33,94
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten	2.034,04 (Juta)	2.148,91 (juta)	2.252,97 (Juta)
19	PDRB Provinsi	46 263,47 milyar	48 642,32 milyar	53,172,12 (milyar rupiah)
20	PDB Nasional	15.434,2 triliun	16.670,8 triliun	20.892,4 (triliun rupiah)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Maluku Tenggara

B. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan daerah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, namun juga diperlukan untuk meningkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2023, dilakukan melalui :

- a. Penerapan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah ditetapkan;
- b. Intensifikasi/Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui perbaikan manajemen pengenaan maupun pemungutan pajak dan retribusi daerah yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel;
- c. Menekan seminimal mungkin kebocoran Pendapatan Daerah melalui pengadaan aplikasi sistem pendapatan daerah, peningkatan pengawasan dan pengendalian internal serta meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan dedikasi pada petugas pungut;
- d. Melakukan upaya penambahan jenis/obyek pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu dengan mendata ulang dan melakukan verifikasi obyek dan wajib pajak dan retribusi yang belum terdata, maupun pedataan ulang dan verifikasi terhadap obyek dan wajib pajak/retribusi yang mengalami perubahan dengan selalu menghindari penetapan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

- e. Penyesuaian pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Maluku.
 - f. Penyesuaian Penganggaran Dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
 - g. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat;
 - h. Penyesuaian Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu dari pos dana penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
 - i. Hasil kinerja dari pengelolaan BLUD maupun BUMD, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - j. Penyesuaian Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka Pemenuhan Perlindungan Sosial.
2. Kebijakan Belanja Daerah
- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai hakikat Otonomi Daerah, maka kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk tahun 2023, masih sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini telah ditempuh sebagai berikut :
- a. Penekanan dan efisiensi akan tetap dilakukan terhadap belanja non program (Belanja Tidak Langsung) sehingga diharapkan Belanja Langsung yang mendukung pelaksanaan program-program akan mendapat alokasi yang proporsional sesuai kebutuhan;
 - b. Pengalokasian anggaran *Mandatory Spending* dari pendapatan transfer di luar gaji sesuai arahan regulasi yaitu untuk Alokasi Dana Desa sebesar 10 persen, anggaran Pendidikan 20 persen, anggaran Kesehatan 10 persen, anggaran dan pengawasan sebesar 1 persen;
 - c. Alokasi anggaran belanja dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024. Termasuk belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi pemilu 2024;
 - d. Penganggaran berbasis program prioritas yang berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi dan sosial, peningkatan infrastruktur khusus penataan Kota Langgur, pencapaian indikator kinerja RPJMD dan prioritas pembangunan nasional;
 - e. Pengalokasian Anggaran belanja untuk penyusunan dokumen-dokumen wajib akhir masa jabatan kepala daerah; rancangan teknokratik dan rancangan dokumen perencanaan, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 (sebagai dokumen perencanaan transisi) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

- f. Efisiensi anggaran melalui pembatasan perjalanan dinas luar daerah dan belanja barang dan jasa. Kegiatan pertemuan, koordinasi, konsultasi luar daerah yang dapat dilakukan melalui media elektronik akan didorong untuk menghemat biaya perjalanan dinas.
 - g. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan belanja modal yang dapat memberikan dampak pengganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi, perumahan dan penanganan Kawasan kumuh.
 - i. Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana bagi hasil antara APBD Kabupaten Maluku Tenggara dengan APBD Provinsi Maluku dan antara APBD Kabupaten Maluku Tenggara dengan APBN
 - j. Untuk belanja program dan kegiatan senantiasa diarahkan pada kegiatan yang secara langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan penunjang dan kegiatan inti pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada gilirannya akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - k. Mempertajam prioritas pembangunan daerah, berdasarkan arahan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2018-2023 dan RKPD Tahun 2022 untuk mencapai sasaran-sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - l. Penyesuaian kebutuhan belanja, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer yang sesuai dengan kondisi serta yang menurut sifatnya penting dan mendesak;
 - m. Perubahan atau penyesuaian kegiatan yang mengakibatkan penambahan dan atau pengurangan pagu anggaran;
 - n. Penyesuaian terhadap Belanja dengan sumber pembiayaan Dana Alokasi Khusus sebagai akibat dari perubahan kebijakan nasional;
 - o. Penyesuaian belanja alam rangka pemenuhan Perlindungan Sosial sebesar 2 persen dari total tranfer DAU triwulan IV.
3. Kebijakan Pembiayaan
- Kebijakan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 lebih ditekankan kepada upaya menutupi perkiraan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2022 melalui upaya peningkatan penerimaan pembiayaan sampai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

dengan 99,88 persen dan atau penurunan pengeluaran pembiayaan sampai dengan 100 persen.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

- 1) Peningkatan/penambahan penerimaan pembiayaan daerah untuk menutupi defisit APBD melalui berbagai pos penerimaan pembiayaan (penggunaan SiLPA) yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan/ditambah/digunakan sampai dengan 100 persen;
- 2) Perlunya kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan peningkatan/penambahan penerimaan pembiayaan daerah pada tiap-tiap pos penerimaan pembiayaan daerah; dan
- 3) Perlunya pengkajian lebih lanjut tentang alokasi penggunaan dana cadangan yang sebelumnya diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- 1) Penurunan/pengurangan pengeluaran pembiayaan daerah untuk menutupi defisit APBD melalui berbagai pos pengeluaran pembiayaan yang diperkirakan masih memungkinkan untuk diturunkan/dikurangi sampai dengan 100 persen;
- 2) Perlunya kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan penurunan/pengurangan pengeluaran pembiayaan daerah pada tiap-tiap pengeluaran pembiayaan daerah.

C. Target Kinerja APBD

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2023. Penetapan capaian kinerja keuangan untuk Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 dan yang kedua adalah melalui Perda Nomo 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023.

Terjadinya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini lebih disebabkan karena adanya perubahan asumsi yang mendasari perhitungan target penerimaan pendapatan Daerah dan alokasi Belanja Daerah. Terjadinya Perubahan Anggaran pada Tahun 2023, disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2023, antara lain :
 - a. Penyesuaian Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Maluku



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023**

- b. Penyesuaian Pendapatan yang bersumber lain – lain pendapatan asli daerah yang sah yang disebabkan oleh pengalihan retribusi pelayanan kesehatan;
 - c. Penyesuaian penganggaran dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak / bukan pajak dan dana alokasi khusus (DAK);
 - d. Penyesuaian terhadap Belanja Daerah;
Penganggaran beberapa kegiatan penting yang mendesak pada OPD antara lain :
 - 1) Belanja pada Dinas Sosial, Pertanian, Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan untuk membiayai kegiatan dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi akibat Covid-19 baik yang bersumber dari DAK dan maupun DAU;
 - 2) Belanja pada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan diarahkan untuk membiayai kegiatan dalam rangka penanganan Dampak Sosial / Safety Net baik yang bersumber dari DAU maupun Bantuan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi;
 - 3) Belanja di Dinas PUPR, penyesuaian terhadap Kegiatan DAK dan kegiatan Infrastruktur yang dianggap penting dan mendesak;
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, penambahan Anggaran untuk pembangunan Rumah Adat;
 - 5) Badan Kesbangpol, adanya pergeseran anggaran dari belanja tak terduga untuk penanganan konflik sosial masyarakat;
 - 6) Dinas Kesehatan, penambahan anggaran untuk mengakomodir tambahan tenaga non PNS, penyesuaian DAK Fisik dan Non Fisik berdasarkan JUKNIS serta mengakomodir kegiatan Luncuran;
 - 7) Dinas Kesehatan dan RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, penyesuaian terhadap Kegiatan DAK;
 - e. Penganggaran kegiatan luncuran dan SiLPA Tahun 2023 yang belum dianggarkan dalam APBD Induk Tahun 2023;
 - f. Penggunaan Pembiayaan Daerah;
Kebijakan Pembiayaan Daerah digunakan untuk menampung transaksi keuangan guna menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau pemanfaatan dana apabila terjadi surplus/defisit anggaran melalui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran. Pergeseran – pergeseran yang dimaksud yaitu pergeseran antar kegiatan untuk mempertajam prioritas dan pencapaian kinerja sasaran dan pergeseran antar jenis belanja dilakukan dalam rangka efisiensi atau rasionalisasi penggunaan anggaran.
 - 3. Keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Tahun sebelumnya harus dimanfaatkan, dan Saldo atau SiLPA tersebut adalah nilai SiLPA Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil audit BPK RI.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel 11 berikut ini :

Tabel 11
Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang) (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	68,908,555,803,00	92,477,624,904,00	23,569,069,101,00
4.1.01	Pajak Daerah	32,014,104,929,00	47,218,977,384,00	15,204,872,455,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5,903,042,000,00	6,553,042,000,00	650,000,000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,200,000,000,00	6,446,735,017,00	1,246,735,017,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25,791,408,874,00	32,258,870,503,00	6,467,461,629,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	960,328,103,937,00	978,517,251,464,00	18,189,147,527,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	944,995,283,000,00	954,074,803,951,00	9,079,520,951,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15,332,820,937,00	24,442,447,513,00	9,109,626,576,00
	Jumlah Pendapatan	1,029,236,659,740,00	1,070,994,876,368,00	41,758,216,628,00
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	594,927,028,303	643,080,198,997,00	48,153,170,694,00
5.1.01	Belanja Pegawai	274,937,827,540	273,945,397,707,00	(992,429,833,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226,525,266,635	258,341,898,142,00	31,816,631,507,00
5.1.03	Belanja Bunga	4,191,090,062,00	999,245,608,00	(3,191,844,454,00)
5.1.05	Belanja Hibah	69,646,044,066,00	90,251,857,540,00	20,605,813,474,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19,626,800,000,00	19,541,800,000,00	(85,000,000,00)
5.2	BELANJA MODAL	227,423,937,544,00	214,308,606,790,00	(13,115,330,754,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,605,964,000,00	568,124,525,00	(1,037,839,475,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,427,036,142,00	28,077,962,789,00	3,650,926,647,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94,014,857,169,00	94,796,299,777,00	781,442,608,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106,360,480,233,00	89,827,499,699,00	(16,532,980,534,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,015,600,000,00	1,038,720,000,00	23,120,000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,000,000,000,00	717,530,909,00	(2,282,469,091,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000,00	717,530,909,00	(2,282,469,091,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	179,383,693,893,00	179,383,693,893,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,791,714,693,00	3,791,714,693,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	175,591,979,200,00	175,591,979,200,00	0,00
	Jumlah Belanja	1,004,734,659,740,00	1,037,490,030,589,00	32,755,370,849,00
	Total Surplus/(Defisit)	24,502,000,000,00	33,504,845,779,00	9,002,845,779,00
6	PEMBIAYAAN			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang) (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36,498,000,000,00	15,765,027,909,00	(20,732,972,091,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11,498,000,000,00	15,765,027,909,00	4,267,027,909,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	25,000,000,000,00	0,00	(25,000,000,000,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	36,498,000,000,00	15,765,027,909,00	(20,732,972,091,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	61,000,000,000,00	49,269,873,688,00	(11,730,126,312,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000,00	1,000,000,000	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	60,000,000,000,00	48,269,873,688,00	(11,730,126,312,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	61,000,000,000,00	49,269,873,688,00	(11,730,126,312,00)
	Pembiayaan Netto	(24,502,000,000,00)	(33,504,845,779,00)	(9,002,845,779,00)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp1.029.236.659.740,00 mengalami Perubahan menjadi Rp1,070,994,876,368,00 mengalami peningkatan sebesar Rp41,758,216,628,00 atau 4 persen.

Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp1,004,734,659,740,00 mengalami Perubahan menjadi Rp1,037,490,030,589,00 mengalami peningkatan sebesar Rp32,755,370,849,00 atau 0,03 persen.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp36,498,000,000,00 mengalami Perubahan menjadi Rp15,765,027,909,00 mengalami penurunan sebesar Rp15,765,027,909,00 atau 57 persen.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp61,000,000,000,00 mengalami Perubahan menjadi Rp49,269,873,688,00 mengalami penurunan sebesar Rp-11,730,126,312,00 atau 19 persen.

D. Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

Arah kebijakan tahunan selama kurun waktu tahun 2018-2023 yang digunakan untuk mengarahkan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara adalah:

1. Penurunan Angka Kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi, baik secara nasional, provinsi, maupun di daerah. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan antara lain untuk menurunkan angka kemiskinan antara lain dengan menyediakan beberapa kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan, pangan, papan, listrik, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian dan perikanan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi upaya tersebut belum memberikan hasil yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Angka



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 sebesar 21,79 persen lebih besar dibanding tahun 2021 sebesar 22,19 persen. Angka kemiskinan ini relatif masih lebih tinggi dibanding angka kemiskinan Provinsi Maluku tahun 2022 sebesar 16,42 persen dan Nasional sebesar 9,32 persen. Beberapa faktor yang diidentifikasi menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah :

a. Pendapatan Rumah Tangga.

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan/penghasilan yang diterima rumah tangga baik yang berasal dari pendapatan kepala keluarga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga (Juanandar, 2004:147). Pendapatan rumah tangga yang tinggi mendorong naiknya pengeluaran rumah tangga untuk membelanjai kebutuhan akan makan, pakaian, hunian, pendidikan, kesehatan dan hiburan keluarga. Apabila pendapatan rumah tangga mencukupi biaya hidup layak yang diukur dengan garis kemiskinan maka rumah tangga tersebut sudah keluar dari lingkaran kemiskinan. Meningkatnya garis kemiskinan yang tidak diikuti dengan naiknya pendapatan rumah tangga, akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. BPS mempublikasikan garis kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 sebesar Rp350.661,00. Artinya bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2022 sebanyak 21.380 jiwa adalah jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara yang pendapatannya masih dibawah garis kemiskinan.

b. Rendahnya Tingkat Pendidikan.

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai ketrampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau ketrampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Pada umumnya penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

c. Terbatasnya Lapangan Kerja.

Terbatasnya lapangan kerja adalah salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara. Penduduk yang mencari kerja atau mau bekerja namun tidak mendapatkan pekerjaan atau memperoleh pekerjaan namun pekerjaan tersebut memberikan penghasilan yang relatif kecil.

d. Terbatasnya Modal Kerja.

Penduduk yang tidak memiliki akses modal usaha sangat rentan terhadap kemiskinan. Ketiadaan modal usaha menjadikan mereka tidak mampu menciptakan lapangan kerja.

e. Beban Keluarga.

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban hidup yang harus dipenuhi. Salah satu indikator yang menunjukkan besarnya ketergantungan hidup



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

adalah rasio ketergantungan. Ada 2 (dua) jenis rasio ketergantungan, yaitu rasio ketergantungan anak dan rasio ketergantungan lanjut usia. Rasio ketergantungan anak digunakan untuk menunjukkan besarnya beban tanggungan anak bagi penduduk usia produktif disuatu daerah pada suatu waktu tertentu. Sedangkan rasio ketergantungan lanjut usia digunakan untuk menggambarkan besarnya beban tanggungan penduduk lanjut usia bagi penduduk usia produktif. Pada tahun 2023 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 69,11 persen, dengan rasio ketergantungan anak sebesar 59,30 persen dan rasio ketergantungan lanjut usia sebesar 9,81 persen. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung penduduk usia belum produktif dan sudah tidak produktif lagi sebanyak 69 orang atau sebanyak 59 orang anak dan 10 orang usia lanjut.

- f. Transportasi biaya tinggi Tingginya biaya transportasi hasil pertanian dan perikanan ke pasar atau pusat-pusat pertumbuhan terutama di wilayah pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil Sebelah Barat, berdampak pada ketidakmampuan petani atau nelayan meningkatkan pendapatan keluarga.
- g. Keterbatasan akses air bersih, Sanitasi, listrik dan air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi manusia terutama untuk minum.

Air yang berasal dari sumber tidak terlindung, seperti sumur yang tidak ada dinding penghalang minimal 3 meter ke dalam tanah dapat tercemar oleh bakteri-bakteri yang ada di sekitar sumur tersebut, misalnya bakteri dari limbah manusia (tinja). Dibanding dengan sumber air lainnya, air PDAM merupakan sumber air yang paling baik kualitasnya. Air berasal dari pompa, sumur, sungai, hujan dan sebagainya, dianggap kurang baik karena kemungkinan tercemarnya relatif cukup besar. Berdasarkan data statistik, pada tahun 2023 persentase penduduk Kabupaten Maluku Tenggara yang menggunakan air ledeng dan air kemasan bermerek hanya sebesar 19,05 persen. Sisanya sebesar 80,95 persen masih menggunakan air sumur bor, sumur terlindung, hujan dan lainnya. Pemilikan tempat buang air besar/kakus sendiri, akan sangat menunjang terciptanya kesehatan lingkungan yang bersih dan teratur. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan rumah tangga dan lingkungan telah menyebabkan tingginya pemakaian fasilitas tempat buang air besar berupa WC yang pada kondisi tahun 2023 telah ada di masing-masing rumah (75,66 %), rumah tangga yang menggunakan WC bersama-sama dengan rumah tangga lain (5,29 %) ataupun memanfaatkan WC Umum (3,95 %). Masih sebanyak 15,10 persen rumah tangga yang belum memiliki tempat buang air besar/kakus dan masih memanfaatkan kolam/sungai/pantai sebagai tempat buang air besar terutama di perdesaan. Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dan menggeser peranan minyak tanah sebagai sumber penerangan dan membuka peluang masuknya penyebaran informasi melalui perangkat elektronik. Rumah yang menggunakan listrik dianggap mempunyai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

tingkat kesejahteraan lebih baik. Peningkatan pemakaian sumber energi listrik menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan jaringan transmisi listrik yang merambat ke pelosok-pelosok dengan didukung oleh meningkatnya pendapatan masyarakat. Meskipun listrik sudah merupakan kebutuhan pokok, namun belum seluruh penduduk Maluku Tenggara menikmati listrik, baik dari PLN maupun Non PLN. Pada tahun 2023 persentase rumah tangga yang belum menggunakan listrik di Kabupaten Maluku Tenggara masih sebesar 22 persen.

- h. Rumah tidak layak huni Masih banyak rumah penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara yang tidak layak huni atau rumah tidak sehat.

Kriteria rumah sehat menurut *World Health Organization (WHO)* agar penghuni suatu rumah dapat hidup nyaman dan tidak berdesakan, maka minimal luas lantai per anggota rumah tangga adalah 10 m². Bila rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 5 (lima) orang, maka luas lantai yang diperlukan minimal 50 m² untuk setiap rumah tangga. Pada tahun 2022, masih terdapat 32,35 persen rumah tangga di Kabupaten Maluku Tenggara menempati rumah dengan luas lantainya kurang dari 50 m².

- i. Inflasi Daerah Inflasi merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Jika pendapatan masyarakat tetap, sedangkan harga-harga barang yang dikonsumsi naik, maka daya beli masyarakat rendah dan berdampak pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Naiknya inflasi mendorong naiknya garis kemiskinan dan penduduk rentan miskin akan terjun bebas dalam jurang kemiskinan. Untuk penanganan inflasi maka pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok sehingga bisa mempertahankan pendapatan riil masyarakat.

- j. Belum efektifnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah belum berjalan efektif. Beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program pemberdayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah :

- 1) Penajaman sasaran penerima program pemberdayaan;
- 2) Pemberian bantuan peralatan pemberdayaan yang diikuti dengan pelatihan pemanfaatannya.
- 3) Melakukan pendampingan secara efektifitas dengan mengadopsi model-model pemberdayaan yang telah dilakukan oleh lembaga mitra pemberdayaan seperti model *Seonet* dan *Ifat*.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pada bidang Pendidikan, akses pendidikan perlu ditingkatkan. Pada tahun 2023 APS usia 7-12 tahun sebesar 99,63 persen, usia 13-15 tahun 96,71 persen dan usia 16-18 tahun



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

72,79 persen. Artinya masih terdapat 0,37 persen penduduk usia 7-12 tahun belum mengenyam pendidikan setara SD, 8,29 persen usia 13-15 tahun tidak mengenyam pendidikan setara SMP, dan 2,29 persen usia 16-18 tahun tidak mengenyam pendidikan setara SMA. Pelayanan kesehatan rujukkan pasien masyarakat miskin masih perlu ditingkatkan, Angka prevalensi penyakit menular masih merupakan persoalan utama, disamping terjadinya pergeseran peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (*stroke*, serangan jantung, diabet dan lain-lain). Pelayanan asupan gizi ibu dan anak masih menjadi kebutuhan penting untuk mengatasi gizi buruk dan kekerdilan (*stunting*). Pada kurun waktu 2019–2021 tercatat angka balita gizi buruk di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 9 Kasus dan gizi kurang sebanyak 12.500 kasus dan untuk kasus *stunting*, menurut data *Global Nutrition Report*, jumlah balita stunting di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 18,64 persen dari seluruh balita di Indonesia. Artinya setiap bayi lahir sebanyak 100 orang berpotensi stunting sebanyak 19 orang. Stunting mencerminkan kekurangan gizi kronis selama periode pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam rahim. Kondisi stunting sudah tidak bisa ditangani lagi bila anak memasuki usia dua tahun. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya stunting pada anak, ibu perlu konsumsi asupan gizi yang layak, terutama selama masa kehamilan hingga anak lahir dan berusia 18 bulan.

3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur dan Konektifitas.

Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas perhubungan serta mengurangi tingkat keterisolasian dan kesenjangan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah yang memadai pada gilirannya akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pulau Kei Besar dengan karakteristik wilayahnya mempunyai tingkat aksesibilitas rendah sehingga jalan lingkar merupakan solusi yang masih harus terus menjadi perhatian utama dalam penyelesaiannya. Konektivitas transportasi antar moda masih rendah. Jaringan jalan dari bandara Karel Sadsuitubun ke ibu kota kabupaten dan ke kecamatan atau ohoi sudah tersedia akan tetapi belum ditunjang dengan moda transportasi publik yang mendukung mobilitas barang dan jasa dari dan ke bandara. Di Pulau Kei Besar, belum tersedianya jalan dalam kondisi baik dan moda transportasi darat antar ohoi dan ke dermaga pelabuhan penyeberangan rakyat. Selain itu, dari sisi komunikasi dan informasi, masih terdapat ohoi yang tidak bisa mengakses informasi dan komunikasi via telepon seluler dan internet. Untuk itu kebijakan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi lima tahun mendatang perlu dibangun secara kemitraan dengan stakeholder terkait agar masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi dan komunikasi dari setiap ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara. Peningkatan kapasitas infrastruktur dan konektifitas ini selain diprioritaskan di Pulau Kei Besar, juga untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah terutama pengembangan sektor pariwisata daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

4. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), melalui reformasi birokrasi belum berjalan optimal di Kabupaten Maluku Tenggara. Budaya kerja ASN belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah, sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik, yang meliputi standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan layanan dan pemanfaatan teknologi informasi perlu untuk terus ditingkatkan. Aspek akuntabilitas kinerja yang juga merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Clean dan Good Governance*), perlu ditingkatkan. Revitalisasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mutlak harus segera dilakukan demi mewujudkan kinerja pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik KKN. Di samping itu, Evaluasi kelembagaan dan penataan ulang organisasi perangkat daerah adalah hal yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan masyarakat dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki. Struktur organisasi daerah yang gemuk dan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit-unit kerja masih perlu dibenahi dalam rangka efektifitas kerja organisasi dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang dimiliki. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah untuk mendapatkan ukuran yang ideal (*rightsizing*) adalah solusi peningkatan kinerja pemerintah daerah, menghindari pemborosan penggunaan anggaran daerah, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik. Persoalan lain dalam hal mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik adalah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi untuk mengisi formasi jabatan sesuai asas tepat orang tepat tempat (*the right man on the right place*) masih sangat sedikit. Hal ini menjadi perhatian serius dalam kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas ASN selama lima tahun ke depan. Penerapan *E-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan namun belum optimal dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, akuntabel dan responsif. Beberapa pelayanan publik berbasis IT belum semuanya dapat diakses masyarakat. Tantangan utama dalam penerapan *E-government* ini adalah masih terbatasnya SDM aparatur yang mempunyai kompetensi IT. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pada sisi perencanaan pembangunan daerah, implementasi proses perencanaan tahunan belum berjalan optimal, terutama dari sisi *bottom up*, baik perencanaan ditingkat perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan maupun perencanaan di tingkat ohoi yang belum sepenuhnya bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah. Hal mendasar yang perlu dibenahi dalam perencanaan di tingkat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

perangkat daerah adalah penempatan pejabat perencana di OPD sesuai kompetensi perencana dan peningkatan ketersediaan data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

5. Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki luas wilayah $\pm 4.212,51 \text{ km}^2$. Dari luasan tersebut 3.181 km^2 atau 75,51 persen adalah luas lautan dan sisanya $\pm 1.031,81 \text{ km}^2$ atau 24,49 persen adalah daratan yang tersebar di atas 68 pulau, dengan garis pantai sepanjang $\pm 651,32 \text{ km}$. Kondisi geografis inilah yang menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki prospek yang cukup baik dalam meningkatkan perekonomian daerah dan daya saing ekonomi dibidang perikanan, pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Potensi perikanan yang dapat dikembangkan adalah perikanan budidaya dengan luas lahan sebesar 10.175,87 hektar, perikanan tangkap dengan luas daerah penangkapan ikan 0 – 4 mil laut sebesar $3.804,17 \text{ km}^2$ dan perairan 4-12 mil laut sebesar $4.585,41 \text{ km}^2$, yang terletak diantara WPP Laut Arafura, Laut Banda dan laut Seram yang memiliki keragaman ikan demarshall dan pelagis bernilai ekonomi tinggi dengan potensi JTB sebesar 3.735.225 ton per tahun. Sumberdaya perikanan yang cukup besar ini mendorong masyarakat menggantungkan hidupnya di sektor perikanan. Ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi lapangan usaha sub kategori perikanan terhadap Lapangan Usaha Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2021 sebesar 70,87 persen atau terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara yang tercatat sebesar sebesar 21,43 persen. (WPP 714 Laut Banda potensi 431.069 ton/tahun; JTB 344.856 ton/tahun, WPP 718 Laut Arafura potensinya 1.992.730 ton/tahun; JTB 1.594.185 ton/tahun, WPP 715 Laut Seram Potensinya 631.703 ton/tahun; JTB 505.363 ton/tahun dinarasikan kemudian). Meskipun memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan belum berjalan optimal, dan masih terdapat penangkapan yang bersifat destruktif. Penggunaan *potassium*, *sianida* dan bahan peledak sebagai alat bantu tangkap telah berdampak destruktif terhadap ekosistem laut disamping perambahan hutan yang sulit dikendalikan yang berpengaruh terhadap kerusakan wilayah pesisir. Untuk itu, pengelolaan perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara akan dilakukan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga potensi lestari perikanan tangkap dan budidaya dapat dikelola secara optimal dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Hal lain yang penting untuk mendapatkan perhatian adalah perlu adanya penguatan kelembagaan kelompok nelayan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya perikanan, revitalisasi sistem penyuluhan dan pendampingan serta pemanfaatan ruang yang tepat sesuai arahan dokumen *RZWP3K* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Di Sektor Pariwisata, Maluku Tenggara sebagai kabupaten kepulauan berkawasan pesisir dan pulau pulau kecil menghadirkan panorama alam yang indah, yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

didukung budaya lokal warisan leluhur akan terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat Kei. Beberapa dokumen rencana pengembangan pariwisata yang sudah tersedia akan digunakan sebagai Pedoman Pengembangan Pariwisata Kepulauan Kei dengan tetap menyesuaikan dengan dinamika lingkungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Pariwisata Kei adalah penyediaan infrastruktur yang memadai, SDM yang berkualitas, manajemen pengelolaan pariwisata yang efektif, lestari budaya Kei dan penataan objek wisata. Di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, tanaman pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah ubi kayu, jagung, dan kacang tanah, serta tanaman hortikultura seperti bawang, cabe, kubis, kacang panjang serta tanaman kelapa dan pala. Ubi kayu mempunyai prospek yang sangat baik, karena kesesuaian lahan, dan telah diusahakan secara luas oleh masyarakat, sehingga mudah untuk dikembangkan industri pengolahannya. Dalam mewujudkan peningkatan produksi pertanian, diperlukan penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan pasca panen sektor pertanian.

6. Ketahanan Pangan.

Tujuan utama pembangunan ketahanan pangan pada dasarnya adalah pemberdayaan masyarakat dan aparatur agar dapat memaksimalkan sumberdaya pangan untuk memperkuat keterpenuhan pangan di masyarakat sekaligus mampu mengatasi berbagai permasalahan ketahanan pangan yang mengemuka. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat menjawab 4 hal utama yakni :

- (1) Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga;
- (2) Distribusi pangan yang lancar dan merata;
- (3) Konsumsi pangan yang bermutu dan aman untuk meningkatkan SDM;
- (4) Ketersediaan cadangan pangan lokal sebagai substitusi beras.

7. Lingkungan Hidup.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Namun pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan relatif mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada ancaman yaitu krisis pangan, air bersih dan abrasi. Ancaman tersebut menjadi tantangan jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pembangunan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

berkelanjutan perlu dipadukan dengan penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup termasuk memulihkan lingkungan yang terlanjur rusak. Di samping itu, dalam hal menangani isu kebencanaan, maka perlu diantisipasi perubahan lingkungan, yang akan berdampak pada risiko bencana yang dihadapi. Untuk itu, maka perlu dilakukan peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi serta penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Dalam kerangka menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana disebutkan di atas, kearifan lokal adat dan budaya Masyarakat Hukum Adat Kei yang sangat erat hubungannya dengan lingkungan dan alam akan ditingkatkan.

E. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan.

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 dapat diikhtisarkan seperti pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12
Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	persen
1	Pendapatan	1,029,236,659,740	999.137.184.659,82	93,29
2	Belanja	1,004,734,659,740	929.299.090.908,20	89,57
3	Surplus/Defisit	24,502,000,000	(48.893.284.313,86)	50,70
4	Penerimaan Pembiayaan	36,498,000,000	36.333.427.972,83	65,44
5	Pengeluaran Pembiayaan	61,000,000,000	69.838.093.751,62	58,69
6	Pembiayaan Neto	(24,502,000,000)	(33.504.665.778,79)	67,31
7	SiLPA/SiKPA	0.00	33.504.665.778,79	0,00

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 sebesar Rp999.137.184.659,82 atau 93,29 persen dibandingkan target sebesar Rp1,029,236,659,740,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 sebesar Rp929.299.090.908,20 atau 89,57 persen dari target sebesar Rp1,004,734,659,740. Hal tersebut terutama disebabkan efisiensi belanja daerah dan beberapa kegiatan yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum selesai sehingga diluncurkan ke tahun anggaran 2022. Dengan demikian, APBD Kabupaten Maluku Tenggara mengalami Defisit sebesar Rp48.893.284.313,86.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp36.333.427.972,83 atau 65,44 persen dari target anggaran sebesar Rp119,437,548,005.00 dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp13.497.848.245,00 atau 58,69 persen dari target anggaran sebesar Rp23.000.000.000,00. Dengan kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan di atas, maka realisasi pembiayaan neto tercapai sebesar Rp(33.504.665.778,79) atau 67,31 persen.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Secara keseluruhan, maka kinerja keuangan dari aktivitas normal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp33.504.665.778,79.

F. Prosedur Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 dilaksanakan secara komputerisasi dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA FMIS dan SIMDA BMD) sehingga memudahkan dalam memproses data mulai dari proses penganggaran, penatausahaan sampai dengan proses pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan SIPD dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah serta SIMDA FMIS. Dalam Penatausahaan Keuangan Daerah dirasakan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menghasilkan data-data keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Mandatory Spending

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, Adapun Tujuan *Mandatory Spending* yakni untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory Spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah sebagaimana arahan Undang-Undang tentang APBN;
4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah mengalokasikan Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk memenuhi *Mandatory Spending* dengan rincian sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran Bidang Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebelum Perubahan APBD sebesar Rp223.863.554.206,00 dan setelah Perubahan APBD Rp224.665.852.796,00 dari Total Alokasi Belanja Daerah sebesar dari Total Belanja Daerah sebelum perubahan APBD sebesar Rp1.004.734.659.740,00 setelah perubahan APBD Rp1.037.490.030.589,00, maka rasio Anggaran Pendidikan sebelum perubahan APBD mencapai 22,28 persen dan Setelah Perubahan APBD sebesar 21,65 persen dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Dinas Pendidikan sebelum Perubahan APBD sebesar Rp220.367.500.956,00,
- b. Belanja Dinas Pendidikan Setelah Perubahan APBD sebesar Rp204.453.549.546,00
Belanja Belanja yang menunjang Bidang Pendidikan sebelum Perubahan APBD sebesar Rp3.824.853.250,00.
- c. Belanja yang menunjang Bidang Pendidikan setelah Perubahan APBD sebesar Rp4.541.103.250,00

Dengan Demikian Alokasi Belanja Bidang Pendidikan telah melampaui 20 persen.

2. Alokasi anggaran Bidang Kesehatan sebelum Perubahan APBD sebesar Rp204.947.434.483,00 dan setelah Perubahan APBD Rp213.106.777.115,00 dari Total Alokasi Belanja Daerah sebesar dari Total Belanja Daerah sebelum perubahan APBD sebesar Rp1.004.734.659.740,00 setelah perubahan APBD Rp1.037.490.030.589,00, maka rasio Anggaran Bidang Kesehatan sebelum perubahan APBD mencapai 21,09 persen dan Setelah Perubahan APBD sebesar 26,48 persen dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Dinas Kesehatan sebelum Perubahan APBD sebesar Rp204.947.434.483,00,
- b. Belanja Dinas Kesehatan Setelah Perubahan APBD sebesar Rp213.106.777.115,00
- c. Belanja Belanja yang menunjang Bidang Pendidikan sebelum Perubahan APBD sebesar Rp6.959.501.501,00.
- d. Belanja yang menunjang Bidang Kesehatan setelah Perubahan APBD sebesar Rp6.902.074.788,00

Dengan demikian Alokasi Belanja Bidang Kesehatan telah melampaui 10 persen.

3. Alokasi anggaran Bidang infrastruktur sebelum Perubahan APBD sebesar Rp343.028.807.251,00 dan setelah Perubahan APBD Rp334.686.694.869,00 dari Total Belanja Daerah sebelum perubahan APBD sebesar Rp1.004.734.659.740,00 setelah perubahan APBD Rp1.037.490.030.589,00, maka rasio Anggaran Bidang Infrastruktur sebelum perubahan APBD mencapai 34,14 persen dan Setelah Perubahan APBD sebesar 32,26 persen .

Dengan demikian maka total belanja Infrastruktur telah melebihi 25 persen.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

4. Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dalam APBD tahun 2023 sebesar Rp32.157.954.200,00 atau belum memenuhi *Mandatory Spending* atau hanya mencapai 6,69 persen dari total Alokasi Belanja tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a) Alokasi Dana Bagi Hasil APBD Tahun 2023 | Rp 9.335.710.951,00 |
| b) Alokasi DAU pada APBD Tahun 2023 | <u>Rp472.015.431.000,00</u> |
| Jumlah Alokasi DBH dan DAU | Rp481.351.141.951,00 |
- Ketidak capaian Alokasi Dana desa akan menjadi Perhtian Pemerintah daerah pada tahun – tahun mendatang.

H. Perlindungan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi.

Implementasi kebijakan terhadap belanja wajib perlindungan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, maka Pemda berkontribusi memberikan dukungannya berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) yang ditentukan penggunaannya. Adapun belanja wajib perlindungan sosial ini dipergunakan untuk, antara lain :

- 1) Pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, UMKM, dan nelayan;
- 2) Penciptaan lapangan kerja;
- 3) Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Total Alokasi Belanja Wajib perlindungan sosial yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp10.807.051.500,00 atau 9 persen dari Total Dana Transfer Umum dengan Rincian sebagai berikut :

1) Total DAU Triwulan IV	Rp118.003.857.750,00
2) Total DBH Triwulan IV	<u>Rp 2.109.456.500,00</u>
Jumlah	Rp120.113.314.250,00

I. Penanganan Penurunan Prevalensi Stunting.

Program penanganan penurunan *Prevalensi Stunting* Kabupaten Maluku Tenggara di tahun 2022 dilaksanakan dalam berbagai program kegiatan. Program kegiatan dilakukan guna memberi pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat baik dari usia dini hingga pada usia dewasa. Pelayanan kesehatan selalu dilakukan guna dapat mencegah dan menurunkan tingkat *Prevalensi Stunting* dalam kehidupan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menganggarkan anggaran sebesar Rp288.840.520.517.737,00 .



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp1.070.994.876.368,00 dan di danai melalui penerimaan pendapatan daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp92.477.624.904,00 Dana Tranfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp978.517.251.4647,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp0,00 sehingga terjadi Surplus anggaran sebesar Rp33.504.845.779,00.

Secara umum realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp999.216.392.889,62 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.070.994.876.368,00 atau 93,30 persen. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp929.446.825.891,00 atau 89,59 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.037.490.030.589,00 serta Realisasi Pembiayaan Netto Daerah sebesar Rp(33.504.665.778,79) atau 100 persen dari target sebesar Rp(33.504.845.779,00) sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenan sebesar Rp 36.264.901.219,83.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2019 sampai dengan 2023 secara jelas dapat terlihat pada tabel 13 dan grafik 1 berikut ini:

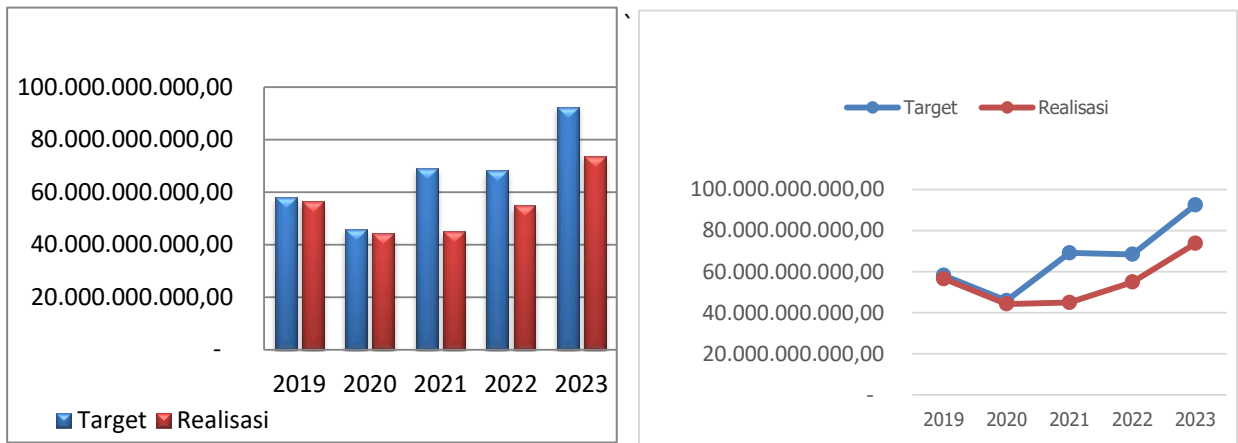
Tabel 13
Perkembangan PAD dari TA 2019 -2023

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2019	58.105.596.120,10	56.518.085.796,23
2	2020	45.847.921.693,32	44.258.115.564,63
3	2021	69.129.070.872,00	44.965.456.930,23
4	2022	68.361.158.477,00	54.893.896.521,42
5	2023	92.477.624.909,00	73.801.232.072,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Grafik 1



Dari grafik diatas, maka dapat dijelaskan bahwa trant perbandingan Target PAD Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2020 target PAD mengalami penurunan sebesar Rp12.257.674.426,78, atau 21,10 persen, kemudian pada tahun 2020 dibandingkan dengan target PAD tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp23.281.149.178,68 atau 50,78 persen dan target PAD pada Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp767.912.395,00 atau 1,11 persen dan selanjutnya pada Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp24.116.466.432,00 atau 35,28 persen. Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar Rp12.259.970.231,60 atau 21,69 persen, pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2021 realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp707.341.365,60 atau 1,60 persen dan pada tahun 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022 Realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp9.928.439.591,19 atau 22,08 persen selanjtnya Realissi Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp18.907.335.550,58 atau 34,44 persen.

Selanjutnya Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun 2023 sebesar Rp925.415.160.817,62 atau sebesar 94,57 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp978.517.251.464,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 secara jelas dapat dilihat pada tabel 14 dan grafik 2 berikut :



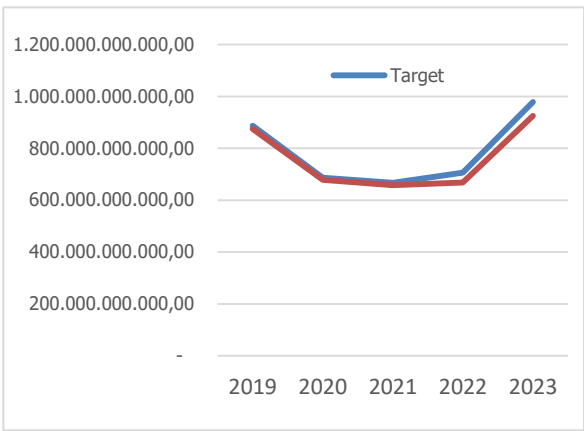
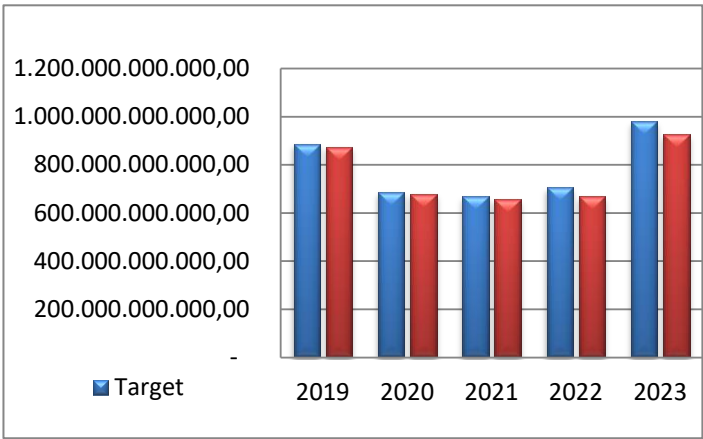
Tabel 14

Perkembangan Transfer (Dana Perimbangan) TA 2019 – 2023

No	TahunAnggaran	Target	Realisasi
1	2019	887.072.603.316,36	874.838.018.450,00
2	2020	686.904.442.062,00	678.193.764.157,00
3	2021	667.330.194.529,00	657.257.884.776,00
4	2022	705.539.562.000,00	667.514.392.947,00
5	2023	978.517.251.464,00	925.415.160.817,62

Grafik 2

Perkembangan Dana Perimbangan TA. 2019-2023



Target anggaran untuk Dana Transfer pada tahun anggaran 2019 dan 2020 dana perimbangan mengalami penurunan, sebesar Rp200.168.161.254,36 atau 22,57 persen dan pada Tahun 2020 dan 2021 target Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp19.574.247.533,00 atau 2,85 persen dan pada tahun 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022 Target Dana Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp38.209.367.471,00 atau minus 5,73 persen selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 target dana perimbangan meningkat sebesar Rp27.297.7689.552,00 atau 38,69 persen, sedangkan dari sisi realisasi penerimaan Dana Perimbangan, pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 realisasi Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp196.644.254.293,00 atau 22,48 persen dan pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2021 realisasi Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp20.935.879.381,00 atau 3,09 persen dan pada tahun 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022 realisasi Dana Perimbangan mengalami peningkatan sebesar Rp10.256.508.171,00 atau 1,56 persen, selanjutnya tahun 2023 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp257.900.767.870,62 atau 38,64 persen.

Pada Tahun 2023 untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari target sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp10.884.428.450,11 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Keuangan Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- 1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- 3. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

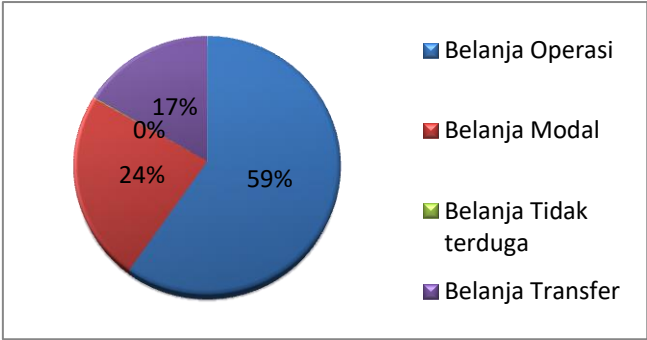
Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp1.037.490.030.853,00 dan terealisasi sebesar Rp929.446.825.891,00 atau 89,59 persen. Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp552.714.560.307,76 atau 85,95 persen dari alokasi sebesar Rp643.080.198.997,00, Realisasi Belanja Modal sebesar Rp191.910.118.091,24 atau 89,55 persen dari alokasi sebesar Rp214.308.606.790,00. Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp310.440.000,00 atau 43,27 persen dari alokasi sebesar Rp717.530.909,00. Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp184.511.707.492,00 atau 102,86 persen dari alokasi sebesar Rp179.383.693.893,00

Realisasi dan Presentase perbandingan Belanja tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 15 dan grafik 3 dibawah ini :

Tabel 15
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	Target	Realisasi
1	Belanja Operasi	643.080.198.997,00	552.714.560.307,76
2	Belanja Modal	214.308.606.790,00	191.910.118.091,24
3	Belanja Tidak terduga	717.530.909,00	310.440.000,00
4	Belanja Transfer	179,383,693,893.00	184,511,707,492.00

Grafik 3
Presentase Belanja Daerah Tahun 2023





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Operasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp643.080.199.997,00 dan terealisasi sebesar Rp552.714.560.307,76 atau 85,95 persen. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel 16 dibawah ini :

Tabel 16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023

Jenis Belanja	Target	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	273.945.397.707,00	245.328.012.957,00	89,55
Belanja Barang	258.341.898.142,00	244.869.780.409,76	94,79
Belanja Bunga	999.245.608,00	999.245.608,00	100
Belanja Hibah	90.251.857.540,00	46.904.766.333,00	51,97
Belanja Bantuan Sosial	19.541.800.000,00	14.612.755.000,00	74,78
Jumlah	643.080.198.997,00	552.714.560.307,76	85,95

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp214.308.606.790,00 dan terealisasi sebesar Rp191.910.118.091,24 atau 89,55 persen. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel 17 dibawah ini :

Tabel 17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022

Jenis Belanja	Target	Realisasi	Persentase
Belanja Tanah	568.124.525,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	28.077.962.789,00	26.629.682.986,00	94,84
Belanja Bangunan dan Gedung	94.796.299.777,00	76.615.372.183,00	80,82
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.827.499.699,00	87.929.442.922,24	97,89
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.038.720.000,00	735.620.000,00	70,82
Jumlah	214.308.606.790,00	191.910.118.091,24	89,55

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Tidak Terduga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp717.530.909,00 dan terealisasi sebesar Rp310.440.000,00 atau 43,27 persen. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel 18 dibawah ini :

Tabel 18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022

Jenis Belanja	Target	Realisasi	Persentase
Belanja Tidak Terduga	717.530.909,00	310.440.000,00	43,27
Jumlah	717.530.909,00	310.440.000,00	43,27

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Transfer mendapat alokasi anggaran sebesar Rp179.383.693.893,00 dan terealisasi sebesar Rp184.511.707.492,00 atau 102,86 persen. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel 19 dibawah ini :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Tabel 19

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023

Jenis Belanja	Target	Realisasi	Persentase
Bagi Hasil	3.791.714.693,00	3.784.456.892,00	99,81
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	175.591.979.200,00	180.727.250.600,00	102.92
Jumlah	179.383.693.893,00	184.511.707.492,00	102.86

Selanjutnya target Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2023 sebesar Rp15.765.027.909,00 dapat direalisasikan sebesar Rp15.765.207.909,21 atau 100 persen. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel 20 dibawah ini :

Tabel 20

Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2023

Jenis Penerimaan Pembiayaan	Target	Realisasi	Persentase
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	15.765.027.909,00	15.765.027.909,00	100
Jumlah	15.765.027.909,00	15.765.027.909,00	100

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp49.269.873.688,00 dari target Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp49.269.873.688,00 atau sebesar 100 persen. Realisasi pengeluaran pembiayaan ini ditujukan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp48.269.873.688,00 dari target anggaran sebesar Rp48.269.873.688,00 dalam rangka pembayaran Pokok Utang dan relisasi penyertaan modal pada PT. Bank Maluku sebesar Rp1.000.000.000,00 dari target anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00.

Dengan demikian Defisit anggaran tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp33.504.845.608,00 dan terealisasi defisit dalam APBD Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp69.838.093.751,62 serta realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp(33.504.665.778,79) sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp36.264.901.219,83.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Keuangan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan tahun 2022 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya :

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan pajak dan retribusi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Masih terbatasnya kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Situasi perekonomian menurun akibat adanya krisis keuangan global,dengan adanya peningkatan beberapa komponen penting, yang diperkirakan akan berdampak kepada berkurangnya daya beli pada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

4. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodir disebabkan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Sedangkan faktor penunjang pencapaian kinerja adalah :

1. Adanya perbaikan sistem dan prosedur kerja serta sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Peningkatan koordinasi antara OPD pengelola pendapatan asli daerah;
4. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas serta penyusunan laporan keuangan.

A. Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah Bupati. Dalam pelaksanaannya, Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenanganya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan :

1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
2. Laporan Keuangan Tahunan, setidaknya-tidaknya terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Entitas Pelaporan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi selain BUD wajib menyusun :

1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
2. Laporan Keuangan Tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sejak 2015 telah menggunakan Basis AkruaI yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 84 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tahun tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akruaI untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan.

Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*) dengan menggunakan mata uang rupiah untuk semua transaksi yang dilakukan.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

D. Kesesuaian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sejak tahun 2021 telah mengatur Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 58 Tanggal 1 September Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 dan ketentuan peraturan lainnya yang relevan.

Kebijakan akuntansi tersebut mencakup prinsip, dasar, konversi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

E. Kebijakan Akuntansi Tertentu Yang Diperlukan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

a. Kebijakan akuntansi lainnya dalam Laporan Realisasi Anggaran dapat diungkapkan sebagai berikut :

- 1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- 2) Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

b. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut :

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Penerapan Kebijakan Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

a. Pendapatan

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

- 1) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai kuasa BUD;
- 2) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, program dan kegiatan, kelompok, dan ekonomi (jenis belanja);
- 3) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- 4) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- 5) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan (pengurang belanja) pada periode yang sama;
- 6) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut;
- 7) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut;
- 8) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut;

- 9) Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara serah terima. Apabila dalam Berita Acara Serah Terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

c. Surplus atau defisit

Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

d. Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 3) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- 4) Pembiayaan Neto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

2. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut :

- a) Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil;
- b) Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan;
- c) Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

b. Beban - LO

Beban diakui pada saat :

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset;
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya adalah tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan beban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban atas belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD yakni pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan unit kerja dibawah Dinas Kesehatan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di bawah Dinas Pendidikan.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap dapat dilihat pada tabel 21 dibawah ini :

Tabel 21
Masa Manfaat

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat - Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat - Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit - Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	34	Senjata Sinar	10
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	TuguTitik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu – Rambu	50
1	3	3	11	Rambu - Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi PengolahanSampah	10
1	3	4	14	Instalasi PengolahanBahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5	04	Barang Bercorak Kesenian	4
1	3	5	05	Alat Olahraga Lainnya/ Alat Musik Modern	5
1	3	5	08	Aset Tetap dalam Renovasi	5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3. Kebijakan Akuntansi Neraca

a. Aset Lancar.

- 1) Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
- 2) Berupa kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
- 3) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan serta penyisihan piutang. Pelaporan Penyisihan Piutang dengan sebagai berikut :
 - a) Beban Penyisihan Piutang;
Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.
 - b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Berikut disajikan ilustrasi pelaporan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam Laporan Operasional (LO), Piutang Dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam Neraca.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023**

a. Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas :

1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang;

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain :

a) Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau

b) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau

c) Debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau

d) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau

e) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau

f) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau

g) Debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena :

(1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau

(2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang.

h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan atau pernyataan Bupati; dan/atau

i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023**

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapus bukuan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2) Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang

Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga di kapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023**

b. Ilustrasi penyisihan piutang

1) Penyisihan Piutang Pajak

Pada 31 Desember 2023, terdapat pendapatan pajak yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sejumlah Rp20.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Piutang sejumlah Rp12.000.000 memiliki umur kurang dari 1 tahun;
- b) Piutang sejumlah Rp5.000.000 memiliki umur lebih dari 1 tahun s.d. 2 tahun;
- c) Piutang sejumlah Rp2.000.000 memiliki umur lebih dari 2 tahun s.d. 5 tahun;
- d) Piutang sejumlah Rp1.000.000 memiliki umur lebih dari 5 tahun.

2) Penyisihan Piutang Retribusi

Pada 31 Desember 2023, terdapat pendapatan retribusi yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sejumlah Rp480.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Piutang sejumlah Rp250.000.000 memiliki masa pelunasan belum jatuh tempo (kualitas lancar);
- b) Piutang sejumlah Rp120.000.000 belum dilunasi terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama diterbitkan (kualitas kurang lancar);
- c) Piutang sejumlah Rp80.000.000 belum dilunasi terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua diterbitkan (kualitas diragukan);
- d) Piutang sejumlah Rp30.000.000 belum dilunasi terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga diterbitkan (kualitas macet).

b. Persediaan

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas Metode Persediaan yang digunakan adalah Metode Sistem Periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan Inventarisasi Fisik.

c. Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023**

- 2) Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi investasi nonpermanen dan investasi permanen.
- d. Investasi Permanen
 - 1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut :
 - a) Jika kepemilikan kurang dari 20 persen dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan menggunakan metode biaya;
 - b) Jika kepemilikan 20 persen sampai 50 persen atau kurang dari 20 persen tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan lebih dari 50 persen dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan prosentase kepemilikan.
 - 2) Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
 - 3) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - 4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi;
 - 5) Dengan menggunakan Metode Ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat perubahan valuta asing serta revaluasi aset tetap;
 - 6) Pengelola Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah Sekretariat Daerah atau unit lain yang ditunjuk;
 - 7) Jenis masing-masing penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

e. Aset Tetap

- 1) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
- 4) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 6) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
- 7) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 8) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
 - (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (b) biaya yang dapat distribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
 - (c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 9) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :
 - (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

- 10) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
- 11) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
 - (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - (d) Uang muka kerja yang diberikan;
 - (e) Retensi.
- 12) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- 13) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- 14) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
- 15) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- 16) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap;
- 17) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023**

- 18) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - 19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
 - 20) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam :
 - (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - 21) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian;
 - 22) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
 - 23) Penyusutan Aset tetap dengan Metode Garis Lurus.
- f. Dana Cadangan
- 1) Pembentukan dan peruntukkan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri;
 - 2) Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk;
 - 3) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan;
 - 4) Pengelola Dana Cadangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD;
 - 5) Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Aset Lainnya
- 1) Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi. Aset Tidak Berwujud (ATB) Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas :

(a) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(d) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

(e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

(h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika :

- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas;
 - (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal
- 2) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah;
- 3) Amortisasi Aset Tak Berwujud
- Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:
- (a) menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
 - (b) mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
 - (c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki;
 - (d) Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya;
 - (e) Amortisasi dapat dikukan dengan metode seperti garis lurus, seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode;

- (f) Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (Copyright) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya;
 - (g) Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
- 4) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar);
 - 5) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara/Kas Daerah;
 - 6) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke daerah;
 - 7) Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (Aset Lancar);
 - 8) Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut;
 - 9) Penyerahan dan pembayaran aset Bangun Kelola Serah (BKS) harus diatur dalam kontrak kerjasama tersendiri;
 - 10) Aset yang berada dalam Bangun Kelola Serah (BKS) disajikan terpisah dari aset tetap;
 - 11) Bangun Serah Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.
- h. Kewajiban Jangka Pendek
- 1) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterimadan/atau pada saat kewajiban timbul;
 - 2) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

- 3) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
 - 4) Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
 - 5) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
 - 6) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka pendek adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
 - 7) R/K Pusat diakui pada saat diterima di Bendahara Pengeluaran. Pada akhir periode akuntansi R/K Pusat dieliminasi dengan S/K SKPD di SKPKD.
- i. Kewajiban Jangka Panjang
- 1) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul;
 - 2) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;
 - 3) Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas
- 1) Laporan Arus Kas disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*);
 - 2) Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi;
 - 3) Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

- 4) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi;
- 5) Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi;
- 6) Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun;
- 7) Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/ daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya;
- 8) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan;
- 9) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan;
- 10) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya;
- 11) Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- 12) Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca;
- 13) Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

F. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam Tingkat Nasional. Pada akhir Maret 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan di bidang kesehatan, jaringan pengamanan sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Penganggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan (LKPD).

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Beberapa Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 antara lain :

1. Penyajian Laporan Keuangan
 - a. Untuk menangani Pandemi Covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menambah utang dalam rangka mendanai pengeluaran belanja penanganan Pandemi Covid-19;
 - b. Penundaan beberapa kegiatan pemerintah, kemungkinan menyebabkan Persediaan menjadi lebih lama tidak tersalurkan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tertunda penyelesaiannya;
 - c. Hal ini akan menyebabkan perubahan signifikan pada tahun sebelumnya, sehingga harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas
 - a. Program penanganan Pandemi Covid-19 akan berdampak pada perubahan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021;
 - b. Realisasi Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tenggara dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - c. Pos-Pos dalam LRA akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, untuk itu perubahan tersebut harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 - a. Pada bagian kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro dijelaskan dampak Pandemi Covid-19 pada entitas dan kebijakan fiskal, perubahan APBD dan kondisi ekonomi makro;
 - b. Ikhtisar pencapaian target keuangan menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 terhadap pencapaian keuangan;
 - c. Kebijakan akuntansi menjelaskan bahwa kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam Pos Luar Biasa karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos – pos laporan keuangan yang berdampak signifikan;
 - d. Pos – pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas Pandemi Covid-19 menjelaskan perubahan pos – pos tersebut sebagai dampak dari realokasi atau *refocusing* anggaran, misalnya : Belanja Tak Terduga, Belanja Barang dan Belanja Modal. Dampak penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang, penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada Konstruksi pada penyelesaian dan Persediaan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

4. Akuntansi Investasi

Kewajiban pemerintah dalam rangka stabilisasi sistim keuangan yang dilakukan melalui penempatan modal daerah pada BUMD / Korporasi / Swasta, baik melalui penanaman modal langsung maupun melalui lembaga keuangan, serta kemungkinan penurunan nilai kepemilikan pemerintah akibat adanya BUMD yang merugi.

5. Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi dan kontrak yang telah berjalan diakui sesuai PSAP Kewajiban;
- b. Kebijakan utang khusus yang dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

6. Akuntansi Hibah

Kegiatan pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, kepada Lembaga atau kepada Masyarakat secara langsung, serta kegiatan pemberian hibah oleh pemerintah daerah kepada lembaga atau masyarakat secara langsung maupun penerimaan hibah oleh pemerintah atau lembaga lain serta yang berasal dari masyarakat secara langsung dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual

Akuntansi dan Pelaporan keuangan atas program bantuan pemerintah yang ditujukan langsung pada masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan sosial merujuk pada Kebijakan Akuntansi ini.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

A. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut :

1	Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		1.793.207.956.151,40	1.681.921.440.608,50

Aset Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.793.207.956.151,40 mengalami peningkatan sebesar Rp111.286.515.542,90 atau 6,62 persen dari aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.681.921.440.608,50, yang terdiri dari :

Tabel 22
Rincian Aset

NO	ASET	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Bertambah / Berkurang
1	Aset Lancar	79.808.122.613,86	41.975.832.461,50	37.832.290.152,36
2	Investasi Jangka Panjang	48.025.602.631,00	45.141.832.681,15	2.883.769.949,85
3	Aset Tetap	1.655.620.758.905,24	1.585.563.162.807,51	70.057.596.097,73
4	Aset Lainnya	9.753.472.001,30	9.240.612.658,34	512.859.342,96
	JUMLAH	1.793.207.956.151,40	1.681.921.440.608,50	111.286.515.542,90

1.1	Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		79.808.122.613,86	41.975.832.461,50

Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.808.122.613,86. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp41.975.832.461,50, maka Aset Lancar 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp37.832.290.152,36 atau 90,13 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 23. Posisi per 31 Desember 2023, yang terdiri dari :

Tabel 23
Rincian Aset Lancar

NO	ASET	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Bertambah / Berkurang
1	Kas di Kasda	30.739.796.985,95	5.996.478.685,03	24.743.318.300,92
2	Kas di Bendahara Penerimaan	54.184.710,00	0,00	54.184.710,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

NO	ASET	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Bertambah / Berkurang
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	106.597.638,00	117.654.963,35	(11.057.325,35)
4	Kas di BLUD	4.630.553.158,00	9.433.167.799,00	(4.802.614.641,00)
5	Kas di Bendahara FKTP	50.562.893,36	106.760.664,04	(56.197.770,68)
6	Kas di Bendahara BOS	103.360.272,61	141.127.761,88	(37.767.489,27)
7	Kas Di Bendahara BOK	1.005.504.340,00	0,00	1.005.504.340,00
8	Piutang Pajak	14.387.211.800,89	13.203.291.618,89	1.183.920.182,00
9	Penyisihan Piutang Pajak	(9.423.107.957,06)	(8.589.943.925,96)	(833.164.031,10)
10	Piutang Retribusi	2.381.629.820,05	2.222.592.720,05	159.037.100,00
11	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.205.141.757,55)	(2.116.932.532,55)	(88.209.225,00)
12	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	9.148.400.299,00	8.939.838.046,06	208.562.252,94
13	Penyisihan Piutang	(4.875.235.527,25)	(3.354.213.367,58)	(1.521.022.159,67)
14	Piutang Transfer Antar Daerah	1.888.035.634,00	4.164.959.705,00	(2.276.924.071,00)
15	Piutang Lainnya	478.049.543,76	248.929.486,66	229.120.057,10
16	Penyisihan Piutang TPTGR lancar	(15.184.672,70)	0,00	(15.184.672,70)
17	Persediaan	31.352.905.432,80	11.462.120.837,63	19.890.784.595,17
	JUMLAH	79.808.122.613,86	41.975.832.461,50	37.832.290.152,36

1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		30.739.796.985,95	5.996.478.685,03

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.739.796.985,95 dan tahun 2022 Rp5.996.478.685,03. Kas di Kas Daerah dengan Rekening pada PT. Bank Maluku Nomor 0201016657 sebesar Rp30.745.848.754,25 dan telah dilakukan rekonsiliasi dengan bank dimana beberapa SP2D telah dicatat oleh BUD, dan kurang dicatat oleh bank atau sebaliknya sebesar Rp6.051.768,30 dapat dilihat pada Lampiran 1.

1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		54.184.710,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 Rp54.184.710,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak terdapat Kas pada Bendahara Penerimaan. Kas pada Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang diterima yang belum disetor ke Kas Daerah. Kas Bendahara Penerimaan pada Badan Badan Pendapatan Daerah telah disetor pada tanggal 23 Februari 2024.

1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		106.597.638,00	117.654.963,35

Dasar penetapan rekening Bendahara Pengeluaran OPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan PT. Bank Maluku Tual untuk Penempatan Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Kas di Bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.597.638,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp117.654.963,35 mengalami penurunan sebesar Rp11.057.325,35 atau 9,40 persen. Kas tersebut merupakan sisa kas dan pajak yang masih berada di Bendahara Pengeluaran OPD dan sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah dan Kas Negara pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 24 di bawah ini :

Tabel 24
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Rincian	Saldo Akhir Tahun 2023
Inspektorat	50.728.119,00
Dinas Koperasi dan UKM	3.142.066,00
Dinas Ketahanan Pangan	722.163,00
Dinas Pemadam Kebakaran	1.162.000,00
Dinas Kebudayaan	2.171.000,00
Dinas Kependudukan dan Capil	33.496.568,00
Sekretariat DPRD	1.999.920,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.302,00
Kec. Hoat Sorbay	24.000,00
Kec. Kei Besar Utara Barat	12.134.500,00
Kec. Kei Besar Selatan	560.000,00
Kec. Kei Besar Utara Timur	456.000,00
Jumlah	106.597.638,00

1.1.1.4	Kas di BLUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		4.630.553.158,00	9.433.167.799,00

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.630.553.158,00. Kas tersebut merupakan kas pada rekening milik BLUD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, jika dibandingkan dengan kas di BLUD tahun 2022 sebesar Rp9.433.167.799,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.802.614.641,00. atau 50,91 persen.

1.1.1.5	Kas di Bendahara FKTP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		50.562.893,36	106.760.664,04

Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas pada rekening pengelolaan dan pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.562.893,36, sedangkan pada tahun 2022 terdapat Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp106.760.664,04 mengalami penurunan sebesar Rp56.197.770,68 atau 52,64 persen, dengan rincian pada Tabel 25 sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Tabel 25

Rincian Kas di Bendahara FKTP

Rincian	Saldo Akhir Tahun 2023
Dinas Kesehatan	36.078.882,00
Puskesmas Ohoijang Watdek (JKN)	0,15
Puskesmas Kolser (JKN)	1.642,70
Puskesmas Ibra (JKN)	1.032,18
Puskesmas Debut (JKN)	544.495,76
Puskesmas Rummat (JKN)	66.663,85
Puskesmas Danar (JKN)	12.663.536,85
Puskesmas Ohoira (JKN)	-
Puskesmas Elat (JKN)	294.796,26
Puskesmas Watsin (JKN)	44.802,37
Puskesmas Ohoiel (JKN)	286.116,80
Puskesmas Matahollat (JKN)	246.391,85
Puskesmas Mun (JKN)	50.483,66
Puskesmas Hoor (JKN)	37.599,75
Puskesmas Weduar (JKN)	9.202,91
Puskesmas Larat Kei (JKN)	80.556,17
Puskesmas Fer (JKN)	-
Puskesmas Hollat (JKN)	153.233,61
Puskesmas Banda Elly (JKN)	3.456,49
Jumlah	50.562.893,36

1.1.1.6 Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	103.360.272,61	141.127.761,88

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas pada rekening penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang langsung disalurkan ke Sekolah-sekolah pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.360.272,61. Pada tahun 2022 terdapat Kas di Bendahara BOS sebesar Rp141.127.761,88. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, maka mengalami penurunan sebesar Rp37.767.489,27 atau 26,76 persen. Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada lampiran 1.2.

1.1.1.7 Kas Di Bendahara BOK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	1.005.504.340,00	0,00

Kas di Bendahara BOK merupakan saldo kas pada rekening penerimaan dana Bantuan Operasional Kesehatan yang langsung disalurkan ke Puskesmas-puskesmas pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Saldo Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.005.504.340,00. Pada tahun 2022 tidak terdapat Kas di Bendahara BOK. Kas di Bendahara BOK dapat dilihat pada Tabel 26 sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Tabel 26
Rincian Kas di Bendahara BOK

Rincian	Saldo Akhir Tahun 2023
Dinas Kesehatan	0,00
Puskesmas Ohoijang Watdek (BOK)	22.549.000,00
Puskesmas Kolser (BOK)	33.697.810,00
Puskesmas Ibra (BOK)	43.159.833,00
Puskesmas Debut (BOK)	153.417.221,00
Puskesmas Rummat (BOK)	11.814.920,00
Puskesmas Danar (BOK)	11.680.185,00
Puskesmas Ohoira (BOK)	412.383.000,00
Puskesmas Elat (BOK)	12.823.400,00
Puskesmas Watsin (BOK)	42.648.132,00
Puskesmas Ohoiel (BOK)	9.421.200,00
Puskesmas Matahollat (BOK)	67.688.000,00
Puskesmas Mun (BOK)	25.238.001,00
Puskesmas Hoor (BOK)	11.280.111,00
Puskesmas Weduar (BOK)	15.061.000,00
Puskesmas Larat Kei (BOK)	59.692.943,00
Puskesmas Fer (BOK)	23.703.000,00
Puskesmas Hollat (BOK)	18.438.955,00
Puskesmas Banda Elly (BOK)	14.167.672,00
Puskesmas Wab (BOK)	1.536.957,00
Puskesmas Ngilngof (BOK)	15.103.000,00
Jumlah	1.005.504.340,00

1.1.3	Piutang Pajak	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		14.387.211.800,89	13.203.291.618,89

Piutang Pajak tahun 2023 sebesar Rp14.387.211.800,89 merupakan piutang atas pajak yang masih harus diterima oleh pemerintah yang berada di wajib pajak. Pada tahun 2022 Piutang Pajak sebesar Rp13.203.291.618,89, jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka mengalami peningkatan sebesar Rp1.183.920.182,00 atau 8,97 persen. Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada lampiran 2.1 dan Tabel 27 sebagai berikut :

Tabel 27
Rincian Piutang Pajak

Rincian	Saldo Akhir Tahun 2023
Piutang Pajak Hotel	412.456.673,00
Piutang Pajak Restoran	1.193.950.681,30
Piutang Pajak Hiburan	1.002.877.280,00
Piutang Pajak Reklame	88.468.665,00
Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri	242.648.552,00



1.1.10.1	Penyisihan Piutang Pajak	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(9.423.107.957,06)	(8.589.943.925,96)

Penyisihan Piutang Pajak tahun 2023 sebesar Rp9.423.107.957,06, jika dibandingkan dengan Penyisihan Piutang Pajak tahun 2022 sebesar Rp8.589.943.925,96, maka terjadi peningkatan sebesar Rp833.164.031,10 atau 9,70 persen. Penambahan ini dikarenakan adanya peningkatan saldo Piutang Pajak sehingga mempengaruhi saldo Penyisihan Piutang Pajak tahun 2023. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada lampiran 2.2.

Piutang Retribusi sebesar Rp2.381.629.820,05 merupakan piutang atas retribusi yang masih harus diterima oleh pemerintah yang masih berada di tangan wajib pajak. Pada tahun 2022 Piutang Retribusi sebesar Rp2.222.592.720,05, jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka mengalami peningkatan sebesar Rp159.037.100,00 atau 7,16 persen. Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada Tabel 28 sebagai berikut :

Rincian	Saldo Akhir Tahun 2023
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	34.108.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	79.800.000,00
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.149.853.350,00
Piutang Retribusi Kepelabuhanan	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Rincian	Saldo Akhir Tahun 2023
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	117.868.470,05
Jumlah	2.381.629.820,05

1.1.10.2	Penyisihan Piutang Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(2.205.141.757,55)	(2.116.932.532,55)

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai melakukan Penyisihan Piutang tahun 2013 untuk menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan. Penyisihan tersebut dilakukan dengan menghitung cadangan piutang yang kemungkinan tidak dapat tertagih berdasarkan umur piutang yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 84 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022.

Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2023 sebesar Rp2.205.141.757,55, jika dibandingkan dengan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2022 sebesar Rp2.116.932.532,55, maka terjadi peningkatan sebesar Rp88.209.225,00 atau 4,17 persen. Penambahan ini dikarenakan adanya penambahan saldo Piutang Retribusi sehingga mempengaruhi saldo Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2022. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi dapat dilihat pada lampiran 2.3

1.1.6	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		9.148.400.299,00	8.939.838.046,06

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2023 sebesar Rp9.148.400.299,00 merupakan piutang atas Lain-Lain PAD yang Sah pada RSUD. Jika dibandingkan dengan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2022 sebesar Rp8.939.838.046,06 mengalami peningkatan sebesar Rp208.562.252,94 atau 2,33 persen.

1.1.10.3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(4.875.235.527,25)	(3.354.213.367,58)

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai melakukan penyisihan piutang dari tahun 2013 untuk menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan. Penyisihan tersebut dilakukan dengan menghitung cadangan piutang yang kemungkinan tidak dapat tertagih berdasarkan umur piutang yang ditetapkan sesuai kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022.

Penyisihan Piutang pada Tahun 2023 sebesar Rp4.875.235.527,25 jika dibandingkan dengan penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2022 sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Rp3.354.213.367,58, maka terjadi peningkatan sebesar Rp1.521.022.159,67 atau 45,35 persen. Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain merupakan total nilai dapat dilihat pada lampiran 2.4.

1.1.8	Piutang Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		1.888.035.634,00	4.164.959.705,00

Piutang Bagi Hasil Pajak Lainnya tahun 2023 sebesar Rp1.888.035.634,00 dan Piutang Bagi Hasil Pajak Lainnya tahun 2022 sebesar Rp4.164.959.705,00 dan terjadi peningkatan sebesar Rp2.276.924.071,00 atau 54,67 persen. Piutang ini merupakan piutang atas Bagi Hasil Provinsi pada Triwulan IV tahun 2023 yang belum dibayarkan.

1.1.9	Piutang Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		478.049.543,76	248.929.486,66

Piutang Lainnya tahun 2023 sebesar Rp478.049.543,76 merupakan bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. sedangkan Piutang Lainnya tahun 2022 sebesar Rp248.929.486,66 dan mengalami peningkatan sebesar Rp229.120.057,10 atau 92,04 persen.

.1.1.10.5	Penyisihan Piutang TPTGR Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(15.184.672,70)	0,00

Penyisihan Piutang TPTGR Lancar pada Tahun 2023 sebesar Rp15.184.672,70. sedangkan penyisihan Piutang TPTGR Lancar pada tahun 2022 masih disatukan dengan Penyisihan Piutang Lainnya.

1.1.12	Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		31.352.905.432,80	11.462.120.837,63

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.352.905.432,80 adalah sisa barang habis pakai, bahan material dan bahan lainnya yang masih ada pada masing-masing OPD berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal 31 Desember 2023. Bila dibandingkan dengan persediaan tahun 2022 sebesar Rp11.462.120.837,63, maka mengalami peningkatan sebesar Rp19.890.784.595,17 atau 173,53 persen. Rekapitan Persediaan dapat dilihat pada Tabel 29 berikut ini. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 3.

Tabel 29
Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023

Rincian	Tahun 2023	Tahun 2022
Alat Tulis Kantor	28.130.187,00	78.820.688,00
BHP/Peralatan	0,00	169.525.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Rincian	Tahun 2023	Tahun 2022
BHP Kesehatan	47.189.621,00	46.710.155,00
Obat - Obatan / Alkes / Alkon / Farmasi	9.363.925.531,80	11.071.247.994,63
Bahan Yang Diserahkan ke Masyarakat	21.895.160.093,00	29.700.000,00
Bahan Makanan	0,00	14.862.000,00
Alat Kebersihan	18.500.000,00	17.655.000,00
Peralatan/Mesin/Alat Listrik	0,00	33.600.000,00
Jumlah	31.352.905.432,80	11.462.120.837,63

Secara rinci total persediaan per OPD dapat dilihat pada Tabel 30 dibawah ini :

Tabel 30
Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 Per OPD

OPD	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan	16.475.063.093,00	5.033.800,00
Dinas Kesehatan	4.799.825.360,00	6.903.239.855,10
Puskesmas Ohoijang Watdek	79.950.529,00	0,00
Puskesmas Kolser	44.482.194,00	0,00
Puskesmas Ibra	47.563.135,00	0,00
Puskesmas Rumat	75.263.962,00	0,00
Puskesmas Danar	22.652.395,00	0,00
Puskesmas Ohoira	20.169.060,00	0,00
Puskesmas Debut	75.125.409,00	0,00
Puskesmas Elat	81.709.639,00	0,00
Puskesmas Watsin	74.140.705,00	0,00
Puskesmas Ohoiel	31.862.534,00	0,00
Puskesmas Mataholat	21.794.912,00	0,00
Puskesmas Holat	45.311.973,00	0,00
Puskesmas Banda Ely	39.099.853,00	0,00
Puskesmas Mun	25.430.872,00	0,00
Puskesmas Hoor	37.578.923,00	0,00
Puskesmas Weduar	41.023.721,00	0,00
Puskesmas Larat	18.593.326,80	0,00
Puskesmas Wab	57.619.507,00	0,00
Puskesmas Ngilngof	68.840.851,00	0,00
Puskesmas Feer	44.708.401,00	0,00
RSUD	3.621.074.207,00	4.254.902.339,53
Dinas Peumahan dan Kawasan Pemukiman	5.055.932.500,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.416.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	162.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

OPD	Tahun 2023	Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	356.250,00	0,00
Badan Lingkungan Hidup	16.500.000,00	29.700.000,00
Dinas Kependudukan dan Capil	1.000.000,00	202.555.408,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	250.559.621,00	46.710.155,00
Dinas Perikanan	970.000,00	0,00
Dinas Pariwisata	165.612.000,00	0,00
Dina Perhubungan	0,00	3.680.000,00
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	132.000,00	4.044.780,00
Inspektorat	2.276.500,00	2.801.500,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.800.000,00	2.625.000,00
Badan Pendapatan Daerah	6.586.000,00	630.000,00
Kecamatan Kei Besar Selatan	306.000,00	610.000,00
Kec. Kei Kecil Timur Selatan	535.000,00	
Kecamatan Kei Besar Utara Timur	455.000,00	
Kecamatan Kei Besar Utara Barat	0,00	295.000,00
Kecamatan Kei Besar	0,00	715.000,00
Jumlah	31.352.905.432,80	11.462.120.837,63

1.2 Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	48.025.602.631,00	45.141.832.681,15

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berupa investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Investasi Jangka Panjang dalam tahun 2023 sebesar Rp48.025.602.631,00, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp45.141.832.681,15 maka mengalami peningkatan sebesar Rp2.883.769.949,85 atau 6,39 persen. Investasi Jangka Panjang tahun 2023 terdiri dari :

- a. Investasi Non Permanen Rp0.00
Jumlah saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara per 31 Desember 2023 dari Investasi Non Permanen adalah Rp0,00
- b. Investasi Permanen Rp48.025.602.631,00
Berdasarkan PSAP nomor 06 tentang Akuntansi Investasi yang menyatakan bahwa metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20 persen menggunakan metode biaya;
 - 2) Kepemilikan 20 persen sampai 50 persen, atau kepemilikan kurang dari 20 persen tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

- 3) Kepemilikan lebih dari 50 persen menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Investasi Permanen sebesar Rp48.025.602.631,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada PT. Bank Maluku dan PDAM Kabupaten Maluku Tenggara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal pada PT. Bank Maluku sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 26 Tahun 2012 adalah senilai Rp30.000.000.000,00 hingga 31 Desember 2023, sedangkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada PT. Bank Maluku adalah sebesar Rp28.921.000.000,00. Pada Tahun 2023 penyertaan modal ke Bank Maluku.
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada PT. Bank Maluku rincian sebagai berikut:
 - 1) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 1999 sebesar Rp2.815.682.040,00;
 - 2) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp1.154.658.980,00;
 - 3) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.380.000.000,00;
 - 4) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp500.000.000,00;
 - 5) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp250.000.000,00;
 - 6) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.820.658.980,00;
 - 7) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - 8) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - 9) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.000.000.000,00;
 - 10) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00.
 - 11) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00.
 - 12) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00
 - 13) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00
 - 14) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00
 - 15) PT. Bank Maluku Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00
- c. Sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2023 (*Unaudited*), jumlah Ekuitas PDAM adalah sebesar Rp19.104.602.631,00 dengan persentase kepemilikan oleh Pemerintah Daerah sebesar 87.64 persen. Perhitungan kepemilikan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada PDAM Kabupaten Maluku Tenggara menggunakan Metode Ekuitas

1.3	Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		1.655.620.758.905,24	1.585.563.162.807,51

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Maluku



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Tenggara dan pelayanan masyarakat. Aset tetap diakui sebesar harga perolehannya ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengamanan aset tersebut. Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai biaya pada saat biaya tersebut dibayar atau dikeluarkan. Untuk pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset tetap atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas dilakukan kapitalisasi. Aset dalam penyelesaian atau Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diakui sebesar harga perolehan. Penerimaan dari hasil Penjualan Aset Tetap yang tidak terpakai, apabila ada, dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam Pos Lain-lain PAD yang Sah dan Aset Tetap yang bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Inventaris Daerah.

Mutasi Aset Tetap selama tahun berasal dari perolehan aset tetap 2023 dan perolehan lain terdiri atas :

- 1. penambahan aset yang melalui pelaksanaan program kegiatan tahun hibah dan penerimaan fasilitas umum;
- 2. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pengurangan aset yang merupakan Aset Tetap yang dihapuskan;
- 3. mutasi antar SKPD dan antar jenis;
- 4. koreksi atas pencatatan Aset Tetap sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2023 terus melakukan penatausahaan aset tetap. Dengan demikian, maka aset yang disajikan dalam Neraca ini telah mengacu pada Laporan Hasil Penatausahaan Aset tersebut dan Laporan Barang Pengguna Tahun 2023. Berdasarkan kedua jenis dokumen tersebut, maka Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara per 31 Desember 2023 berjumlah sebesar Rp1.655.620.758.905,24. Jika dibandingkan dengan Aset Tetap tahun 2022, maka mengalami peningkatan sebesar Rp70.057.596.097,73 atau 4,42 persen. Aset Tetap dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 31 di bawah ini dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 4.

Tabel 31
Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Per 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023
		Koreksi Tambah	Koreksi kurang	
Tanah	116.931.607.761,00	2.160.000.000,00	365.473.272,00	118.726.134.489,00
Peralatan dan Mesin	427.795.386.778,03	34.586.569.655,00	2.778.074.378,60	459.603.882.054,43
Gedung dan Bangunan	567.470.448.370,76	84.471.876.608,00	28.620.959.710,00	623.321.365.268,76
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.305.246.544.566,72	101.108.250.105,30	1.752.055.000,00	1.404.602.739.672,02
Aset Tetap Lainnya	28.074.826.306,56	959.185.103,00	394.370.000,00	28.639.641.409,56



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Konstruksi Dalam Pengerjaan	150.922.692.581,00	16.136.350.820,00	7.491.725.133,00	159.567.318.268,00
Akumulasi Penyusutan	(1.010.878.343.556,56)	(130.234.443.599,07)	(2.272.464.899,10)	(1.138.840.322.256,53)
Jumlah	1.585.563.162.807,51	109.187.788.692,23	39.130.192.594,50	1.655.620.758.905,24

1.3.1 Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	118.726.134.489,00	116.931.607.761,00

Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp118.726.134.489,00 adalah merupakan saldo aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara per 31 Desember 2023 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai yang meliputi antara lain harga pembelian dan biaya untuk memperoleh hak yang berhubungan dengan pengukuran. Rincian saldo tanah dapat dilihat pada tabel 32 sebagai berikut.

Tabel 32
Rincian Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo per 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023
		Koreksi Tambah	Koreksi kurang	
Tanah	116.931.607.761,00	2.160.000.000,00	365.473.272,00	118.726.134.489,00
Jumlah	116.931.607.761,00	2.160.000.000,00	365.473.272,00	118.726.134.489,00

Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp118.726.134.489,00 jika dibandingkan dengan saldo Awal Aset Tetap Tanah Sebesar Rp116.931.607.761,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.794.526.728,00 atau 1,53 persen. Penambahan tersebut terdiri Mutasi Masuk sebesar Rp2.160.000.000,00 dan dikurangi dengan Mutasi Kurang sebesar Rp365.473.272,00. Rincinan dapat dijelaskan pada tabel 33 sebagai berikut :

Tabel 33
Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	116.931.607.761,00
II	Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	0,00
III	MUTASI TAMBAH	
	Pencatatan Tanah atas Tanah UF	2.160.000.000,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	2.160.000.000,00
IV	MUTASI KURANG	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

	Hibah Keluar ke Kesatuan Brimob Kabupaten Maluku Tenggara	110.000.000,00
	Koreksi Nilai Aset Tanah Lebih Catat	255.473.272,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	365.473.272,00
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 (I + II + V)	118.726.134.489,00

1.3.2	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		459.603.882.054,43	427.795.386.778,03

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp459.603.882.054,43 adalah merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara per 31 Desember 2023 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan aset tersebut siap dipakai yang tersebar di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 34 di bawah ini :

Tabel 34

Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo per 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023
		Koreksi Tambah	Koreksi kurang	
Peralatan dan Mesin	427.795.386.778,03	34.586.569.655,00	2.778.074.378,60	459.603.882.054,43
Jumlah	427.795.386.778,03	34.586.569.655,00	2.778.074.378,60	459.603.882.054,43

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp459.603.882.054,43, jika dibandingkan dengan saldo Awal Aset Tetap Peralatan Mesin Sebesar Rp427.795.386.778,03, mengalami peningkatan sebesar Rp31.808.495.276,40 atau 7,44 persen. Penambahan tersebut terdiri atas belanja Modal Aset Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 sebesar Rp26.629.682.986,00 dan penambahan lainnya sebesar Rp7.956.886.669,00 dikurangi dengan Mutasi Kurang sebesar Rp2.778.074.378,60. Rincian Aset Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan pada tabel 35 sebagai berikut :

Tabel 35

Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	427.795.386.778,03
II	BELANJA MODAL T.A 2023	26.629.682.986,00
III	MUTASI TAMBAH	
	Penerimaan Hibah	54.069.909,00
	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa terdiri atas :	51.517.000,00
	Utang Belanja Modal PM	74.317.400,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

	Reklasifikasi antar Aset Tetap	7.247.907.360,00
	Tambahan Aset dari Belanja Barang diserahkan	529.075.000,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	7.956.886.669,00
IV	MUTASI KURANG	
	Intra ke Extracom Saldo Awal	465.725.675,60
	Bukan Kategori Belanja Modal	1.548.649.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap	763.699.703,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	2.778.074.378,60
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	459.603.882.054,43

1.3.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	623.321.365.268,76	567.470.448.370,76

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp567.470.448.370,76 adalah merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara per 31 Desember 2023 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan aset tersebut siap dipakai dan tersebar di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 36 berikut :

Tabel 36

Rincian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo per 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023
		Koreksi Tambah	Koreksi kurang	
Gedung dan Bangunan	567.470.448.370,76	84.471.876.608,00	28.620.959.710,00	623.321.365.268,76
Jumlah	567.470.448.370,76	84.471.876.608,00	28.620.959.710,00	623.321.365.268,76

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp623.321.365.268,76, jika dibandingkan dengan saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sebesar Rp567.470.448.370,76 mengalami peningkatan sebesar Rp55.850.916.898,00 atau 9,84 persen. Jika dibandingkan dengan belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp76.615.372.183,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.764.455.285,00 yang dapat dijelaskan bahwa penambahan ini disebabkan karena adanya mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.856.504.425,00 dikurang mutasi kurang sebesar Rp28.620.959.710. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dijelaskan pada tabel 37 sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Tabel 37

Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	567.470.448.370,76
II	BELANJA MODAL	76.615.372.183,00
III	MUTASI TAMBAH	
	Reklas Antar Aset	483.135.000,00
	Barang Jasa Jadi Aset Tetap	2.656.051.387,00
	Pengakuan Hutang	4.717.318.038,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	7.856.504.425,00
IV	MUTASI KURANG	
	Penghapusan Gedung Bangunan atas Pembangunan Pasar Langgur	5.679.948.530,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap	22.941.011.180,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	28.620.959.710,00
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	623.321.365.268,76

1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		1.404.602.739.672,02	1.305.246.544.566,72

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.305.246.544.566,72 adalah saldo aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara per 31 Desember 2022 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan aset tersebut siap dipakai yang tersebar di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel 38 di bawah ini :

Tabel 38

Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo per 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023
		Koreksi Tambah	Koreksi kurang	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.305.246.544.566,72	101.108.250.105,30	1.752.055.000,00	1.404.602.739.672,02
Jumlah	1.305.246.544.566,72	101.108.250.105,30	1.752.055.000,00	1.404.602.739.672,02

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.404.602.739.672,02. Jika dibandingkan dengan Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.305.246.544.566,72 mengalami peningkatan sebesar Rp99.356.195.105,30 atau 7,61 persen. Jika dibandingkan dengan Belanja Modal Aset



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp87.929.442.922,24 mengalami peningkatan sebesar Rp11.426.752.183,06 yang disebabkan karena adanya mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp13.178.807.183,06 dikurangi dengan mutasi kurang sebesar Rp1.752.055.000,00. Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan pada tabel 39 sebagai berikut :

Tabel 39
Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	1.305.246.544.566,72
II	BELANJA MODAL	87.929.442.922,24
III	MUTASI TAMBAH	
	KDP Selesai	7.491.725.133,00
	Reklasifikasi Antar Aset tetap	931.400.000,00
	Barang Jasa Jadi Aset	3.815.250.000,00
	Pengakuan Utang	940.431.850,05
	Kurang Catat	200,01
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	13.178.807.183,06
IV	MUTASI KURANG	
	Penghapusan Jalan Jaringan atas Pembangunan Pasar Langgur	1.009.968.000,00
	Reklasifikasi aset tetap	617.776.000,00
	Bukan Kategori Belanja Modal	124.311.000,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	1.752.055.000,00
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	1.404.602.739.672,02

1.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	28.639.641.409,56	28.074.826.306,56

Saldo Aset Tetap lainnya sebesar Rp28.639.641.409,56 merupakan saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara per 31 Desember 2023 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai dengan aset tersebut siap dipakai yang tersebar di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Rincian aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam tabel 40 berikut ini:

Tabel 40
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo per 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023
		Koreksi Tambah	Koreksi kurang	
Aset Tetap Lainnya	28.074.826.306,56	959.185.103,00	394.370.000,00	28.639.641.409,56
Jumlah	28.074.826.306,56	959.185.103,00	394.370.000,00	28.639.641.409,56



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.639.641.409,56 jika dibandingkan dengan Saldo Awal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.074.826.306,56 mengalmi peningkatan sebesar Rp564.815.103,00 atau 2,01 persen. Jika dibandingkan dengan Belanja Modal sebesar Rp 735.620.000,00, mengalami penurunan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui mutasi aset sebesar Rp170.804.897,00. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp223.565.103,00 dikurangi dengan mutasi kurang sebesar Rp394.370.000,00. Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan pada tabel 41 sebagai berikut :

Tabel 41
Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	28.074.826.306,56
II	BELANJA MODAL	735.620.000,00
III	MUTASI TAMBAH	
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	223.564.703,00
	Kurang Catat	400,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	223.565.103,00
IV	MUTASI KURANG	
	Reklasifikasi antar Aset	236.324.000,00
	Bukan Katagori Belanja Modal	158.046.000,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	394.370.000,00
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	28.639.641.409,56

1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		159.567.318.268,00	150.922.692.581,00

Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp 159.567.318.268,00 adalah merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023. KDP pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp8.644.625.687,00 atau 5,73 persen. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun per 31 Desember 2023 sebagian sudah dapat diselesaikan. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam tabel 42 berikut ini:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Tabel 42

Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo per 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023
		Koreksi Tambah	Koreksi kurang	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	150.922.692.581,00	16.136.350.820,00	7.491.725.133,00	159.567.318.268,00
Jumlah	150.922.692.581,00	16.136.350.820,00	7.491.725.133,00	159.567.318.268,00

Saldo Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp159.567.318.268,00. Rincian Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan pada tabel 43 sebagai berikut :

Tabel 43

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	150.922.692.581,00
II	MUTASI TAMBAH	
	Reklas antar Aset	16.136.350.820,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	16.136.350.820,00
III	MUTASI KURANG	
	KDP Selesai	7.491.725.133,00
IV	MUTASI KURANG	7.491.725.133,00
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	159.567.318.268,00

1.3.7	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(1.138.840.322.256,53)	(1.010.878.343.556,56)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan Penyusutan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan pendekatan bulanan, dengan Laporan Penyusutan secara Semesteran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Akumulasi Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp1.138.840.322.256,53. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 44 berikut :

Tabel 44
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo per 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023
		Koreksi Tambah	Koreksi kurang	
Penyusutan	(1.010.878.343.556,56)	(130.234.443.599,07)	(2.272.464.899,10)	(1.138.840.322.256,53)
Jumlah	(1.010.878.343.556,56)	(130.234.443.599,07)	(2.272.464.899,10)	(1.138.840.322.256,53)

Pengakuan terhadap penyusutan aset telah diakui pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sejak tahun 2015. Hal ini merupakan dampak dari penerapan basis akuntansi akrual secara menyeluruh. Saldo Akumulasi Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp1.138.840.322.256,53 merupakan penjumlahan atas penambahan Beban Penyusutan Aset Tetap semester I dan II sebesar Rp130.234.443.599,07 dikurangi dengan Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Penghapusan dan Kelebihan Pencatatan Aset sebesar Rp2.272.464.899,10. Jika dibandingkan dengan Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp1.010.878.343.556,56, maka akan mengalami peningkatan sebesar Rp127.961.978.699,97 atau 12,66 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 45 berikut ini:

Tabel 45
Saldo Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
I	SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	(1.010.878.343.556,56)
II	MUTASI TAMBAH	
	Beban Penyusutan Aset Tetap	(130.234.443.599,07)
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	(130.234.443.599,07)
III	MUTASI KURANG	
	Koreksi kurang catat Penyusutan	(2.272.464.899,10)
	JUMLAH MUTASI KURANG	(2.272.464.899,10)
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	(1.138.840.322.256,53)

Adapun Rincian Penyusutan perjenis Aset tetap dapat dilihat pada tabel 46 dibawah ini :

Tabel 46
Akumulasi Penyusutan

Rincian	Saldo Akhir Tahun 2023
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(343.152.534.135,78)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(103.655.739.159,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(692.032.048.961,75)
Jumlah	1.138.840.322.256,53



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

1.5 Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	9.753.472.001,30	9.240.612.658,34

Aset Lainnya termasuk dalam kategori Aset Non Lancar lainnya, termasuk didalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, piutang TGR yang akan diterima lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Jumlah aset lainnya tahun 2023 sebesar Rp9.753.472.001,30 jika dibandingkan dengan saldo aset lainnya tahun 2022 sebesar Rp9.240.612.658,34, maka terdapat peningkatan sebesar Rp512.859.342,96 atau 5,55 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset tak berwujud dan amortisasi aset tak berwujud serta Tuntutan Ganti Rugi dan Penyisihan Piutang Lainnya. Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel 47 sebagai berikut :

Tabel 47
Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Per 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023
		Koreksi Tambah	Koreksi kurang	
Piutang Penjualan Angsuran	1.777.250.963,10	0,00	5.750.000,00	1.771.500.963,10
Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran	(1.777.250.963,10)	0,00	(5.750.000,00)	(1.771.500.963,10)
Tuntutan Ganti Rugi	3.525.070.716,81	127.944.250,00	0,00	3.653.014.966,81
Penyisihan Piutang TPGR	(3.431.688.687,10)	0,00	93.382.029,71	(3.525.070.716,81)
Aset Tak Berwujud	10.960.440.288,00	1.672.129.000,00	0,00	12.632.569.288,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.204.775.375,67)	0,00	(164.191.315,67)	(4.040.584.060,00)
Aset Lain – Lain	19.511.308.683,28	0,00	1.358.023.193,00	18.153.285.490,28
Penyusutan Aset Lainnya	(16.172.516.066,98)	0,00	0,00	(16.172.516.066,98)
Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Non Lancar	(947.226.900,00)	0,00	0,00	(947.226.900,00)
Jumlah	9.240.612.658,34	1.800.073.250,00	1.287.213.907,04	9.753.472.001,30

1.5.1.1 Piutang Penjualan Angsuran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	1.771.500.963,10	1.777.250.963,10

Piutang Penjualan Angsuran merupakan Tagihan atas Rumah Guru dan Rumah Pemda tahun 2023 sebesar Rp1.771.500.963,10, jika dibandingkan dengan saldo awal Piutang Penjualan Angsuran tahun 2022 sebesar Rp1.777.250.963,10 mengalami penurunan sebesar Rp5.750.000,00 atau 0,32 persen yang merupakan penyetoran atas angsuran rumah pemda, dengan rincian tabel 48 dibawah ini :



Tabel 48

Rincian Saldo Piutang Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2023

RINCIAN	Tahun 2023
Angsuran Rumah Dinas Daerah Golongan III	1.771.500.963,10
JUMLAH	1.771.500.963,10

1.5.1.2	Penyisihan Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Penjualan Angsuran	(1.771.500.963,10)	(1.777.250.963,10)

Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran merupakan penyisihan atas Rumah Guru dan Rumah Pemda tahun 2023 sebesar Rp1.771.500.963,10, jika dibandingkan dengan Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran tahun 2022 sebesar Rp1.777.250.963,10 mengalami penurunan sebesar Rp5.750.000,00, atau 0,32 persen dengan rincian dapat dilihat pada tabel 49 dan lampiran 5.

Tabel 49

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran

Per 31 Desember 2023

RINCIAN	Tahun 2022
Angsuran Rumah Dinas Daerah Golongan III	(1.771.500.963,10)
JUMLAH	(1.771.500.963,10)

1.5.1.3	Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		3.653.014.966,81	3.525.070.716,81

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dan pihak lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atau suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara dan pihak lain tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) tahun 2023 sebesar Rp3.653.014.966,81 bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3.525.070.716,81, maka mengalami peningkatan sebesar Rp127.944.250,00 atau 3,63 persen.

1.4.4	Penyisihan Piutang Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(3.525.070.716,81)	(3.431.688.687,10)

Penyisihan Piutang lainnya merupakan penyisihan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) tahun 2023 sebesar Rp3.525.070.716,81, jika



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

dibandingkan dengan Penyisihan Piutang lainnya tahun 2021 sebesar Rp3.431.688.687,10 mengalami peningkatan sebesar Rp93.382.029,71 atau 2,72 persen. Rincian dapat dilihat pada lampiran 6.

1.5.3	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		12.632.569.288,00	10.960.440.288,00

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, meliputi:

- a. *Software* komputer;
- b. *Lisensi* dan *franchise*;
- c. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya;
- d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Aset Tidak Berwujud (ATB) Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak berwujud yang berada pada KTSP, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Badan Pendapatan Daerah.

Aset Tak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp12.632.569.288,00 jika dibandingkan dengan Aset Tak Berwujud Tahun 2022 sebesar Rp10.960.440.288,00, maka Aset Tak Berwujud mengalami peningkatan sebesar Rp1.672.129.000,00 atau 15,26 persen yang disebabkan karena penambahan belanja asset tak berwujud pada tahun 2023.

1.5.5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(4.040.584.060,00)	(4.204.775.375,67)

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat Aset Tak Berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp4.040.584.060,00, jika dibandingkan dengan Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 sebesar Rp4.204.775.375,67, maka Amortisasi Aset Tak Berwujud mengalami penurunan sebesar Rp164.191.315,67 atau 3,90 persen

1.5.4	Aset Lain-lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		18.153.285.490,28	19.511.308.683,28

Aset Lain-lain merupakan aset dengan kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan direncanakan untuk dilakukan penghapusan serta aset-aset lain yang sudah tidak tergolong dalam kriteria aset lancar maupun aset tetap.

Aset Lain-lain merupakan Aset yang kondisi sudah rusak berat yang direklas dari Aset Peralatan dan Mesin yang dimaksudkan untuk dihapus, tetapi di dalam asset lain-lain tidak hanya mencatat asset yang rusak berat tetapi ada revolving pada Dinas Koperasi dan Dinas Perikanan dan UUDP tahun sebelumnya yang belum di SKTJM.

Aset ain-lain tahun 2023 sebesar Rp18.153.285.490,28, jika dibandingkan dengan Aset lain-lain tahun 2022 sebesar Rp19.511.308.683,28, maka mengalami peningkatan sebesar Rp1.358.023.193,00 atau 6,96 persen.

1.5.6	Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(16.172.516.066,98)	(16.172.516.066,98)

Penyusutan Aset Lain-lain merupakan Aset yang kondisi sudah rusak berat yang direklas dari Aset Peralatan dan Mesin yang dimaksudkan untuk dihapus.

Koperasi dan Dinas Perikanan dan UUDP tahun sebelumnya yang belum di SKTJM. Penyusutan Aset Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp16.172.516.066,98, jika dibandingkan dengan Penyusutan Aset Lain tahun 2022 sebesar Rp16.172.516.066,98, maka tidak mengalami perubahan.

1.4.9	Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Non Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(947.226.900,00)	(947.226.900,00)

Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Non Lancar merupakan penyisihan piutang atas pajak dan retribusi yang tak tertagih dan dimaksudkan untuk dihapus. Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Non Lancar pada tahun 2023 sebesar Rp947.226.900,00, jika



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

dibandingkan dengan Penyusutan Aset Lain tahun 2022 sebesar Rp947.226.900,00, maka tidak mengalami perubahan.

2	Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		22.193.903.871,14	59.472.396.786,10

Saldo kewajiban adalah merupakan nilai saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp22.193.903.871,14 yang terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Pinjaman, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. jika dibandingkan dengan Kewajiban tahun 2022 sebesar Rp59.472.396.786,10, maka mengalami penurunan sebesar Rp37.278.492.914,96 atau 62,68 persen.

2.1	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		22.193.903.871,14	59.472.396.786,10

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp22.193.903.871,14 terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Utang Beban. Rincian Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat pada tabel 50 sebagai berikut :

Tabel 50
Rincian Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2023

Rincian	2023	2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	425.658.778,09	29.981.964,09
Utang Pinjaman	0,00	48.269.873.705,00
Utang Belanja	15.749.252.805,00	10.682.530.877,01
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.018.992.288,05	490.010.240,00
Jumlah	22.193.903.871,14	59.472.396.786,10

2.1.1	Utang PFK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		425.658.778,09	29.981.964,09

Saldo akhir Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp425.658.778,09 merupakan pajak yang belum disetorkan pada tahun 2023 yang ada pada bendahara pengeluaran Dinas pada beberapa OPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir Tahun Anggaran 2023. Jika dibandingkan dengan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2022 sebesar Rp29.981.964,09, maka terjadi peningkatan sebesar Rp395.676.814,00 atau 1.319,72 persen. Rincian Utang PFK dapat dilihat pada table 51 sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Tabel 51
Rincian Utang PFK Per 31 Desember 2023

Rincian	Saldo Akhir Tahun 2023
Kas Di Kas Daerah	419.815.642,09
Dinas Koperasi dan UKM	3.142.066,00
Dinas Ketahanan Pangan	722.070,00
Dinas Pemadam Kebakaran	867.000,00
Dinas Kependudukan dan Capil	72.000,00
Kec. Hoat Sorbay	24.000,00
Kec. Kei Besar Selatan	560.000,00
Kec. Kei Besar Utara Timur	456.000,00
Jumlah	425.658.778,09

2.1.2	Utang Pinjaman	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		0,00	48.269.873.705,00

Saldo Utang Pinjaman merupakan *Outstanding* yaitu nilai penarikan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp48.269.873.705,00 dikurangi nilai yang sudah dibayarkan sebesar Rp48.269.873.688,00 terdapat selisih sebesar Rp17,00 dan telah dilakukan koreksi sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

2.1.6	Utang Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		15.749.252.805,00	10.682.530.877,01

Saldo akhir Utang Belanja sebesar Rp15.749.252.805,00 merupakan Utang belanja atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Jika dibandingkan dengan Utang Beban tahun 2022 sebesar Rp10.682.530.877,01, maka terjadi peningkatan sebesar Rp5.066.721.927,99 atau 47,43 persen. Secara rinci Utang Beban dapat dilihat pada lampiran 7.

2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		6.018.992.288,05	490.010.240,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.018.992.288,05 merupakan utang Belanja Modal tahun 2023 dan akan dibayarkan di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Utang Belanja tahun 2022 sebesar Rp490.010.240,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp5.528.982.048,05 atau 1.128,34 persen. Utang Jangka Pendek Lainnya secara rinci dapat dilihat pada table 52 sebagai berikut :



Tabel 52
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2023

Rincian	Saldo Akhir Tahun 2023
Dinas Pendidikan	419.815.642,09
Dinas Kesehatan	3.142.066,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	722.070,00
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	867.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	72.000,00
Sekretariat DPRD	24.000,00
Jumlah	5.794.227.288,05

3	Ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		1.771.014.052.280,26	1.622.449.043.822,40

Ekuitas merupakan Kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp1.793.207.956.151,40 dan kewajiban sebesar Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp22.193.903.871,14. Pada 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyajikan Ekuitas Dana Tahun 2023 dalam neraca adalah sebesar Rp1.771.014.052.280,26. Jika dibandingkan dengan Ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1.622.449.043.822,40, maka terjadi peningkatan sebesar Rp148.565.008.457,86 atau 9,16 persen. Secara rinci peningkatan ekuitas Tahun 2023 dijelaskan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1	Ekuitas Awal	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		1.622.449.043.822,40	1.584.894.572.266,47

Saldo Ekuitas Awal tahun 2023 sebesar Rp1.622.449.043.822,40 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Ekuitas Awal tahun 2022 sebesar Rp1.584.894.572.266,47, maka terjadi peningkatan sebesar Rp37.554.471.555,93 atau 2,37 persen.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

3.2	Surplus/Defisit-LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		153.489.669.906,38	38.662.739.753,17

Surplus/defisit-LO sebesar Rp153.489.669.906,38 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO tahun 2022 sebesar Rp38.662.739.753,17, maka terjadi peningkatan sebesar Rp114.826.930.153,21 atau 297,00 persen.

3.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(4.924.661.448,52)	(1.108.268.197,24)

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar adalah Koreksi Nilai Ekuitas Lainnya merupakan nilai selisih karena adanya Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp4.924.661.448,52 merupakan Koreksi Nilai Ekuitas Awal Lainnya. Jika dibandingkan dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan tahun 2022 sebesar Rp1.108.268.197,24, maka terjadi peningkatan sebesar Rp3.816.393.251,28 atau 344,36 persen. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan sebesar Rp4.924.661.448,52 terdiri dari :

- Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan sebesar	Rp(928.500.000,00)
- Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap sebesar	Rp (5.246.587.493,52)
- Koreksi Nilai Ekuitas Awal Lainnya sebesar	<u>Rp 1.250.426.045,00.</u>
Jumlah	Rp (4.924.661.448,52)

3.4	Ekuitas Akhir	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		1.771.014.052.280,26	1.622.449.043.822,40

Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 sebesar Rp1.771.014.052.280,26 merupakan hasil penjumlahan Saldo Awal Ekuitas, Surplus/Defisit, dan Dampak Kumulatif. Jika dibandingkan dengan Ekuitas Awal tahun 2022 sebesar Rp1.584.894.572.266,47, maka terjadi peningkatan sebesar Rp37.554.471.555,93 atau 2,37 persen.

C. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian secara wajar. Di samping itu Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya serta dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

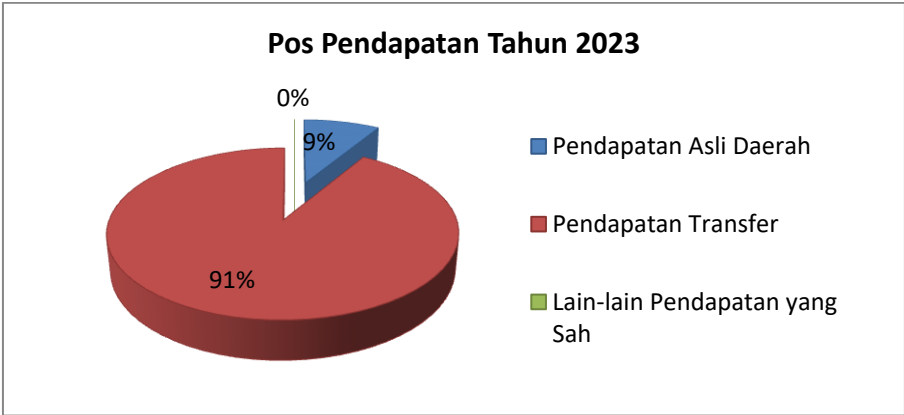
4.	Pendapatan	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		1.070.994.876.368,00	999.216.392.889,62	893.152.891.160,53

Realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp999.216.392.889,62. Realisasi pendapatan tersebut di atas tidak mencapai target dari yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp1.070.994.876.386,00 atau 93,30 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp893.152.891.160,53, maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp106.063.501.729,09 atau 11,88 persen. Realisasi Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 yang dapat dilihat pada tabel 53 dan perbandingan masing-masing pendapatan dapat dilihat pada grafik 4 dibawah ini :

Tabel 53
Pendapatan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Pendapatan Asli Daerah	92.477.624.904,00	73.801.232.072,00	79,80	54.893.896.521,42
2	Pendapatan Transfer	978.517.251.464,00	925.415.160.817,62	94,57	827.374.566.189,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	10.884.428.450,11
	Jumlah	1.070.994.876.368,00	999.216.392.889,62	93,30	893.152.891.160,53

Grafik 4
Perbandingan Pos-Pos Pendapatan Tahun Anggaran 2023



Grafik 4 menggambarkan perbandingan capaian realisasi terhadap total, masing – masing adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar 6 persen, Pendapatan Transfer sebesar 93 persen dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1 persen. Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		92.477.624.904,00	73.801.232.072,00	54.893.896.521,42

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp73.801.232.072,00. Realisasi PAD tersebut tidak melampaui target yang dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp92.477.624.904,00 atau 79,80 persen. Jika dibandingkan dengan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp54.893.896.521,42, maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp18.907.335.550,58 atau 34,44 persen. Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 54 dibawah ini :

Tabel 54
Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Pajak Daerah	47.218.977.384,00	11.190.143.473,00	23,70	12.056.543.681,00
2	Retribusi Daerah	6.553.042.000,00	1.992.498.500,00	30,41	2.559.104.600,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.446.735.017,00	6.446.735.017,00	100,00	3.211.782.587,06
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.258.870.503,00	54.171.855.082,00	167,93	37.066.465.653,36
	Jumlah	92.477.624.904,00	73.801.232.072,00	79,80	54.893.896.521,42

Pendapatan Asli Daerah secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		47.218.977.384,00	11.190.143.473,00	12.056.543.681,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Realisasi pajak daerah pada tahun 2023 sebesar Rp11.190.143.473,00 tidak mencapai target bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp47.218.977.384,00 atau 23,70 persen. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target pendapatan pada Pajak Reklame, Pajak Mineral Batuan bukan Logam, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp12.056.543.681,00, maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp866.400.208,00 atau 7,19 persen. Rincian Realisasi Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel 55 dibawah ini :

Tabel 55
Pendapatan Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Pajak Air Permukaan	0,00	21.001.041,00		0,00
2	Pajak Hotel	2.383.264.544,00	770.503.116,00	32,33	795.263.105,00
3	Pajak Restoran	2.400.000.000,00	1.875.570.599,00	78,15	2.146.467.387,00
4	Pajak Hiburan	1.322.416.780,00	309.629.500,00	23,41	326.869.500,00
6	Pajak Reklame	683.654.990,00	148.480.050,00	21,72	119.667.025,00
7	Pajak Penerangan Jalan	3.126.811.660,00	2.610.017.985,00	83,47	2.502.419.204,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
8	Pajak Parkir	74.449.200,00	77.053.000,00	103,50	72.386.200,00
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	11.200.000.000,00	4.432.753.000,00	39,58	4.921.175.000,00
10	Pajak Bumi dan bangunan	22.312.296.940,00	799.852.982,00	3,58	951.068.810,00
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.716.083.270,00	145.282.200,00	3,91	221.227.450,00
JUMLAH		47.218.977.384,00	11.190.143.473,00	23,70	12.056.543.681,00

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa semua pos Pajak tidak melampaui target penerimaan yang ditetapkan. Pendapatan Pajak dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pajak Air Permukaan
Realisasi Pajak Pajak Air Permukaan pada tahun 2023 sebesar Rp21.001.041,00. Pada tahun anggara 2023 tidak ditetapkan besaran target anggaran untuk merealisasikan Pajak Air Permukaan.
- b. Pajak Hotel
Realisasi Pajak Hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2012, pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp770.503.116,00 dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.383.264.544,00 atau 32,33 persen. Jika dibandingkan dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp795.263.105,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp24.759.989,00 atau 3,11 persen. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya volume pengunjung dari luar daerah.
- c. Pajak Restoran
Realisasi Pajak Restoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2012, pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.875.570.599,00 dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp2.400.000.000,00 atau 78,15 persen. Jika dibandingkan dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.146.467.387,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp270.896.788,00 atau 12,62 persen. Pada tahun 2023 Realisasi Pajak Restoran tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penurunan target yang ditetapkan lebih rendah bila dibandingkan dengan target anggaran tahun 2022 yakni Rp3.600.248.936,00 atau sebesar 33,34 persen sehingga berpengaruh juga pada penurunan realisasi yang diperoleh.
- d. Pajak Hiburan
Realisasi Pajak Hiburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 2012, pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp309.629.500,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.322.416.780,00 atau 23,41 persen. Jika dibandingkan dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp326.869.500,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp17.240.000,00 atau 5,27 persen. Pajak Hiburan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022 karena menurunnya target APBD atas Pajak Hiburan dari target Rp500.000.000,00 di tahun 2022 menjadi Rp1.322.416.780,00 di tahun 2023.

e. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp148.480.050,00 dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp683.654.990,00 atau 21,72 persen. Jika dibandingkan dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp119.667.025,00, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp 28.813.025,00 atau 24,08 persen.

f. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2013, pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.610.017.985,00 dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp3.126.811.660,00 atau 83,47 persen. Jika dibandingkan dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.502.419.204,00 maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp107.598.781,00 atau 4,30 persen. Peningkatan realisasi Pajak Penerangan Jalan disebabkan karena bertambahnya optimalisasi fasilitas penerangan jalan tersedia.

g. Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2010, pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp77.053.000,00 atau 103,50 persen dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp74.449.200,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp72.386.200,00 terjadi peningkatan sebesar Rp4.666.800,00 atau 6,45 persen. Realisasi Pajak Parkir tahun 2023 melampaui target APBD yang ditetapkan. Pajak Parkir mengalami peningkatan disebabkan karena meningkatnya volume kendaraan.

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2012, pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.432.753.000,00 atau 39,58 persen dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp11.200.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.921.175.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp488.422.000,00 atau 9,92 persen.

i. Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2013, pada Tahun Anggaran 2023 sebesar



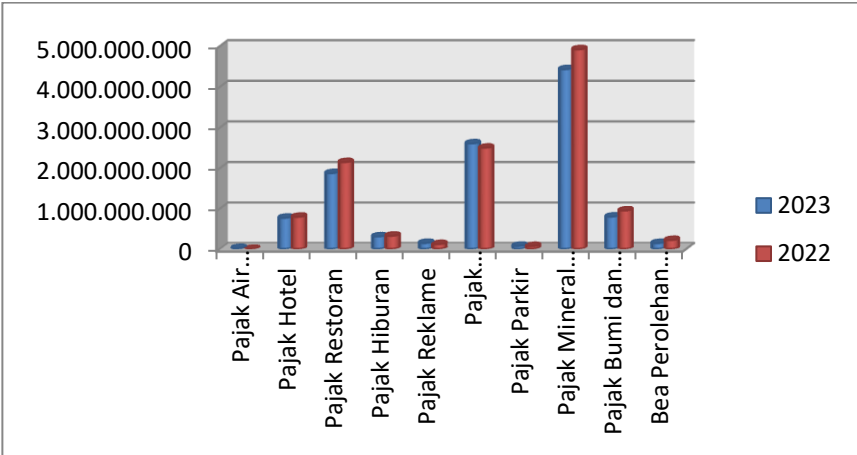
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Rp799.852.982,00 atau 3,58 persen dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp22.312.296.940,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp951.068.810,00, terjadi penurunan sebesar Rp151.215.828,00 atau 15,90 persen. Peningkatan target Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00 menjadi Rp22.312.296.940,00 di tahun 2023 berakibat pada kecilnya prosentase realisasi antara realisas dan target yang ditetapkan.

j. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2010, pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 145.282.200,00 atau 3,91 persen dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp 3.716.083.270,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Rp221.227.450,00, terjadi penurunan sebesar Rp75.945.250,00 atau 34,33 persen.

Grafik 5
Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2022 – 2023



Grafik 5 di atas menunjukkan secara umum komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dan realisasi penerimaan secara umum mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 kecuali Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan dan Pajak Parkir.

4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		6.553.042.000,00	1.992.498.500,00	2.559.104.600,00

Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan dari yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.992.498.500,00 atau 30,41 persen dibandingkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

dengan target dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.553.042.000,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.559.104.600,00, maka pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp566.606.100,00 atau sebesar 22,14 persen. Realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel 56 dibawah ini :

Tabel 56
Pendapatan Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Retribusi Jasa Umum	274.427.000,00	132.394.000,00	48,24	149.079.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	5.889.015.530,00	1.704.191.500,00	28,94	2.170.171.600,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	389.599.470,00	155.913.000,00	40,02	239.854.000,00
	JUMLAH	6.553.042.000,00	1.992.498.500,00	30,41	2.559.104.600,00

Berdasarkan rincian penerimaan Retribusi Daerah pada tabel 24 di atas terlihat bahwa dari 3 (tiga) jenis retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2023 secara umum tidak melampaui target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD.

Terhadap Rincian Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

Dasar hukum pengenaan jasa umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2023 sebesar Rp132.394.000,00 atau 48,24 persen dibandingkan target pada APBD Perubahan sebesar Rp274.427.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp149.079.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.685.000,00 atau sebesar 11,19 persen.

Retribusi Jasa Umum secara rinci dapat dilihat pada tabel 57 sebagai berikut :

Tabel 57
Retribusi Jasa Umum

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	126.116.000,00	86.096.000,00	68,27	93.610.000,00
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	40.000.000,00	32.500.000,00	81,25	35.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	56.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	51.611.000,00	13.798.000,00	26,73	20.469.000,00
	Jumlah	274.427.000,00	132.394.000,00	48,24	149.079.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

b. Retribusi Jasa Usaha

Dasar hukum pengenaan jasa usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2023 sebesar Rp1.704.191.500,00 atau 28,94 persen dibandingkan target pada APBD Perubahan sebesar Rp5.889.015.530,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.170.171.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp465.980.100,00 atau sebesar 21,47 persen.

Retribusi Jasa Usaha secara rinci dapat dilihat pada tabel 58 sebagai berikut :

Tabel 58
Retribusi Jasa Usaha

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	239.800.000,00	122.177.500,00	50,95	15.080.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.298.564.250,00	1.306.895.000,00	30,40	1.363.767.600,00
3	Retribusi Terminal	750.407.280,00	237.455.000,00	31,64	634.917.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00	0,00	0,00	3.526.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	550.244.000,00	37.664.000,00	6,84	152.881.000,00
	Jumlah	5.889.015.530,00	1.704.191.500,00	28,94	2.170.171.600,00

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Dasar hukum pengenaan perizinan tertentu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2023 sebesar Rp155.913.000,00 atau 40,02 persen dibandingkan target pada APBD Perubahan sebesar Rp389.599.470,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp239.854.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp83.941.000,00 atau sebesar 35,00 persen. Retribusi Perizinan Tertentu secara rinci dapat dilihat pada tabel 59 sebagai berikut :

Tabel 59
Retribusi Perizinan Tertentu

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	355.689.470,00	108.893.000,00	30,61	198.014.000,00
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	23.800.000,00	39.400.000,00	165,55	37.400.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.110.000,00	7.620.000,00	75,37	4.440.000,00
	Jumlah	389.599.470,00	155.913.000,00	40,02	239.854.000,00

4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Anggaran Perubahan 6.446.735.017,00	Realisasi 2023 6.446.735.017,00	Realisasi 2022 3.211.782.587,06

Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2009. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp6.446.735.017,00 atau 100 persen dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.446.735.017,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.211.782.587,06 mengalami peningkatan sebesar Rp3.234.952.429,94 atau sebesar 100,72 persen.

4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Anggaran Perubahan 32.258.870.503,00	Realisasi 2023 54.171.855.082,00	Realisasi 2022 37.066.465.653,36

Pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasi baik ke dalam pajak daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp54.171.855.082,00 atau 167,93 persen dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp32.258.870.503,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp37.066.465.653,36, maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp17.105.389.428,64 atau 46,15 persen. Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada tabel 60 dibawah ini :

Tabel 60
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.190.000.000,00
2	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	1.800.000.000,00	5.750.000,00	0,32	21.743.589,00
	Hasil Sewa BMD	862.852.623,00	0,00	0,00	
3	Penerimaan Jasa Giro	1.000.694.785,00	304.164.780,57	30,40	660.139.494,00
4	Penerimaan Bunga Deposito	2.000.000.000,00	821.738.656,07	41,09	1.045.919.196,61
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	6.366.493.743,00	1.171.465.428,56	18,40	646.577.988,11



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.700.000.000,00	308.251.464,00	18,13	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak	15.000.000,00	3.007.850,00	20,05	2.335.762,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	10.000.000,00	6.167.470,00	61,67	6.656.340,00
9	Pendapatan dari pengembalian	0,00	882.831.270,00	0,00	996.977.520,52
10	Pendapatan BLUD	13.000.000.000,00	25.997.812.199,00	199,98	27.521.037.397,00
11	Penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	4.403.829.352,00	24.670.665.963,80	560,21	4.974.679.366,12
12	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	399.000,00
	Jumlah	32.258.870.503,00	54.171.855.082,00	167,93	37.066.465.653,36

4.2 **Pendapatan Transfer Anggaran Perubahan Realisasi 2023 Realisasi 2022**
978.517.251.464,00 925.415.160.817,62 827.374.566.189,00

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, Transfer Dana Lainnya, dan Transfer dari Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 sebesar Rp925.415.160.817,62 atau 94,57 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp978.517.251.464,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp827.374.566.189,00 mengalami peningkatan sebesar Rp98.040.594.628,62 atau 11,85 persen. Untuk Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Transfer yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Kas Daerah dapat dilihat pada tabel 61 di bawah ini :

Tabel 61
Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	954.074.803.951,00	907.994.277.141,62	95,17	810.826.028.947,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	24.442.447.513,00	17.420.883.676,00	71,27	16.548.537.242,00
	JUMLAH	978.517.251.464,00	925.415.160.817,62	94,57	827.374.566.189,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

4.2.1	Pendapatan	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	Transfer Pemerintah	Perubahan		
	Pusat- Dana	954.074.803.951,00	907.994.277.141,62	810.826.028.947,00
	Perimbangan			

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebagaimana diatur dalam Pepres 72 Tahun 2010 dan PMK nomor 35/PMK.07/2020 merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk Tahun Anggaran 2023. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah pusat tahun 2023 sebesar Rp907.994.277.141,62 dari target anggaran sebesar Rp954.074.803.951,00 atau 95,17 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp810.826.028.947,00 mengalami peningkatan sebesar Rp97.168.248.194,62 atau 11,98 persen. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel 62 dibawah ini :

Tabel 62
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Dana Perimbangan	804.433.292.951,00	753.216.996.141,62	93,63	667.514.392.947,00
2	Dana Insentif Daerah	6.207.486.000,00	6.207.486.000,00	100,00	5.805.126.000,00
3	Dana Desa	143.434.025.000,00	148.569.795.000,00	103,58	137.506.510.000,00
JUMLAH		954.074.803.951,00	907.994.277.141,62	95,17	810.826.028.947,00

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk Tahun Anggaran 2023. Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2023 sebesar Rp753.216.996.141,62 atau sebesar 93,63 persen dari target anggaran sebesar Rp804.433.292.951,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp667.514.392.947,00, maka mengalami peningkatan sebesar Rp85.702.603.194,62 atau 12,84 persen. Dana Perimbangan merupakan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan terdiri dari beberapa jenis dana, antara lain :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Transfer Umum Bagi Hasil pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp9.895.199.975,00 atau sebesar 105,99 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.335.710.951,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp472.005.502.824,00 atau sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 472.015.431.000,00.
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp222.663.255.505,00 atau sebesar 96,00 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp231.937.207.000,00.
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp48.653.037.837,62 atau sebesar 53,38 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp91.144.944.000,00.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID). Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2023 sebesar Rp6.207.486.000,00 atau sebesar 100 persen dari target anggaran sebesar Rp6.207.486.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.805.126.000,00, maka mengalami peningkatan sebesar Rp 402.360.000,00 atau 6,93 persen.
3. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa. Realisasi Dana Desa pada tahun 2023 sebesar Rp148.569.795.000,00 atau sebesar 103,58 persen dari target anggaran sebesar Rp143.434.025.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp137.506.510.000,00, maka mengalami peningkatan sebesar Rp11.063.285.000,00 atau 8,05 persen.

4.2.2	Transfer	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	Pemerintah Daerah	24.442.447.513,00	17.420.883.676,00	16.548.537.242,00
	Lainnya			

Pos Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak provinsi. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2023 sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak. Realisasi penerimaan Bagi hasil pajak provinsi tahun 2023 sebesar Rp17.420.883.676,00 atau 71,27 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp24.442.447.513,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp16.548.537.242,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp872.346.434,00 atau 5,27 persen.. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 63 dibawah ini :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Tabel 63

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Bagi Hasil Pajak	24.442.447.513,00	17.420.883.676,00	71,27	16.121.937.242,00
2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	426.600.000,00
	JUMLAH	24.442.447.513,00	17.420.883.676,00	71,27	16.548.537.242,00

4.3	Lain - Lain	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	Pendapatan Daerah	Perubahan		
	Yang Sah	0,00	0,00	10.884.428.450,11

Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat. Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.884.428.450,11 merupakan Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan Hibah Dana Bos. Pada tahun 2023 Pendapatan Dana Bos digabungkan dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

5.	Belanja Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		Perubahan		
		1.037.490.030.589,00	929.446.825.891,00	942.046.175.474,39

Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp1.037.490.030.589,00 dengan realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp929.446.825.891,00 atau 89,59 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp942.046.175.474,39 mengalami penurunan sebesar Rp12.599.349.583,39 atau 1,34 persen. Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran OPD tersebut dapat dilihat pada Tabel 64 dibawah ini :

Tabel 64

Belanja Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Belanja Operasi	643.080.198.997,00	552.714.560.307,76	85,95	543.444.952.876,66
2	Belanja Modal	214.308.606.790,00	191.910.118.091,24	89,55	210.488.597.602,73
3	Belanja Tak Terduga	717.530.909,00	310.440.000,00	43,27	668.857.600,00
4	Belanja Transfer	179.383.693.893,00	184.511.707.492,00	43,27	187.443.767.395,00
	JUMLAH	1.037.490.030.589,00	929.446.825.891,00	89,59	942.046.175.474,39



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

5.1	Belanja Operasi	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		643.080.198.997,00	552.714.560.307,76	543.444.952.876,66

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp552.714.560.307,76 atau 85,95 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp643.080.198.997,00. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp543.444.952.876,66, maka mengalami penurunan sebesar Rp9.269.607.431,10 atau 1,71 persen. Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang memberikan manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel 65 dibawah ini :

Tabel 65
Belanja Operasional

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Belanja Pegawai	273.945.397.707,00	245.328.012.957,00	89,55	240.096.047.701,00
2	Belanja Barang dan Jasa	258.341.898.142,00	244.869.780.409,76	94,79	251.935.384.712,66
3	Belanja Bunga	999.245.608,00	999.245.608,00	100,00	709.426.734,00
3	Belanja Hibah	90.251.857.540,00	46.904.766.333,00	51,97	39.534.257.729,00
4	Belanja Bantuan Sosial	19.541.800.000,00	14.612.755.000,00	74,78	11.169.836.000,00
	JUMLAH	643.080.198.997,00	552.714.560.307,76	85,95	543.444.952.876,66

5.1.1	Belanja Pegawai	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		273.945.397.707,00	245.328.012.957,00	240.096.047.701,00

Belanja Pegawai Terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp245.328.012.957,00 atau 89,55 persen dibandingkan dengan anggaran dalam APBD Perubahan sebesar Rp273.945.397.707,00. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tersebut dalam tahun 2022 sebesar Rp240.096.047.701,00, maka mengalami peningkatan sebesar Rp5.231.965.256,00 atau 2,18 persen. Realisasi belanja pegawai dapat dirinci pada Tabel 66 dibawah ini :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Tabel 66

Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Gaji dan Tunjangan	228.912.798.985,00	202.357.106.537,00	88,40	198.004.555.119,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	24.178.574.000,00	22.584.908.276,00	93,41	21.038.501.640,00
3	Tambahan Penghasilan pertimbangan obyektif	3.735.460.000,00	3.265.212.500,00	87,41	3.608.790.378,00
3	Gaji dan Tunjangan DPRD	13.974.893.315,00	13.764.317.018,00	98,49	14.154.733.564,00
4	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000,00	480.600.000,00	95,81	501.600.000,00
5	Belanja Pegawai BOS	2.642.071.407,00	2.875.868.626,00	108,85	2.787.867.000,00
	JUMLAH	273.945.397.707,00	245.328.012.957,00	89,55	240.096.047.701,00

5.1.2	Belanja Barang Jasa	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		258.341.898.142,00	244.869.780.409,76	251.935.384.712,66

Realisasi Belanja Barang Jasa tahun 2023 sebesar Rp244.869.780.409,76 atau 94,79 persen dibandingkan dengan anggarannya pada APBD Perubahan sebesar Rp258.341.898.142,00. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tersebut dalam tahun 2022 sebesar Rp251.935.384.712,66, maka mengalami penurunan sebesar Rp7.065.604.302,90 atau 2,80 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya belanja pada OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun realisasi belanja barang dan jasa dapat dijelaskan pada Tabel 67 dibawah ini :

Tabel 67

Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Belanja Barang	88.835.324.265,00	91.781.070.597,71	103,32	74.111.175.162,00
2	Belanja Jasa	92.278.151.319,00	88.509.438.130,49	95,92	87.328.895.597,7
3	Pemeliharaan	3.117.514.978,00	2.419.463.279,00	77,61	4.308.286.132,00
4	Perjalanan Dinas	48.507.527.680,00	37.808.937.282,67	77,94	56.100.397.011,00
5	Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	341.800.000,00	332.428.000,00	97,26	112.950.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	7.659.649.900,00	7.483.920.286,89	97,71	7.085.584.754,90
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.601.930.000,00	16.534.522.833,00	93,94	22.888.096.055,00
	Jumlah	258.341.898.142,00	244.869.782.432,76	94,79	251.935.384.712,60

a. Realisasi Belanja Barang pada tahun 2023 sebesar Rp91.781.070.597,71 atau 103,32 persen dari target anggaran sebesar Rp88.835.324.265,00. Jika



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

- dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp74.111.175.162,00, maka mengalami peningkatan sebesar Rp17.669.895.435,71 atau 23,84 persen.
- b. Realisasi Belanja Jasa pada tahun 2023 sebesar Rp88.509.438.130,49 atau 95,92 persen dari target APBD Perubahan sebesar Rp92.278.151.319,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp87.328.895.597,70, maka mengalami peningkatan sebesar Rp1.180.542.532,79 atau 1,35 persen.
- c. Realisasi Belanja Pemeliharaan pada tahun 2023 sebesar Rp2.419.463.279,00 atau 77,61 persen dari target APBD Perubahan sebesar Rp3.117.514.978,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.308.286.132,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp1.888.822.853,00 atau 43,84 persen.
- d. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp48.507.527.680,00 atau 77,94 persen dari target APBD Perubahan sebesar Rp59.472.280.771,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp56.100.397.011,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp18.291.459.728,33 atau 32,60 persen.
- e. Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada tahun 2023 sebesar Rp332.428.000,00 dari target APBD Perubahan sebesar Rp341.800.000,00 atau 97,26 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 112.950.000,00, maka mengalami peningkatan sebesar 219.478.000,00 atau 194,31 persen.
- f. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp7.659.649.900,00 dan terealisasi sebesar Rp7.483.920.286,89 atau 97,71 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.085.584.754,90, maka mengalami peningkatan sebesar Rp398.335.531,99 atau 5,62 persen.
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp17.601.930.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 16.534.522.833,00 atau 93,94 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp22.888.096.055,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp6.353.573.222,00 atau 27,76 persen.

5.1.5	Belanja Bunga	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		Perubahan		
		999.245.608,00		

Realisasi Belanja Bunga dalam tahun 2023 sebesar Rp999.245.608,00 atau mencapai 100 persen dari terget anggaran yang ditetapkan sebesar Rp999.245.608,00. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan antara PT. Saran Multi Infrastruktur (SMI)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 tanggal 18 November 2021, fasilitas pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,00 dan Pasal 5 angka 6 Akta Perjanjian Pembiayaan berbunyi Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya/fee pinjaman senilai 1% (satu persen) dari jumlah fasilitas pembiayaan yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (“Biaya Fasilitas Pembiayaan”) yang dibayarkan secara bertahap dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pembayaran 90% (sembilan puluh persen) dari biaya fasilitas pembiayaan yang dibayarkan sebelum perjanjian efektif (sebagai Syarat Efektif Perjanjian)
- b. Sisanya sebesar 10% (sepuluh persen) dari Biaya Fasilitas Pembiayaan akan dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Akan dikenakan dalam hal *outstanding* melebihi 90% (sembilan puluh persen) atas nilai plafond fasilitas pembiayaan;
 - 2) Dalam hal butir (i) terjadi, maka biaya akan dibayarkan pada setiap penarikan, dengan perhitungan besarnya fee pada setiap per penarikan yaitu 1% (satu persen) dari jumlah fasilitas yang ditarik. Ketentuan ini berlaku dalam hal sisa fasilitas pembiayaan akan ditarik secara bertahap. Namun apabila sisa fasilitas pembiayaan akan ditarik secara sekaligus, maka sisa biaya fasilitas sebesar 10% (sepuluh persen) akan dibayarkan secara sekaligus paling lambat pada penarikan terakhir atas sisa fasilitas pembiayaan yang belum ditarik.
 - 3) Untuk menghindari keragu-raguan Para Pihak sepakat bahwa besaran fee/ biaya yang dibayarkan oleh Debitur adalah maksimum sebesar biaya fasilitas pembiayaan.
 - 4) Pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp999.245.608,00 ini merupakan pembayaran dari periode tanggal 20 Januari sampai tanggal 18 Juli 2023. Pembayaran bunga atas pinjaman ini merupakan pembayaran terakhir pada PT. Saran Multi Infrastruktur (SMI).

Tabel 68
Belanja Bunga Pinjaman

NO	URAIAN	REALISASI 2022
1	Belanja Langsung Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Periode Bulan Januari 2023	199.099.844,00
2	Belanja Langsung Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Periode Bulan Februari 2023	182.508.167,00
3	Belanja Langsung Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Periode Bulan Maret 2023	149.860.079,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

4	Belanja Langsung Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Periode Bulan April 2023	149.324.863,00
5	Belanja Langsung Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Periode Bulan Mei 2023	128.451.494,00
6	Belanja Langsung Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Periode Bulan Juni 2023	116.141.560,00
7	Belanja Langsung Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Periode Bulan Juli 2023	73.859.601,00
Jumlah		999.245.608,00

5.1.6	Belanja Hibah	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		90.251.857.540,00	46.904.766.333,00	39.534.257.729,00

Realisasi Belanja Hibah dalam tahun 2023 sebesar Rp46.904.766.333,00 atau mencapai 51,97 persen dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp90.251.857.540,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.370.508.604,00 atau 18,64 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp39.534.257.729,00. Belanja Hibah merupakan belanja yang diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan Kelompok/Anggota Masyarakat, adapun rekapan belanja hibah sebagai berikut :

- a. Hibah Kepada Pemerintah Pusat berupa Bantuan Keuangan kepada Partai-Partai Politik dan KPUD sebesar Rp419.459.502,00;
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp29.459.100.000,00;
- c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp17.026.206.831,00.

5.1.7	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		19.541.800.000,00	14.612.755.000,00	11.169.836.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan perorangan. Dalam tahun 2023 terealisasi anggaran Rp14.612.755.000,00 atau 74,78 persen dari besar target APBD Perubahan Rp19.541.800.000,00. Realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.442.919.000,00 atau 30,82 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp11.169.836.000,00.

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja yang diberikan kepada Organisasi Sosial dan anggota kemasyarakatan, diantaranya :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

- 1. Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu, sebesar Rp30.000.000,00 dari target anggaran sebesar Rp70.000.000,00;
- 2. Bantuan Sosial (Bansos) berupa barang kepada keluarga sebesar Rp14.582.755.000,00 dari target anggaran sebesar Rp19.471.800.000,00;

5.2	Belanja Modal	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		214.308.606.790,00	191.910.118.091,24	210.488.597.602,73

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp191.910.118.091,24 atau 89,55 persen dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp214.308.606.790,00. Dibandingkan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2022 sebesar Rp210.488.597.602,73, maka terjadi peningkatan sebesar Rp18.578.479.511,49 atau 8,83 persen.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 67 dibawah ini :

Tabel 69
Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Tanah	568.124.525,00	0,00	0,00	1.032.948.772,00
Belanja Mesin & Peralatan	28.077.962.877,00	26.629.682.986,00	94,84	37.012.000.249,73
Belanja Gedung & Bangunan	94.796.299.777,00	76.615.372.183,00	80,82	17.665.831.432,00
Belanja Jalan, Irigasi, & Jaringan	89.827.499.699,00	87.929.442.922,24	97,89	154.050.191.850,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.038.720.000,00	735.620.000,00	70,82	727.625.299,00
Jumlah	214.308.606.878,00	191.910.118.091,24	89,55	210.488.597.602,73

5.2.1	Belanja Modal Tanah	31 Desember 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		568.124.525,00	0,00	1.032.948.772,00

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 58 Tahun 2021, tanggal 1 September 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

aset tetap tanah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2023 tidak ada realisasi Belanja Modal Tanah dengan target yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp568.124.525,00.

5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		28.077.962.789,00	26.629.682.986,00	37.012.000.249,73

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 58 tanggal 1 September 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp26.629.682.986,00 atau 94,84 persen dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp28.077.962.789,00. Dibandingkan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2022 sebesar Rp37.012.000.249,73, maka terjadi penurunan sebesar Rp10.382.317.263,73 atau 28,05 persen.

5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		94.796.299.777,00	76.615.372.183,00	17.665.831.432,00

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 58 tanggal 1 September 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp76.615.372.183,00 atau 80,82 persen dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp94.796.299.777,00. Dibandingkan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2022 sebesar Rp17.665.831.432,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp58.949.540.751,00 atau 333,69 persen.

5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		89.827.499.699,00	87.929.442.922,24	154.050.191.850,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 58 tanggal 1 September 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp87.929.442.922,24 atau 97,89 persen dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp89.827.499.699,00. Dibandingkan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2022 sebesar Rp154.050.191.850,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp66.120.748.927,76 atau 42,92 persen.

5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		1.038.720.000,00	735.620.000,00	727.625.299,00

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 58 tanggal 1 September 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Aset Tetap Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp735.620.000,00 atau 70,82 persen dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.038.720.000,00. Pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi tidak melampaui target anggaran, dibandingkan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2022 sebesar Rp727.625.299,00 terjadi peningkatan sebesar Rp7.994.701,00 atau 1,10 persen.

5.3	Belanja Tak Terduga	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		717.530.909,00	310.440.000,00	668.857.600,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Realisasi Belanja Tak Terduga dalam tahun 2023 adalah sebesar Rp310.440.000,00 atau 43,27 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp717.530.909,00 jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 sebesar Rp668.857.600,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp358.417.600,00 atau 53,59 persen.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

5.4	Belanja Transfer	Anggaran Perubahan	Realisasi 2022	Realisasi 2022
		179.383.693.893,00	184.511.707.492,00	187.443.767.395,00

Realisasi Belanja Transfer selama tahun 2023 sebesar Rp184.511.707.492,00 atau 102,86 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp179.383.693.893,00. Dibandingkan realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2022 sebesar Rp187.443.767.395,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp2.932.059.903,00 atau 1,56 persen.

Belanja Transfer terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil dengan Realisasi sebesar Rp3.784.456.892,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.791.714.693,00 atau 99,81 persen;
- b. Belanja Bantuan Keuangan dengan Realisasi sebesar Rp180.727.250.600,00 dari target anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp175.591.979.200,00 atau sebesar 102,92 persen.

5.5	Surplus/Defisit	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		33.504.845.779,00	69.769.566.998,62	(48.893.284.313,86)

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Dalam tahun 2023 Anggaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengalami Surplus sebesar Rp69.769.566.998,62 dengan rincian dapat dijelas pada Tabel 70 dibawah ini :

Tabel 70
Surplus/Defisit Anggaran Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Pendapatan Daerah	1.070.994.876.368,00	999.216.392.889,62	93,30
2.	Belanja Daerah	1.037.490.030.589,00	929.446.825.891,00	89,59
	Defisit Anggaran (1-2)	33.504.845.779,00	69.769.566.998,62	208,24

6.	Pembiayaan Neto	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(33.504.845.779,00)	(33.504.665.778,79)	64.658.492.223,07

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Jumlah Realisasi Pembiayaan netto dalam tahun 2023 adalah sebesar Rp33.504.665.778,79 yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp15.765.207.909,21 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp49.269.873.688,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

(Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp48.269.873.688,00, telah diselesaikan seluruh cicilan pokok utang pada PT. SMI. Pebiayaan Neto dapat dilihat pada Tabel 71 dibawah ini :

Tabel 71
Realisasi Pembiayaan Neto Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Naik/(Turun) %
1.	Penerimaan Pembiayaan	15.765.027.909,00	15.765.207.909,21	100,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	49.269.873.688,00	49.269.873.688,00	100,00
Pembiayaan Neto (1-2)		(33.504.845.779,00)	(33.504.665.778,79)	100,00

SiLPA	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	0,00	36.264.901.219,83	15.765.207.909,21

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar 36.333.427.972,83 merupakan selisih lebih antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. SiLPA/(SiKPA) (LRA) = Kas di Kasda (Neraca) + Kas di Bend. Penerimaan (Neraca) + Kas di Bend. Pengeluaran (Neraca) + Kas di Bend. BLUD (Neraca) + Kas di Bend. FKTP (Neraca) + Kas di Bend. BOS (Neraca) + Setara Kas di BUD (Neraca) + Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Selain BUD) Terkait Utang PFK (Neraca) - Utang PFK (Neraca).

SiLPA/(SiKPA) (LRA) = Kas dan Setara Kas (Neraca) - Utang PFK (Neraca). Rincian SiLPA tersebut dapat diuraikan pada Tabel 72 dibawah ini :

Tabel 72
Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Kas Daerah	30.739.796.985,95
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	106.597.638,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	54.184.710,00
4	Kas di BLUD	4.630.553.158,00
5	Kas di Bendahara FKTP	50.562.893,36
6	Kas di Bendahara BOS	103.360.272,61
7	Kas di Bendahara BOK	1.005.504.340,00
8	Utang PFK	(425.658.778,09)
	Jumlah	36.264.901.219,83



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

7.	Pendapatan - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		848.547.195.485,56	763.866.944.876,31

Pendapatan – LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang telah diklasifikasi menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdapat pada Tabel 73 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 73
Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2023

No.	Pendapatan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Pendapatan Asli Daerah	75.346.963.469,94	50.583.426.840,08
2	Pendapatan Transfer	773.146.162.106,62	693.109.961.726,12
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	54.069.909,00	20.173.556.310,11
	Jumlah	848.547.195.485,56	763.866.944.876,31

7.	Pendapatan Asli Daerah - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		75.346.963.469,94	50.583.426.840,08

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp75.346.963.469,94. Dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2022 sebesar Rp50.583.426.840,08, maka terjadi penurunan sebesar Rp24.763.536.629,86 atau 48,96 persen. Rincian Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 74 sebagai berikut :

Tabel 74
Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023

No.	Pendapatan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Pendapatan Pajak Daerah	12.374.063.655,00	13.211.770.387,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.151.535.600,00	2.684.472.600,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.446.735.017,00	5.556.126.850,54
4	Lain-Lain PAD yang Sah	54.374.629.197,94	29.131.057.002,54
	Jumlah	75.346.963.469,94	50.583.426.840,08

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		12.374.063.655,00	13.211.770.387,00

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola Badan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara. Pendapatan pajak Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak daerah (OPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (OPDKB) yang ditetapkan tahun 2023.

Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) + Piutang Pajak (Neraca) - Piutang Pajak Tahun 20NN-1 (Neraca) - Pendapatan Pajak Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca).

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional dalam tahun 2023 sebesar Rp12.374.063.655,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 sebesar Rp11.190.143.473,00 ditambahkan dengan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp14.387.211.800,89 dan dikurang dengan piutang pajak tahun 2022 sebesar Rp13.203.291.618,89 tidak terdapat selisih. Rincian Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel 75 sebagai berikut :

Tabel 75
Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Nama Sub Akun	Pendapatan Pajak 2023
1	Pajak Hotel	749.695.245,00
2	Pajak Restoran	1.844.855.699,00
3	Pajak Hiburan	316.959.500,00
4	Pajak Reklame	153.293.725,00
5	Pajak Penerangan Jalan	2.625.854.877,00
6	Pajak Parkir	74.990.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	4.442.667.000,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.999.464.368,00
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	145.282.200,00
10	Pajak Air Permukaan-LO	21.001.041,00
	Jumlah	12.374.063.655,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

7.1.2	Pendapatan Daerah - LO	Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
			2.151.535.600,00	2.684.472.600,00

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 5 (lima) OPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada Masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara didasarkan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) + Piutang Retribusi (Neraca) - Piutang Retribusi Tahun 20NN-1 (Neraca) - Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca).

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.151.535.600,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi LRA sebesar Rp1.992.498.500,00 ditambah dengan Piutang Retribusi tahun 2023 sebesar Rp2.381.629.820,05 dikurangi dengan piutang retribusi tahun 2022 sebesar Rp2.222.592.720,05, tidak terdapat selisih. Adapun rincian pendapatan Retribusi-LO. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel 76 sebagai berikut :

Tabel 76
Pendapatan Retribusi-LO

No	Nama Sub Akun	Pendapatan Retribusi LO 2023
1	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	94.088.000,00
2	Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	32.500.000,0
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	13.798.000,0
4	Pemakaian Kekayaan Daerah	122.177.500,00
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan	1.458.184.100,00
6	Retribusi Terminal	237.455.000,0
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00
8	Pelayanan Kepelabuhan	37.420.000,00
9	Izin Mendirikan Bangunan	108.893.000,00
10	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Alkohol	39.400.000,00
11	Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.620.000,00
	Jumlah	2.151.535.600,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

No.	Nama Sub Akun	Pendapatan Pajak 2023
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	75.730.984,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO	691.802.000,00
11	Pendapatan dari BLUD-LO	26.206.374.451,94
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	24.670.665.963,80
	Jumlah	54.374.629.197,94

7.2	Pendapatan Transfer - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		773.146.162.106,62	693.109.961.726,12

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Maluku Tenggara mendapat alokasi dana transfer untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp773.146.162.106,62. Dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2022 sebesar Rp693.109.961.726,12, maka terjadi penurunan sebesar Rp80.036.200.380,50 atau 11,55 persen. Rincian pada tabel 78 sebagai berikut :

Tabel 78
Realisasi Pendapatan Transfer-LO

No.	Pendapatan Transfer	Jumlah
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	751.794.716.501,62
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	6.207.486.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	15.143.959.605,00
	JUMLAH	773.146.162.106,62

7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		751.794.716.501,62	674.742.488.479,12

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari Bagi Hasil Pajak-LO, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp751.794.716.501,62 bila dibandingkan dengan Realisasi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LRA sebesar Rp753.216.996.141,62, maka terdapat selisih sebesar Rp 1.422.279.640,00. Selisi ini merupakan koreksi nilai *Treasury Deposit Facility* (TDF).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

7.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	31 Desember 2023 6.207.486.000,00	31 Desember 2022 0,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.207.486.000,00 bila dibandingkan dengan Realisasi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Insentif Daerah LRA sebesar Rp6.207.486.000,00, maka tidak terdapat selisi atau antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada LRA dan LO memiliki nilai yang sama.

7.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	31 Desember 2023 15.143.959.605,00	31 Desember 2022 17.940.873.247,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp15.143.959.605,00 bila dibandingkan dengan realisasi pada Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA sebesar Rp17.420.883.676,00, dijumlahkan dengan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2023 sebesar Rp1.888.035.634,00 dan dikurangi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2022 sebesar Rp4.164.959.705,00, maka memiliki nilai yang sama atau tidak terdapat selisi.

7.3.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	31 Desember 2023 54.069.909,00	31 Desember 2022 20.173.556.310,11

Realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.069.909,00 merupakan Pendapatan Hibah. Bila dibandingkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan juga dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2022, maka terjadi penurunan sebesar Rp9.235.057.951,00 atau 99,42 persen.

8	Beban	31 Desember 2023 697.976.359.033,33	31 Desember 2022 725.725.347.523,14

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun 2023. Beban LO Kabupaten Maluku Tenggara adalah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp697.976.359.033,33. Bila dibandingkan dengan Beban – LO tahun 2022 sebesar Rp725.725.347.523,14, maka mengalami penurunan sebesar Rp27.748.988.489,81 atau 3,82 persen. Beban - LO secara rincian dapat dilihat pada Tabel 79 sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Tabel 79
Beban Operasi-LO

No.	Beban	SALDO TAHUN 2023	SALDO TAHUN 2022
1	Beban Pegawai	246.544.202.554,00	242.084.010.537,99
2	Beban Barang dan Jasa	220.631.071.514,19	251.849.722.164,79
3	Beban Bunga	999.245.608,00	709.426.734,00
4	Beban Hibah	48.504.476.313,00	39.540.818.929,00
5	Beban Bantuan Sosial	14.612.755.000,00	11.169.836.000,00
6	Beban Penyisihan Piutang	507.530.924,17	1.129.241.509,89
7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	40.453.099.040,22	50.409.864.353,47
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.695.591.950,00	12.119.459.958,00
9	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.391.030.756,75	66.885.365.208,00
9	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.164.692.571,00	623.855.493,00
9	Beban Transfer Bagi Hasil	35.472.662.802,00	2.376.105.992,00
10	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	46.827.640.643,00
	Jumlah	697.976.359.033,33	725.725.347.523,14

Dari rincian beban di atas pos-pos beban dapat dijelaskan sebagai berikut :

8.1.1	Beban Pegawai	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		246.544.202.554,00	242.084.010.537,99

Beban Pegawai tahun 2023 terealisasi sebesar Rp246.544.202.554,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai LRA sebesar Rp245.328.012.957,00 ditambah dengan utang belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp3.465.874.239,00 dan dikurangi dengan utang belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp2.416.922.885,01 terdapat selisih sebesar Rp167.238.243,01. Selisih ini merupakan koreksi atas kurang catat hutang tahun sebelumnya. Rincian pada Tabel 80 sebagai berikut :

Tabel 80
Beban Pegawai-LO

No.	Beban Pegawai	Jumlah
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	203.573.296.134,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	22.584.908.276,00
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.265.212.500,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.764.317.018,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	480.600.000,00
6	Beban Pegawai Dana BOS	2.875.868.626,00
JUMLAH		246.544.202.554,00

8.1.2	Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		220.631.071.514,19	251.849.722.164,79

Beban Barang dan Jasa tahun 2023 terealisasi sebesar Rp220.631.071.514,19. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA sebesar Rp244.869.780.409,76 ditambah utang belanja barang dan jasa pada Neraca sebesar Rp10.954.753.992,00, dikurangi dengan utang belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp8.265.607.992,00, dikurangi Persediaan barang tahun 2023 sebesar Rp31.352.905.432,80, tambahkan Persediaan barang tahun 2022 sebesar Rp11.462.120.837,63 terdapat selisih sebesar Rp7.037.070.300,40 yang disebabkan karena adanya koreksi kurang catat hutang tahun sebelumnya. Rincian Beban Barang dan Jasa dapat dilihat tabel 81 sebagai berikut :

Tabel 81
Beban Barang dan Jasa-LO

No.	Beban Barang dan Jasa	Jumlah
1	Beban Barang	89.774.911.993,14
3	Beban Jasa Kantor	81.606.391.690,49
4	Beban Pemeliharaan	3.220.762.721,00
5	Beban Perjalanan Dinas	37.808.937.282,67
6	Beban Jasa yang diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	(15.798.375.293,00)
7	Beban Barang dan Jasa BOS	7.483.920.286,89
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.534.522.833,00
JUMLAH		220.631.071.514,19

8.1.3	Beban Bunga	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		999.245.608,00	709.426.734,00

Beban Bunga untuk tahun 2023 sebesar Rp999.245.608,00 merupakan Biaya Fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 tanggal 18 November 2021, fasilitas pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,00 dan Pasal 5 angka 6 Akta Perjanjian Pembiayaan berbunyi Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya/fee pinjaman senilai 1% (satu persen) dari jumlah fasilitasi pembiayaan yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (“Biaya Fasilitas Pembiayaan”) yang dibayarkan secara bertahap dengan tata cara sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

- a. Pembayaran 90% (sembilan puluh persen) dari biaya fasilitas pembiayaan yang dibayarkan sebelum perjanjian efektif (sebagai Syarat Efektif Perjanjian);
- b. Sisanya sebesar 10% (sepuluh persen) dari Biaya Fasilitas Pembiayaan akan dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Akan dikenakan dalam hal *outstanding* melebihi 90% (sembilan puluh persen) atas nilai plafond fasilitas pembiayaan;
 - 2) Dalam hal butir (i) terjadi, maka biaya akan dibayarkan pada setiap penarikan, dengan perhitungan besarnya fee pada setiap penarikan yaitu 1% (satu persen) dari jumlah fasilitas yang ditarik. Ketentuan ini berlaku dalam hal sisa fasilitas pembiayaan akan ditarik secara bertahap. Namun apabila sisa fasilitas pembiayaan akan ditarik secara sekaligus, maka sisa biaya fasilitas sebesar 10% (sepuluh persen) akan dibayarkan secara sekaligus paling lambat pada penarikan terakhir atas sisa fasilitas pembiayaan yang belum ditarik;
 - 3) Untuk menghindari keragu-raguan Para Pihak sepakat bahwa besaran fee/ biaya yang dibayarkan oleh Debitur adalah maksimum sebesar biaya fasilitas pembiayaan.

Realisasi Belanja Bunga dalam tahun 2023 sebesar Rp999.245.608,00 merupakan Pembayaran 90% (sembilan puluh persen) dari biaya fasilitas pembiayaan yang dibayarkan sebelum perjanjian efektif (sebagai Syarat Efektif Perjanjian).

8.1.5	Beban Hibah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		48.504.476.313,00	39.540.818.929,00

Beban hibah untuk tahun 2023 sebesar Rp48.504.476.313,00. Jika dibandingkan dengan realisasi LRA sebesar Rp46.904.766.333,00, maka terdapat selisih sebesar Rp1.599.709.980,00. Selisih tersebut merupakan pengakuan hutang atas Barang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga yang tidak masuk.

8.1.6	Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		14.612.755.000,00	11.169.836.000,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk tahun 2023 sebesar Rp14.612.755.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi LRA sebesar Rp14.612.755.000,00, maka tidak terdapat selisi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		507.530.924,17	1.129.241.509,89

Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp507.530.924,17. Nilai tersebut merupakan selisih Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp(16.293.678.341,49) dan Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp(14.061.089.826,09), maka terdapat selisih sebesar Rp(1.947.159.510,97) yang merupakan koreksi Nilai Penyisihan Piutang.

8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		130.704.414.317,97	130.038.545.012,47

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp130.704.414.317,97, nilai tersebut merupakan pembebanan aset tetap yakni Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO tahun 2022 sebesar Rp130.038.545.012,47, maka mengalami peningkatan sebesar Rp125.032.227,50 atau 0,10 persen. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 dirincikan pada Tabel 82 sebagai berikut :

Tabel 82

Beban Penyusutan dan Amortisasi -LO

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Jumlah
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	129.539.721.746,97
2	Beban Penyusutan / Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.164.692.571,00
JUMLAH		130.704.414.317,97

Beban Penyusutan terdiri dari :

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp40.453.099.040,22 merupakan pengurangan antara Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp343.152.534.135,78 dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp302.642.532.806,56.
2. Beban Penyusutan Gedung Bangunan sebesar Rp12.695.591.950,00 merupakan pengurangan antara Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan tahun 2023 sebesar Rp103.655.739.159,00 dan Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan tahun 2022 sebesar Rp90.960.147.209,00.
3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp76.391.030.756,75 merupakan pengurangan antara Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp692.032.048.961,75 dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp615.802.478.514,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

4. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.164.692.571,00 merupakan pengurangan antara Akumulasi Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.040.584.060,00 dan Akumulasi Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.204.775.375,67. Terdapat selisi sebesar Rp1.328.883.886,67 merupakan koreksi catat Amortisasi pada Bapeda.

8.3.1	Beban Transfer Bagi Hasil	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Pajak Daerah dan Retibusi	35.472.662.802,00	2.376.105.992,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2022 terealisasi sebesar Rp35.472.662.802,00, beban ini dalam LRA tergabung dalam Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada LRA.

8.3.4	Beban Transfer Bantuan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Keuangan	0,00	46.827.640.643,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp46.827.640.643,00 yang merupakan Bantuan Keuangan Desa, beban ini dalam LRA tergabung dalam Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada LRA.

8.4	Surplus dari Operasional	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		150.570.836.452,23	38.141.597.353,17

Surplus Defisit Operasional tahun 2023 sebesar Rp150.570.836.452,23 yang merupakan selisih Pendapatan-LO sebesar Rp848.547.195.485,56 dan Beban-LO sebesar Rp697.976.359.033,33.

9.3	Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		153.800.109.906,38	38.141.597.353,17

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp153.800.109.906,38 yang merupakan penjumlahan antara surplus dari operasi sebesar Rp150.570.836.452,23 dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.229.273.454,15.

9.4.	Defisit Dari Pos Luar Biasa	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(310.440.000,00)	(668.857.600,00)

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2023 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Saldo Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp310.440.000,00. Besaran nilai ini memiliki nilai yang sama dengan Belanja Tak Terduga pada LRA. Defisit dari Pos Luar Biasa merupakan selisih Pendapatan Luar Biasa-LO dan Beban Luar Biasa.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

Surplus Laporan Operasional	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	153.489.669.906,38	37.472.739.753,17

Surplus LO tahun 2022 sebesar Rp153.489.669.906,38 merupakan selisih surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp153.800.109.906,38 dengan defisit dari pos luar biasa sebesar Rp310.440.000,00.

E. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. LPSAL pada tahun 2022 adalah sebesar Rp15.765.207.909,21 dan LPSAL pada tahun 2023 adalah sebesar Rp36.264.901.219,83 atau mengalami peningkatan sebesar Rp20.499.693.310,62 atau 130,03 persen. Rincian LPSAL disajikan sebagai berikut :

10.1 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SiLPA Tahun 2022 sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp15.765.207.909,21. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp0,00 sehingga tidak terdapat selisih.

10.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp36.264.901.219,83 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Surplus / Defisit Anggaran LRA Rp 69.769.566.998,62
- Pembiayaan Neto (Rp 33.504.665.778,79)
- SiLPA Tahun berjalan Rp 36.264.901.219,83

10.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 sebesar Rp36.264.901.219,83 diperoleh dari :

- Selisih Saldo awal dan Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp 0,00
- SiLPA Tahun berjalan Rp36.264.901.219,83
- Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya Rp 0,00
- Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 Rp36.264.901.219,83

F. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

F.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2023 261.679.685.089,86	31 Desember 2022 161.595.313.288,87

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp261.748.211.842,86 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan sebagai berikut.

- a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp999.216.392.889,62 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp737.536.707.799,76 merupakan Belanja Operasi, Belanja Transfer dan Belanja tak terduga dari Laporan Realisasi Anggaran.

F.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2023 (192.910.118.091,24)	31 Desember 2022 (213.288.597.602,73)

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2023 defisit sebesar Rp192.910.118.091,24. Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp192.910.118.091,24 diperoleh dari Arus Masuk Kas Akt. Investasi Tahun Berjalan sebesar Rp0,00 dikurangi Arus Keluar Kas Akt. Investasi Tahun Berjalan Sebesar Rp 192.910.118.091,24.

F.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	31 Desember 2023 (48.269.873.688,00)	31 Desember 2022 48.269.873.705,00

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan merupakan arus kas yang mencerminkan penerimaan kas untuk aktivitas pembiayaan sebesar Rp48.269.873.688,00 diperoleh dari Arus Masuk Kas Aktivitas Pembiayaan Rp0,00 pengeluaran kas untuk aktivitas pembiayaan sebesar Rp48.269.873.688,00.

F.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2023 395.676.814,00	31 Desember 2022 (5.626.380,92)

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp395.676.814,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

misalnya potongan Taspen, JKN dan potongan PPn dan PPh serta potongan lainnya. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp56.911.655.763,75 merupakan nilai PFK selama tahun 2023. Sementara Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah sebesar Rp56.515.978.949,75. Dari penjumlahan Arus Kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan transitoris mengalami peningkatan Kas sebesar Rp20.895.370.124,62 dijumlahkan dengan saldo awal Kas di BUD sebesar Rp15.795.189.873,30 sehingga menjadi saldo akhir sebesar Rp 36.690.559.997,92 yang berada pada Kas di BUD atau sama dengan Saldo Kas di Neraca.

F.5	Saldo Akhir Kas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		36.690.559.997,92	15.795.189.873,30

Saldo Akhir Kas adalah Rp36.690.559.997,92 merupakan penjumlahan antara saldo akhir kas masing-masing di BUD/Kas Daerah sebesar Rp30.739.796.985,95, Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp54.184.710,00, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp106.597.638,00, Saldo Kas di BLUD sebesar Rp4.630.553.158,00, Saldo Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp50.562.893,36, Saldo Kas di Bendahara BOK sebesar Rp 1.005.504.340,00 dan Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp103.360.272,61. Bila dibandingkan dengan SiLPA LRA sebesar Rp36.264.901.219,83 terdapat selisih sebesar Rp425.658.778,09 yang merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

G. Penjelasan – Penjelasan Lain Atas Laporan Keuangan

Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Tahun Anggaran 2023 memperoleh bantuan yang bersumber dari APBN Kementrian Sosial RI dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp43.975.861.445 (*Empat Puluh Tiga Milyard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Progran Pemberdayaan Sosial dengan dua kegiatan yaitu :
 - ✓ Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dengan alokasi dana sebesar Rp18.240.761.445 yang diperuntukan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebanyak 6.305 KPM atau 10.652 jiwa yang tersebar pada 11 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara.
 - ✓ Kegiatan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dengan alokasi dana sebesar Rp168.800.000 yang diperuntukan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebanyak 66 KPM.
- b. Program Rehabilitasi Sosial. Program ini lebih tertuju kepada para disabilitas, anak terlantar, orang tua yang terlantar, gelandangan dan pengemis dengan alokasi anggaran sebesar Rp153.100.000 yang diperuntukan kepada 125 orang .



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan program kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Jaminan Sosial Yatim Piatu dengan besar anggaran Rp153.600.000. yang diperuntukan kepada 64 orang.
- ✓ Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako dengan alokasi dana sebesar Rp21.516.000.000,00 yang diperuntukan kepada 8.959 KPM.
- ✓ Bantuan Langsung Tunai El Nino dengan alokasi dana sebesar Rp3.583.600.000,00 yang diperuntukan kepada 8.959 KPM.

d. Program Peranganan Bencana dengan program kerja sebagai berikut :

- ✓ Jaminan santunan kematian korban bencana alam atau sosial, dengan alokasi sebesar Rp60.000.000 yang diperuntukan kepada 4 orang.
- ✓ Program kearifan lokal berbasis masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp100.000.000,00 yang diperuntukan kepada dua ohoi (desa).



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Nomor 1645).

Bupati Maluku Tenggara dijabat oleh Drs. Muhamad Thaher Hanubun didampingi oleh Wakil Bupati yang dijabat oleh Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si yang dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati sejak Oktober 2018-2023. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Bupati Maluku Tenggara dibantu oleh Sekretaris Daerah yang dijabat oleh Drs. H. A. Yani Rahawarin, M.Si.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maluku Tenggara sampai akhir tahun 2022 terdiri dari 46 Organisasi Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1	Sekretariat Daerah	:	1	Unit
2	Sekretariat DPRD	:	1	Unit
3	Dinas Daerah	:	23	Unit
4	Badan	:	7	Unit
5	Inspektorat	:	1	Unit
6	Satuan	:	1	Unit
7	Kecamatan	:	11	Unit
8	Kelurahan	:	1	Unit
9	BLUD(RSUD)	:	1	Unit
	Jumlah		47	Unit

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari 11 Kecamatan yang membawahi Pemerintah Desa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 192 Desa/Ohoi dan tersebar pada :

1	Kecamatan Kei Kecil	:	16	Desa/ohoi
2	Kecamatan Kei Kecil Timur	:	18	Desa/ohoi
3	Kecamatan Kei Kecil Barat	:	10	Desa/ohoi
4	Kecamatan Kei Besar	:	37	Desa/ohoi
5	Kecamatan Kei Besar Utara Timur	:	30	Desa/ohoi



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023**

6	Kecamatan Kei Besar Selatan	:	10	Desa/ohoi
7	Kecamatan Manyeuw	:	9	Desa/Ohoi
8	Kecamatan Hoatsorbay	:	13	Desa/Ohoi
9	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan	:	11	Desa/Ohoi
10	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat	:	13	Desa/Ohoi
11	Kecamatan Kei Besar Utara Barat	:	25	Desa/Ohoi
Jumlah		:	192	Desa/Ohoi

B. Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Berpijak pada arahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara, 2005-2025 dengan visi, “Terwujudnya Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam Masyarakat yang Religius Kultural”, dan memperhatikan potensi, kekhasan daerah, permasalahan pembangunan dan isu strategis, maka Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2020-2023 memiliki visi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2020 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Maluku Tenggara yang Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan“

1. Mandiri.

Mandiri adalah kondisi yang ditandai dengan kemampuan keuangan daerah yang semakin kuat mendukung aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, mengedepankan pembangunan SDM yang berkualitas dan berintegritas, memperkuat basis ekonomi daerah berdasarkan SDA dan berorientasi pada kemampuan daya saing yang kompetitif, meningkatnya kemampuan investasi daerah, meningkatnya daya beli masyarakat serta tersedianya berbagai infrastruktur ekonomi yang memungkinkan berkembangnya kemampuan ekonomi daerah dan masyarakat yang optimal.

2. Cerdas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas berarti sempurnaperkembangan akal budi seseorang manusia (untuk berpikir, mengerti), tajam pikiran dan sempurna pertumbuhan tubuhnya. Yang dimaksud dengan cerdas dalam Visi ini adalah, disamping cerdas intelektual, juga cerdas mental spiritual, cerdas emosional dan cerdas sosial

3. Demokratis.

Demokratis adalah Maluku Tenggara yang mendukung adanya partisipasi masyarakat, baik di dalam perumusan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan publik. Partisipasi rakyat tersebut disertai dengan diakuinya HAM, Kebebasan, Solidaritas dan kesamaan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berkeadilan.

Ditandai dengan terdistribusinya kegiatan dan hasil pembangunan secara merata antar wilayah sehingga akan secara perlahan menghilangkan kesejangan antar pulau Kei Kecil



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

dan Kei Besar, sekaligus untuk menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat.

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai visi. Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Bupati-Wakil Bupati terpilih dalam penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 2018-2023 adalah :

1. Mengoptimalkan Kinerja dan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Misi ini adalah upaya untuk mengoptimalkan kinerja dan kapasitas Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara yang lebih baik melalui terobosan kinerja yang secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang efisiensi struktur pemerintahan, kapasitas birokrasi yang handal dan sejahtera, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana kerja pemerintahan berdasarkan azas transparan, efisien dan efektif, manfaat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

2. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Perlindungan Sosial

Misi ini adalah upaya untuk peningkatan sumber daya manusia Maluku Tenggara dan perlindungan sosial melalui penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu dan merata, penyediaan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, serta perlindungan sosial berbasis masyarakat.

3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan sesuai potensi unggulan daerah secara sinergi dan terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah (daya saing produk) dalam rangka perluasan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, menguatnya ketahanan pangan daerah serta sekaligus untuk menciptakan lapangan kerja baru.

4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Konektivitas

Misi ini adalah upaya untuk percepatan pembangunan serta memelihara prasarana dasar seperti jalan dan jembatan, telekomunikasi dan informasi, air bersih, listrik dan prasarana ekonomi lainnya secara merata dan terjangkau di seluruh wilayah berbasis mitigasi bencana dan sesuai dengan RTRW.

5. Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kewilayahan dengan Pendekatan *Prosperity Approach* Berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Masyarakat Hukum Adat.

Misi ini adalah upaya mewujudkan perkembangan pembangunan kultur masyarakat Maluku Tenggara yang berasaskan pada hukum adat Larvul Ngabal dan kearifan lokal lainnya sebagai patokan nilai, norma dan tata laku, tata atur dan tata tindak sehingga Budaya Kei tidak terdegradasi oleh pengaruh zaman.

C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2021 berjumlah 3.097



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA T.A. 2023

orang dan pada tahun 2022 peningkatan menjadi 3.216 orang. Peningkatan jumlah pegawai dibandingkan dengan tahun 2021 disebabkan karena jumlah Penerimaan Calon Pegawai Negeri periode tahun anggaran 2022. Selain itu, terjadi perubahan data menurut pangkat dan golongan, Eselon dan Pendidikan diakibatkan karena perubahan status pangkat dan golongan, rotasi kenaikan eselon serta perubahan tingkat pendidikan selama periode tahun 2022. Untuk lebih rinci dapat diuraikan menurut jabatan dan golongan sebagai berikut :

Tabel 83
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan dan Golongan Tahun 2023

U R A I A N	Jumlah (Orang)
Menurut Jabatan	
Eselon I	-
Eselon II	36
Eselon III	163
Eselon IV	171
Jabatan Fungsional	1.842
Staf	891
Jumlah	3.103
Menurut Golongan	
Golongan IV	317
Golongan III	2.232
Golongan II	545
Golongan I	9
Jumlah	3.103

Jumlah PNS pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan tingkat pendidikan formal adalah sebagai berikut :

Tabel 84
Rekapitulasi PNS Kabupaten Maluku Tenggara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

NO	PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)
1	SD	2
2	SMP	16
3	SMA	620
4	D1	19
5	D2	132
6	D3	467
7	S1/D4	1.765
8	S2	81
9	S3	1
	JUMLAH	3.103



**BAB VII
PENUTUP**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah. Untuk itu Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Dalam memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah.

Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO

 KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023							
No.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	KOREKSI	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5) - 6
1	Piutang Pajak	2023	13.203.291.618,89	1.629.897.344,00	445.977.162,00		14.387.211.800,89
2	Piutang Retribusi	2023	2.222.592.720,05	250.401.600,00	91.364.500,00	-	2.381.629.820,05
3	Piutang PAD lainnya	2023	8.939.838.046,06	208.562.252,94	-		9.148.400.299,00
4	Piutang Dana Bagi Hasil	2023	4.164.959.705,00	-	2.276.924.071,00	-	1.888.035.634,00
5	Piutang Lain - Lain	2023	248.929.486,66	229.120.057,10	-	-	478.049.543,76
JUMLAH			28.779.611.576,66	2.317.981.254,04	2.814.265.733,00	-	28.283.327.097,70
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA JASMONO							

 KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN ANGGARAN 2023							
No.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5) - 6
1	Piutang Pajak	2023	8.149.486,72	233.942.729,40	1.236.871.421,95	7.944.144.319,00	9.423.107.957,06
2	Piutang Retribusi	2023	233.487,50	7.043.000,00	66.637.050,00	2.131.228.220,05	2.205.141.757,55
3	Piutang PAD lainnya	2023	11.599.380,75	195.775.519,50	202.908.327,00	4.464.952.300,00	4.875.235.527,25
4	Piutang Dana Bagi Hasil	2023				-	-
5	Piutang Lain - Lain	2023	2.390.247,72	12.794.424,98		3.525.070.717,00	3.540.255.389,70
JUMLAH			22.372.602,69	449.555.673,88	1.506.416.798,95	18.065.395.556,05	20.043.740.631,56
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA JASMONO							

 KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2023							
No.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	KOREKSI	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5) - 6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH			-	-	-	-	-
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA JASMONO							

 KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023												
No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Akhir tahun	Sisa Modal yang belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 -12
1	2020	PT. BANK MALUKU	-	Penyertaan Modal (Saham)	27.921.000.000,00	27.921.000.000,00	1.000.000.000,00	28.921.000.000,00	-	-	-	28.921.000.000,00
2	2020	PDAM	-	Penyertaan Modal	17.220.832.681,16	17.220.832.681,16	1.883.769.949,84	19.104.602.631,00	-	-	-	19.104.602.631,00
JUMLAH					45.141.832.681,16	45.141.832.681,16	2.883.769.949,84	48.025.602.631,00	-	-	-	48.025.602.631,00
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA JASMONO												

LAMPIRAN XII Perda Pertanggungjawaban APBD 2023

Nomor : 4

Tanggal : 4 Oktober 2024

 KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023					
No	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6= 3 + 4 -5
1	Tanah	116.931.607.761,00	2.160.000.000,00	365.473.272,00	118.726.134.489,00
2	Peralatan dan Mesin	427.795.386.778,03	34.586.569.655,00	2.778.074.378,60	459.603.882.054,43
3	Gedung dan Bangunan	567.470.448.370,76	84.471.876.608,00	28.620.959.710,00	623.321.365.268,76
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.305.246.544.566,72	101.108.250.105,30	1.752.055.000,00	1.404.602.739.672,02
5	Aset tetap lainnya	28.074.826.306,56	959.185.103,00	394.370.000,00	28.639.641.409,56
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	150.922.692.581,00	16.136.350.820,00	7.491.725.133,00	159.567.318.268,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.010.878.343.556,56)	(130.234.443.599,07)	(2.272.464.899,10)	(1.138.840.322.256,53)
JUMLAH		1.585.563.162.807,51	109.187.788.692,23	39.130.192.594,50	1.655.620.758.905,24
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA JASMONO					

LAMPIRAN XIII Perda Pertanggungjawaban APBD 2023

Nomor : 4

Tanggal : 4 Oktober 2024

 KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP TAHUN ANGGARAN 2023					
No	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6= 3 + 4 -5
1	Tanah	116.931.607.761,00	2.160.000.000,00	365.473.272,00	118.726.134.489,00
2	Peralatan dan Mesin	427.795.386.778,03	34.586.569.655,00	2.778.074.378,60	459.603.882.054,43
3	Gedung dan Bangunan	567.470.448.370,76	84.471.876.608,00	28.620.959.710,00	623.321.365.268,76
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.305.246.544.566,72	101.108.250.105,30	1.752.055.000,00	1.404.602.739.672,02
5	Aset tetap lainnya	28.074.826.306,56	959.185.103,00	394.370.000,00	28.639.641.409,56
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	150.922.692.581,00	16.136.350.820,00	7.491.725.133,00	159.567.318.268,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.010.878.343.556,56)	(130.234.443.599,07)	(2.272.464.899,10)	(1.138.840.322.256,53)
JUMLAH		1.585.563.162.807,51	109.187.788.692,23	39.130.192.594,50	1.655.620.758.905,24
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA JASMONO					

 KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM Pengerjaan PER 31 DESEMBER 2023											
No	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								SALDO AKHIR
			BERTAMBAH				BERKURANG				
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	
1	2	3	4				5			5	6= 3 + 4 -5
1	DINAS PENDIDIKAN	348.238.019,00	-	1.683.952.680,00	-	-	-	-	-	-	2.032.190.699,00
2	DINAS KESEHATAN	165.362.500,00	-	14.270.898.140,00	-	-	-	-	7.491.725.133,00	-	6.944.535.507,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	114.688.335.609,00	-	-	181.500.000,00	-	-	-	-	-	114.869.835.609,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	10.341.473.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.341.473.210,00
5	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN	24.037.650.591,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.037.650.591,00
6	SEKRETARIAT DPRD	1.341.632.652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.341.632.652,00
JUMLAH		150.922.692.581,00	-	15.954.850.820,00	181.500.000,00	-	-	-	7.491.725.133,00	-	159.567.318.268,00
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA JASMONO											

 KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023					
No	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	1.777.250.963,10	-	5.750.000,00	1.771.500.963,10
2	Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran	(1.777.250.963,10)	-	5.750.000,00	(1.771.500.963,10)
3	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.525.070.716,81	127.944.250,00	-	3.653.014.966,81
4	Penyisihan Piutang TPGR	(3.431.688.687,10)	-	93.382.029,71	(3.525.070.716,81)
5	Aset Tak Berwujud	10.960.440.288,00	1.672.129.000,00	-	12.632.569.288,00
6	Amortisasi	(4.204.775.375,67)	-	(164.191.315,67)	(4.040.584.060,00)
7	Aset Lain-lain	19.511.308.683,28	-	1.358.023.193,00	18.153.285.490,28
9	Penyusutan Aset Lainnya	(16.172.516.066,98)	-	-	(16.172.516.066,98)
10	Penyisihan	(947.226.900,00)	-	-	(947.226.900,00)
JUMLAH		9.240.612.658,34	1.800.073.250,00	1.287.213.907,04	9.753.472.001,30
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA JASMONO					

 KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH PER 31 DESEMBER 2023								
NO	Tahun Pembentukan dana cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH			NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA JASMONO								



KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 PER 31 DESEMBER 2023

No.	URAIAN RINCIAN UTANG	TAHUN PENGAKUAN UTANG	SALDO AWAL UTANG	PENAMBAHAN UTANG	PENGURANGAN UTANG	KOREKSI	SALDO AKHIR UTANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5) - 6
1	Utang PFK	2023	29.981.964,09	425.658.778,09	29.981.964,09		425.658.778,09
2	Utang Pinjaman	2023	48.269.873.705,00	-	48.269.873.705,00	-	0,00
3	Utang Beban	2023	10.682.530.877,01	15.749.252.805,00	10.682.530.877,01	-	15.749.252.805,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	2023	490.010.240,00	6.018.992.288,05	490.010.240,00	-	6.018.992.288,05
					-		
JUMLAH			59.472.396.786,10	22.193.903.871,14	59.472.396.786,10	-	22.193.903.871,14

LANGGUR, 4 OKTOBER 2024
 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO

 KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2023							
No.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	KOREKSI	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5) - 6
	N	I	H	I	L		
JUMLAH			-	-	-	-	-
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA JASMONO							

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA								
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA								
No.	Kode Rekening	OPD/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023			%	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2024	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH / KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1.01.0.00.0.00.01	DINAS PENDIDIKAN	19.625.529.464	19.003.102.397	622.427.067	96,83	266.870.640	
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	19.625.529.464	19.003.102.397	622.427.067	96,83	266.870.640	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10.741.007.386	10.194.018.143	546.989.243	94,91	266.870.640	
	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.068.692.547	988.013.343	80.679.204	92,45	55.040.130	
		- PEMBANGUNAN RUANG UKS BESERTA PERABOTNYA SD NASKAT OHOITUF (LUNCURAN					55.040.130	
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.926.264.800	3.814.303.800	111.961.000	97,15	211.830.510	
		- PEMBANGUNAN RUANG GURU BESERTA PERABOTNYA SD NASKAT OHOITUF (LUNCURAN					113.502.210	
		- PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SD NASKAT					98.328.300	
4		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	175.000.000	-	175.000.000	-	6.247.146.779	
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	175.000.000	-	175.000.000	-	6.247.146.779	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	175.000.000	-	175.000.000	-	5.344.293.179	
	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	175.000.000	-	175.000.000	-	2.956.298.230	
		- Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Kompleks Asti Dharma Langgur (Luncuran 2023)					37.898.230	
		- Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Weduar - Kilwat - langgiar feer (Luncuran 2022)					2.918.400.000	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan	-	-	-		119.250.000	
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Hotmix Ruas Jalan Kawasan Pemerintahan					50.000.000	
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Hotmix Ruas Jalan Ohoidertawun Bawah,					69.250.000	
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-	-		34.925.600	
		- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Weduar-Kilwat-Langgiar Feer					9.925.600	
		- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Pasar Langgur (Luncuran 2023)					25.000.000	
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	-	-	-		2.197.020.000	
		- Pembangunan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Ohoi Waur (Luncuran 2022)					2.197.020.000	
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	-	-	-		36.799.349	
		- Pembangunan Jembatan Ohoiwait (Luncuran 2021)					36.799.349	
	01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-		902.853.600	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah	-	-	-		902.853.600	
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan	-	-	-		902.853.600	
		- Pembangunan Pagar Gedung Pesparawi (Luncuran 2023)					22.469.300	
		- Pembangunan Pagar Rumah Raja Wain (Lanjutan) Dan Bangunan Pelengkap (Luncuran					29.476.300	
		- Pembangunan Landmark Kota Langgur (Luncuran 2023)					328.995.000	
		- Landscape Kawasan Kuliner Vawahan (Luncuran 2023)					370.152.300	
		- Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Pasar Langgur (Luncuran 2023)					151.760.700	
4		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-		17.792.800	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-		17.792.800	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-		17.792.800	
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	-	-	-		17.792.800	
		-Pembangunan Tallud Penahan Tanah Ohoi Rahareng Kecamatan Kei Besar (Luncuran Tahun					17.792.800	
4	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINA PERHUBUNGAN	-	-	-		4.336.128.640	
	02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	-		4.336.128.640	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	-	-	-		4.336.128.640	
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-		4.336.128.640	
		- Pekerjaan Pembangunan Bus Air Roro (Luncuran DAK Tahun 2022)					2.362.500.000	
		- Pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Faan (Luncuran DAK Tahun 2017)					1.973.628.640	
		JUMLAH	19.800.529.464	19.003.102.397	797.427.067	95,97	10.867.938.859	-
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024								
Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA								
JASMONO								

 KABUPATEN MALUKU TENGGARA IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022																		
NO	Perusahaan Daerah	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal disetor	Modal penyertaan pemerintah pusat YBDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	PT Bank Maluku			294.196.003.458,86	5.643.214.857,83	2.608.316.910,32	302.447.535.227,01	203.415.726.568,45	-	203.415.726.568,45	27.921.000.000,00	1.000.000.000,00		47.388.388.380,53	22.722.420.278,03	99.031.808.658,56	6,25	28.921.000.000,00
2	PDAM			3.791.042.895,00	15.415.517.289,00	-	19.206.560.184,00	101.957.553,00		101.957.553,00		-	3.062.985.105,00	16.041.617.526,00		19.104.602.631,00		19.206.560.184,00
Jumlah				297.987.046.353,86	21.058.732.146,83	2.608.316.910,32	321.654.095.411,01	203.517.684.121,45	-	203.517.684.121,45	27.921.000.000,00	1.000.000.000,00	3.062.985.105,00	63.430.005.906,53	22.722.420.278,03	118.136.411.289,56	6,25	48.127.560.184,00
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA JASMONO																		

 KABUPATEN MALUKU TENGGARA IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA / RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022									
NO	Perusahaan Daerah	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan Diluar Usaha	Beban Diluar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Panjak
1	PT Bank Maluku			44.017.434.201,24	20.673.312.902,47	23.344.121.298,77	475.362.000,74	146.339.020,00	23.673.144.279,51
2	PDAM			5.963.883.509,00	4.068.831.915,00	1.895.051.594,00	24.465.884,00	2.463.322.847,00	(543.805.369,00)
JUMLAH				49.981.317.710,24	24.742.144.817,47	25.239.172.892,77	499.827.884,74	2.609.661.867,00	23.129.338.910,51
LANGGUR, 4 OKTOBER 2024 Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA JASMONO									



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
0		643.080.198.997,00	214.308.606.640,00	717.530.909,00	179.383.693.893,00
		552.714.560.307,76	191.910.118.091,24	310.440.000,00	184.511.707.492,00
0.1.01	PENDIDIKAN	186.103.277. 684,00	34.350.271. 862,00	0,00	0,00
		144.631.530.548,89	30.079.675.898,00	0,00	0,00
0.1.02	KESEHATAN	132.654.039.138,00	80.452.737.977,00	0,00	0,00
		136.378.015.589,48	65.520.777.521,00	0,00	0,00
0.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.665.897.957,00	87.258.693.068,00	0,00	0,00
		13.056.758.165,67	86.369.962.772,24	0,00	0,00
0.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.650.150.395,00	8.935.031.331,00	0,00	0,00
		18.473.869.370,00	7.937.476.500,00	0,00	0,00
0.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.474.971.387,00	369.700.000,00	0,00	0,00
		11.729.597.049,00	369.042.000,00	0,00	0,00
0.1.06	SOSIAL	3.574.970.555,00	0,00	0,00	0,00
		3.411.192.958,00	0,00	0,00	0,00
0.2.07	TENAGA KERJA	140.768.500,00	0,00	0,00	0,00
		87.067.850,00	0,00	0,00	0,00
0.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	607.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		510.270.717,00	0,00	0,00	0,00
0.2.09	PANGAN	1.172.814.000,00	32.125.000,00	0,00	0,00
		1.168.815.738,00	32.125.000,00	0,00	0,00
0.2.10	PERTANAHAN	611.836.000,00	568.124.525,00	0,00	0,00
		253.123.500,00	0,00	0,00	0,00
0.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	7.699.712.861,00	170.891.850,00	0,00	0,00
		6.972.428.985,00	0,00	0,00	0,00
0.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.901.339.269,00	62.375.000,00	0,00	0,00
		2.863.217.752,00	57.375.000,00	0,00	0,00
0.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.886.482.487,00	7.625.000,00	0,00	175.591.979.200,00
		4.546.882.769,00	0,00	0,00	180.727.250.600,00
0.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.902.074.788,00	0,00	0,00	0,00
		6.526.740.575,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
0.2.15	PERHUBUNGAN	9.381.616.361,00	180.387.808,00	0,00	0,00
		8.873.794.865,00	57.000.000,00	0,00	0,00
0.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	2.619.103.006,00	13.750.000,00	0,00	0,00
		2.503.449.034,00	13.050.000,00	0,00	0,00
0.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.895.044.133,00	0,00	0,00	0,00
		2.726.673.840,00	0,00	0,00	0,00
0.2.18	PENANAMAN MODAL	3.941.817.914,00	51.750.000,00	0,00	0,00
		3.858.616.868,00	51.750.000,00	0,00	0,00
0.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.447.768.185,00	66.625.000,00	0,00	0,00
		3.969.471.513,00	66.625.000,00	0,00	0,00
0.2.20	STATISTIK	19.853.750,00	0,00	0,00	0,00
		19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.21	PERSANDIAN	49.444.500,00	0,00	0,00	0,00
		42.810.075,00	0,00	0,00	0,00
0.2.22	KEBUDAYAAN	3.358.389.270,00	0,00	0,00	0,00
		3.149.383.596,00	0,00	0,00	0,00
0.2.23	PERPUSTAKAAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.24	KEARSIPAN	1.955.221.275,00	0,00	0,00	0,00
		1.921.602.128,00	0,00	0,00	0,00
0.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	18.434.285.288,00	8.750.000,00	0,00	0,00
		17.427.784.025,72	0,00	0,00	0,00
0.3.26	PARIWISATA	3.451.328.898,00	0,00	0,00	0,00
		3.259.718.717,00	0,00	0,00	0,00
0.3.27	PERTANIAN	12.414.576.524,00	1.206.250.000,00	0,00	0,00
		12.204.528.776,00	1.137.650.000,00	0,00	0,00
0.3.30	PERDAGANGAN	3.102.828.264,00	31.075.000,00	0,00	0,00
		3.066.339.740,00	31.075.000,00	0,00	0,00
0.3.31	PERINDUSTRIAN	464.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		443.558.905,00	0,00	0,00	0,00
0.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	62.125.966.988,00	375.484.619,00	0,00	0,00
		56.228.366.943,00	122.250.000,00	0,00	0,00
0.4.02	SEKRETARIAT DPRD	40.135.880.805,00	115.171.250,00	0,00	0,00
		35.345.901.957,00	24.908.400,00	0,00	0,00
0.5.01	PERENCANAAN	6.077.908.138,00	0,00	0,00	0,00
		5.667.065.366,00	0,00	0,00	0,00
0.5.02	KEUANGAN	14.166.820.106,00	11.462.500,00	717.530.909,00	3.791.714.693,00
		12.709.680.123,00	0,00	310.440.000,00	3.784.456.892,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
0.5.03	KEPEGAWAIAN	15.406.520.342,00	0,00	0,00	0,00
		6.038.261.490,00	0,00	0,00	0,00
0.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	257.883.500,00	0,00	0,00	0,00
		251.839.072,00	0,00	0,00	0,00
0.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	194.999.000,00	0,00	0,00	0,00
		187.599.220,00	0,00	0,00	0,00
0.5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	2.311.081.900,00	23.750.000,00	0,00	0,00
		2.269.136.180,00	23.750.000,00	0,00	0,00
0.6.01	INSPEKTORAT	4.313.143.967,00	0,00	0,00	0,00
		4.031.911.244,00	0,00	0,00	0,00
0.7.01	KECAMATAN	12.035.611.985,00	16.575.000,00	0,00	0,00
		11.746.167.771,00	15.625.000,00	0,00	0,00
0.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.322.395.377,00	0,00	0,00	0,00
		4.012.387.292,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING -BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	220.453.549.810,00	174.711.206.446,89	79,25
	1). Belanja Operasi:	186.103.277.860,00	144.631.530.548,89	77,72
	a. Belanja Pegawai	121.808.714.693,00	107.944.464.457,00	88,62
	b. Belanja Barang dan Jasa	23.574.336.004,00	19.660.859.260,89	83,40
	c. Belanja Hibah	40.720.227.163,00	17.026.206.831,00	41,81
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2). Belanja Modal:	34.350.271.950,00	30.079.675.898,00	87,57
	a. Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.822.600.281,00	3.658.275.524,00	95,70
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.593.321.669,00	25.765.150.374,00	87,06
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	934.350.000,00	656.250.000,00	70,24
	b. Belanja di luar Dinas pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain:	9.789.214.730,00	9.068.311.637,00	92,64
	1). Belanja Transfer:	0,00	0,00	0,00
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00
	2). Sub Kegiatan Pada SKPD :	9.789.214.730,00	9.068.311.637,00	92,64
	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.996.421.275,00	1.962.802.128,00	98,32
	Penunjang Urusan Pemerintah daerah kab/kota	1.776.421.275,00	1.742.802.197,00	98,11
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	34.999.931,00	100,00
	- Dinas Pemuda dan Olahraga	4.514.393.185,00	4.036.096.513,00	89,41
	Penunjang Urusan Pemerintah daerah kab/kota	1.852.072.685,00	1.817.233.263,00	98,12
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	25.176.000,00	25.176.000,00	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	221.030.250,00	187.629.000,00	84,89
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	74.410.000,00	74.410.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	511.559.250,00	511.503.250,00	99,99
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	237.510.000,00	237.510.000,00	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	28.635.000,00	28.635.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	174.000.000,00	174.000.000,00	100,00
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	600.000.000,00	540.000.000,00	90,00
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	530.000.000,00	180.000.000,00	33,96
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
	- Dinas kebudayaan	3.278.400.270,00	3.069.412.996,00	93,63
	Penunjang Urusan Pemerintah daerah kab/kota	1.808.406.520,00	1.749.836.246,00	96,76
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	70.000.000,00	69.983.000,00	99,98
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1.100.000.000,00	949.600.000,00	86,33
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	39.993.750,00	39.993.750,00	100,00
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	230.242.764.540,00	183.779.518.083,89	79,82
3	Total Belanja Daerah	1.037.490.030.853,00	929.446.825.891,00	89,59
	Rasio anggaran pendidikan (2:5) x 100%	22,19	19,77	



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING -BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	213.106.777.115,00	201.898.793.110,48	94,74
	1). Belanja Operasi:	132.654.039.138,00	136.378.015.589,48	102,81
	a. Belanja Pegawai	52.476.512.601,00	48.570.609.745,00	92,56
	b. Belanja Barang dan Jasa	80.177.526.537,00	87.807.405.844,48	109,52
	c. Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2). Belanja Modal;	80.452.737.977,00	65.520.777.521,00	81,44
	a. Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.235.866.377,00	21.639.009.812,00	97,32
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.065.999.100,00	40.991.721.709,00	74,44
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.150.872.500,00	2.890.046.000,00	91,72
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang pendidikan, antara lain:	1.016.828.791,00	940.795.500,00	92,52
	1). Belanja Transfer:	0,00	0,00	0,00
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00
	2). Sub Kegiatan Pada SKPD :	1.016.828.791,00	940.795.500,00	92,52
	- Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.016.828.791,00	940.795.500,00	92,52
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.016.828.791,00	940.795.500,00	92,52
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	214.123.605.906,00	202.839.588.610,48	94,73
3	Total Belanja Daerah	1.037.490.030.853,00	929.446.825.891,00	89,59
4	Gaji ASN	228.739.213.181,00	202.209.872.159,00	88,40
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	808.750.817.672,00	727.236.953.732,00	89,92
	Rasio anggaran pendidikan (2:5) x 100%	26,48	27,89	



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING-
BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2023

A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASI DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a) DAU	472.015.431.000,00	472.005.502.824,00	100,00
	b) DBH	9.335.710.951,00	9.895.199.975,00	105,99
	Jumlah Penerimaan	481.351.141.951,00	481.900.702.799,00	100,11
2	Pengurangan			
	a) DBH CHT	0,00	0,00	0,00
	b) DBH DR	0,00	0,00	0,00
	c) ADD	175.591.979.200,00	180.727.250.600,00	102,92
	Jumlah Pengurangan	175.591.979.200,00	180.727.250.600,00	102,92
3	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	305.759.162.751,00	301.173.452.199,00	98,50

B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a. Belanja Modal	97.329.973.449,00	94.307.439.272,24	96,89
	1). Belanja Modal Tanah	1.136.249.050,00	0,00	0,00
	2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin	755.739.100,00	563.822.250,00	74,61
	3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.738.238.100,00	8.681.100.100,00	99,35
	4). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.676.627.199,00	85.039.396.922,24	98,11
	5). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.120.000,00	23.120.000,00	100,00
	b. Belanja Pemeliharaan	652.783.294,00	450.114.000,00	68,95
	Jumlah	97.982.756.743,00	94.757.553.272,24	96,71
2	a. Belanja Hibah	90.251.857.540,00	46.904.766.333,00	51,97
	b. Belanja Bantuan Sosial	19.541.800.000,00	14.612.755.000,00	74,78
	c. Belanja Bantuan Keuangan	175.591.979.200,00	180.727.250.600,00	102,92
	Jumlah	285.385.636.740,00	242.244.771.933,00	84,88
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	383.368.393.483,00	337.002.325.205,24	87,91
3	Total Belanja Daerah	1.037.490.030.853,00	929.446.825.891,00	89,59
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	36,95%	36,26%	98,12%



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
A	SPM Bidang Pendidikan			
	1. Pendidikan Dasar	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	49.441.087.157,00 38.609.178.715,00	34.608.180.618,56 29.681.461.416,33
	Total		88.050.265.872,00	64.289.642.034,89
	2. Pendidikan Anak Usia Dini	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.080.997.990,00	2.725.117.200,00
	Total		7.080.997.990,00	2.725.117.200,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan			95.131.263.862,00	67.014.759.234,89
B	SPM Bidang Kesehatan			
	1. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104.950.000,00	101.878.593,00
	Total		104.950.000,00	101.878.593,00
	2. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104.950.000,00	104.774.816,00
	Total		104.950.000,00	104.774.816,00
	3. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.892.250,00	98.490.600,00
	Total		99.892.250,00	98.490.600,00
	4. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104.950.000,00	103.790.100,00
	Total		104.950.000,00	103.790.100,00
	5. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.325.000,00	58.025.000,00
	Total		58.325.000,00	58.025.000,00
	6. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00
	Total		70.000.000,00	70.000.000,00
	7. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104.950.000,00	104.344.395,00
	Total		104.950.000,00	104.344.395,00
	8. Pelayanan Kesehatan Balita	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.995.000,00
	Total		50.000.000,00	49.995.000,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan			698.017.250,00	691.298.504,00
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	300.925.500,00	257.807.637,95
	Total		300.925.500,00	257.807.637,95
	2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.355.142.000,00	2.353.736.000,00
Total			2.355.142.000,00	2.353.736.000,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			2.656.067.500,00	2.611.543.637,95
D	SPM Bidang Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.586.786.000,00	4.945.491.000,00
	Total		6.586.786.000,00	4.945.491.000,00
	2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	55.000.000,00 150.000.000,00	55.000.000,00 150.000.000,00
	Total		205.000.000,00	205.000.000,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			6.791.786.000,00	5.150.491.000,00
E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	653.347.000,00	643.790.000,00
	Total		653.347.000,00	643.790.000,00
	2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	156.494.000,00	155.117.900,00
Total			156.494.000,00	155.117.900,00

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
	3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	101.248.750,00	100.745.500,00
		Total	101.248.750,00	100.745.500,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			911.089.750,00	899.653.400,00
F	SPM Bidang Sosial			
	1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	103.925.750,00	99.078.493,00
		Total	103.925.750,00	99.078.493,00
	2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	350.054.250,00	337.522.480,00
		Total	350.054.250,00	337.522.480,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial			453.980.000,00	436.600.973,00

 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023 (Dalam Rupiah)					
No	URAIAN	ANGGARAN	KOMITMEN BELANJA PDN	REALISAI BELANJA PDN	%
I	BELANJA OPERASIONAL				
1	Belanja Barang dan Jasa (Termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	85.000.000,00	85.000.000,00	84.902.514,00	99,89
2	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	85.000.000,00	85.000.000,00	84.902.514,00	99,89
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL KESELURUHAN				



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	8.052.765.500,00	7.809.722.830,00	96,98
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	5.525.699.250,00	4.995.559.170,00	90,41
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	663.545.750,00	552.098.000,00	83,20
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindagnaker	114.348.500,00	114.348.500,00	100,00
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindagnaker	429.999.500,00	408.558.905,00	95,01
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindagnaker	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindagnaker	55.000.000,00	6.575.250,00	11,96
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Perindagnaker	35.768.500,00	32.781.600,00	91,65
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	60.000.000,00	40.778.016,00	67,96
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	60.000.000,00	47.237.958,00	78,73
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	185.000.000,00	180.446.888,00	97,54
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	571.300.000,00	566.543.664,00	99,17
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.069.685.500,00	1.036.228.250,00	96,87
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM	119.221.000,00	117.984.580,00	98,96
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	2.350.650.500,00	312.650.500,00	13,30
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	508.766.000,00	506.950.130,00	99,64
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	54.860.000,00	54.581.194,00	99,49
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR	300.925.500,00	257.807.637,95	85,67
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH	309.121.100,00	241.213.675,00	78,03
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR	77.129.043.300,00	76.411.793.969,67	99,07
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUTR	170.442.250,00	170.442.250,00	100,00
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PUTR	9.427.363.100,00	9.086.965.100,00	96,39

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUTR	441.336.800,00	353.948.800,00	80,20
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	97.562.644.612,00	67.138.494.173,89	68,82
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan	822.400.500,00	0,00	0,00
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UKM	237.530.250,00	232.859.925,00	98,03
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	128.497.914.664,00	112.952.656.834,68	87,90
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	3.580.000.000,00	3.422.932.609,00	95,61
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindagnaker	55.000.000,00	6.575.250,00	11,96
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	257.883.500,00	251.839.072,00	97,66
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Peng. Penduduk dan KB	211.811.250,00	211.585.000,00	99,89
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Peng. Penduduk dan KB	3.139.778.791,00	2.951.194.000,00	93,99
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Peng. Penduduk dan KB	1.655.900.000,00	1.512.625.000,00	91,35
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	819.273.250,00	716.539.196,00	87,46
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	102.814.500,00	70.314.500,00	68,39
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	108.713.750,00	103.866.493,00	95,54
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	180.204.000,00	136.393.850,00	75,69
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PMDPPPA	490.234.000,00	400.234.000,00	81,64
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas PMDPPPA	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas PMDPPPA	47.141.000,00	40.337.517,00	85,57
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PMDPPPA	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.069.685.500,00	1.036.228.250,00	96,87
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	1.170.000.000,00	1.019.583.000,00	87,14
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMDPPPA	128.292.000,00	128.263.252,00	99,98
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Setda	34.000.443.400,00	29.563.785.297,00	86,95
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol	254.000.000,00	243.773.160,00	95,97
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	2.980.073.000,00	2.722.839.250,00	91,37
5	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo	372.604.750,00	348.702.225,00	93,59
		Program Aplikasi Informatika	Diskominfo	52.121.750,00	48.700.000,00	93,44
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR	365.750.000,00	364.576.943,00	99,68
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUTR	170.442.250,00	170.442.250,00	100,00

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PUTR	9.427.363.100,00	9.086.965.100,00	96,39
		Program Kawasan Permukiman	Dinas PKPP	16.141.081.000,00	10.865.781.500,00	67,32
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PKPP	6.586.786.000,00	4.945.491.000,00	75,08
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR	77.129.043.300,00	76.411.793.969,67	99,07
6	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	2.542.860.250,00	1.096.646.200,00	43,13
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH	309.121.100,00	241.213.675,00	78,03
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH	25.950.000,00	25.950.000,00	100,00
		Program Pengelolaan Persampahan	DLH	4.784.264.950,00	4.538.213.771,00	94,86
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP	728.337.750,00	705.501.622,00	96,86
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	Kesbangpol	254.000.000,00	243.773.160,00	95,97
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	2.980.073.000,00	2.722.839.250,00	91,37
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Setda	34.000.443.400,00	29.563.785.297,00	86,95



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting		742.307.500,00	736.911.288,00	99,27
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
		BELANJA OPERASI	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	104.950.000,00	104.344.395,00	99,42
		BELANJA OPERASI	104.950.000,00	104.344.395,00	99,42
		Belanja Barang dan Jasa	104.950.000,00	104.344.395,00	99,42
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.000.000,00	49.995.000,00	99,99
		BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.995.000,00	99,99
		Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.995.000,00	99,99
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	104.950.000,00	101.878.593,00	97,07
		BELANJA OPERASI	104.950.000,00	101.878.593,00	97,07
		Belanja Barang dan Jasa	104.950.000,00	101.878.593,00	97,07
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	5	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	412.407.500,00	410.693.300,00	99,58
		BELANJA OPERASI	412.407.500,00	410.693.300,00	99,58
		Belanja Barang dan Jasa	412.407.500,00	410.693.300,00	99,58
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			742.307.500,00	736.911.288,00	99,27



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota	2.649.227.500,00	337.309.599,00	12,73
1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4.788.000,00	4.788.000,00	100,00
	BELANJA OPERASI	4.788.000,00	4.788.000,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	4.788.000,00	4.788.000,00	100,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	103.925.750,00	99.078.493,00	95,34
	BELANJA OPERASI	103.925.750,00	99.078.493,00	95,34
	Belanja Barang dan Jasa	103.925.750,00	99.078.493,00	95,34
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.429.541.750,00	123.734.939,00	5,09
	BELANJA OPERASI	2.429.541.750,00	123.734.939,00	5,09
	Belanja Barang dan Jasa	168.231.750,00	123.734.939,00	73,55
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	2.261.310.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL	1.839.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.839.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
5	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.775.000,00	97,75
	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.775.000,00	97,75
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.775.000,00	97,75
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		50.972.000,00	49.933.167,00	97,96
	BELANJA OPERASI		50.972.000,00	49.933.167,00	97,96
		Belanja Barang dan Jasa	50.972.000,00	49.933.167,00	97,96
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL		249.953.500,00	207.874.470,95	83,17
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	249.953.500,00	207.874.470,95	83,17
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan		230.204.000,00	186.393.850,00	80,97
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		180.204.000,00	136.393.850,00	75,69
	BELANJA OPERASI		180.204.000,00	136.393.850,00	75,69
		Belanja Barang dan Jasa	180.204.000,00	136.393.850,00	75,69
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL		0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	BELANJA OPERASI		50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL		0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)		79.036.049.847,00	63.540.483.338,00	80,39
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		78.951.049.847,00	63.506.244.508,00	80,44
	BELANJA OPERASI		3.259.015.952,00	2.346.382.928,00	72,00
		Belanja Barang dan Jasa	3.259.015.952,00	2.346.382.928,00	72,00
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL		75.692.033.895,00	61.159.861.580,00	80,80
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.819.800.495,00	18.441.911.921,00	97,99
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.721.360.900,00	39.827.903.659,00	74,14
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.150.872.500,00	2.890.046.000,00	91,72
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000,00	27.663.580,00	92,21
	BELANJA OPERASI		30.000.000,00	27.663.580,00	92,21
		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.663.580,00	92,21
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL		0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		55.000.000,00	6.575.250,00	11,96
	BELANJA OPERASI		55.000.000,00	6.575.250,00	11,96
		Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	6.575.250,00	43,84
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	40.000.000,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL		0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
4	Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima		16.006.081.000,00	10.815.781.500,00	67,57
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		16.006.081.000,00	10.815.781.500,00	67,57
	BELANJA OPERASI		15.946.206.000,00	10.756.618.500,00	67,46
		Belanja Barang dan Jasa	2.054.406.000,00	926.818.500,00	45,11
		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Bantuan Sosial	13.891.800.000,00	9.829.800.000,00	70,76
	BELANJA MODAL		59.875.000,00	59.163.000,00	98,81
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.875.000,00	59.163.000,00	98,81
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			97.921.562.347,00	74.879.968.287,00	76,47



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA
PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang / Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang / Jasa melalui epurchasing (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
dst...					



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Keterangan
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Persentase Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Persentase Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
dst...								